

PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT ADHYA TIRTA SRIWIJAYA (ATS) TAHUN 2011-2015

Ade Putri Handayani¹, Fitriasuri², Ade kemala Jaya²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina darma¹
Jalan jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang

Pos-el: aphandayani11@gmail.com, Fitriasuri@binadarma.ac.id, Jaya_ade@yahoo.com

ABSTRACT: *The purpose of this study was to examine the effect of the level of accounts receivable turnover to profitability as measured by return on assets. Object of research is PT. Adhya Tirta Sriwijaya in 2011 - 2015. This study used quantitative descriptive method that consists of two variables: the accounts receivable turnover as independent variables and ROA as the dependent variable. The type of data used is quantitative data and data sources used are secondary data. Data collection techniques are engineering documentation. Methods of data analysis used in this research is simple regression analysis and were tested by t-test. The test results showed that the level of accounts receivable turnover does not have a significant effect on profitability. These results can be seen in the R Square of 0.235 which means the relationship between the accounts receivable turnover to profitability have a relationship that is strong enough. The results of this study confirmed the hypothesis testing results through the t-test showed a significance level of accounts receivable turnover of 0.318 is above 0.05, which means the rate of turnover of receivables is not significant effect on profitability (ROA).*

Keywords: *Accounts Receivable, Accounts Receivable Turnover Rate, Profitability (Return On Assets).*

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat perputaran piutang terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset*. Obyek penelitian yaitu PT. Adhya Tirta Sriwijaya tahun 2011 – 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang terdiri dari dua variabel yaitu perputaran piutang sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang diambil merupakan data pertriwulan. Teknik pengumpulan data ini adalah teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dan diuji dengan Uji-t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil ini dapat dilihat pada R Square sebesar 0,235 yang berarti hubungan antara perputaran piutang dengan profitabilitas mempunyai hubungan yang cukup kuat. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis melalui Uji-t yang menunjukkan signifikansi tingkat perputaran piutang sebesar 0,318 berada diatas 0,05 yang berarti tingkat perputaran piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Kata Kunci: Piutang, Tingkat Perputaran Piutang, Profitabilitas (*Return On Asset*).

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang dagang, jasa maupun manufaktur memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh laba dan menjaga kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang. Di era globalisasi saat ini, semakin menambah permasalahan bagi manajemen

suatu perusahaan didalam mewujudkan usahanya dan menjalankan aktivitas perusahaan.

Di dunia usaha yang berkembang semakin pesat ini, menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi tinggi. Sehingga timbul persaingan yang semakin tajam dan kompetitif dalam dunia usaha. Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan atau meningkatkan nilai

perusahaan serta mampu untuk mengelola faktor-faktor produksi yang ada secara efektif dan efisien agar tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal dan optimal tercapai. Dalam hal ini, perusahaan juga dituntut untuk mampu menentukan kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan akan dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan pasti memerlukan dana untuk membiayai kegiatan operasinya sehari-hari misalnya untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh dan lain sebagainya dimana dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dengan waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya. Uang yang masuk berasal dari penjualan produk tersebut akan dikeluarkan lagi untuk membiayai operasi selanjutnya.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba hubungannya, laba usaha maupun total aktiva sering digunakan untuk mengukur efisiensi keuntungan suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba usaha dengan modal yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut dapat melangsungkan hidupnya secara *continue*.

Bagi perusahaan masalah profitabilitas sangat penting. Bagi pimpinan perusahaan, profitabilitas digunakan sebagai tolak ukur berhasil atau tidak perusahaan yang dipimpinnya. Sedangkan bagi karyawan

perusahaan semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh oleh perusahaan, maka ada peluang untuk meningkatkan gaji karyawan.

Persaingan yang semakin tinggi menyebabkan PT. Adhya Tirta Sriwijaya (ATS) harus selalu melakukan perbaikan dari berbagai segi, baik kualitas maupun pelayanan agar dapat terus bertahan dan bersaing. Keuntungan yang optimal merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Dalam kondisi lain, banyak usaha sejenis yang bermunculan dan meningkatkan persaingan dan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Maka dalam penelitian ini sama seperti penelitian Rina Yuliani, 2013 yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA (ATS) TAHUN 2011-2015”**.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Piutang

2.1.1 Pengertian Piutang

Menurut Warren, et. all (dalam Rina Yuliani, 2013) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah Piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya. Sedangkan menurut Rusdi Akbar (2012) piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada

organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, atau jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu.

2.1.2 Jenis Piutang

Menurut Warrent (dalam Rina Yuliani, 2013) mengklasifikasikan piutang kedalam tiga kategori yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain sebagai berikut :

1. Piutang Usaha, Piutang usaha timbul dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60 hari.
2. Wesel Tagih, Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari.
3. Piutang lain-lain, Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca

2.1.3 Kerugian Piutang

1. Risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan (piutang). Risiko ini adalah risiko yang paling berat yang harus ditanggung oleh perusahaan, karena tidak dibayarkan seluruh jumlah piutang, sehingga perusahaan akan menanggung kerugian sebesar jumlah piutang tersebut.
2. Risiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Walaupun piutang telah dibayar sebagian, tetapi hal ini juga menimbulkan kerugian

bagi perusahaan, karena kemungkinan sebagian dari piutang tersebut tidak dibayar.

3. Risiko keterlambatan pelunasan piutang. Risiko keterlambatan dalam melunasi piutang lebih ringan bila dibandingkan kedua risiko diatas, karena pada akhirnya piutang yang telah diberikan oleh perusahaan akan dibayar oleh pihak debitur.
4. Risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Apabila perusahaan memberikan piutang maka dengan sendirinya terdapat modal yang tertanam dalam piutang tersebut. Apabila investasi dalam piutang terlalu besar jumlahnya akan mengakibatkan kontinuitas perusahaan.

2.1.4 Kebijakan Penagihan Piutang

Menurut Syahyuna (dalam Furqon 2014) sejumlah teknik penagihan piutang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan bilamana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Melalui surat, Bilamana waktu pembayaran hutang dari langganan sudah lewat beberapa hari tetapi belum juga dilakukan pembayaran, maka perusahaan dapat mengirimkan surat teguran langganan tersebut bahwa hutangnya sudah jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan surat kedua.

2. Melalui telepon, Apabila setelah dikirimkan surat teguran ternyata hutang-hutang tersebut belum juga dibayar, maka dapat menelepon langganan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata misalnya pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai suatu jangka waktu tertentu.
3. Kunjungan Personal, teknik penagihan piutang dengan jalan melakukan kunjungan personal atau pribadi ke tempat langganan sering kali digunakan karena dirasakan sangat efektif dalam usaha penagihan piutang.
4. Tindakan Yuridis, bilamana ternyata langganan tidak mau membayar hutang-hutangnya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

2.1.5 Perputaran Piutang

Menurut Bambang Riyanto (dalam Ari Bramasto 2013), perputaran piutang adalah rasio yang memperlihatkan lamanya waktu untuk mengubah piutang menjadi kas. Pernyataan tersebut dinyatakan dengan rumus:

$$\text{perputaran piutang} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{rata - rata piutang}}$$

2.1.6 Penilaian Piutang

1. Metode Penyisihan

Perusahaan-perusahaan besar pada umumnya menentukan jumlah tertentu dari piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, yang dilakukan tiap periode untuk menjaga kemungkinan tak tertagihnya piutang dikemudian hari. Karena pada saat timbulnya piutang, belum dapat ditentukan secara pasti mana piutang yang dapat ditagih dan berapa jumlahnya. Pencadangan penyisihan dimuka untuk tagihan yang tidak dapat tertagih kemudian hari ini dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode fiskal. Seperti halnya pos-pos penyesuaian lainnya ayat jurnal penyesuaian ini mempunyai dua tujuan, yakni :

- a) Mengurangi nilai piutang dagang yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang kas diwaktu yang akan datang.
- b) Mengalokasikan taksiran beban pengurangan nilai tersebut ke periode berjalan.

2. Metode Penghapusan Langsung

Apabila perusahaan menggunakan metode ini, maka tidak ada perkiraan penyisihan atau penaksiran jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih. Pencatatan baru dilakukan jika piutang benar-benar dinyatakan tidak tertagih.

pengembalian atas total aset (ROA)

$$= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.3 Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dan dinyatakan dalam bentuk persentase atau dengan kata lain menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut dengan seluruh sumber daya yang dimiliki seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan sebagainya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

2.1.1 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat profitabilitas yang diperoleh menurut Kasmir (2012), adalah :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.2 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

1. Margin laba atas penjualan (*Profit margin on sales*)
2. Pengembalian total aset
3. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau *Basic Earning Power* (BEP)
4. Pengembalian Ekuitas Biasa atau *Return On Common Equity* (ROE),

3. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

3.2.1 Variabel Penelitian dan definisi Operasional Variabel

Supomo dan Indriantoro (2011), menyatakan bahwa operasional variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diamati dan diukur dengan menentukan hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Variabel bebas (independent variabel) dalam penelitian ini yaitu perputaran piutang. Sedangkan *Return On Asset* (ROA) yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan digunakan sebagai variabel terikat.

3.2.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder
 - a. Dokumentasi
 - b. Studi kepustakaan

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.
(Kasmir, 2012)

Sumber: Data Diolah 2016

3.3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan dalam pengambilan sampel, digunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* atau sampel tidak acak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana.

1. Uji Asumsi Klasik, meliputi:

- a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data digunakan uji kolmogrov-smirnov dengan menggunakan taraf signifikan 5%.

- b. Uji Auto korelasi

Uji auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan dengan pertimbangan untuk pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

- c. Uji Heteroskedastisitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Singgih Santoso (2014) menyebutkan bahwa model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas.

2. Melakukan pengolahan data penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana,.

Tabel 3.1

Operasional variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Perputaran Piutang (x)	perputaran piutang yang digunakan sebagai indikator terhadap efisien atau tidaknya piutang, ada indikator lain yang cukup penting yaitu jika waktu rata-rata pengumpulan piutang (average collection periode). “Jangka waktu pengumpulan piutang adalah angka yang menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk menagih piutang.” (Munawir 2012)	Jangka Waktu	Rasio
Profitabilitas (Y)	<i>profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan</i>	Return On Assets (ROA)	Rasio

3. Melakukan uji hipotesis statistik dengan menggunakan Uji-t dengan tingkat signifikansi sebesar 5% pada nilai t_{tabel} .

4. **HASIL**

Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, rata-rata perputaran piutang pada ATS selama lima tahun terakhir kurang dari rata-rata standar industri yaitu kurang dari 15 kali sedangkan untuk jumlah penagihan piutang telah melebihi standar industri rata-rata perputaran piutang yaitu melebihi 25 hari. Menurut kasmir (2015) mengatakan bahwa hal yang jelas bahwa rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Kesuksesan perusahaan dapat dapat dikatakan berhasil apabila piutang perusahaan semakin menurun.

Sesuai yang telah dibahas sebelumnya, untuk perputaran piutang sendiri pada ATS sangat jauh di bawah rata-rata industri atau < 15 kali sedangkan jumlah hari penagihannya melebihi standar industri, jika jumlah hari penagihan terlalu besar maka resiko tidak tertagihnya juga besar. Maka dalam hal ini ATS dalam perputaran piutang sangat lambat dan dapat dikatakan dalam kondisi yang buruk.

Yang terjadi pada ATS selama lima tahun berturut-turut mengalami kenaikan terhadap piutang dan begitu pula pada labanya. Pada laba yang didapat pada ATS selama lima tahun dari 2011-2015 juga sangat baik karena

telah melebihi standar industri untuk ROA yaitu sebesar 30%.

Di tahun 2011 dengan perputaran piutang 2,875 dan ROA sebesar 39%, tahun 2012 perputaran piutang 1,955 dan ROA sebesar 48%, tahun 2013 dengan perputaran piutang 1,8175 dan ROA sebesar 50%, tahun 2014 dengan perputaran piutang 2,070 dan ROA sebesar 47%, dan tahun 2015 dengan perputaran piutang 1,95 dan ROA sebesar 48%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan perputaran piutang namun ROA meningkat, tetapi pada tahun 2014 terjadi peningkatan perputaran piutang tetapi ROA menurun. Sehingga dapat disimpulkan setiap penurunan piutang pada ATS akan meningkatkan ROA dan begitu juga sebaliknya. Menurut Husnan dan Pujiastuti (2012) bahwa rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi pengguna aktiva perusahaan atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan.

Rasio profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna laporan tahunan, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek/securities. Pengukuran dan peramalan laba dan arus kas operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok.

Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya keuntungan (*profit*), maka akan sangat sulit

bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama sekali dari pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan karena disadari benar betapa pentingnya arti dari profit terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan.

Dan ini juga terjawab pada pengujian menggunakan SPSS versi 22 yang terdapat pada analisis regresi sederhana yang menjelaskan a sebesar 0,490 menunjukkan bahwa apabila variabel X (perputaran piutang) diabaikan atau tidak ada, maka ROA akan bernilai sebesar 0,490. Nilai koefisien dari b sebesar -0,011 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel perputaran piutang sebesar 1 satuan akan diikuti oleh penurunan ROA sebesar -0,011 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

Hasil analisis koefisien korelasi juga menunjukkan korelasi adalah 0,235. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori cukup kuat yaitu sebesar 23,5 % dan sisanya 76,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang diluar perputaran piutang.

Pengujian juga di perkuat dengan menggunakan uji t yang menjelaskan bahwa jika Nilai Sig. $< 0,05$, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh nilai Sig. = 0,318 yang berarti $>$ kriteria signifikan (0,05). Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak

signifikan artinya, model regresi linier tidak memenuhi kriteria linieritas.

Inilah yang menyebabkan mengapa pada saat piutang meningkat tetapi laba juga meningkat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perputaran piutang tidak mempengaruhi profitabilitas pada ATS. Sesuai penuturan dari *manager GA/Finance* ATS mengatakan bahwa meningkatnya laba pada ATS disebabkan ada banyak faktor seperti peningkatan tarif, meningkatnya jumlah pelanggan dan lain-lain. Sehingga apabila piutang semakin meningkat tidak begitu mempengaruhi laba perusahaan, masih ada faktor lain yang bisa meningkatkan laba pada ATS. Sehingga dapat disimpulkan perputaran piutang pada ATS tidak begitu berpengaruh, pengaruhnya hanya sebesar 23,5% dan sisanya 76,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar perputaran piutang. Sehingga perlunya pihak manajemen memperhatikan faktor lain tersebut sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perputaran piutang pada ATS kurang dari standar industri yaitu sebesar 15 kali, tetapi untuk penagihan piutang telah melebihi rata-rata standar penagihan piutang yaitu melebihi 25 hari. Walaupun saat ini dari neraca perusahaan terjadi peningkatan piutang selama lima tahun berturut-turut.
2. Berdasarkan hasil analisis profitabilitas menggunakan ROA pada ATS terus meningkat dan telah mencapai lebih dari standar industri untuk ROA sebesar 30%.

- Ini sesuai dengan laporan laba rugi ATS yang menunjukkan terjadi peningkatan laba pada ATS selama 2011-2015.
3. Pada analisis regresi sederhana yang menjelaskan a sebesar 0,490 menunjukkan bahwa apabila variabel X (perputaran piutang) diabaikan atau tidak ada, maka ROA akan bernilai sebesar 0,490. Nilai koefisien dari b sebesar -0,011 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel perputaran piutang sebesar 1 satuan akan diikuti oleh penurunan ROA sebesar -0,011 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.
 4. Hasil analisis koefisien korelasi juga menunjukkan korelasi adalah 0,235. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori cukup kuat yaitu sebesar 23,5 % dan sisanya 76,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang diluar perputaran piutang.
 5. uji t yang menjelaskan bahwa jika Nilai Sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel 4.14, diperoleh nilai Sig. = 0,318 yang berarti > kriteria signifikan (0,05). Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah tidak signifikan artinya, model regresi linier tidak memenuhi kriteria linieritas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Brigham dan Houlston. 2010. *Dasar-dasar manajemen Keuangan*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Safri. 2011. *Analisis kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali pers.
- _____. 2014. *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2011). *Intermediate Accounting*. Edisi ke-12. Diterjemahkan oleh Emil Salim. Jakarta: Erlangga.
- Munawir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Riyanto, Bambang. 2012. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Santoso, Singgih. 2014. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan kelima. Jakarta: salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan ke-22. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, Rina. 2013. *Pengaruh perputaran Piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan PT unilever Indonesia Tbk tahun 2005-2012*. Malang: Jurnal universitas brawijaya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI)

Ahmad Taufik, Poppy Indrian, M. Titan Terzaghi

Universitas Bina Darma Palembang Jalan Jenderal Ahmad Yani No.03 Palembang

Email : Ahmadtaufiq4444@gmail.co, poppy.indriani@binadarma.ac.i, mtitan4@gmail.co

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, opini audit, solvabilitas, dan kepemilikan pihak eksternal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 38 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik biner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, opini audit, solvabilitas dan kepemilikan pihak eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Kata Kunci : Timeliness, Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran perusahaan, Opini audit, Solvabilitas dan Kepemilikan pihak eksternal

Abstract

The purpose of this research is investigating the influence of profitability, liquidity, firm size, audit opinion, solvability and public ownership toward timeliness of corporate financial reporting. This research used samples of property and real estate industry which is listed in Indonesian Stock exchange in 2015. The sample selection method used purposive sampling method. The data used in this research was secondary data. Hypothesis in this research were tested by binary logistic regression. Result of this research profitability, liquidity, firm size, audit opinion, solvability and public ownership is not significantly influence timeliness financial reporting.

Keyword : Timeliness, Profitability, Liquidity, Firm size, Audit opinion, Solvability, and Public ownership

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut. Salah satu informasi yang penting bagi pemakai yang berkaitan dengan laporan keuangan adalah informasi *Leverage* keuangan dan profitabilitas perusahaan. Para pemakai sering menjadikan *leverage* keuangan yang

diukur dengan *debt to equity ratio* dan *profitabilitas* perusahaan yang berasal dari laporan keuangan sebagai salah satu indikator untuk landasan di dalam

Pelaporan keuangan perusahaan dianggap pemakai utama (investor dan kreditor) sebagai *good news* dan *bad news*. *Good news* memiliki arti bahwa informasi yang disajikan dianggap sebagai hal penting dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan kredit dan keputusan investasi. Adapun *bad news* mempunyai pengertian bahwa informasi yang disajikan tidak dapat

memenuhi informasi kunci sehingga investor dan kreditor sebagai pengguna utama memandang bahwa *financial reporting* masih bermanfaat namun perlu diperbaiki. Investor sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan dari pihak luar memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kembalian (*rate of return*) atas investasi dan membantu untuk memutuskan tindakan mereka baik untuk membeli, menahan, atau menjual saham-saham perusahaan.

Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Submisi dan publikasi laporan keuangan tahunan teraudit (*audited annual financial statement*) dan laporan keuangan semi tahunan yang tidak teraudit (*unaudited semiannual financial statement*) bersifat wajib, sedangkan pengiriman laporan keuangan triwulanan hanya bersifat sukarela. Laporan keuangan harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dan catatan yang menyertai laporan keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian pada beberapa peneliti untuk variabel penelitian yang sama, mendorong untuk melakukan pengujian kembali mengenai faktor-faktor seperti *profitabilitas*, *likuiditas*, ukuran perusahaan, opini auditor, *solvabilitas*

dan kepemilikan pihak eksternal yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan properti dan *real estate*. Pemilihan perusahaan-perusahaan publik yang masuk kategori perusahaan properti dan *real estate* ini didasarkan pada pertimbangan akan homogenitas dalam aktivitas produksinya dan kelompok industri ini yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok industri yang lain di Bursa Efek Indonesia, sehingga mendominasi bursa dan mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan bursa.

Ketepatan penyampaian laporan keuangan menjadi sangat penting bagi para investor dimana laporan keuangan dapat menggambarkan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut sehingga sebelum memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah dana di perusahaan investor terlebih dahulu melihat laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga ketepatan penyampaian menjadi sangat penting

Berdasarkan uraian tersebut maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI)”**

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Kepatuhan

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan

konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan, menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan (*agency relationship*) terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal Jensen dan Meckling (1976) dalam Dwiyanti (2010).

2.1.3 Signalling Theory

Teori lain yang mendukung penelitian ini adalah *signalling theory*. *Signalling Theory* merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

2.1.5 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan, 2012).

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi *profitabilitas* maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat *profitabilitas* yaitu dengan menggunakan rasio *gross profit margin*, *return on asset*, *return on equity*.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.7 Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo lancar terdiri dari hutang dagang, wesel bayar jangka pendek, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, pajak yang belum dibayar (*accrued*) dan biaya-biaya yang belum dibayar (*accrued*) lainnya (terutama upah).

2.1.8 Opini Auditor

Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk memberikan

pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Objek dalam audit ini adalah laporan keuangan yang pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, termasuk pengungkapan - pengungkapannya, dan Laporan Arus Kas.

2.1.9 Ukuran Perusahaan

Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan \ln total asset. Penggunaan *natural log* (\ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan.

2.1.10 Solvabilitas

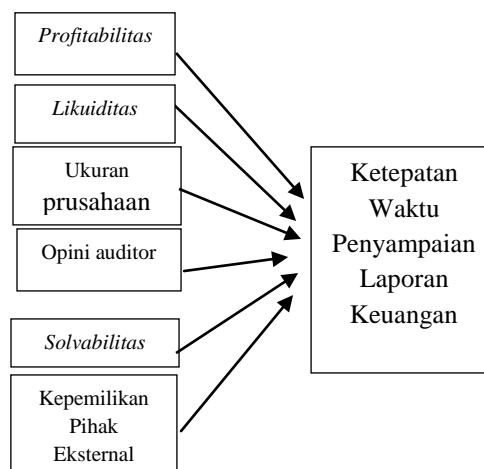
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. *Solvabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh asset yang dimiliki (Lalitha, 2012).

2.1.11 Kepemilikan Pihak Eksternal

Struktur perusahaan yang sudah *go public* dapat dikatakan sebagai kepemilikan saham perusahaan yang didalamnya perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu kepemilikan oleh pihak internal atau manajemen perusahaan dan kepemilikan oleh pihak eksternal (Dwiyanti, 2010).

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015.

3.2 METODOLOGI PENELITIAN

3.2.1 Operasional Variabel

Di dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok variabel, yaitu variabel bergantung (dependen variabel) dan variabel bebas (independen variabel). Variabel bergantung pada penelitian ini adalah *Profitabilitas*, *Likuiditas*, Ukuran perusahaan, Opini Auditor, *Solvabilitas* dan Kepemilikan Pihak Eksternal.

3.2.2.1 Populasi

Jumlah populasi penelitian ini adalah 48 perusahaan *Real estate*. Berikut populasi penelitian, yaitu perusahaan properti dan *real estate* yang listing di Bursa Efek Indonesia

berdasarkan *Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact Book* 2014.

3.3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang akan diteliti. Sampel yang diambil pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan yang berdasarkan pertimbangan tertentu dimana syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi oleh sampel dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang relevan.

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data yang merupakan data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh merupakan jenis data sekunder.. Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada periode 2015.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Studi Pustaka (*Library Research*)

2. Metode Dokumentasi

3.2.5 Teknik Analisis Data

3.2.5.1 Statistik Deskriptif

Pemilihan teknis analisis kuantitatif adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini teknik analisis kuantitatif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara

sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang dianalisis dengan menggabungkan hubungan antara variabel yang terlibat didalamnya..

3.5.2 Analisis Regresi

Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Logistic regression* merupakan regresi dengan dua kategori seperti naik turun, memberli-tidak membeli, tepat-tidak tepat (Ghozali, 2006). Model *Logistic regression* merupakan pengujian dengan *Logistic regression* mengesampingkan asumsi normalitas data penelitian, karena variabel penelitian merupakan campuran antara variabel kontinu (matrik) dan kategorial (non matrik) sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2006).

3.5.3 Uji nilai *likelihood*

Uji nilai *likelihood* digunakan untuk menguji model *logistic regression*. Uji ini digunakan untuk menunjukkan apakah dengan penambahan variabel bebas ke dalam model regresi dapat memperbaiki model regresi dalam memprediksi variabel dependen penelitian. Uji ini didasarkan pada nilai -2LogL baik pada block 0 maupun block 1. Dengan menguji ini dapat memperbaiki model *fit* dalam model *logistic regression* penelitian ini

3.5.4 Uji nilai *Hosmer dan lemeshow's Goodness of Fit Tes*

Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model regresi dalam penelitian atau tidak ada

perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan *Fit*.

3.5.5 Uji Koefisien Regresi

Untuk menguji koefisien regresi dapat dilihat pada bagian akhir output yaitu Variables in the equation. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi masing-masing variabel independen. Dasar keputusannya adalah sebagai berikut :

- 3 Nilai signifikansi variabel independen yang lebih besar dari 0,05 (5%) maka variabel independen tersebut tidak layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen sehingga variabel independen tersebut harus dihilangkan dari model.
- 4 Nilai Signifikansi variabel independen yang lebih kecil atau sama dengan 0,05 ($<0,05$) maka variabel independen tersebut layak digunakan untuk memprediksi variabel independen tersebut dimasukkan dalam model.

3.5.7 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomik/ biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval dan atau kategorik (Hosmer dan Lemeshow's, 1989). Variabel yang dikotomik/biner adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu kategori yang menyatakan kejadian sukses ($Y=1$) dan kategori yang menyatakan kejadian gagal ($Y=0$).

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Dari tabel 4.12 yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan hal ini mengindikasikan bahwa keuntungan yang dicapai perusahaan tidak mempengaruhi tepat atau terlambatnya perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya. Adanya keuntungan tinggi yang dicapai perusahaan tidak dapat memperlihatkan adanya kinerja manajemen yang baik sehingga tidak dapat dipastikan bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan dapat menyajikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan laba berdasarkan aktiva yang dimiliki ternyata tidak mempunyai secara signifikan terhadap jangka waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Banyak perusahaan yang mengalami kenaikan kenaikan profit namun kenaikan itu tidak begitu besar, apalagi ada yang mengalami kerugian selain itu mungkin tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan tidak begitu besar sehingga tidak memicu perusahaan untuk mengkomunikasikan laporan keuangan yang diaudit lebih cepat. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4.4.2 Pengaruh Likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Dari Tabel 4.12 yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini disebabkan bahwa tinggi rendahnya tingkat likuiditas suatu perusahaan tidak mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas tinggi, belum tentu menyelesaikan proses audit laporan keuangannya dengan lebih cepat. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas rendah juga ingin proses menyelesaikan audit laporan keuangannya lebih cepat atau tidak melebihi batas ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam, sehingga penyampaian laporan keuangannya lebih cepat, yang bertujuan agar pihak kreditor dapat mengetahui kinerja perusahaan dan mengetahui kemampuan perusahaan didalam membayar pinjaman dan kreditor. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4.4.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Dari Tabel 4.12 yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa *Ukuran perusahaan* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh seberapa

besar tanggung jawab suatu perusahaan dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM mengenai keterbukaan informasi khususnya mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan dan seberapa besar tanggung jawab perusahaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Hal ini juga dikarenakan besar atau kecilnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi sistem pengendalian internal oleh perusahaan tersebut, sehingga baik perusahaan besar atau kecil mereka sama-sama memiliki audit internal yang baik dan mereka juga sama-sama dimonitori secara ketat oleh para investor agar proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa *Ukuran perusahaan* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4.4.4 Pengaruh opini auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Dari Tabel 4.12 yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan opini audit adalah wewenang dari kantor akuntan publik sebagai lembaga yang independen dan bertanggungjawab ke publik untuk mengeluarkan opini audit berdasarkan laporan keuangan yang diuditnya, dalam hal ini manajemen tidak berhak mengintervensi opini audit yang telah dikeluarkan oleh Kantor

Akuntan Publik meskipun Kantor Akuntan Publik tersebut mendapat fee dari perusahaan yang diauditnya. Hal ini juga disebabkan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan ternyata tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian keuangan. Hal ini terjadi karena jenis pendapat auditor merupakan *goodnews* dan *badnews* atas kinerja manajerial perusahaan dalam setahun bukan merupakan faktor penentu dalam ketepatan waktu eloran audit. Kebijakan untuk mengatur waktu penentu dalam penyelesaian audit merupakan kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan klien. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa Opini Auditor berpengaruh positif terhadap opini ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4.4.5 Pengaruh solvabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Dari tabel 4.12 yang telah dilakukan bahwa *solvabilitas* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayarkan semua hutang-hutangnya ternyata tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena standar pekerjaan auditor yang telah diatur dalam SPAP menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit perusahaan yang baik yang memiliki total utang besar dengan jumlah *debtholder* yang banyak atau perusahaan dengan utang kecil

dan jumlah *debtholder* sedikit tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan, karena auditor yang ditunjuk pasti telah menyediakan waktu sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan proses audit hutang. Jadi hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4.4.6 Pengaruh kepemilikan pihak eksternal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Dari tabel 4.12 yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa Kepemilikan pihak eksternal hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh pihak dalam perusahaan akan mempengaruhi kinerja manager akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja manger untuk dituntut lebih baik adanya manajemen dengan kinerja yang baik mampu menyampaikan laporan keuangan lebih tepat waktu. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa kepemilikan pihak eksternal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil pengujian Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *Profotabilitas* tidak berepngaruh signifikan terhadap

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

- 5 Hasil pengujian Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. .
- 6 Hasil pengujian Hipotesis Ketiga menunjukkan bahwa Variabel *Ukuran perusahaan* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- 7 Hasil pengujian Hipotesis Keempat menunjukkan bahwa variabel Opini Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan.
- 8 Hasil pengujian Hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- 9 Hasil pengujian Hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan pihak eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanti Rini, 2010, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia, Serang
- Hedy Kuswanto dan Sodikin Manaf, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan

Waktu Laporan Keuangan ke Publik (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013)

Kuriawati Astrid , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Publik Di Indonesia (Studi Empiris Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012, Semarang

Kristanti Yanita Anggi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia, Jawa Timur

Saemargani Fitria Inggga, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Ukuran Kap, Dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay* (Studi Kasus Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 2013)

Sukoco Agus, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan

<https://id.wikipedia.org/wiki/Profitabilitas>

Lathiefatunnisa Nur Islam, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012 – 2013) Skripsi, Semarang

Hulmi dan Ali (2012), Pengaruh *Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan* dan Reputasi Auditor terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI)

Suharni dan Rachmani (2014), Faktor-Faktor yang mmemoengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI)

Oktarina dan Suhardi (2013), Pengaruh *Debt to equity ratio* (DER), Umur perusahaan, Profitabilitas, Struktur kepemilikan, kanton Akuntan Publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Sulistyo dan Bagus (2014), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (studi kasus perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)

PENGARUH PERUBAHAN PTKP TERHADAP RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PT ALANTEC PRIMA MANDIRI

Aprianti¹, Poppy Indriani², Yeni Widyanti²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el : aprianty_april@yahoo.com¹, poppy.indriani@binadarma.ac.id²,
yeni.widyanti@binadarma.ac.id²

ABSTRACT: *Withholding tax on employees' monthly income is usually done directly by the companies concerned to do their own calculation based on the regulations of Article 21 of tax laws. However, this system is sometimes not appropriate for their components that are not included into the calculation so as to cause the difference in the numbers, either on income or payroll taxes to be paid by the company to its employees. The purpose of this study was to analyze the calculations, remittance, reporting income tax under Article 21 have been carried out by PT Alantec Prima Mandiri Palembang. The background of this research is to avoid any overpayment as a result of a calculation error reporting income tax deduction or employees. The results of this research showed the overpayment or excess withholding tax (VAT) of Article 21 of the employees at PT.Alantec Prima Mandiri in the period July to December 2015 as a result of the increase in taxable income rates change, so PT Alantec Prima Mandiri has the status of the overpayment of Rp.48.731.971.*

Keywords: *Calculation, Deposit, Reporting, Income Tax Article 21*

ABSTRAK: Pemotongan pajak atas penghasilan bulanan karyawan biasanya dilakukan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dengan melakukan penghitungan sendiri berdasarkan peraturan Pasal 21 undang-undang perpajakan. Namun sistem ini terkadang kurang tepat karena adanya komponen yang tidak disertakan ke dalam penghitungan tersebut sehingga dapat menimbulkan angka selisih, baik pada pajak penghasilan maupun gaji yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perhitungan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT Alantec Prima Mandiri Palembang. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menghindari timbulnya kelebihan bayar akibat dari kesalahan perhitungan pemotongan atau pelaporan Pajak Penghasilan Karyawan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan adanya kelebihan bayar atau kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan pada PT.Alantec Prima Mandiri dalam periode Juli sampai dengan Desember 2015 akibat dari kenaikan perubahan tarif PTKP, sehingga PT Alantec Prima Mandiri memiliki status kelebihan bayar sebesar Rp.48.731.971.

Kata Kunci: *Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang hingga akhir tahun 2013 jenis pajak tersebut dalam

skema realisasi penerimaan pajak menjadi yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2013 Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

PT Alantec Prima Mandiri adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dimana sebagian besar karyawan dari perusahaan ini adalah Wajib Pajak yang telah melakukan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada Negara.

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT Alantec Prima Mandiri terhadap karyawannya mengalami kekeliruan atau lebih bayar karena salah satu dampak atas perubahan PTKP di periode berjalan. Mulai Juli 2015, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan perubahan peraturan PTKP yang diatur dalam PMK Nomor 152/PMK.010/2015, PTKP setahun yang dahulu Rp 36.000.000 sekarang menjadi Rp 54.000.000, juga kenaikan upah tidak kena pajak yang diatur dalam PMK, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2016, upah tidak kena

pajak yang dahulu Rp 200.000 per hari sekarang menjadi Rp 300.000 per hari.

Dampaknya bagi pegawai tetap dan bukan pegawai yaitu akan terjadi kelebihan bayar pajak, dan dapat direstitusi/diminta kembali oleh wajib pajak kepada KPP setempat, atau seharusnya dikembalikan kepada penerima penghasilan oleh KPP, sedangkan dampak bagi pegawai tidak tetap apabila kelebihan bayar tidak dapat dikompensasikan, tetapi pada akhir tahun kredit pajaknya lebih tinggi dari sesungguhnya dan dapat juga dikembalikan. Dampak bagi pemotong pph pasal 21 adalah kelebihan bayar yang dikompensasikan pada bulan berikutnya bahkan tahun berikutnya.

Wajib pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Dalam PER-32/PJ/2015 dikatakan bahwa atas Lebih Bayar yang timbul atas penyesuaian PTKP baru tersebut, dapat dikompensasikan ke Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2016. Artinya, Lebih Bayar atas PPh 21 yang telah disetorkan selama Masa Januari-Juni 2016 dapat dikembalikan kepada wajib pajak yang menyetorkan pajak PPh pasal 21 lebih besar dari yang seharusnya dibayar.

Dengan tujuan untuk dapat mengetahui lebih lanjut pengenaan pajak penghasilan terhadap perhitungan kepada karyawan pada PT. Alantec Prima Mandiri, maka berdasarkan pola pikir tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh**

Perubahan PTKP terhadap restitusi pajak penghasilan pada PT Alantec Prima Mandiri Palembang”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah perubahan PTKP berpengaruh terhadap restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT.Alantec Prima Mandiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2011:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1) bahwa Pajak berfungsi sebagai Fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi. Disamping itu, negara mempunyai sumber penerimaan lain sebagai berikut:

- a. Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam, Seperti tercantum pada pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero, Perum maupun Perusahaan jawatan (Perjan). Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun harus diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi pelanggaran hukum.
- d. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax (bukan merupakan pajak) yang diterima atas

- pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- e. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
 - f. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
- Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah :
- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya

- di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
 - f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan dikemukakan oleh Suandy (2010 : 81) bahwa Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Harmanto (2003 : 186), menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan

oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Contoh Menghitung Pajak Penghasilan Pph 21 Tahun 2016 :

Agar dapat lebih memahami cara perhitungan pajak penghasilan, berikut ini contoh perhitungan pajak penghasilan Pph 21:

-Misalnya A adalah seorang karyawan status kawin dengan anak dengan asumsi data penghasilan sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 5 juta

Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2 juta

Total Penghasilan Bruto : Rp. 7 juta

Dari data di atas perhitungan pajak penghasilan Pph 21 atas penghasilan dalam setahun adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Gaji Pokok	60.000.000,-
Tunjangan	24.000.000,-
Penghasilan-Bruto	84.000.000,-
Pengurangan (-)	
PTKP	63.000.000,-
Biaya Jabatan	4.200.000,-
Iuran Pensiun	2.400.000,-
Total	69.600.000,-
Penghasilan Kena Pajak-Netto	14.400.000,-
	720.000,-
Pajak Pph (5%) Per Tahun	60.000,-
Pajak Pph (5%) Per Bulan	

Catatan :

- Perhitungan diatas dengan asumsi pegawai A memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak memiliki [NPWP](#) maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal.
- Apabila Karyawan A asumsi perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Netto) di atas nilainya di atas Rp. 50 juta, maka tarif pajak disesuaikan dengan tabel pajak progresif di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Untuk perhitungan pajak penghasilan PPh 21 Tahun 2016 dengan status lainnya tinggal merubah nilai PTKP sesuai dengan tabel PTKP 2016 diatas.

2.1.4 Restitusi Pajak

Restitusi pajak mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Masyarakat Indonesia kini mengenal restitusi di bidang pajak sebagai ganti rugi atau pembayaran kembali pembayaran pajak yang berlebih oleh wajib pajak. Sejarah restitusi pajak juga bisa kita lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah.

2.1.5 Pajak Terutang

Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan meliputi :

- a. Undang- undang nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
- b. Undang- undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan)
- c. Undang- undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah)

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada PT. Alantec Prima Mandiri yang beralamat di Palembang.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:129) ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder

3.3 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data untuk memberikan gambaran dan jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan masalah dan melakukan perbandingan terhadap teori-teori yang ada dengan masalah yang dibahas untuk kemudian

membuat kesimpulan dan saran yang dipandang penting.

4. PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Alantec Prima Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor. Perusahaan ini berkedudukan di Palembang, didirikan oleh Bapak Andri Hidayat, yang sekaligus sebagai Direktur Utama pada perusahaan ini. PT Alantec Prima Mandiri didirikan tepatnya pada tanggal 22 Januari 2012 dan beralamat di jalan MP Mangkunegara No. 09 Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pada tahun 2015 pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Alantec Prima Mandiri terhadap karyawannya yang gajinya di atas PTKP telah di pungut, disetorkan dan dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ilir Timur II dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015. Tetapi pada periode dari Juli sampai dengan Desember 2015 telah terjadi perubahan kenaikan tarif PTKP dimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa mulai Juli 2015, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan perubahan peraturan PTKP yang diatur dalam PMK Nomor 152/PMK.010/2015, PTKP setahun yang dahulu yang dahulu Rp.24.300.000 sekarang menjadi Rp.36.000.000. Artinya telah terjadi kelebihan

bayar atau kelebihan setor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan pada karyawan PT Alantec Prima Mandiri.

Pemberlakuan PTKP akan ditarik mundur sejak tanggal 1 Januari 2015, Bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah bayar pajak enam bulan sebelumnya, berarti akan ada kelebihan pembayaran. Ditjen Pajak akan melimpahkan kelebihan tersebut ke enam bulan berikutnya. Artinya ada pengurangan pembayaran pajak yang ditutupi dari kelebihan bayar tersebut. Ataupun kelebihan bayar tersebut dapat di restitusi, walaupun sangat jarang perusahaan mengajukan restitusi atas PPh pasal 21 tetapi tidak ada Undang-Undang yang mengatur bahwa restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak boleh dilakukan.

4.2.2 Restitusi Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21

PT Alantec Prima Mandiri Palembang setelah melakukan analisa dan melakukan perhitungan kembali atas pengenaan Pph pasal 21 terhadap karyawannya dan benar telah terjadi kelebihan bayar. Sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan restitusi atau pembayaran kembali pembayaran pajak yang berlebih oleh wajib pajak. Sebenarnya ada 2 cara untuk memproses kelebihan bayar tersebut yaitu:

- a) Kompensasi, yaitu semua bentuk kembalian finansial jadi kelebihan bayar atas suatu periode dapat dikompensasikan pada periode selanjutnya.

- b) Restitusi, yaitu sebagai ganti rugi atau pmabayaran kembali pembayaran pajak yang berlebih oleh wajib pajak.

Perusahaan lebih memilih untuk merestitusikan kelebihan bayar atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikarenakan Perusahaan telah memungut gaji dari setiap karyawannya dimana kelebihan bayar tersebut merupakan hak dari setiap karyawan yang seharusnya gaji mereka tidak dipotong setelah terjadi perubahan tarif PTKP pada bulan Juli sampai dengan Desember 2015. Setelah melakukan proses Restitusi dan kelebihan bayar tersebut harus dikembalikan kepada karyawan yang berhak.

- a) Pengenaan Pajak Penghasilan dari periode Januari – Juni yaitu: Rp.14.569.075
- b) Pengenaan Pajak Penghasilan dari Juli – Desember yaitu: Rp.63.301.046

Jadi, Pengembalian atau Restitusi tersebut senilai Rp.48.731.971

5.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan membuat laporan dengan judul “Pengaruh Perubahan PTKP Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Alantec Prima Mandiri” maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Besaran perubahan tarif PTKP menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya kelebihan setor atau kelebihan bayar terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Alantec Prima Mandiri.

2. Pengaruh perubahan PTKP menyebabkan terjadinya restitusi akibat lebih bayar ataupun lebih setor terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
3. Besaran gaji karyawan dan tarif PTKP mempengaruhi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

5.2 Saran

1. Pada tahun-tahun yang akan datang sebaiknya perusahaan tidak melakukan kesalahan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena besaran tarif PTKP yang berubah.
2. Sebaiknya perusahaan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada AR atau konsultan pajak mengenai pemotongan, penyeteroran, serta pelaporan PPh pasal 21.
3. Sebaiknya perusahaan lebih teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122/PMK 010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Puteri Indrayanti. 2014. Analisis Pengaruh Perubahan Atas Kenaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Bandung: Universitas Maranatha

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Buku 2 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat

www.ortax.org

www.pajak.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Sanusi. 2011. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Aryanto Yuda. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat

Halim Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 21011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Michel Salim, Lili Syafitri. 2013. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Jurnal Akuntansi. STIE MDP

Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH DI INDONESIA

Arfan¹, Ade Kemala Jaya², Rolia Wahasusmiah²

Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹

Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang

Pos-el: Arfancicharito@gmail.com, Jaya_ade@yahoo.com, Rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id

ABSTRACT: *This research is meant to analyze influence of financing murabahah, mudharabah, musyarakah and ijarah to profitability of Bank BRI Syariah kind of used ratio return on asset (ROA) and return on equity (ROE). The kind of data use is secondary data obtained from www.brisyariah.co.id. The method of analysis that used in this research multiple regression. The study of return on assets (ROA) indicates that the financing murabahah, mudharabah and musyarakah partially no significant effect on return on assets (ROA) and Ijara financing is partially significant effect on the return on assets (ROA). While the results of research on return on equity (ROE) showed that the financing murabahah, mudharabah and musyarakah partially no significant effect on return on equity (ROE), and Ijara financing is partially significant effect on return on equity (ROE).*

Keywords: *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, ROA, ROE*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas pada Bank BRI Syariah dengan menggunakan rasio return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.brisyariah.co.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian terhadap return on asset (ROA) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA) dan pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA). Sedangkan hasil penelitian terhadap return on equity (ROE) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE), dan pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE).

Kata Kunci : *Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, ROA, ROE*

1. PENDAHULUAN

Dunia perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat vital dalam industri perekonomian dan perkembangan ekonomi, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu fondasi perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan bank mampu menyediakan dana bagi setiap kegiatan usaha yang dapat meningkatkan sistem perekonomian suatu negara. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah prinsip yang digunakan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya

bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*) dalam membagi keuntungan atau kerugian antara pihak nasabah dan bank serta *margin* dalam transaksi jual belinya.

Rendahnya penyaluran pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global yang terjadi tidak hanya di perbankan syariah di Indonesia, melainkan juga terjadi di perbankan syariah di seluruh dunia. Penelitian ini akan menggunakan dua perhitungan rasio yakni

return on assets (ROA) dan *return on equity* (ROE). Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank yang memakai sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank BRI Syariah telah menjadi bank syariah yang mempunyai reputasi baik di mata masyarakat Indonesia karena bank BRI Syariah termasuk dalam bank BUMN.

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah perolehan laba pada Bank BRI Syariah mengalami kenaikan dan penurunan (*fluktuatif*) dibandingkan dengan laba Bank BRI Konvensional yang selalu mengalami peningkatan. Penurunan laba Bank BRI Syariah dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah penurunan dalam penghimpunan dan penyaluran dana melalui pembiayaan, baik pembiayaan dengan skema jual beli dalam bentuk *murabahah* maupun pembiayaan dengan skema bagi hasil dan kegiatan sewa menyewa

Tabel 1.2
Perolehan Laba PT Bank BRI Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laba Bank BRI Syariah
2010	9.053
2011	11.654
2012	101.888
2013	129.568
2014	6.577
2015	122.637

Sumber : Laporan Keuangan Bank BRI Syariah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat adanya kenaikan laba pada tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu sebesar Rp 101.888.000.000 pada tahun 2012 dan Rp 129.568.000.000 pada tahun 2013. Namun penurunan laba terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 6.577.000.000 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp 122.637.000.000.

Berdasarkan penjelasan diatas maka timbul dugaan sementara bahwa peningkatan dan penurunan laba Bank BRI Syariah dipengaruhi oleh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Kegiatan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas perusahaan yang berhubungan dengan kinerjanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah ?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah ?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah ?
4. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah ?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *Ijarah* terhadap profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Murabahah

Menurut Sri Nurhayati (2015) Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dimana bank harus memberitahukan margin yang diperoleh bank di awal memulai akad.

2.2 Pengertian Mudharabah

Menurut Sri Nurhayati (2015) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

2.3 Pengertian Musyarakah

Menurut Sri Nurhayati (2015) Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.4 Pengertian Ijarah

Menurut Sri Nurhayati (2015) *Ijarah* adalah akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan.

2.5 Pengertian Profitabilitas

Menurut Hanafi (2012) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan).

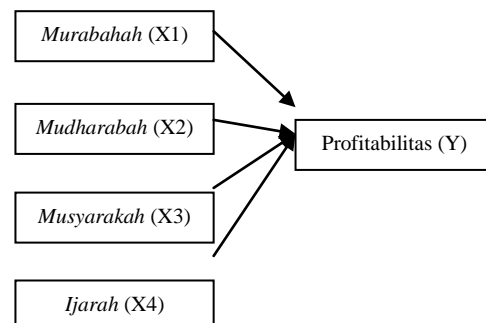
2.6 Penelitian Terdahulu

Novi (2015) dengan penelitian yang berjudul analisis pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bank mandiri syariah mengungkapkan bahwa hasil pengujian *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba sedangkan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Mandiri Syariah.

Ela Chalifah (2015) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri mengungkapkan bahwa Hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial variabel pendapatan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas sedangkan variabel pendapatan berpengaruh negative terhadap profitabilitas.

2.7 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Berdasarkan gambar paradigma penelitian diatas, maka pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah akan dianalisis pengaruhnya terhadap profitabilitas.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT Bank BRI Syariah di Indonesia.

3.2 Operasional Variabel

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Sedangkan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain menurut Sanusi (2014). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank BRI Syariah tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang dapat diperoleh di website perusahaan www.brisyariah.co.id.

3.4 Teknik Analisis

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pemilihan teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini.

3.5 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini,

dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum.

3.6 Analisis Regresi

Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Profitabilitas
- X1 = Pembiayaan *Murabahah*
- X2 = Pembiayaan *Mudharabah*
- X3 = Pembiayaan *Musyarakah*
- X4 = Pembiayaan *Ijarah*
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- e = Tingkat Kesalahan

3.7 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji simultan (uji f) dengan standar nilai 0,05 dan uji parsial (uji t) dengan standar nilai 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	24	.03	1.71	.7038	.50806
ROE	24	.24	18.63	6.3596	5.07407
Murabahah	24	66870.00	1458382.00	597968.5000	390912.99543
Mudharabah	24	7003.00	128509.00	54627.7917	35374.73300
Musyarakah	24	25364.00	513496.00	155876.3750	128782.68264
Ijarah	24	173.00	87808.00	19475.6250	20551.32172
Valid N (listwise)	24				

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui *descriptive statistic* dari masing-masing variabel. Dari 24 sampel ini variabel profitabilitas dengan menggunakan rasio return on asset (ROA) memiliki nilai minimum 0,03, memiliki nilai maksimum 1,71 dan memiliki standar deviasi sebesar 0,50% masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,70%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simpangan data pada variabel return on asset (ROA) baik. Variabel profitabilitas dengan menggunakan rasio return on equity (ROE) memiliki nilai minimum 0,24, memiliki nilai maksimum 18,63 dan memiliki standar deviasi sebesar 5,07% masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 6,35%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simpangan data pada variabel return on equity (ROE) baik.

Variabel pembiayaan murabahah memiliki nilai minimum 66870,00, memiliki nilai maksimum 1458382,00 dan standar deviasi sebesar 390912,99% masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan bahwa data pada variabel pembiayaan murabahah baik. Variabel pembiayaan mudharabah memiliki nilai minimum 7003,00, memiliki nilai maksimum 128509,00 dan standar deviasi sebesar 35374,73% masih lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar 54627,79 %, ini menunjukkan bahwa data pada variabel pembiayaan mudharabah baik.

Variabel pembiayaan musyarakah memiliki nilai minimum 25364,00, memiliki

nilai maksimum 513496,00 dan memiliki standar deviasi sebesar 128782,68% masih lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sebesar 155876,37%, ini menunjukkan bahwa data pada variabel pembiayaan musyarakah baik. Variabel pembiayaan ijarah memiliki nilai minimum 173,00, memiliki nilai maksimum 87608,00 dan memiliki standar deviasi sebesar 20551,32% masih lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sebesar 19475,62%, ini menunjukkan bahwa data pada variabel pembiayaan ijarah baik.

4.2 Analisis Regresi Berganda

Model ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap return on asset (ROA).

Tabel 4.2

Regresi Berganda ROA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	.794	.182		4.365	.000
Murabahah	-2.895E-6	.000	-.227	-1.308	.206
Mudharabah	2.359E-5	.000	1.643	1.263	.222
Musyarakah	-5.036E-7	.000	-.128	-.185	.855
Ijarah	2.208E-5	.000	.893	2.655	.016

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data Diolah (2017)

$$ROA = 0,794 - 2,895E-6 + 2,359E-5 - 5,036E-7 + 2,208E-5 + e$$

Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 0,794. Hal ini menunjukkan bahwa jika murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah dianggap konstan oleh karena itu besarnya return on asset (ROA) akan berkurang sebesar 0,794. Nilai Koefisien

regresi murabahah sebesar $-2,895E-6$. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi penurunan terhadap murabahah sebesar 1% akan berdampak pada penurunan return on asset (ROA) sebesar $-2,895E-6$. Nilai Koefisien regresi mudharabah sebesar $2,359E-5$. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap mudharabah sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan return on asset (ROA) sebesar $2,359E-5$. Nilai Koefisien regresi musyarakah sebesar $-5,036E-7$. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi penurunan terhadap murabahah sebesar 1% akan berdampak pada penurunan return on asset (ROA) sebesar $5,036E-7$. Nilai Koefisien regresi ijarah sebesar $2,208E-5$. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap murabahah sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan return on asset (ROA) sebesar $2,208E-5$.

Model ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap return on equity (ROE).

Tabel 4.3

Regresi Berganda ROA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,355	1,878		3,917	,001
Murabahah	$-3,251E-5$,000	-.2504	-1,424	,171
Mudharabah	,000	,000	1,773	1,319	,203
Musyarakah	$3,486E-6$,000	,088	,124	,903
Ijarah	,000	,000	,834	2,398	,027

a. Dependent Variable: ROE

Sumber : Data Diolah (2017)

$$ROE = 7,355 - 3,251E-5 + 0,000 + 3,486E-6 + 0,000 + e$$

Nilai konstanta untuk persamaan regresi adalah 7,355. Hal ini menunjukkan bahwa jika murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah dianggap konstan oleh karena itu besarnya return on equity (ROE) akan berkurang sebesar 7,355. Nilai Koefisien regresi murabahah sebesar $-3,251E$. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi penurunan terhadap mudharabah sebesar 1% akan berdampak pada penurunan return on equity (ROE) sebesar $-3,251E$. Nilai Koefisien regresi mudharabah sebesar 0,000. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan dan penurunan terhadap mudharabah sebesar 1% tidak akan berdampak pada peningkatan dan penurunan return on equity (ROE) sebesar 0,000. Nilai Koefisien regresi musyarakah sebesar $3,486E-6$. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan terhadap musyarakah sebesar 1% akan berdampak pada penurunan return on equity (ROE) sebesar $3,486E-6$. Nilai Koefisien regresi ijarah sebesar 0,000. Hal ini dapat diartikan setiap terjadi peningkatan atau penurunan terhadap ijarah sebesar 1% tidak akan berdampak pada peningkatan dan penurunan return on equity (ROE) sebesar 0,000.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Detrminasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya nilai korelasi antara variabel independen yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah,

musyarakah dan ijarah terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas.

Tabel 4.4
Koefisien Determinasi ROA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.641 ^a	.411	.287	.42899

a. Predictors: (Constant), Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi mengindikasikan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0.287 yang menunjukkan bahwa 28,7%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah menjelaskan variabilitas variabel dependen profitabilitas (ROA) sebesar 28,7%. Sementara itu sisanya 72,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi ROA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.239	4.42714

a. Predictors: (Constant), Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROE

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi mengindikasikan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0.239 yang menunjukkan bahwa 23,9%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian

ini yang terdiri dari pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah menjelaskan variabilitas variabel dependen Return on equity (ROE) sebesar 23,9%. Sementara itu sisanya 76,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4.3.2 Uji Simultan (Uji f)

Uji simultan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.6

Uji f ROA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.440	4	.610	3.315	.032 ^b
	Residual	3.497	19	.184		
	Total	5.937	23			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji f dikatakan bahwa *probability value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% ($\alpha = 0,05$) sebesar 0,032. Apabila dibandingkan F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,315 > 2,90$. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Sehingga secara simultan variabel murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA).

Tabel 4.7
Uji f ROE

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.772	4	54.943	2.803	.055 ^b
	Residual	372.391	19	19.600		
	Total	592.163	23			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

Berdasarkan hasil uji f dikatakan bahwa *probability value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% ($\alpha = 0,05$) sebesar 0,055. Apabila dibandingkan F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2,803 > 2,90$. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak layak (*unfit*) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Sehingga secara simultan variabel murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE).

4.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik (t-Test) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Tabel 4.8
Uji t ROA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.794	.182		4.365	.000
	Murabahah	-2.895E-6	.000	-2.227	-1.308	.206
	Mudharabah	2.359E-5	.000	1.643	1.263	.222
	Musyarakah	-5.036E-7	.000	-.128	-.185	.855
	Ijarah	2.208E-5	.000	.893	2.655	.016

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,206 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -1,308 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, yang berarti variabel pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA).

Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,222 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,263 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, yang berarti variabel pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA).

Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai

signifikan sebesar $0,855 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,185 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, yang berarti variabel pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA).

Pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,016 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,655 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, yang berarti variabel pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA).

Tabel 4.9
Uji t ROE

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.355	1.878		3.917	.001
Murabahah	-3.251E-5	.000	-2.504	-1.424	.171
Mudharabah	.000	.000	1.773	1.319	.203
Musyarakah	3.486E-6	.000	.088	.124	.903
Ijarah	.000	.000	.834	2.398	.027

a. Dependent Variable: ROE
Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} >$

t_{tabel} atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,171 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -1,424 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, yang berarti variabel pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE).

Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,203 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,319 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, yang berarti variabel pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE).

Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,903 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,124 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, yang berarti variabel pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE).

Pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,027 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,398 < t_{tabel} 1,72913$. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian maka, H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, yang berarti variabel pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE).

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah secara simultan berpengaruh terhadap return on asset (ROA), sedangkan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah secara simultan tidak berpengaruh terhadap return on equity (ROE).
2. Pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA), sedangkan pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh terhadap return on asset (ROA).
3. Pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on equity (ROE), sedangkan pembiayaan ijarah secara parsial berpengaruh terhadap return on equity (ROE).

5.2 Saran

Dalam penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan objek dan sampel penelitian ataupun penambahan jumlah periode untuk mendapatkan deskripsi yang lebih baik dan mewakili keseluruhan populasi bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. (2009). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank BRI Syariah. Laporan Keuangan. (2011-2015). Terpublikasi melalui website: <http://brisyariah.co.id> (diakses 27 Oktober 2016).
- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia. (<http://www.bi.go.id>, diakses 27 Oktober 2016).
- Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Buchori, dan Aji Prasetyo. (2013). *Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah*

- terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manfaat Surabaya.* Terpublikasi melalui website: elqist.uinsby.ac.id (diakses 17 Oktober 2016).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta. PT. Syamil Cipta Media.
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fahrul, Fauzan, dkk. (2012). *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. Terpublikasi melalui website: <http://prodipps.unsyiah.ac.id> (diakses 17 Oktober 2016).
- Hanafi, Mamduh. (2012). *Manajemen Keuangan*. Anggota IKAPI BPFE Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati, Sri. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Umar. 2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, Heri. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Van Horne, dan John M. Wachowicz. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

PENGARUH HUBUNGAN JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2011-2015

**Baron Praseyo Buchika¹, Poppy Indrianni², Rolia Wahasusmiah²,
Dosen Universitas Binadarma2.2, Mahasiswa BinamDarma1
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang**

Baronpb56@gmail.com, Rolia.Whasusmiah@binadarma.ac.id, Poppy_ucat@yahoo.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah wisata dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang secara simultan maupun persial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari dua instansi pemerintahan yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan adalah Deteksi Normalitas, Regresi Linier Berganda, dan Deteksi Goodnes of fit menggunakan program SPSS 22.0. Hasil penelititan menunjukkan bahwa jumlah wisatawan dan jumlah hotel berpengaruh secara simultan dan persial terhadap penerimaan pajak hotel dan disarankan kepada pemerintah daerah Kota Palembang untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan cara meningkatkan pembangunan jumlah tempat wisata dan memperbarui tempat wisata yang sudah ada, serta harus lebih sering mengadakan kegiatan (event – event) baik nasional maupun internasional di Kota Palembang,

Kata Kunci :Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Penerimaan Pajak Hotel

***ABSTRACT** : This study aimed to analyze the effect of the amount of travel and the number of hotels to tax revenues in the city of Palembang in simultan and Persia. This study uses secondary data obtained from two government agencies namely the Department of Revenue of Palembang and the Department of Tourism and culture of Palembang. The analysis technique used is the detection of normality, Regression, and Detection goodnes of fit using SPSS 22.0. Results penelititan showed that the number of tourists and the number of hotels influential simultaneously and Persia to tax revenues hotel and suggested to local governments Palembang to continue to increase the number of tourists by increasing the development of the number of sites and updating the tourist attractions that already exist, and should be more frequent held an event both nationally and internationally in Palembang,*

***Keywords:** Number of Travelers, Total Hotel, Hotel Tax Revenue*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri pariwisata di Kota Palembang berkembang dengan pesat. Potensi yang dimiliki oleh daerah yang hampir memiliki 2 juta jiwa penduduk ini bakal dilirik oleh investor dan wisatawan dalam maupun luar dalam dua tahun ke depan. Hal ini dikarenakan saat ini industri pariwisata Palembang sedang dipacu untuk meningkatkan perkembangan ekonomi daerah.

Kota Palembang adalah salah satu destinasi wisata di pulau Sumatra yang menjadi

pilihan wisatawan untuk datang berkunjung. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang kebanyakan berasal dari daerah Jambi, Medan, Bengkulu dan Bangka Belitung. Dari sekian banyak wisatawan yang datang ke kota Palembang banyak diantara mereka yang mengatakan alasannya berkunjung untuk menyaksikan keindahan jembatan Ampera di malam hari dan ada juga yang hanya untuk berbelanja dan rekreasi.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata seharusnya menjadi peluang bagi

pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara mengembangkan potensi wisata di daerah dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan wisatawan lokal dan mancanegara. Oleh karena itu otonomi daerah memiliki peranan penting untuk membangun pariwisata di kota Palembang, karena otonomi daerah memiliki hak guna untuk mengatur daerahnya sendiri namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta Undang-Undang.

Pajak hotel bagi daerah mempunyai potensi yang tinggi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan mampu mendukung segala aktivitas pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata. Mengingat berbagai kegiatan Nasional dan Internasioal yang sering diadakan di Kota Palembang mendorong kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang akhirnya mendorong pertumbuhan hotel dikota Palembang.

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil penelitian diatas, penelitian ini disusun guna mengulas secara lebih lanjut dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan dan jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, terhadap penerimaan pajak hotel Kota Palembang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2011-2015.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah wisata dan jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk memperluas wawasan penulis khusus nya mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kota Palembang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi kinerja dan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak
3. Dapat diguakam sebagai referensi mapun bahan pembelajaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi sebelumnya, fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) sebagai berikut

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah

2.3 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Dasar Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang

Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 Bab 2 Pasal 2 tentang Objek Pajak Hotel).

Dalam pengenaan Pajak Hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 Bab 2 Pasal 2 tentang Objek Pajak Hotel.

- a) Dengan nama Pajak Hotel adalah dipungut pajak atas setiap pembayaran jasa pelayanan yang disediakan hotel.
- b) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas hiburan dan olahraga.
- c) Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telpon fotokopi, internet, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenisnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 Bab 2 Pasal 3 dan 4 tentang “Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel”, subjek pajak adalah pribadi atau badan

yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010 Bab 2 Pasal 4 tentang “Dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak hotel”, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Siahaan, Marihot P.(dalam Aliandi 2013), dalam praktek pemungutan pajak hotel menggunakan dua sistem yaitu :

1. Sistem langsung.

Sistem langsung yaitu wajib pajak langsung membayar pajak ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) dinas pendapatan daerah dan kemudian Bendahara Khusus Pemerintah menyerahkan ke Bank Pembangunan (BPD) Daerah sebagai pemegang kas daerah.

2. Sistem Tidak Langsung.

Yaitu tugas pungut dinas pendapatan daerah memungut pajak ke tempat wajib pajak berada kemudian menyertakan ke Bendahara Khusus Pemerintah (BKP) pendapatan daerah dan diteruskan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD).

2.5 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel

Adam (2013) menyatakan, Beberapa faktor yang mempengaruhi pajak hotel sebagai berikut :

Jumlah Wisatawan

Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebutkan wisatawan adalah pelancong uang melakukann perjalanan pendek dengan menginap di daerah tersebut minimal 24 jam atau maksimal enam buan.

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan (Karyono, 1997)

Jumlah Hotel

Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan dari hotel dapat dibedakan menjadi

a. *Small Hotel*

Kamar yang disediakan maksimal sebanyak 28 kamar.

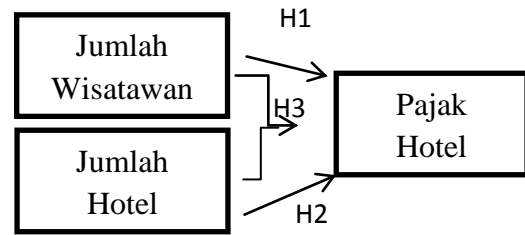
b. *Medium Hotel*

Jumlah kamar uang terseia antara 28 sampai 299 kamar

c. *Large Hotel*

Jumlah kamar yang disediakan sebnayak 300 kamar atau lebih

2.6 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

2.7 Hipotesis

Berdasarkan hal diatas analisis hipotesis terhadap masalah yang dibahas ialah sebagai berikut:

H1: Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang.

H2: jumlah hotel berpengaruh erhadap penerimaan pajak hotel dikota Palembang.

H3 : Jumlah HWisatawan, Jumlah Hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dilihat dari jenis data yang bersifat angka dengan variabel independen Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Hotel (X2), dan Penerimaan Pajak Hotel (Y) sebagai variabel dependennya. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang menggunakan deret berkala (*time series*) atau data runtun waktu empat tahun yaitu tahun 2011 – 2015. Data jumlah wisatawan, jumlah hotel di peroleh langsung dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Sedangkan, data penerimaan pajak hotel di peroleh langsung dari Dinas Pendapatan

Daerah Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi karena data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yaitu Data jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan laju inflasi dan data penerimaan pajak hotel yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode analisis regresi linier berganda. Bentuk umum dari model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \epsilon_i$$

Keterangan :

- Y : Penerimaan Pajak Hotel
- X1 : Jumlah Wisatawan
- X2 : Jumlah Hotel
- α : Konstanta
- β_1 - β_3 : Koefisien regresi ϵ_i : *Error*

HASIL PENELITIAN

4.2.1 Deskripsi Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Penerimaan Pajak Hotel

Jumlah wisatawan ada yang menurun drastis dan ada juga peningkatan. Bisa dilihat pada tabel 4.1, pada tahun 2012 jumlah wisatawan menurun drastis tetapi perlahan tahun 2013 sampai 2014 meningkat setiap tahunnya walaupun kembali menurun di tahun 2015. Jumlah hotel ada yang bertambah setiap tahunnya dan ada pun yang tetap. Seperti pada

tabel 4.1. Berbeda dengan penerimaan pajak hotel, untuk setiap tahunnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Hotel, Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel

Tahun	Jumlah Wisatawan (X1) (Orang)	Jumlah Hotel (X2) (Satuan)	Penerimaan Pajak Hotel (Y) (Rp)
2011	1430107	134	18.596.699.903
2012	1386743	136	19.862.054.472
2013	1667117	138	30.720.894.276
2014	1828207	138	38.869.545.560
2015	1732303	140	43.539.617.438

Sumber : data diolah 2017

4.4.3 Uji Persial (Uji T)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable bebas dengan varuabel terikat secara persial. Pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 22.0. Berdasarkan data-data yang diperoleh di dapat hasil sebagai berikut:

1. H_1 : Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.
2. H_2 : Jumlah Hotel berpengaruh porsitif terhadap penerimaan pajak hotel

Hasil analisis dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-	144944145			
	36290115	252.696		-2.504	.129
	3502.843				
JumlahWisatawan	29789.419	14030.628	.515	2.123	.168
JumlahHotel	25166972	118365684	.516	2.126	.167
	03.174	9.292			

a. Dependent Variable: PenerimaanPajakHotel

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah wisatawan (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 2.123 nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,782 dan nilai Sig t sebesar 0,168 lebih besar dari 0,05. Maka $H_{a1.1}$ ditolak dan $H_{01.1}$ diterima, Hal ini juga menjelaskan bahwa secara parsial jumlah wisatawan (X1) berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Y).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Hotel (X2) memiliki t_{hitung} sebesar 2,126 nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,782 dan nilai Sig t sebesar 0,167 lebih besar dari 0,05 Maka $H_{a1.2}$ diterima dan $H_{01.2}$ ditolak Hal ini juga menjelaskan bahwa secara parsial jumlah hotel (X2) berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (Y).

4.4.4 Uji Simultan (Uji F)

Uji hipotesis simultan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (X) secara bersama – sama terhadap variabel dependen (Y) (Sanusi, 2011). Hasil pengujian dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Table 4.8
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47396819		23698409		
		30621628		65310814	22.73	
		60000.00	2	30000.00	2	.042 ^b
		0		0		
	Residual	20849902		10424951		
		44305180	2	22152590		
		0000.000		0000.000		
	Total	49481809				
		55052147	4			
		00000.00				
		0				

a. Dependent Variable: PenerimaanPajakHotel

b. Predictors: (Constant), JumlahHotel, JumlahWisatawan

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai f_{hitung} sebesar 22,732 (Sig f =0,042), sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata (α) sebesar 5% serta $df1 = k - 1$ dan $df2 = n - k$ yaitu $df1 = 2$ dan $df2 = 12$ adalah sebesar 3,82 sehingga, $f_{hitung} >$ daripada f_{tabel} ($22,732 > 3,82$) dan Sig f $<$ 0,05 ($0,042 < 0,05$). Dengan demikian H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak yang berarti secara bersama – sama variabel jumlah wisatawan (X1), jumlah hotel (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel (Y).

PEMBAHASAN

a) Pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Dari hasil uji T pada tabel 4.6 diketahui bahwa variabel jumlah wisatawan (X1) memiliki t_{hitung} sebesar 2.123 nilai ini lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1,782 dan nilai Sig t sebesar 0,168 lebih besar dari 0,05. Maka H_1 yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan

berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang diterima. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Menurut penelitian Aldo Adam (2013), tetapi berbeda dengan hasil penelitian Novia Leoni (2015) yang menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan yang menginap di hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Manado.

Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, karena biaya pajak hotel yang berasal dari 10 % dari penghasilan atau/pelayanan hotel terhadap pengunjung hotel yang berasal dari wisatawan nusantara maupun mancanegara, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Pasal 7 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Hotel seperti pada contoh :

Harga per kamar = Rp. 500.000

2 orang tamu untuk 1 kamar (double bed) = 1 pasang x Rp. 500.000 = Rp. 500.000

Jumlah Pajak Hotel = Rp. 500.000 x 10% = Rp. 50.000..

Jadi dapat di simpulkan pajak hotel Kota Palembang dapat di pengaruhi oleh tingkat hunian hotel yang berasal dari wisatawan yang menginap di hotel. Sehingga dapat dipastikan pertumbuhan jumlah wisatawan di Kota Palembang dipastikan akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

b) Pengaruh jumlah Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap penerimaan pajak

hotel. Dari hasil uji T pada tabel 4.6 diketahui bahwa variabel Jumlah Hotel (X2) memiliki t_{hitung} sebesar 2.126 nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 1,782 dan nilai Sig t sebesar 0,167 lebih kecil dari 0,05 Maka H_{a1.2} yang menyatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang diterima dan H_{01.2} yang menyatakan bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang ditolak. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian Novia Leoni Supit (2015), tetapi berbeda dengan hasil penelitian Satria Adi Nugraha(2012) yang menyatakan bahwa jumlah hotel, tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.

Jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang dikarenakan tingkat pembangunan hotel di Kota Palembang yang cukup meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa permintaan akan tempat menginap (Hotel) cukup besar sehingga penerimaan dari pajak hotel juga akan meningkat. Usaha perhotelan dapat menunjang kegiatan para wisatawan dalam melakukan perjalanan mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata dan membutuhkan tempat untuk menginap, makan dan minum serta hiburan di karenakan Kota Palembang telah menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang memiliki tempat tempat pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri. Jika kebutuhan akan hotel terus meningkat, maka dapat dipastikan pertumbuhan jumlah

hotel di Kota Palembang dipastikan akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

c) Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang secara simultan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai f_{hitung} sebesar 22,732 ($Sig f = 0,042$), sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf nyata (α) sebesar 5% serta $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$ yaitu $df_1 = 2$ dan $df_2 = 12$ adalah sebesar 3,82 sehingga, $f_{hitung} >$ daripada f_{tabel} ($22,732 > 3,82$) dan $Sig f < 0,05$ ($0,042 < 0,05$). Dengan demikian H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak yang berarti secara bersama – sama variabel jumlah wisatawan (X_1), jumlah hotel (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel (Y). Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi R^2 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak hotel sebesar 95.8 %. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Aldo Adam (2013), tetapi berbanding terbalik dengan hasil penelitian Satria Adi Nugraha (2012) yang menyimpulkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Palembang dapat

mendorong peningkatan pertumbuhan jumlah hotel di Kota Palembang dan dengan meningkatnya jumlah hotel dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Palembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam pemungutan pajak hotel di Kota Palembang tahun 2011 – 2015 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel secara parsial, Sedangkan jumlah wisatawan juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini dikarenakan tingkat pembangunan hotel di Kota Palembang yang cukup meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa permintaan akan tempat menginap (Hotel) yang berasal dari wisatawan cukup besar sehingga penerimaan dari pajak hotel juga akan meningkat.
2. Jumlah wisatawan, jumlah hotel, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Palembang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan jumlah hotel di Kota Palembang dan dengan meningkatnya jumlah hotel dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Palembang.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Palembang maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Palembang untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan cara meningkatkan pembangunan jumlah tempat wisata dan memperbaiki tempat wisata yang sudah ada, serta harus lebih sering mengadakan kegiatan (*event – event*) baik nasional maupun internasional di Kota Palembang,
2. Bagi penyedia jasa hotel di Kota Palembang agar tetap meningkatkan pelayanan terhadap jasa hotel baik secara personal maupun fasilitas yang diberikan kepada tamu yang menginap sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada tamu yang menginap di hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Aldo 2013, *Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel*, Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Aliandi, Vidya Anggitasari 2013, *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

<http://dedyhuang.com/2016/08/10/LRT-Palembang-Transfortasi-baru-milik-wongito-galo/>

http://id.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah

<http://www.kajianpustaka.com/245/06/pendapatan-asli-daerah-PAD.html>

Mardiasmo 2016, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Jakarta

Nugraha, Satria Adi 2012, *Analisis pada Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel*, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2010, 2010, *Tentang Pajak Hotel*, Bagian Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Republkc Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 *tentang definisi pajak hotel*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 2004, *tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah*.

Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, 2009, *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, 2009, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Supit, Novia Leoni 2015, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado*. Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulagi, Manado.

Sanusi, Anwar 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Sabatini, Rifqi 2012, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Hotel di Kota Semarang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Dipenegoro Semarang

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAPALEMBANG)**

Beni Febri¹, Hasan Kuzery², Yeni Widyanti²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el : benifeb@gmail.com¹, hasankuzery@binadarma.ac.id²,
yeniwidyanti@binadarma.ac.id²

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness and contribution of street lighting tax revenue to the local tax revenue the city of Palembang. The problem in this research is How Effectiveness and Contributions Tax Revenues and Non PLN Road Illumination PLN Against Local Tax Revenue in the Regional Revenue Office Palembang. The data is the data observe local tax revenues, especially tax revenues street lighting during the years 2012 to 2016. The data analysis is quantitative descriptive analysis, with formula effectiveness contribution of street lighting tax based on tax revenues street lighting. The results of the discussion can be seen that tax revenue has been very effective street lighting, this indicates that the Regional Revenue Office Palembang considered to be very effective in managing street lighting tax revenue. While the contribution of street lighting tax revenue remains low or enough to contribute to local tax revenue the city of Palembang, means the ability of taxpayers to pay taxes in the city of Palembang is still low. In connection with this, the Regional Revenue Office Palembang in order to enhance the contribution of street lighting tax PLN and Non PLN towards realization of revenue from local taxes, by raising more services to consumers of electricity and identify objects taxes related to street lighting tax to the maximum in order to develop the region and welfare of the community.*

Keywords : Street Lighting Tax. Local Tax Revenue

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Data yang amati merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya penerimaan pajak penerangan jalan selama tahun 2012 hingga tahun 2016. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan perhitungan efektivitas kontribusi pajak penerangan jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak penerangan jalan. Hasil pembahasan dapat diketahui bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sudah sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan masih rendah atau cukup berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang, artinya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Palembang masih rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, dengan cara meningkatkan lagi pelayanan kepada konsumen listrik dan mengidentifikasi objek pajak yang terkait dengan pajak penerangan jalan secara maksimal guna untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Penerimaan Pajak Daerah

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah

ditetapkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Undang-undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti atas Undang-undang No 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah menetapkan bahwa pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu, pendapatan bersumber dari PAD, Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun PAD dapat bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pajak Daerah dan Restribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, dimana Pajak Daerah dan Restribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Pajak Daerah yang dikelola daerah meliputi 12 (dua belas) jenis penerimaan daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan PLN, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai tindak lanjut atas pajak penerangan jalan.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun 2012 s/d 2016

PAJAK DAERAH	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.Pajak Hotel	19.851.876.671,20	30.720.894.276,20	38.869.545.560,00	45.539.617.438,00	52.346.963.653,00
2.Pajak Restoran	31.594.733.209,30	35.926.603.685,26	45.527.716.420,82	57.718.132.607,00	70.544.503.680,00
3.Pajak Hiburan	7.438.853.578,00	7.706.129.728,00	10.846.608.407,00	12.608.936.834,00	16.940.474.310,00
4.Pajak Reklame	9.182.077.878,00	8.232.395.642,26	14.185.516.850,50	15.318.876.606,00	16.567.211.469,38
5.Pajak Penerangan Jalan PLN	77.971.321.821,00	94.671.200.935,00	115.097.485.053,00	134.093.161.585,00	138.836.706.156,00
6.Pajak Penerangan Jalan Non PLN	3.692.941.801,00	2.833.147.668,00	4.095.070.814,00	4.508.080.811,00	5.786.841.229,00
7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.488.299.956,00	815.453.071,00	276.239.933,00	652.114.844,00	691.787.625,00
8.Pajak Parkir	6.566.830.322,00	15.243.492.916,40	18.102.433.974,00	21.117.176.973,00	24.783.105.599,00
9.Pajak Air Bawah Tanah	7.355.000,00	8.550.000,00	9.549.000,00	10.300.905,00	22.553.728,00

10.Pajak Sarang Burung Walet	31.960.000,00	31.965.000,00	26.400.000,00	64.109.000,00	68.450.001,00
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	76.134.848.215,00	79.673.835.193,00	83.810.426.995,00	97.443.811.213,00	117.558.226.402,00
12.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	99.143.722.955,00	80.867.194.759,00	132.727.606.144,00	92.038.580.407,00	92.405.857.197,00
TOTAL	333.104.821.406,50	356.730.194.759,00	463.574.599.151,32	479.112.899.223,00	536.552.681.049,38

Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2016

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat dari dua belas (12) jenis pajak daerah dalam lima (5) tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan 2016, jenis pajak daerah pajak penerangan jalan yang rata-rata setiap tahun nya mengalami peningkatan. Maka dari itu pemerintah juga perlu memperhatikan penerimaan pajak penerangan jalan guna untuk meningkatkan perkembangan pemerintahan daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah di kota Palembang. Karena pajak daerah memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dimana Penerimaan Pajak Daerah merupakan cermin kemandirian suatu daerah, diantaranya Pajak Penerangan Jalan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih judul sebagai berikut : **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?”

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

2.1.2 Jenis- jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang- undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Restribusi Daerah. Jenis- jenis pendapatan pajak dibagi menjadi:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Kendaraan di atas Air,
 - e. Pajak Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan PLN,
 - f. Pajak Penerangan Jalan Non PLN,
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - h. Pajak Parkir,
 - i. Pajak Air Bawah Tanah,
 - j. Pajak Sarang Burung Walet,
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
 - l. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pajak Penerangan Jalan

2.2.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan

Pengertian Pajak Penerangan Jalan menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 menyatakan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PPJ

di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN

Berdasarkan Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan, Pemungutan PPJ di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Tentang Pajak Penerangan Jalan.
5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten./Kota.

2.2.3 Subjek Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN

Berdasarkan Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

2.2.4 Objek Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN

Berdasarkan Perda Kota Palembang No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan meliputi sendiri sebagaimana dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

2.2.5 Bukan Objek Penerangan Jalan / Non PLN

Pada PPJ, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Berdasarkan Perda Kota Palembang No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan yang tidak termasuk Objek Pajak Penerangan Jalan, adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Yang memiliki kapasitas pemakaian janset diatas 200 kva, contohnya Pusri, Pertamina dan Pabrik Karet.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.5.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

2. Nilai Jual Tenaga Listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota.

Tarif Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Perda Kota Palembang No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan pelayanan:
 - Golongan sosial murni sebesar 5% (lima persen)
 - Golongan sosial komersil sebesar 7 % (tujuh persen)
- b. Untuk keperluan pelayanan rumah tangga ditetapkan sebagai berikut:
 - Rumah tangga 1
 - Rumah Tangga 1A (450 VA dan 900 VA) sebesar 5% (lima persen).
 - Rumah tangga 1B (1300 VA) sebesar 6% (enam persen).
 - Rumah tangga 2 (2200 VA s/d 6600 VA) sebesar 8% (delapan persen).
 - Rumah tangga 3 (>6600 VA) sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Untuk keperluan bisnis sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

e. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 Besarnya Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak penerangan jalan dengan dasar pengenaan nilai jual tenaga listrik.

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang di Jalan Merdeka No. 21 Kecamatan Ilir Barat Palembang.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti cara survei, cara observasi, dan cara dokumentasi (Sanusi, 2014: 105). Disini penulis menggunakan cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data bahan bacaan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

3.2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang

akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2014: 115). Teknik penelitian data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek tertentu berdasarkan data yang ada, kemudian dikumpulkan, diklarifikasikan, dan dianalisis. Deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan dengan data angka- angka (rumus) sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembahasa

4.1.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pembahasan ini akan menjelaskan perhitungan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2012 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 77.971.321.821,00 dan Rp 3.692.941.801,00. Dan target pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 64.684.977.420,00 dan Rp 2.547.473.200,00. Untuk menghitung efektivitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Efektivitas Penerimaan PPJ Per Periode}}{\text{Target Penerimaan Pajak PPJ Per Periode}} \times 100\%$$
$$= \frac{\text{Rp } 77.971.321.821,00 + \text{Rp } 3.692.941.801,00}{\text{Rp } 64.684.977.420,00 + \text{Rp } 2.547.473.200,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 81.664.263.622,00}{\text{Rp } 67.232.450.620,00} \times 100\% = 121,46\%$$

Persentase pajak penerangan jalan PLN Non PLN sebesar 121,46%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN pada tahun 2012 adalah sangat efektif.

- b. Pada tahun 2013 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 94.671.200.935,00 dan Rp 2.833.147.668,00 dan target pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 73.600.935.922,00 dan Rp 2.136.435.000,00. Untuk menghitung efektivitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Efektivitas Penerimaan PPJ Per Periode}}{\text{Target Penerimaan Pajak PPJ Per Periode}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 94.671.200.935,00 + \text{Rp } 2.833.147.668,00}{\text{Rp } 73.600.935.922,00 + \text{Rp } 2.136.435.000,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 97.504.348.603,00}{\text{Rp } 75.737.370.922,00} \times 100\% = 128,74\%$$

Persentase pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar 128,74%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN pada tahun 2013 adalah sangat efektif.

- c. Pada tahun 2014 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 115.097.485.053,00 dan Rp 4.095.070.814,00 dan target pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 100.300.000.000,00 dan Rp 2.800.000.000,00. Untuk menghitung efektivitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Efektivitas Penerimaan PPJ Per Periode}}{\text{Target Penerimaan Pajak PPJ Per Periode}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 115.097.485.053,00 + \text{Rp } 4.095.070.814,00}{\text{Rp } 100.300.000.000,00 + \text{Rp } 2.800.000.000,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 119.192.555.867,00}{\text{Rp } 103.100.000.000,00} \times 100\% = 115,60\%$$

Persentase pajak penerangan jalan Non PLN sebesar 115,60%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN pada tahun 2014 adalah sangat efektif.

- d. Pada tahun 2015 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 134.093.161.585,00 dan Rp 4.508.080.811,00 dan target pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 125.154.931.000,00 dan Rp 3.600.000.000,00. Untuk menghitung efektivitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Efektivitas Penerimaan PPJ Per Periode}}{\text{Target Penerimaan Pajak PPJ Per Periode}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 134.093.161.585,00 + \text{Rp } 4.508.080.811,00}{\text{Rp } 125.154.931.000,00 + \text{Rp } 3.600.000.000,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 138.601.242.396,00}{\text{Rp } 128.754.931.000,00} \times 100\% = 107,64\%$$

Persentase pajak penerangan jalan Non PLN sebesar 107,64%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN pada tahun 2015 adalah sangat efektif.

- e. Pada tahun 2016 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 138.836.706.156,00 dan Rp 5.786.841.229,00 dan target pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 137.244.450.248,60 dan

Rp 5.600.000.000,00. Untuk menghitung efektivitas realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Efektivitas Penerimaan PJJ Per Periode}}{\text{Target Penerimaan Pajak PJJ Per Periode}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 138.836.706.156,00 + \text{Rp } 5.786.841.229,00}{\text{Rp } 137.244.450.248,60 + \text{Rp } 5.600.000.000,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 144.623.547.385,00}{\text{Rp } 142.844.450.248,60} \times 100\% = 101,24\%$$

Persentase pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar 101,24%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN pada tahun 2016 adalah sangat efektif.

Dilihat dari perhitungan di atas yaitu tahun 2012 sampai dengan 2016 penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sudah sangat efektif hal itu terjadi karena adanya tindakan- tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu melakukan sosialisasi mengenai arti penting dari pajak penerangan jalan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen listrik dengan memperbanyak agen pembayaran listrik untuk mempermudah masyarakat dalam membayar rekening listrik.

4.1.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pembahasan ini akan menjelaskan perhitungan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun 2012 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 77.971.321.821,00 dan Rp 3.692.941.801,00 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 333.104.821.406,80. Untuk menghitung kontribusi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Kontribusi Penerimaan PJJ PLN dan Non PLN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 77.971.321.821,00 + \text{Rp } 3.692.941.801,00}{\text{Rp } 333.104.821.406,80} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 81.664.263.622,00}{\text{Rp } 333.104.821.406,80} \times 100\% = 24,51\%$$

Persentase kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 24,51%, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2012 adalah cukup berkontribusi.

b. Pada tahun 2013 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 94.671.200.935,00 dan Rp 2.833.147.668,00 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 357.230.028.259,12. Untuk menghitung kontribusi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Kontribusi Penerimaan PJJ PLN dan Non PLN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 94.671.200.935,00 + \text{Rp } 2.833.147.668,00}{\text{Rp } 357.230.028.259,12} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 97.504.348.603,00}{\text{Rp } 357.230.028.259,12} \times 100\% = 27,29\%$$

Persentase kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 27,29%, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2013 adalah cukup berkontribusi.

- c. Pada tahun 2014 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 115.097.485.053,00 dan Rp 4.095.070.814,00 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 463.574.599.151,32. Untuk menghitung kontribusi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Kontribusi Penerimaan PJJ PLN dan Non PLN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 115.097.485.053,00 + \text{Rp } 4.095.070.814,00}{\text{Rp } 463.574.599.151,32} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 119.192.555.867}{\text{Rp } 463.574.599.151,32} \times 100\% = 25,71\%$$

Persentase kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 25,71%, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2014 adalah cukup berkontribusi.

- d. Pada tahun 2015 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 134.093.161.585,00 dan Rp 4.508.080.811,00 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 479.112.899.223,00. Untuk menghitung kontribusi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Kontribusi Penerimaan PJJ PLN dan Non PLN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 134.093.161.585,00 + \text{Rp } 4.508.080.811,00}{\text{Rp } 479.112.899.223,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 138.601.242.396,00}{\text{Rp } 479.112.899.223,00} \times 100\% = 28,92\%$$

Persentase kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 28,92%, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2015 adalah cukup berkontribusi.

- e. Pada tahun 2016 realisasi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sebesar Rp 138.836.706.156,00 dan Rp 5.786.841.229,00 dan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 536.552.681.049,38. Untuk menghitung kontribusi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN dengan menggunakan rumus yaitu:

$$= \frac{\text{Kontribusi Penerimaan PJJ PLN dan Non PLN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 138.836.706.156,00 + \text{Rp } 5.786.841.229,00}{\text{Rp } 536.552.681.049,38} \times 100\%$$
$$= \frac{\text{Rp } 144.623.547.385,00}{\text{Rp } 536.552.681.049,38} \times 100\% = 26,95\%$$

Persentase kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebesar 26,95%, hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada tahun 2016 adalah cukup berkontribusi.

Dilihat dari perhitungan di atas yaitu tahun 2012 sampai dengan 2016 kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN sudah cukup berkontribusi itu artinya masih bisa ditingkatkan menjadi berkontribusi atau sangat berkontribusi. Hal itu terjadi karena masih kurangnya kesadaran konsumen listrik dalam melunasi rekening listrik nya tepat waktu.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN di kota Palembang adalah sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan.

2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kota Palembang adalah pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN cukup berkontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dimana pajak penerangan jalan adalah jenis pajak daerah paling tertinggi diantara semua penerimaan pajak daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan PLN dan Non PLN terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, dengan cara meningkatkan lagi pelayanan kepada konsumen listrik dan mengidentifikasi objek pajak yang terkait dengan pajak penerangan jalan secara maksimal guna untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Dispenda. 2011. *Realisasi Analisis Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Hadidia & Rismansyah) 63 Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 1998 s/d 2011*. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Palembang.
- Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. 2013. *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Monginsidi) Penerimaan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 s/d 2012*. Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa.
- Dinas PPKAD di Kabupaten Tegal. 2015. *Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Awaliyah) Penerimaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun*

2011 s/d 2014. Dinas PPKAD di Kabupaten Tegal.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomin dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bina Darma. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bina Darma. Palembang.*

Sanusi, Anwar.2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat: Jakarta.

Indra Riady. 2010. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro. Semarang.

Halim & Kusufi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 tahun 2010 Kota Palembang tentang Pajak Penerangan Jalan.

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak. Edisi 6*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

ANALISIS TRANSPARANSI DAN MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PURWOSARI DAN PILIP SATU KARET DI KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN (MUBA)

David Sundika¹ . Henni Indriyani² . Rolia Wahasusmiah³

¹Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang

^{2,3}Dosen Universitas Bina Darma Palembang

Jalan Jendral Ahmad Yani No.12 Palembang

Email : davidsundika16@yahoo.co.id¹ . henniinayah@gmail.com² . rolia.wahasusmiah@ac.id³

Abstract : This study focuses on the mechanism of the system, which is a form of accountability for the management of public funds by government committed from the planning, implementation, accountability, and oversight of the management of the Village Fund Allocation. This research was conducted at two villages in the subdistrict of Lais at the village Purwosari and village Pilip Satu Karet. The data collection is done by direct observation in the field. This study shows that at the planning and execution of the village Purwosari and Pilip Satu Karet accordance with the applicable procedures and management has been conducted in a transparent though not maximized. For the monitoring stage is still not running well because of the lack of transparency to the public. , As for the stage of accountability are not going well because of the Human Resources executive team in creating a report that the administration is still lacking, so it is necessary to guidance and supervision over local governments.

Keywords : Mechanism, Transparency, Village Fund Allocation

Abstrak : Penelitian ini memfokuskan pada sistem mekanisme, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada dua desa di wilayah Kecamatan Lais pada Desa Purwosari dan Desa Pilip Satu Karet. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pada desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta pengelolaannya telah dilakukan secara transparan meskipun belum maksimal. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. . Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Kata Kunci : Mekanisme, Transparansi, Alokasi Dana Desa

I PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam PP No. 72 tahun 2005, yang menyatakan bahwa salah satu sumber

keuangan Desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memberikan pembiayaan program pemerintah desa dalam melaksanakan

kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan kemampuan masyarakat lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

Ada dua prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, pertama prinsip transparansi dan keterbukaan, transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan- pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Kedua, mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) semua kegiatan harus mempertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum dan dilaksanakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Kecamatan Lais desa Purwosari dan Desa Pilip Satu Karet. Karena kedua desa ini adalah salah satu desa yang melaksanakan alokasi dana desa. Pada kedua desa ini terdapat permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). Seperti kemampuan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) baik dalam unsur pemerintahan desa maupun lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya Kurangnya transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga menimbulkan opini-opini masyarakat pada kegiatan alokasi dana desa (ADD) tersebut seperti adanya tindak korupsi yang dilakukan pemerintah desa karena kurangnya komunikasi dari tim pelaksana, atau pemerintah desa terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dan desa (ADD) dalam mewujudkan transparansi dan mekanisme di desa Purwosari dan desa Pilip Satu Karet Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).

II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Desa

Pengertian desa menurut undang-undang RI No 6 tahun 2014 tentang desa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa. Nurcholis (2011:4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

2.1.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

2.1.3 Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;

8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha

2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah

terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

2.3.3 Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan ADD

2.4 Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Rata-rata dana provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

1. 30% untuk jumlah penduduk.
2. 20% untuk luas wilayah.
3. 50% untuk angka kemiskinan.

Mekanisme penyusunan dan perencanaan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
- b. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun sekretaris desa meliputi:
 1. Naskah APBDesa.
 2. Lampiran I Ringkasan APBDesa.
 3. Lampiran II Rincian APBDesa.
 4. Lampiran III Penjabaran APBDesa.
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa).
- c. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan.
- d. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari:
 1. Naskah APBDesa.
 2. Lampiran I Ringkasan APBDesa.
 3. Lampiran II Rincian APBDesa.
 4. Lampiran III Penjabaran APBDesa.Untuk selanjutnya, dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan.

- e. Perancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan sebagai peraturan daerah.
- f. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD.
- g. Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, kepala desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- h. Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan bupati melalui camat.

2) Tahap Evaluasi

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui oleh bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lama tiga hari kerja harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk di evaluasi.
- b. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan

paling lama dua puluh (20) hari kepada kepala desa.

3) Tahap Penetapan

- a. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, kepala desa bersama BPD melakukan penyesuaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.
- b. Peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota bagian pemerintahan desa, serta tembusan inspektorat daerah, bagian Hukum dan Camat.

2.4.3. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa

Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat disatu pihak dan kegiatan pemerintah dipihak lain.

2.4.4 Mekanisme Pelaporan Keuangan

Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasi (MUBA) ini, memiliki dasar hukum yang meliputi, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 24 Juli 2007. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.4.5 Pelaporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri.
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.5 Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari integral atau bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD.

2. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
3. Semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Dilaksanakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

2.5.1 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai berikut :

1. Dari 30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi anggota BPD dan biaya tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Dari 70% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT.RW, PKK, Karang Taruna, Linmas dan sebagainya.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui transparansi dan mekanisme pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian adalah Desa Purwosari dan Desa Pilip 1 Karet Kecamatan Lais (jalan Palembang- Sekayu km 72) Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).

3.3 Sumber dan Teknik PengumpulanData

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya melalui metode :

- Observasi

Yaitu mengadakan langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan.

- Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan staf-staf dan pihak-pihak internal yang berwenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah di olah lebih lanjut oleh orang lain melalui riset perpustakaan, buku-buku, dan lain-lain. Contohnya studi pustaka yaitu dengan memperoleh data -data yang bersifat teori didapat dari beberapa buku

dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada. Dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam hal ini Desa Purwosari Dan Pilip Satu Karet Kecamatan Lais Kabupaten Musibnyuasin (MUBA).

4. PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dan Desa (ADD)

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat di jabarkan secara berikut:

- a. Kepala desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa dengan membahas rencanaan penggunaan ADD.
 - a) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa , dan tokoh masyarakat serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi kecamatan.
 - b) Tim pelaksana desa menyampaikan

rancangan-rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah, rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musyawarah tahun sebelumnya.

- c) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya terhadap yang memberikan kesepakatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

1. Hasil wawancara dengan sekertaris desa, Tim pelaksana, BPD mengenai perencanaan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Purwosari Kecamatan Lais Kabupaten Musi Bayuasin (MUBA).

Wawancara dengan sekertaris desa bapak Eko Hermanto,SE :

“Sekdes membuat undangan musyawarah yang mana kegiatan musyawarah tersebut masyarakat diberikan hak untuk mengusulkan pembangunan apa saja yang akan dilakukan pada tahun itu. musyawarah dihadiri oleh BPD, LPM dan tokoh masyarakat, hasil dari musyawarah akan di buat berita acara oleh sekdes yang akan di setujui oleh BPD”.

Ungkapan lain dari bapak Angkara (22 oktober 2016) sebagai ketua tim pelaksana :

“Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa ini melalui musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan anggota BPD. Tujuan dari hasil musyawarah ini adalah untuk membuat rencana kegiatan pembangunan desa yang akan digunakan sebagai arah pembangunan yang akan direalisasikan”.

Wawancara dengan Bapak Sabarudin selaku Ketua BPD pada hari Jum’at 21 Oktober 2016 pk. 20.00 WIB :

“Pada alokasi dana desa ini perencanaan yang dilakukan yaitu kami sebagai BPD menyetujui hasil musyawarah yang dilakukan perangkat desa yang dibuat program-program yang akan dilaksanakan”.

2. Selanjutnya wawancara tentang perencanaan pengelolaan dilakukan sekdes desa Pilip Satu Karet, Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Iskandar (Wawancara, 23 Oktober 2016 pk. 08.00 WIB) sebagai berikut.

“dalam pembuat perencanaan kepala desa terlebih dahulu membentuk TIM pelaksana. Dalam perencanaan kami bersama-sama dengan masyarakat melakukan musyawarah mengenai daftar urutan rincian kegiatan (DURK). masyarakat berhak memberikan masukan-masukkan dari daftar urutan rincian kegiatan (DURK) yang dibuat TIM Pelaksana dan jika daftar urutan rincian kegiatan (DURK) tersebut di setujui oleh

BPD dan kepala desa baru lah rencana pembangunan dapat dikerjakan.

Wawancara dengan informan selanjutnya dengan Bapak Agus Elan (23 Oktober 2016 pk. 10.00 WIB) sebagai ketua tim pelaksana menyampaikan bahwa :

“Pertama saya membuat daftar pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana ditunjukkan pada BPD dan kepala desa”

Bapak Johan Lasmana (Wawancara, 23 Oktober 2016 pk. 14.00 WIB) selaku ketua BPD menambahkan :

“Kami dari pihak BPD di undang dalam musyawarah yang dimana membahas program-program yang akan di realisasikan serta biaya-biaya yang diperkirakan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah melakukan perencanaan sesuai dengan Permandakri nomor 113 tahun 2014 tentang mekanisme perencanaan, yaitu dilakukannya musyawarah yang dihadiri perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, yang dibuktikan dari daftar hadir rapat desa sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah undangan 41 dan jumlah undangan yang hadir 34 dengan persentase 82,93% sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat desa Pilip Satu Karet cukup tinggi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Mekanisme pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Musi Banyuwasin harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
1. Hasil wawancara yang dilakukan kepada sekdes, tim pelaksana, BPD pada desa Purwosari.

Wawancara dengan bapak Eko Hermanto., SE selaku sekretaris desa (22 oktober 2016) :

“Dalam pelaksanaan ini TIM Pelaksana bertanggungjawab terhadap program yang telah direncanakan. TIM Pelaksana membuat laporan tentang informasi yang berhubungan dengan dana desa”.

Wawancara bersama ketua tim pelaksana Bapak Angkara tanggal 21 oktober 2016 yaitu :

“Sesuai berita acara yang telah di sepakati dana yang dianggarkan dalam pembangunan, dan akan dilaksanakan nya kegiatan kegiatan pembangunan setiap dana yang dialokasikan akan di buat laporan, kami diwajibkan untuk membuat papan pengumuman yang diletakan di depan tempat pembangunan. Yang berisi segala kegiatan dan dana dana yang telah direalisasikan”.

Wawancara selanjutnya di lakukan dengan ketua BPD Bapak Sabarudin sebagai berikut 22 oktober 2016 sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan dan desa ini yang bertanggungjawab penuh adalah kepala desa yang dimana kami melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana desa”.

2. Hasil wawancara desa Pilip Satu Karet peneliti melakukan wawancara kepada perangkat desa, BPD, tim pelaksana.

Wawancara dengan sekdes bapak Iskandar (23 oktober 2016) :

“Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tim pelaksana berperan

penting dalam penyelenggaraan pembangunan, yang dimana dana dikelolah 30% untuk biaya operasional desa dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masarsakat”

Pernyataan dari informan lain nya yaitu ketua Tim pelaksan Agus Elan pada tanggal 26 Oktober 2016 yaitu:

“Pertama kali tim pelaksana menyiapkan papan pengumuman, setiap penggunaan anggaran diikutsertakan bukti kwuitansi di laporkan pada papan pengumuman dan tak lupa tim pelaksana melibatkan langsung masyarakat sebagai kuli atau pekerja”.

Hasil wawancara Ketua BPD bapak Johan Lasmana (23 oktober 2016) sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan bpd sebagai tim pengawasan, bpd berpadoman dari berita acara yang telah disepakati”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kedua desa ini sudah menjalankan pengelolaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, tetapi tidak keseluruhan karena mereka hanya transparan dengan pengelolaan dana desa berupa bangunan saja

Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib;

1. Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada bupati/walikota;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun kepada bupati/walikota;
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD akhir tahun anggaran.

Hasil wawancara kepala desa purwosari bapak Mustamil Jali 20 oktober 2016 tentang pelaporan alokasi dana desa.

“Dari bendahara tim pelaksana ADD dibuat pelaporan yang akan diberikan ke bendahara seterusnya bendahara membukukan, buku kas pembantu umum, dilengkapi bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan akan dilaporkan pada kabupaten”.

Hasil wawancara tentang Pelaporan alokasi dana desa yang diungkapkan kepala desa Pilip Satu Karet Bapak Zuhri Zaini pada tanggal 21 oktober 2016 sebagai berikut :

“Jika tahap pertama telah selesai 40% langsung dilaporkan ke pemerintah kabupaten dan seterusnya”.

Berdasarkan pernyataan Peraturan Permendagri di atas dari hasil wawancara kepada kepala desa Purwosari dan desa Pilip Satu Karet tentang pelaporan keuangan desa didapatkan penjelasan bahwa laporan keuangan yang terealisasi dilaporkan kepada pemerintah kabupaten dan pusat, pernyataan ini sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pelaporan keuangan

desa pada poin yang pertama dimana dijelaskan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di desa Purwosari dan Pilip Satu Karet mengenai transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dilakukannya wawancara ke masyarakat karena transparansi tidak hanya mendengarkan dari pihak perangkat desa tapi juga sesuai pendapat masyarakat.

Berbagai pendapat tentang transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa seperti yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat di Desa Purwosari Wawancara kepada masyarakat yang mengakui transparansi dan diikutsertakan dalam pengelolaan dana desa, hasil wawancara kemasyarakat sebagai berikut:

1. Bapak Gah selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa :
“Saya diundang dalam rapat desa, waktu itu penyampaian pengumuman tentang selesainya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan juga kami bisa melihat

hasil tersebut di papan pengumuman balai desa tentang penggunaan dana” (wawancara,tanggal 30 Oktober 2016)

2. Bapak Dono selaku tokoh masyarakat menambahkan:

“Saya waktu itu ikut dalam rapat desa dalam pembahasan Program Alokasi Dana Desa, banyak unsur pemerintahan yang dilibatkan dalam rapat tersebut termasuk RT” (wawancara, 2 November 2016)

Adapun masyarakat yang mengaku tidak pernah berpartisipasi atau dilibatkan dalam alokasi dana desa. Seperti pada wawancara tanggal 3 November 2016 berikut :

1. Bapak Awan menyatakan bahwa :
“Saya tidak tau apa itu ADD, sepertinya hanya beberapa tokoh masyarakat saja yang tau apa itu ADD” .
2. Ditambahkan oleh Bapak Samsi tanggal 3 November 2016 yang menyampaikan bahwa :
“Untuk proses pengambilan keputusan saya juga tidak tau mas, kan saya tidak dilibatkan dalam rapat”.
3. Bapak Hasyim menyampaikan bahwa :
“Hanya beberapa tokoh masyarakat, bapak RT,RW,Kasun dan BPD saja yang tau soal transparansi atau tidaknya Pemerintah Desa dalam melaksanakan program ADD, selebihnya ya saya tidak tau mas” (wawancara, 5 November 2016, pk. 20.30)
4. Ungkapkan dari Bapak Saparuddin :

“Saya pernah dilibatkan dalam keanggotaan program Alokasi Dana Desa, dimana waktu rapat desa saya dipilih sebagai anggota untuk memonitoring atau pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tapi setelah itu saya diganti oleh orang lain, tidak tau kenapa” (wawancara, 5 November 2016, pk. 09.30)

Hasil wawancara warga desa Pilip Satu Karet tentang transparansi yang di rasakan masyarakat ada pendapat positif dari masyarakat yang selalu terlibat seperti yang diungkapkan oleh :

1. Bapak Sudirman selaku tokoh masyarakat menyampaikan bahwa :

“Kami masyarakat sangat senang karena dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa kami selalu dilibatkan oleh Pemerintah Desa dalam kegiatan rapat desa, kami dilibatkan untuk mengikuti pembuatan keputusan, rencana, atau kebijakan Alokasi Dana Desa dan kami masyarakat bisa memberikan solusi kepada pemerintah desa apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat” (wawancara, 2 November 2016)

2. Bapak Ayub selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa:

“Saya berpartisipasi dalam rapat yang diselenggarakan pemerintah desa dek, dan juga ikut dalam program pembangunan sebagai kuli” (wawancara, 2 November 2016)

3. Adapun hasil Wawancara dengan Ibu Emi yaitu :

“Dalam kegiatan program Alokasi Dana Desa, kami ibu-ibuk PKK tidak dilibatkan dalam rapat desa ataupun musrenbang, bahkan kami pun tidak tau apa-apa soal program Alokasi Dana Desa itu” (wawancara, 7 November 2016, pk. 09.00)

4. Ditambahkan oleh Ibu Rici :

“saya tidak berpartisipasi mas, kan saya tidak dikasih kabar kalau ada rapat atau semacamnya”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi tetapi belum sepenuhnya mencakup masyarakat di desa Purwosari dan pilip satu karet kecamatan lais.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan program alokasi dana desa (ADD) pada desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa dibuktikan dengan adanya forum musyawarah dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengelolaan program alokasi dana desa (ADD) di desa Purwosari dan Pilip Satu Karet telah menerapkan transparansi walaupun belum maksimal.
3. Pertanggungjawaban baik secara teknis

maupun administrasi belum maksimal karena sumber daya manusia yang kurang memadai.

4. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa Purwosari dan Pilip Satu Karet ternyata mendapat respon tanggapan positif dan tanggapan negative dari masyarakat.

5.2 Saran

beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas maka untuk mencapai sasaran maksimal dalam pembangunan partisipasi masyarakat yang diimplementasikan melalui program alokasi dana desa perlu adanya pembenahan dalam beberapa hal berikut :

1. Melakukan pelatihan bagi perangkat desa selaku tim pelaksana desa tentang manajemen dan administrasi di desa Purwosari dan Pilip Satu Karet.

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban)

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, 1990. *Analisi Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa*. Universitas Jember.
- Arsjad,. Dkk. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta:Erlangga.
- Atmadja,. Dkk. 2003. *Akuntansi Manajemen Sektor Pablik*. Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ffaridah. 2015. *Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pndapatan Dan Belanja Desa(Apbdes)*. Universitas Surabaya.
- Hari sabarno. 2007. *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar.
- Kristianten. 2006. *Tranparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lalolo,. Loina K.P. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabel, Tranparansi, Dan Partisipasi, Sekreteriat Good Governance Badan Pembangunan Nasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M.Yoggy. 2016. *Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Binadarma.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Manulang. 1998. *Dasar Hukum Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Masudi, 2012. *Padoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Nordiawan,. Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Pablik. Edisi pertama*. Jakarta : Selamba Empat.
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Okta, R. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Perdesaan*. Universitas Brawijaya.
- Pemerintah Kabupaten MUBA. *Dokumen Pencairan Program ADD/K Desa Purwosari*. Kecamatan Lais.
- Pemerintah Kabupaten MUBA. *Dokumen Pencairan Program ADD/K Desa Pilip Satu Karet*. Kecamatan Lais.

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Desa Sebagai Dasar Hukum Yang Mengatur.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Dana Desa*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa.*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. *Pemerintahan daerah*
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widjaja, 2003. *Otonomi desa.* Jakarta : Erlangga.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Detia Okta Herian³, Ade Kemala Jaya¹, Septiani Fransisca²
Dosen Universitas Bina Darma^{1,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma³
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang

Sur-el : Jaya_ade@yahoo.com¹, septiani.fransisca@binadarma.ac.id², detiaokta@yahoo.com³

ABSTRACT : This study aims to determine how the soundness of banks listed on the stock exchanges of Indonesia, if evaluated using RGEC approach (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) in the year 2012-2015. This type of research is descriptive research with quantitative approach. The variables and measurements in this study consisted of RGEC factor (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). RGEC bank as a whole it can be said that VERY HEALTHY, aspects of the risk profile of banks to be in GOOD condition, GCG aspect in GOOD condition, Aspect Earning successive drops in EXCELLENT condition, Aspect Capital in EXCELLENT condition.

Keywords: bank soundness, the approach RGEC

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia, jika ditinjau menggunakan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) pada tahun 2012-2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel dan pengukuran pada penelitian ini terdiri dari faktor RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital). RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang SANGAT SEHAT, aspek risk profile bank berada dalam kondisi BAIK, Aspek GCG dalam kondisi BAIK, Aspek Earning berturut-turun dalam kondisi SANGAT BAIK, Aspek Capital dalam kondisi SANGAT BAIK.

Kata Kunci: tingkat kesehatan bank, pendekatan RGEC

1. PENDAHULUAN

Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam mendukung perekonomian adalah Perbankan. Bank mempunyai kegiatan seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang secara efektif dan efisien. Krisis perbankan kembali terjadi di Indonesia pada Tahun 2008. Penyebab terjadinya krisis bermula pada krisis ekonomi di Amerika Serikat yang menyebar kenegara-negara lain termasuk Indonesia Krisis berdampak sistematis terhadap sektor perbankan, sehingga tingkat bunga diturunkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Berulangya krisis perbankan terjadi karena

bank merupakan institusi kepercayaan yang rentan terhadap penarikan dana besar-besaran nasabah.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas kearah peningkatan rakyat bank. Tujuan perbankan untuk mengetahui bagaimana kondisi bank yang seharusnya dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin sakit.

Tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan operasi yang memenuhi kewajiban dengan baik melakukan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan. Penilaian bank didasarkan dengan laporan keuangan adalah laporan posisi perusahaan pada suatu titik waktu dan kegiatan operasinya selama beberapa periode tertentu (Brigham dan Houston,2010). Laporan keuangan juga dimaksud laporan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna laporan pihak manajemen yang bersangkutan. Adapun tujuan laporan keuangan memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sejumlah kalangan penggunaan pembuatan keputusan ekonomi. Dari laporan keuangan akan diketahui kondisi bank yang sebenarnya, kelemahan, dan kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan dapat dihitung dengan jumlah rasio yang benar untuk dijadikan penilaian tingkat kesehatan bank (Martani,2012).

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam menilai kesehatan bank saat ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI No.13/1/PBI/2011) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yaitu dengan menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*); dan Permodalan (*capital*) atau disingkat

menjadi metode RGEC. Penelitian mengambil objek penelitian pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan alasan tertarik dengan perusahaan di Bursa Efek Indonesia menjadi pelaku bisnis dinegara berkembang termasuk di Indonesi. Melihat peran bank sangat besar dalam perekonomian Indonesia dan perusahaan yang dikelola langsung oleh pemerintahan bank Bursa Efek Indonesia meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya secara maksimal sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Likuiditas atau bangkrutnya bank disebabkan oleh bangkrutnya bank akibat penarikan dana secara tiba-tiba

II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menjelaskan objek yang diteliti dengan cara memberikan deskripsi atau gambaran terhadap masalah yang telah diidentifikasi dan dilakukan secara intensif dan terinci terhadap suatu perusahaan. Variabel dan pengukuran ini berfungsi untuk membatasi informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi variabel dan pengukuran dalam penelitian ini adalah:

1. Risk profile

Penilaian faktor profile merupakan penilaian terhadap risiko dalam operasional bank. Risiko ini digunakan 8 risiko tetapi hanya

dua yang digunakan untuk menggunakan rasio keuangan yaitu :

- Cara menghitung *Non Performing Loan* (NPL)

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Sumber : Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Table 3.1

Klasifikasi Peringkat Komposit NPL

Peringkat	Predikat	Nilai Komposit
1	Sangat Baik	$\geq 2\%$
2	Baik	$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq \text{NPL} \leq 12\%$
5	Tidak Bain	$\text{NPL} > 12\%$

Sumber : Peraturan Bank Indonesia

- Cara menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Sumber : Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Table 3.2

Klasifikasi peringkat komposit LDR

Peringkat	Predikat	Nilai Komposit
1	Sangat Baik	$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$
2	Baik	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$

3	Cukup Bik	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$
4	Kurang Baik	$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$
5	Tidak Baik	$\text{LDR} > 120\%$

Sumber : Peraturan Bank Indonesia

2. Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Faktor *Good Corporate Governance* dengan menganalisis Laporan *Good Coporate Governance* berdasarkan atas aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum.

Tabel 3.3

Matrik kriteria penetapan peringkat *Good Corporate Governance*

No	Keterangan	Kriteria
1	Sangat baik	Memiliki NK < 1,5
2	Baik	Memiliki NK $1,5 \leq \text{NK} < 2,5$
3	Cukup baik	Memiliki NK $2,5 \leq \text{NK} < 3,5$
4	Kurang baik	Memiliki NK $3,5 \leq \text{NK} < 4,5$
5	Tidak baik	Memiliki NK $4,5 \leq \text{NK} < 5$

(Sumber : Zaini,2016)

3. Faktor *Earnings* (Rentabilitas)

Earning yaitu penilaian kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan rasio *Return on Aseets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM).

Cara perhitungan :

- ROA (*Return On Assets*)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset} \times 100\%}$$

Sumber : Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Tabel 3.4

Klasifikasi Peringkat Komposit ROA

Peringkat	Predikat	Nilai Komposit
1	Sangat Baik	> 1,5%
2	Baik	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Baik	0,5% < ROA ≤ 1,2%
4	Kurang Baik	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak Baik	ROA ≤ 0%

Sumber : Peraturan Bank Indonesia

- NIM (*Net Interest Margin*)

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif} \times 100\%}$$

Sumber : Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Tabel 3.5

Klasifikasi Peringkat Komposit NIM

Peringkat	Predikat	Nilai Komposit
1	Sangat Baik	> 3%
2	Baik	2% < NIM ≤ 3%
3	Cukup Baik	1,5% < NIM ≤ 2%
4	Kurang Baik	1% < NIM ≤ 1,5%
5	Tidak Baik	NIM ≤ 1%

Sumber : Peraturan Bank Indonesia

4. Faktor *Capital* (Permodalan)

Capital (permodalan), yaitu metode penilaian bank berdasarkan permodalan yang dimiliki bank dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*(CAR)

Cara perhitungan :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Sumber : Lampiran SE BI No.13/24/DPNP/2011

Table 3.6

Klasifikasi Peringkat Komposit CAR

Peringkat	Predikat	Nilai Komposit
1	Sangat Baik	> 12%
2	Baik	9% ≤ CAR < 12%
3	Cukup Baik	8% ≤ CAR < 9%
4	Kurang Baik	6% < CAR < 8%
5	Tidak Baik	CAR ≤ 6%

Sumber : Peraturan Bank Indonesia

5. Tingkat kesehatan bank

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86-100	PK 1	Sangat sehat
71-85	PK 2	Sehat
61-70	PK 3	Cukup Sehat
41-60	PK 4	Kurang sehat

<40 PK 5 Tidak sehat

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Data

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penilaian Kesehatan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015 meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profile Risiko (*Risk Profile*)

Rasio keuangan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari aspek *risk profile* pada penelitian ini dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus NPL dan risiko likuiditas dengan rumus LDR.

- *NPL (Net Performing Loan)*
Nilai rata-rata NPL bank umum BUMN selama tahun 2012-2015 berturut-turut adalah 4,81%, 3,48%, 2,53% dan 4,48%. Nilai NPL tersebut menunjukkan bahwa kualitas kredit bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia berada pada kondisi yang BAIK. Hal ini sesuai dengan matriks penetapan peringkat NPL dimana rasio NPL antara $2\% \leq NPL < 5\%$ masuk dalam kriteria BAIK. NPL yang diperoleh oleh bank yang Terdaftar

di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015 telah sesuai dengan standar Bank Indonesia yang menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) maksimal adalah sebesar 5%. Terlihat pula bahwa nilai NPL pada tahun 2013 dan 2014 lebih kecil dari tahun 2012 dan 2015. Nilai NPL yang semakin kecil menunjukkan bahwa bank semakin baik dalam menyeleksi calon peminjam sehingga jumlah kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet pun berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya manajemen dalam mengelola tingkat kolektibilitas dan menjaga kualitas kredit tiap tahunnya semakin baik dan memberikan hasil positif, sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan bukan sekedar pertumbuhan kredit yang tinggi dan agresif.

- *LDR (Loan to Deposit ratio)*
Nilai rata-rata LDR bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015 berturut-turut adalah 75,96%, 88,67%, 77,27% dan 76%. Terlihat bahwa pada tahun 2013 nilai LDR meningkat, namun ditahun 2012, 2013, dan 2015 masih berada dalam peringkat yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu BAIK, ditahun 2014 memiliki peringkat

CUKUP BAIK. Sehingga menunjukkan bahwa selama periode tersebut bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kemampuan yang BAIK dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Namun secara keseluruhan sebaiknya bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia perlu mengetatkan jumlah kredit yang disalurkan dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian pada tahun-tahun mendatang.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Tingkat kesehatan bank ditinjau dari nilai rata-rata *Good Corporate Governance* pada bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 bank di Bursa Efek Indonesia memperoleh nilai rata-rata GCG masing-masing sebesar 1,56, 1,84, 1,85, dan 1,90 dengan kriteria BAIK. Namun kriteria BAIK tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2015 kualitas manajemen bank di Bursa Efek Indonesia atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG telah berjalan dengan baik, sehingga pada empat tahun tersebut bank di Bursa Efek Indonesia pun tergolong bank yang terpercaya. Penerapan GCG yang baik akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* untuk melakukan transaksi pada bank yang bersangkutan, karena dengan melihat nilai GCG suatu bank *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi

apabila melakukan transaksi dengan bank tersebut.

3. *Rentabilitas (Earnings)*

Rasio keuangan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari aspek *earnings* pada penelitian ini dengan menggunakan dua indikator yaitu dengan menggunakan rumus ROA dan NIM.

- ROA (*Return On Asset*)

Nilai rata-rata ROA bank di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015 berturut-turut adalah 2,85%, 2,39%, 2,05%, dan 2,13. Terlihat bahwa ROA bank di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 meningkat seiring dengan menurunnya rasio kredit bermasalah (NPL) dan meningkatnya rasio likuiditas (LDR) yang berarti juga meningkatnya penyaluran kredit. Namun pada tahun 2013-2015 ROA menurun, hal ini disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga yang secara umum menyebabkan Peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank di Bursa Efek Indonesia. Namun secara keseluruhan ROA yang telah dimiliki oleh bank umum BUMN selama periode tersebut telah masuk dalam kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank di Bursa Efek Indonesia dalam memperoleh laba

dengan mengandalkan asetnya telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini sesuai dengan matriks penetapan peringkat ROA dimana rasio ROA > 1,5% masuk dalam kriteria SANGAT BAIK.

- **NIM (*Net Interest Margin*)**

Nilai rata-rata margin bunga bersih (NIM) bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015 masing-masing sebesar 4,20%, 4,54%, 3,70%, dan 3,17%. Terlihat bahwa pada tahun 2012-2013 nilai rata-rata NIM sedikit meningkat hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bunga bersih bank di Bursa Efek Indonesia juga membaik, namun pada tahun 2014-2015 nilai rata-rata NIM menurun hal ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga sehingga menyebabkan tingginya biaya bunga yang ditanggung oleh bank di Bursa Efek Indonesia pada tahun tersebut. Namun secara keseluruhan dengan nilai rata-rata NIM sebesar itu menunjukkan kemampuan bank di Bursa Efek Indonesia dalam memperoleh pendapatan bunga bersih selama empat tahun tersebut sudah SANGAT BAIK

4. Permodalan (*Capital*)

Tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *Capital* dengan mengitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank umum

BUMN tahun 2012-2015 memiliki nilai rata-rata CAR masing-masing adalah 16,42%, 15,50%, 17,68% dan 17,68% dengan kriteria SANGAT BAIK. Meskipun terlihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 nilai CAR sedikit menurun namun secara keseluruhan CAR bank di Bursa Efek Indonesia tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, yaitu bank wajib menyediakan total modal paling kurang 8% dari ATMR. CAR yang besar menunjukkan bahwa bank dapat menyangga kerugian operasional bila terjadi dan dapat mendukung pemberian kredit yang besar. CAR yang besar juga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan dananya ke bank Bursa Efek Indonesia. Nilai CAR yang dimiliki bank di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015 berada di atas standar yang telah ditetapkan sehingga bank dinilai telah mampu memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM).

5. Penilaian Tingkat Kesehatan Metode RGEK (*Risk Profile, GCG, Earning, Capital*)

Berdasarkan Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011 bank yang memperoleh peringkat komposit 1 mencerminkan bahwa kondisi bank yang secara umum SANGAT SEHAT sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari kriteria faktor-faktor penilaian, antara lain *risk profile, GCG, earnings, dan capital* yang secara umum SANGAT BAIK. Apabila

terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Semua bank yang jadi sampel mendapatkan peringkat komposit yang SANGAT BAIK dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Bank yang SANGAT BAIK yaitu :

Bank BUMN	
Bank Rakyat Indonesia	96,66%
Bank Negara Indonesia	96,66%
Mandiri	93,33%
Bank Tabungan Negara	93,33%
Bank Swasta Devisa	
Bank Central Asia	96,66%
Bank Maybank Indonesia	96,66%
Bank Bumi Arta	96,66%
Bank Permata	90%
Bank Mega	90%
Bank Agro Niaga	86,66%
Bank Bukopin	86,66%
Bank Artha Graha Internasional	86,66%
Bank Swasta Non Devisa	
Bank Nusantara Parahyangan	93,33%
Bank Jabar Banten	90%
Bank Pundi Indonesia	86,66%
BTPN	76,66%

Sumber: Data yang diolah, 2016

Manfaat bagi pihak-pihak bank dengan adanya tingkat kesehatan bank yang sangat baik akan memberikan manfaat besar bagi bank untuk dapat memperoleh kepercayaan nasabah dan calon investor. Selain untuk bermanfaat besar memperoleh kepercayaan nasabah dan calon investor, tingkat kesehatan bank juga sebagai salah satu sarana bank dalam melakukan evaluasi kondisi yang dihadapi bank

IV KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan perhitungan yang menunjukkan bahwa nilai komposit untuk *risk profile* yang menggunakan 2 indikator yaitu NPL dengan nilai rata-rata tahun 2012-2015 yaitu 4,81%, 3,48%, 2,53%, 4,48% dan LDR dengan nilai rata-rata tahun 2012-2015 yaitu 75,96%, 88,67%, 77,27%, 76% berada dalam kondisi peringkat 2 BAIK, hasil pelaksanaan GCG mencerminkan bahwa nilai GCG berada pada peringkat 2 yang berarti BAIK pelaksanaan GCG sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan berjalan sangat efektif dan efisien sehingga untuk mampu meningkatkan kepercayaan untuk *stakeholder*, nilai komposit rentabilitas (*earning*) yang menggunakan 2 indikator yaitu ROA dan NIM berada pada peringkat 1 yang SANGAT BAIK sehingga mampu untuk bertambahnya jumlah aset yang dimiliki oleh

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan nilai komposit permodalan (*capital*) berada pada peringkat 1 yang artinya SANGAT BAIK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015 dengan Metode RGEC dengan secara keseluruhan memiliki peringkat komposit 1 yang berarti bank itu memiliki nilai SANGAT SEHAT.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. www.bi.go.id. 29 Oktober 2016.
- Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP/2004 Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. www.bi.go.id. 29 Oktober 2016.
- Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. www.bi.go.id. 30 Oktober 2016.
- Bursa efek Indonesia. Laporan keuangan tahun 2012-2015. www.idx.co.id. 30 Oktober 2016.
- Brigham, Eugene F Dan Joel F, Houston. 2010. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawi, Herman. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara
- Fajri Hakim. 2013. Analisis Pengaruh Rasio NPL, LDR, GCG, NIM, CAR, Dan BOPO Terhadap Tingkat Kesehatan Bank (Studi Empiris Pada Bank Konvensional Yang Tercatat Di BEI Tahun 2008-2012). Semarang: skripsi semarang. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hanif Eka Setiaji. 2011. Analisis Faktor-Faktor Pembentukan Kinerja RGEC Pada Perbankan Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013). Diponegoro: Skripsi Diponegoro. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utar.

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KURS MATA UANG, KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN LQ 45

Dona Patrisia¹, Poppy Indriani², Septiani Fransisca².
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang
Sur-el: Dona.patrisia4@gmail.com, poppy.indriani@binadarma.ac.id,
septiani.fransisca@binadarma.ac.id

ABSTRACT: *This study aimed to examine the effect of corporate governance mechanism, the currency exchange rate and financial performance to the value of the company LQ 45. The population and sample in this study are all companies in LQ 45 index in the Indonesia Stock Exchange (BEI) during period 2010-2015. The total sample is 9 LQ 45 were determined through purposive sampling. The results in this study demonstrate managerial ownership, institutional ownership and return on assets positively affect the value of the company, an independent commissioner, audit committee and , the currency rate has no effect on the value of the company, and return on equity have negative affect the value of the company. Simultaneously managerial ownership, institutional ownership, independent directors, audit committee, foreign exchange rates, return on assets, and return on equity together have an effect on firm value.*

Keywords: *Mechanism of Corporate Governance, currency exchange rates, financial performance, the company's value*

ABTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, kurs mata uang dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan LQ 45. Populasi dan sampel penelitian ini merupakan saham perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45, Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2015. Total sampel penelitian adalah 9 perusahaan yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan *return on asset* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, komisaris independen, komite audit dan kurs mata uang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan *return on equity* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kurs mata uang, *return on asset*, dan *return on equity* bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: *Mekanisme Corporate Governance, kurs mata uang, kinerja keuangan, nilai perusahaan*

1. PENDAHULUAN

Nilai perusahaan dapat dikatakan sebagai cerminan dari baiknya harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal, karena semakin baik atau semakin tinggi harga saham maka kemakmuran yang dirasakan oleh para investor atau pemegang saham akan semakin baik pula. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat para investor lain tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan

tersebut. Oleh karena itu pihak perusahaan atau pihak manajemen dituntut untuk dapat memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat mengoptimalkan harga sahamnya di pasar modal. Perusahaan LQ 45 merupakan perusahaan yang memiliki peringkat yang sangat tinggi dari segi tingkat likuiditas dan memiliki nilai kapitalisasi pasar. Perusahaan indeks LQ 45 merupakan saham yang sangat aktif diperdagangkan dan cenderung lebih cepat

bereaksi serta dapat dengan cepat menghindari adanya saham tidur dalam menganalisis *return* saham. Perusahaan yang berada di LQ 45 merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang sangat baik dan memiliki manajemen keuangan yang sangat baik.

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan, sistem pengawasan yang baik yang dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk bisa memberikan jaminan keamanan atas dana atau aset yang ditanamkan oleh para investor pada perusahaan. GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama yaitu untuk dapat mengelola risiko yang ada guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamatan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Mekanisme *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai sebuah aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara yang pihak yang akan mengambil sebuah keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Kurs mata uang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Turunnya nilai perusahaan merupakan dampak dari harga saham yang mengalami penurunan akibat dari perubahan kurs mata uang terhadap arus

kas masuk ataupun arus kas yang keluar dari perusahaan. Melemahnya kurs rupiah terhadap dolar akan memiliki dampak yang negatif terhadap pasar modal dan berpengaruh Kinerja keuangan merupakan indikator yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Kinerja keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi keuangan dalam suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan itu berada dalam keadaan baik atau tidak baik. Bagi perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan merupakan suatu keharusan, agar saham perusahaan menarik bagi para penanam modal atau para investor. Biasanya para investor melakukan peninjauan dengan melihat rasio keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “ Bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance*, kurs mata uang dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan di lq 45 secara parsial dan simultan”. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance*, kurs mata uang dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan secara parsial dan simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2011) mendefinisikan bahwa teori

keagenan (*Agency theory*) sebagai suatu hubungan dimana para manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik saham. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* (pemilik saham) dan *agent* (manajer). Jika dikaitkan dengan nilai perusahaan, teori agensi berperan dalam mendasari praktik bisnis perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Ketika manajerial yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi bukan kepentingan pemegang saham atau kepemilikan institusional.

2.2 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Susanti (2010) dalam Mahendra (2011), nilai perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan tingginya kemakmuran bagi para pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan harapan bagi pemilik perusahaan, sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi akan menunjukkan kemakmuran bagi para pemegang saham.

2.3 Good Corporate Governance

Menurut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ

BUMN untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.3.1 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara tersistem untuk dapat memenuhi persyaratan tertentu dalam suatu organisasi. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control* dan pengawasan (*monitoring*) terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk dapat menjamin dan mengawasi berjalanya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Arifin, 2005 dalam Thaharah Nina, 2016).

2.3.1.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut di dalam suatu pengambilan keputusan sebuah perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah presentase saham yang

dimiliki (Wahidahwati, 2002 dalam Thaharah Nina, 2016).

2.3.1.2 Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Thaharah Nina (2016), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting di dalam meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan yaitu, antara pihak manajer dengan pihak pemegang saham.

2.3.1.3 Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan puncak dari sebuah sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris juga bertanggung atas kualitas laporan yang akan disajikan. Menurut Anisa Larasati (2009), dewan komisaris yang ditugaskan adalah untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya suatu akuntabilitas didalam perusahaan.

2.3.1.4 Komite Audit

Berdasarkan Pedoman Umum GCG di Indonesia yaitu Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2008), komite audit memiliki tugas untuk membantu Dewan Komisaris untuk dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan sangat baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan dari hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

2.4 Kurs Mata Uang

Nilai tukar rupiah mempunyai peranan penting bagi perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor. Depresiasi rupiah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga berdampak pada penurunan profitabilitas dari perusahaan (Darminto, 2008).

2.5 Kinerja Perusahaan

Kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator dari suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan kinerja keuangan merupakan suatu tampilan tentang suatu kondisi keuangan lain yang bersifat sebagai penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi suatu kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada (Wirawan, 2009).

2.5.1 Return On Asset

Menurut Hanafi dan Halim (2004) ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki oleh

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.

2.5.2 Return On Equity

Menurut Mursidah (2011) ROE merupakan rasio yang sangat penting bagi pemilik perusahaan (*The Common Stockholder*), karena rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan

Manajer sekaligus sebagai pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan dari nilai perusahaan akan meningkatkan kekayaannya sebagai pihak pemegang saham akan meningkat juga. Konsisten dengan teori diatas menurut penelitian Frysa (2011) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan memperhatikan uraian yang dijabarkan diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Begitu pula dengan Wening (2009) yang mengemukakan bahwa semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara

dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan dapat memonitoring atau mengawasi tim manajemen secara efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Banyaknya dewan komisaris independen maka tingkat integritas pengawasan terhadap dewan direksi yang akan dihasilkan akan semakin baik, dengan begitu akan dapat mewakili kepentingan dari para *stakeholders* lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas dan akan berdampak baik terhadap nilai perusahaan.

H₃: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Peran dari komite audit di dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektifitas dari auditor. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan memberi kontribusi dalam kualitas laporan

keuangan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.

H₄: Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Kurs Mata Uang Terhadap Nilai Perusahaan

Nilai tukar (kurs) merupakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar (kurs) merupakan jumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat ditukarkan dengan satuan unit dari mata uang asing. Penurunan profitabilitas dari perusahaan akan membuat harga saham yang diperdagangkan di Bursa Efek akan mengalami penurunan sehingga nilai perusahaan dari perusahaan tersebut ikut mengalami penurunan.

H₅: Kurs mata uang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Return On Asset Terhadap Nilai Perusahaan

Semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dan dapat menggunakan aset secara efisien maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dapat menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya. Sehingga profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Mardiyanti dkk, 2012).

H₆: Return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Return On Equity Terhadap Nilai Perusahaan

Bahwa semakin tinggi nilai profit yang didapat maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu para investor untuk ikut meningkatkan permintaan atas saham. Permintaan saham yang tinggi akan menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat (Mardiyati dkk, 2012).

H₇: Return on equity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Operasional Variabel

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kurs mata uang, *return on asset* dan *return on equity*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan di indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling. Kriteria yang digunakan adalah (1) Perusahaan yang tercatat di indeks LQ 45 2010-2015, (2) Perusahaan LQ 45 yang terdaftar secara berturut-turut tetap

konsisten ada selama tahun 2010-2015, (3) Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial pada tahun 2010-2015, (4) Perusahaan yang memiliki kepemilikan Institusional tahun 2010-2015, (5) Perusahaan yang dipengaruhi oleh Kurs mata uang tahun 2010-2015, dan (6) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan web resmi dari perusahaan yang diteliti. Studi pustaka atau berupa literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki kaitan dengan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan sumber pengumpulan data bagi peneliti. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dokumenter yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan LQ 45.

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini merupakan jenis

penelitian kausal-komparatif. Tujuan dilakukan penelitian kausal-komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Penelitian kausal-komparatif bersifat *ex post factor*, artinya data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan telah berlangsung. Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan merupakan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan berupa angka-angka dimana perhitungannya menggunakan metode standart yang dibantu dengan sebuah program *Statistical Package Social Sciences* (SPSS).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2015. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa *annual report* dan *financial report* yang terdapat dalam website resmi milik Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website milik perusahaan yang bersangkutan. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 (Sembilan) perusahaan yang telah

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Berikut ini deskripsi penarikan sampel penelitian.

Tabel 1
Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian
Tahun 2010-2015

No	Keterangan	Jumlah	Frekuensi
1	Merupakan perusahaan yang tercatat di Indeks LQ 45 pada Bursa Efek Indonesia.	45	100%
2	Perusahaan LQ 45 yang terdaftar secara berturut-turut tetap konsisten ada selama tahun 2010-2015.	24	0,23%
3	Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial pada tahun 2010-2015.	6	0,07%
4	Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional pada tahun 2010-2015.	3	0,03%
5	Perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh kurs mata uang asing (nilai tukar) pada tahun 2010-2015.	1	0,01%
6	Laporan keuangan yang menggunakan	2	0,2%

mata uang rupiah

7 Jumlah Sampel Perusahaan 9 0,09%

Sumber: Data diolah, 2017

4.2 Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 2
Adjusted R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.677 ^a	.459	.376

a. Predictors: (Constant), ROE, KOLmn, KA, KI, Kurs, ROA, KM

b. Dependent Variable: PBV

Pada tampilan tabel diatas model summary besarnya koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai Adjusted R² yaitu 0,376, hal ini berarti 37,6% variabel nilai perusahaan yang diprosikan *price to book value* dapat dijelaskan oleh variansi dari variabel Kepemilikan Manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), komisaris independen (Kolmn), Komite audit (KA), nilai mata uang (Kurs), *return on asset* (ROE), dan *return on equity* (ROE). Sedangkan sisanya 62,4% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

4.2 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3
Hasil Regresi Parsial

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
Model		B	Std. Error		
1	(Constant)	.316	2.161	.146	.884

KM	7.011	1.749	4.008	.000
KI	.544	.215	2.531	.015
Kolmn	.804	1.376	.584	.562
KA	.388	.260	1.492	.142
Kurs	1.337E-5	.000	.131	.897
ROA	4.187	1.803	2.323	.025
ROE	-7.019	2.911	2.411	.020

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, diperoleh nilai signifikan Kepemilikan manajerial (KM) adalah $0,000 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$ dan $0,1$, karena nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$, sehingga dapat disimpulkan KM berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan Institusional memiliki diperoleh nilai signifikan $0,015 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara KI terhadap nilai perusahaan. Komisariss Independen (Kolmn) memiliki nilai signifikan $0,562 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$ dan, karena nilai signifikan lebih besar dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Kolmn terhadap nilai perusahaan. Komite Audit (KA) memiliki nilai signifikan $0,142 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih besar dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara KA terhadap nilai perusahaan. Kurs mata uang (Kurs) memiliki diperoleh nilai signifikan

$0,897 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih besar dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Kurs terhadap nilai perusahaan. Return On Asset (ROA) memiliki nilai signifikan $0,025 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ROA terhadap Nilai Perusahaan. Return on equity (ROE) nilai signifikan $0,020 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$ dan $0,1$, karena nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ dan $0,1$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ROE terhadap nilai perusahaan.

4.3 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4

Hasil Uji Regresi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60.014	7	8.573	5.569	.000 ^b
	Residual	70.814	46	1.539		
	Total	130.827	53			

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test di atas, signifikansi simultan bernilai $0,000$ dimana tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari $0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), Komisariss Independen (KOLmn), Komite audit (KA), Kurs mata uang (Kurs), return on asset (ROA), dan

Return on Equity (ROE) secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh mekanisme corporate governance, kurs mata uang, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2015 maka dapat disimpulkan:

1. Variabel kepemilikan manajerial (KM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dan kepentingan pihak para *principal* dapat terpenuhi sehingga nilai perusahaan pun dapat meningkat juga.
2. Variabel kepemilikan institusional (KI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan. Hasil ini menunjukkan dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingginya kepemilikan saham oleh pihak institusional akan mengurangi tidak kecurangan oleh pihak manajemen yang biasanya melakukan tindak manipulasi laba dimana hal tersebut akan berakibat turunnya nilai perusahaan.
3. Variabel komisaris independen (Kolmn) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dimana hal ini ada kemungkinan bahwa komisaris independen yang tinggi bukan merupakan jaminan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik pula, sehingga pasar menganggap keberadaan dari komisaris independen tersebut bukanlah jaminan atau faktor yang dapat jadi pertimbangan dalam mengapresiasi nilai perusahaan dan dari pembentukan komisaris independen hanya sekedar untuk memenuhi aturan dari Bapepam sehingga peranan dan tanggungjawab yang dilakukan belum dapat dikatakan optimal.
4. Variabel komite audit (KA) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. dalam penelitian ini jumlah komite audit yang tidak mencukupi perusahaan juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut, karena jumlah komite audit juga harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan.

5. Variabel kurs mata uang (Kurs) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan kemungkinan pasar modal di Indonesia kurang bereaksi terhadap perkembangan pasar uang atau Bank Indonesia ikut campur dalam pasar uang untuk menjaga kestabilan dari nilai tukar terhadap dolar dan kemungkinan para investor dalam menanamkan modalnya kurang memperhatikan atau mempertimbangkan dari perubahan kurs yang terjadi di pasar modal
6. Variabel *return on asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan Semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan dan dapat menggunakan aset secara efisien maka akan meningkatkan nilai perusahaan.
7. Variabel *return on equity* (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai profit yang didapat maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Profit yang tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga

dapat memicu para investor untuk ikut meningkatkan permintaan atas saham. Permintaan saham yang tinggi akan menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat, namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa modal yang dikelola oleh perusahaan kurang efektif dan efisien.

8. Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa signifikansi simultan bernilai 0,000 dimana tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial (KM), kepemilikan institusional (KI), Komisaris Independen (KOlmn), Komite audit (KA), Kurs mata uang (Kurs), *return on asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dengan meningkatnya nilai saham perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan dan

bahan evaluasi tentang permasalahan mengenai mekanisme *corporate governance*, kurs mata uang, dan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang terhadap nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan akan dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal mereka ke perusahaan.

2. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor pada saat melakukan investasi atau menanamkan modal pada suatu perusahaan, sehingga pada saat para investor mengetahui informasi tentang mekanisme *corporate governance*, kurs mata uang, dan kinerja perusahaan maka investor dapat menentukan apakah ingin melakukan investasi atau tidak pada perusahaan tersebut dengan suatu pertimbangan faktor yang akan mempengaruhi nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- AnisaLarasati. 2009. *AnalisisPengaruhMekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba, dan nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi.UniversitasAirlangga Surabaya.
- Arifin, Zaenal. 2005.*HubunganAntara Corporate Governance danVariabelPengurangMasalahA gensi*. *JurnalFenomena*, Vol. 3, No. 2.
- Bursa Efek Indonesia, 2016.Tentang BEI: LaporanTahunan. <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/laporantahunan.aspx> (DiaksesOktober 2016)
- Darmawati,Khomsyahdan Rika Gelar, 2005, “*Hubungan Corporate Governance danKinerja Perusahaan*”, *JurnalRisetAkuntansi Indonesia*, Yogyakarta, IkatanAkuntansi Indonesia KompartemenAkuntanPublik, Vol 8, No. 1, Januari 2005.
- Darminto, 2010, *PengaruhFaktorEksternaldanBerbagaiKeputusanKeuanganTerhadapNilai Perusahaan*,*JurnalAplikasiManajemen*, Vol.8, No.1.
- Enggar F. V.S danAkhmadRiduwan. 2013. *Pengaruh Corporate GovenanceTerhadapNilaiPerusahaan: KualitasLabasebagaiVariabel Intervening*. *JurnalIlmudanRisetAkuntansi STIESIA Surabaya*.Volume 1 No. 1.Januari.
- Hanafi, M. M. 2003. *ManajemenKeuangan*. BAFE.Yogyakarta.
- Hanafi, M. Mamduhdan Abdul Halim. 2004. “*ManajemenKeuangan*”, PT.BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Herawati, V. 2008.*PeranPraktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel Dari Pengukuran Earning Management TerhadapNilai Perusahaan*.SimposiumNasional Akuntansi XI.Pontianak.
- Irmala Sari. 2011. *PengaruhMekanisme Good Corporate Governance terhadapKinerjaPerbankanNasional*.

- Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Frysa, P. P. 2011. *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Kaihatu, T. S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No.1: 1-9, Maret.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. www.governance-indonesia.com.
- Lastanti, Hexana Sri. 2004. *Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar*. Konferensi Nasional Akuntansi: 1-16.
- Mahendra, Alfredo. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderating) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Udayana, Tesis tahun 2011.
- Mardiyanti dkk. 2012. *Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*. Jurnal Riset Manajemen Sains Volume 3.
- Rahayu, Sri. 2010. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi*. Unpublished Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Thaharah, Nina dan Nur F. 2016. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan LQ 45*. Jurnal Ilmuan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Wahidahwati. 2002. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency*. Jurnal; Riset Akuntansi Indonesia, Vol 5, No 1: 82-104. Januari.

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA KONSTRUKSI DAN KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI (PSAK No. 34)

Egi Taris Wihandri¹, Yeni Widyanti², Rolia Wahasusmiah³

ewihandri@gmail.com¹, yeniwidyanti@binadarma.ac.id², Roliawahasusmiah@binadarma.ac.id³
Jalan Jendral Ahmad Yani No.12 Palembang

Abstract: National development is one indicator of public welfare, organizations that participate in the national development one Construction Services. In this study, we need to observe at the treatment of Income Tax Clause 4, paragraph 2 construction services that is applied and the suitability of the construction contract PSAK No. 34, in this case discuss the construction services business revenue recognition. In construction there are two revenue recognition methods 1). Completed Contract Method, 2). Percentage of Completion method. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis, which arrange the data collected, classified, and analyzed based on the real conditions company with the theory and rules so as to give a true description and the conclusions drawn. From the analysis it can be concluded that 1). Income taxes deduction showed that there were errors that can be said is not in accordance with the applicable rules. 2). Revenue recognition in accordance with PSAK No. 34 using the percentage of completion method of physical approach. 3). Income tax treatment of construction services has no compatible with PSAK No. 34.

Keyword: Income Tax for Construction Service, Revenue Recognition Construction Sservice, PSAK No. 34

Abstrak : Pembangunan nasional merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, organisasi yang berperan serta dalam pembangunan nasional salah satunya Jasa Konstruksi. Dalam penelitian ini kita perlu mencermati perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 usaha jasa konstruksi yang diterapkan dan kesesuaian kontrak konstruksi PSAK No 34, dalam hal ini membahas pengakuan pendapatan usaha jasa konstruksi. Pada jasa konstruksi ada dua metode pengakuan pendapatan 1). Metode Kontrak Selesai, 2). Metode Persentase Penyelesaian. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan disusun, dikelompokkan, dan dianalisis berdasarkan keadaan dilapangan dengan teori dan peraturan sehingga dapat memberikan gambaran yang sebenarnya dan ditarik kesimpulan. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa 1).Pemotongan pajak menunjukkan adanya kekeliruan sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan aturan yang berlaku. 2). Pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK No 34 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian pendekatan fisik. 3). Perlakuan perpajakan jasa konstruksi tidak memiliki keterkaitan dengan PSAK No 34.

Kata Kunci: Pajak Jasa Konstruksi, Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi, PSAK No. 34

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan perekonomian era globalisasi Indonesia, pemerintah dituntut agar dapat menciptakan kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suatu organisasi yang didirikan dengan berorientasi pada laba khususnya perusahaan jasa konstruksi tentunya dikenakan kewajiban membayar pajak

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak ditujukan untuk mensejahterahkan rakyat, dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang

konstruksi. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yang di maksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Salah satu unsur yang sangat berkaitan dalam pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi adalah pendapatan. Masalah yang penting terkait dengan pendapatan adalah bagaimana dan kapan sebaiknya perusahaan mengakui pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan konstruksi atau proyek yang

dikerjakan memiliki jangka waktu penyelesaian yang bervariasi. Ada proyek yang diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun (jangka pendek) dan ada juga yang diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih dari satu tahun (jangka panjang).

Standar Akuntansi Keuangan secara khusus mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya kontrak dengan menerbitkan sebuah pernyataan PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Tujuan PSAK No. 34 adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana suatu transaksi harus diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan, dan pengukuran pendapatan adalah berapa jumlah pendapatan yang seharusnya diakui oleh perusahaan atas suatu transaksi yang menimbulkan aliran masuk yang diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan. Dengan menerapkan metode pengakuan pendapatan yang tepat maka perusahaan dapat mengakui pendapatannya pada saat yang tepat pula dan juga dapat mengetahui berapa jumlah pendapatan yang seharusnya diakui oleh perusahaan pada suatu periode akuntansi.

Kesesuaian pengakuan pendapatan dan kewajiban wajib pajak membayar pajak atas jasa konstruksi merupakan hal yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34)”**

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) mengemukakan Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, “Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang

berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup dalam berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam undang-undang perpajakan nomor 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) penghasilan dapat diartikan sebagai: Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.3 Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan jasa yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, Pemerintah membuat UU No. 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi. Pengertian Jasa Konstruksi menurut UU No. 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yaitu “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”. Jasa konstruksi melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pengertian Pekerjaan Konstruksi pada UU No. 18 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut: “Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain”.

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Izin usaha konstruksi yaitu “Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.” Tujuan utama dari pengadaan IUJK adalah sebagai fungsi pengaturan yang diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga berguna untuk mewujudkan usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan yang berkualitas.

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

2.4 Pendapatan

Menurut PSAK Nomor 23 Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktiva normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik.

Lam dan Lau (2012:353) dalam penelitian Pingkan C. Oroh mengemukakan definisi pendapatan sebagai arus masuk bruto manfaat ekonomi yang selama periode yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas ketika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan meningkatkan kontribusi dari peserta.

Jadi, dapat didefinisikan pendapatan merupakan arus masuk bruto yang mempengaruhi manfaat ekonomi perusahaan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas selama suatu periode dan mengakibatkan kenaikan ekuitas bukan dari kontribusi pemilik.

2.5 Metode Pengakuan Pendapatan

Weygandt *et al.* (2011) dalam Priska Rahmania menyatakan Metode pengakuan pendapatan yang secara umum digunakan dalam perusahaan konstruksi adalah :

1. Metode Kontrak Selesai (*Completed-Contract Method*)

Metode pengakuan pendapatan dengan kontrak selesai adalah metode pengakuan dimana pendapatan dan laba kotor diakui pada saat kontrak selesai. Metode kontrak selesai biasanya digunakan perusahaan yang mempunyai kontrak jangka pendek.

2. Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage Of Completion Method*)

Metode pengakuan pendapatan persentase penyelesaian adalah metode pengakuan yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, dimana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mengakui pendapatan dan biaya pada suatu kontrak sesuai dengan kemajuan penyelesaian proyek, tidak menunggu sampai dengan proyek selesai.

Metode pendekatan dalam metode persentase penyelesaian adalah:

a. Pendekatan Fisik

Metode pendekatan fisik merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan untuk menentukan besarnya persentase penyelesaian atas pelaksanaan kontrak jangka panjang berdasarkan kemajuan fisik yang sudah dicapai atas pekerjaan yang dilaksanakan.

b. Pendekatan Biaya (Cost to Cost)

Metode pendekatan biaya ditentukan dengan membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan total biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan proyek tersebut.

2.6 Akuntansi Jasa Konstruksi

Standar Akuntansi Keuangan secara khusus mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya kontrak dengan menerbitkan pernyataan PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Tujuan PSAK No. 34 adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruks. Oleh karena sifat dari aktivitas yang dilakukan pada kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas pada kontrak mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut diselesaikan biasanya jatuh pada akuntansi yang berlainan. Oleh karena itu persoalan utama dari akuntansi kontrak konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan.

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 34 paragraf 25, Pengakuan pendapatan dan beban dengan

memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tetap mengacu kepada satu arah pembahasan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dalam menganalisis Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi (PPH Pasal 4 ayat (2) dan kesesuaian pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 34 pada PT Alantec Prima Mandiri untuk tahun 2015.

3.2 Metode Penelitian

Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Dengan membandingkan teori dan keadaan yang sebenarnya di dalam perusahaan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT APM yang bertempat di Jalan MP Mangkunegara No. 09 RT. 09 RW. 020 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang – Sumatera Selatan, Indonesia.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif dengan melakukan *review* untuk melihat perbandingan terhadap cara perhitungan, pemotongan yang telah dilakukan pada perusahaan dengan aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 34 Tahun 2010) pada PT APM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Setelah ditelusuri data yang ada pada PT APM penulis menemukan ada kekeliruan pada pemotongan pajak final jasa konstruksi tersebut. Pada PT APM dipotong tarif sebesar 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), pemberi jasa dalam hal ini selaku pemotong pajak beranggapan bahwa PT APM dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksinya dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maksudnya pemberi jasa beranggapan bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga, sehingga dikenakan tarif pemotongan pajak final sebesar 3% dan beranggapan bahwa mereka memiliki hak 1% dari nilai kontrak untuk biaya administrasi pihak ketiga.

Tabel 4.13

Perbandingan PPh Final pada Perusahaan dengan PPh Final menurut aturan

Bulan	DPP	PPh Final pada Perusahaan	PPh Final Menurut Aturan	Selisih
JUNI	232,600,000	9,304,000	4,652,000	4,652,000
JULI	66,000,000	2,640,000	1,320,000	1,320,000
AGUSTUS	132,000,000	5,280,000	2,640,000	2,640,000
OKTOBER	405,450,000	16,218,000	8,109,000	8,109,000
NOVEMBER	328,050,000	13,122,000	6,561,000	6,561,000
DESEMBER	376,700,000	15,068,000	7,534,000	7,534,000
	1,540,800,000	61,632,000	30,816,000	30,816,000

Dari tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 PT APM memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp1.540.800.000,- penghasilan bruto ini kemudian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh Final Jasa Konstruksi. Dan pajak final yang telah dipotong oleh pemberi kerja dengan tarif 4% dikalikan dasar pengenaan pajak diperoleh hasil

sebesar Rp61.632.00,-. Sedangkan menurut aturan yang berlaku sesuai dengan tarif pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak, maka diperoleh hasil pemotongan pajak sebesar Rp30.816.000,-. Jadi, pada pemotongan yang telah dilakukan pada PT APM yang dibandingkan dengan peraturan yang berlaku maka terjadi selisih sebesar Rp30.816.000,-

Setelah ditelusuri, kesalahan potong tersebut terjadi karena kesengajaan pihak pemotong pajak. Kelebihan pemotongan tarif yang dilaporkan oleh pemotong pajak sebesar 3% dari dasar pengenaan pajak, jadi yang disetorkan ke pihak Dirjen Pajak hanya sebesar Rp46.224.000,- dan sisanya sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak sebesar Rp15.408.00,- pihak pemotong beralasan bahwa mereka memiliki hak untuk 1% tersebut untuk biaya administrasi pihak ketiga.

Metode pengakuan pendapatan yang digunakan PT APM adalah metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian digunakan untuk proyek jangka panjang lebih dari satu tahun atau proyek yang memerlukan beberapa kali penagihan dalam penyelesaiannya. Metode persentase penyelesaian pada PT APM menggunakan pendekatan fisik dimana pengakuan pendapatannya di akui berdasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai dilapangan sesuai dengan perhitungan ahli dan keputusan oleh manajer proyek dan kemudian dituangkan ke dalam laporan prestasi proyek. Kemudian melakukan perhitungan pendapatan yang diakui pada periode berjalan dengan mengalikan

persentase penyelesaian fisik dengan nilai kontrak setelah dikurangi PPN, kemudian hasilnya akan dicatat sebagai pendapatan atau penjualan konstruksi.

4.2 Hasil Pembahasan

Diketahui terjadi selisih pemotongan pajak yang sangat besar. Pada masa pajak tahun 2015 selama bulan Juni, Juli, Agustus, Oktober, November dan Desember. PT APM mengalami kekeliruan dalam pemotongan pajak tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp30.816.000,- yang merugikan bagi pihak PT APM. Setelah ditelusuri, kesalahan potong tersebut terjadi karena kesengajaan pihak pemotong pajak. Pengenaan PPh Final dengan tarif 3% dari dasar pengenaan pajak, pihak pemberi kerja beranggapan bahwa PT APM merupakan kualifikasi perusahaan yang menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana konstruksi sehingga dikenakan tarif 3% dan sisanya sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak pihak pemotong beralasan bahwa mereka memiliki hak untuk 1% tersebut untuk biaya administrasi pihak ketiga. Yang seharusnya berdasarkan lampiran pada kontrak kerja antar kedua belah pihak menyatakan bahwa PT APM memiliki kualifikasi usaha jasa konstruksi kelas II, yaitu kualifikasi usaha kecil yang dikenakan tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 2% yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan *invoice* yang dikeluarkan. Dan pada kontrak perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak telah disetujui bahwa kontrak konstruksi yang dijalankan hanya melibatkan pihak pertama selaku pemberi kerja dan pihak kedua selaku kontraktor. Tidak terdapat pihak ketiga dalam kontrak tersebut, sehingga pemberi kerja tidak

memiliki hak atas 1% dari pph final tersebut.

Dari data yang telah dianalisis dalam mencatat pengakuan pendapatannya PT APM menerapkan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan fisik dimana pengukuran pengakuan pendapatan diakui berdasarkan perhitungan persentase proyek yang telah dicapai dilapangan, dan kemudian dilaporkan dalam prestasi proyek. Perusahaan melakukan perhitungan pendapatan yang diakui pada periode yang bersangkutan dengan cara mengalikan persentase penyelesaian fisik yang sudah disetujui dengan nilai kontrak setelah dikurangi PPN, kemudian hasilnya akan dicatat sebagai pendapatan atau penjualan konstruksi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT APM memiliki kualifikasi badan usaha jasa konstruksi kelas II yaitu jasa konstruksi kualifikasi usaha kecil. Perhitungan kewajiban pajak atas jasa konstruksi pada PT APM telah dilakukan secara final menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Terdapat penyimpangan dalam pemotongan PPh Final pada PT APM pemberi kerja melakukan pemotongan yang tidak sesuai dengan peraturan dan melakukan penyelewengan dana yang seharusnya diterima oleh PT APM. Yaitu dipungut Rp61.632.000,- yang seharusnya dipungut Rp30.816.000,- Sehingga mengakibatkan kerugian

- bagi PT APM sebesar Rp30.816.000,- .
2. PT APM telah menerapkan metode persentase penyelesaian pendekatan fisik, Sesuai dengan PSAK Nomor 34. Dalam mencatat pendapatannya, perusahaan mengakui pendapatan pada saat invoice dikeluarkan berdasarkan perkembangan fisik dilapangan sebesar dasar pengenaan pajak (DPP) dan piutang dicatat sebesar DPP ditambah dengan PPN sebesar 10%.

Dalam perlakuan pajak atas jasa konstruksi dan akuntansi kontrak konstruksi pada PT APM laporan keuangan perusahaan jasa konstruksi mencatat/mengakui penghasilan berdasarkan metode persentase penyelesaian pekerjaan, hal ini tidak mempengaruhi besaran penghasilan yang harus dihitung PPh pasal 4 (2). Walaupun kemungkinan terjadi perbedaan antara jumlah penghasilan yang diakui dalam laporan keuangan dengan penghasilan yang dihitung PPh pasal 4 (2), perbedaan tersebut (jika terjadi) tidak merupakan suatu kesalahan dalam perhitungan kewajiban PPh pasal 4 (2) jasa konstruksi. Dan saat terutangnya PPh pasal 4 (2) atas jasa konstruksi, jelas disebutkan pada pasal 5 PP No. 51 tahun 2008, yaitu pada saat terjadinya pembayaran oleh pengguna jasa kepada perusahaan jasa konstruksi. Walaupun faktur sudah diterbitkan dan dikirimkan kepada pengguna jasa, namun sepanjang pengguna jasa belum melakukan pembayaran, maka tidak terutang PPh pasal 4 (2).

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan pemotongan pajak atas jasa konstruksi yang terjadi pada PT APM mengakibatkan kerugian tersebut harus dilakukan pembetulan SPT dari pemotongan pajak yang dilaporkan sebesar 3% di lakukan pembetulan sesuai dengan peraturan yang menyatakan bahwa PT APM untuk masa pajak tahun 2015 dikenakan pajak atas jasa konstruksi bersifat final sebesar 2% sebesar Rp30.816.000,-, sehingga selisih bayar pajak yang berhak yang dikreditkan untuk masa pajak tahun yang akan datang 1% dari selisih kesalahan tersebut sebesar Rp15.408.000,-. PT APM sebaiknya melakukan penagihan kembali atas kelebihan 1% yang yang dipotong oleh pemberi kerja dengan alasan biaya administrasi pihak ketiga sebesar Rp15.408.000,-. Karena kesalahan yang terjadi bukan dari PT APM melainkan pihak pemberi kerja.
2. PT APM sebaiknya menerapkan perhitungan pengakuan pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian dengan pendekatan *cost to cost* melihat terdapat selisih dalam pengakuan pendapatan dengan menggunakan pendekatan fisik. Pendekatan *cost to cost* memberikan gambaran yang lebih wajar dalam mengakui pendapatan jika dibandingkan dengan pendekatan fisik. Pendekatan *cost to cost* mengakui pendapatan dengan memperhatikan besarnya biaya yang terjadi atau biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan kontrak konstruksi, sehingga menghasilkan konsep penyajian laporan keuangan yang wajar.

Perlakuan Pajak atas jasa konstruksi dan akuntansi kontrak konstruksi pada PT APM telah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Peraturan Pajak dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan.

6. REFERENSI

- Eng Juan, Ng dan Ersu Tri Wahyuni. 2012. Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 34 tentang Kontrak Konstruksi. IAI Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 tentang Pendapatan. IAI Jakarta.
- Johanna, Bena. 2015. Evaluasi penggunaan tarif PPh atas jasa konstruksi dan tarif PPh Badan (Studi Kasus Pada PT x), Jurnal Ilmiah.
- N Rembet. Dhian Dkk. 2016. Analisis penerapan akuntansi perpajakan atas jasa konstruksi pada PT Dua Mutiara Sejati. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus Ed. 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi penelitian bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak Ed. 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Yarnita, Yul. 2013. Analisis Pajak Penghasilan jasa konstruksi pada PT Stabilished Pavement Indo (Studi kasus pada PT Stabilished Indo Pavement Pekanbaru). Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.

**ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN**
(Studi kasus pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Endang¹, Fitriasuri², Yeni Widianti³

Mahasiswa Universitas Bina Darma¹, Dosen Universitas Bina Darma^{2,3}

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.03 Palembang

endangtj2010@gmail.com¹, fitriasuri@binadarma.ac.id², yeniwidianti@binadarma.ac.id³

***Abstract :** This study aims to determine whether there are effects of changes in non-taxable income (PTKP) against the growth rate of the number of individual taxpayers and tax revenue to the Tax Office (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu. This study uses primary data and secondary data obtained from KPP Pratama Seberang Ulu Palembang . Data analysis technique used is the number of WPOP in subsequent years minus the number WPOP in previous year divided by the number of WPOP in the previous year multiplied by one hundred percent. The results showed that the change in taxable income (PTKP) in the year of 2016 effect on the growth rate of the number of individual taxpayers and tax revenue to the Tax Office (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu.*

***Keywords :** PTKP, Growth of Individual Taxpayer, and Revenue Tax Income*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah jumlah WPOP pada tahun selanjutnya dikurang jumlah WPOP pada tahun sebelumnya dibagi jumlah WPOP pada tahun sebelumnya dikali seratus persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada tahun 2016 berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu.

***Kata Kunci :** PTKP, Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Penerimaan Pajak Penghasilan*

1. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, tarif pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak. Pada Wajib Pajak

yang berpenghasilan tinggi memiliki kesadaran membayar pajak dengan jumlah beban pajak terutang yang lebih kecil dan bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan menengah kebawah mendapat keringanan sehingga tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya.

Apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang berkerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh mupun WPOP yang memiliki pekerjaan bebas

dan/atau wiraswasta. PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK).UMK yang rata-rata masih berkisar antara 1,5-2,5 Juta setiap bulannya, mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/ pegawai dan buruh di Palembang melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp.0,- atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan jumlah pajak terutang yang lebih sedikit.

Permasalahan lain setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP adalah dengan adanya kenaikan PTKP ini dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/ pegawai dan buruh atau yang belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan Wajib Pajak baru akan mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.101/ PMK.010/2016. Sehubungan dengan perubahan nilai PTKP, tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada pemerintah. Terlebih untuk Penerimaan PPh Orang Pribadi yang memiliki jumlah lebih banyak dari Wajib Pajak Badan. Hal tersebut juga memberikan dampak positif pada masyarakat dengan diberlakukannya PMK No.101/PMK.010/2016 tentang perubahan

penghasilan tidak kena pajak akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang dibayar. Sedangkan dampak negatifnya terkait dengan penerimaan pajak secara normatif penerimaan tersebut akan menurun, tapi secara keseluruhan dan berjangka panjang penerimaan pajak tersebut akan meningkat pada akhirnya.

Penelitian ini menggunakan data penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, yaitu data penerimaan PPh Pasal 21 masa dan pasal 25/29 pada tahun 2012 s/d 2016 dan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada “Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu” yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu. Palembang 30264, Telp:

(0711)513393, Fax: (0711)513392.

Data yang digunakan penulis adalah menggunakan data Kualitatif yang sesuai dengan yang dibuat penulis yaitu analisis perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan. Variabel-variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi menurut Tambunan (2001) dengan Rumus :

Tingkat Pertumbuhan Wajib pajak

$$= \left(\frac{WP_n - WP_{n-1}}{WP_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

WP_n = Jumlah WP orang pribadi pada tahun selanjutnya

WP_{n-1} = Jumlah WP orang pribadi pada tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak adalah pendapatan yang diterima Negara atas distribusi yang dibeban ke wajib pajak. Sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan. Menghitung jumlah penerimaan pajak menurut Tambunan (2001) adalah tahun sebelumnya dikurang dengan tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya.

Rumus :

Penerimaan Pajak Penghasilan

$$= \left(\frac{Y_n - Y_{n-1}}{Y_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

Y_n = Jumlah penerimaan pajak pada tahun selanjutnya

Y_{n-1} = Jumlah penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

3. HASIL

Peneliti menganalisis bahwa perubahan PTKP tersebut mempengaruhi tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 28 tahun 2007 menjelaskan setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, wajib memiliki NPWP dan melaporkan jumlah wajib pajak. Jadi, setiap masyarakat yang memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP, dengan perubahan PTKP tersebut wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tidak diwajibkan memiliki NPWP dan melaporkan jumlah pajaknya. Perubahan PTKP secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, akan tetapi menurunnya wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan maka dapat meningkatkan jenis pajak yang lainnya.

Pada tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan PMK 162/PMK.011/2012 jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan terus meningkat, pada tahun 2015 dengan PMK 122/PMK.010/2015 tingkat pertumbuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan dan pada tahun 2016 PMK 101/PMK.010/2016 juga mengalami penurunan. Perubahan PTKP dilakukan untuk mendorong wajib pajak berpenghasilan menengah keatas melakukan konsumsi yang

lebih besar dan akan lebih banyak menabung. Dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor lain. Dan jumlah beban pajak terutang yang lebih kecil meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam menyetor pajak. Perubahan PTKP yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak akan menurunkan jumlah penerimaan pajak. Dikarenakan penghasilan kena pajak wajib pajak pribadi yang telah dikurang PTKP dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak pribadi menjadi kecil dan penerimaan pajak penghasilan juga menjadi menurun. Perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga mempengaruhi penerimaan PPh 21 dan PPh 25/29. Untuk PPh pasal 21 dari tahun 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan setelah berubahnya PTKP yang baru sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 penerimaan PPh 21 tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/ pengusaha/pekerjaan bebas, terjadi penurunan di tahun 2014 sebesar 7,53% tetapi untuk tahun 2015 setelah ditetapkan PTKP baru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 menunjukkan bahwa, perubahan PTKP mengalami kenaikan sebesar 18,24%, tetapi penerimaan PPh pasal 25/29 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan di tahun 2016 akibat dari perubahan PTKP yang baru menurut Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yaitu sebesar -54,19%.

3.1 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012-2016

Tabel 1
Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu

Tahun	Dasar Hukum	Jumlah WP OP	Pertumbuhan	
			WP OP	Persentase
2012	PMK 162/PMK.011/2012	32.064	-	0%
2013	PMK 162/PMK.011/2012	37.299	5.235	16,33%
2014	PMK 162/PMK.011/2012	42.976	5.677	15,22%
2015	PMK 122/PMK.010/2015	48.462	5.486	12,77%
2016	PMK 110/PMK.010/2016	53.423	4.961	10,24%
Rata-rata			5.340	13,64%

Sumber: Data Diolah 2017

Berdasarkan Tabel 1 pertumbuhan jumlah wajib pajak setiap tahun mengalami peningkatan tetapi persentasenya mengalami penurunan, pada tahun 2012 menjadi tahun dasar perhitungan, pada tahun 2013 pertumbuhan jumlah wajib pajak meningkat sebesar 5.235 atau sebesar 16,33% dan pada

tahun 2014 pertumbuhan jumlah wajib pajak meningkat sebesar 5.677 atau sebesar 15,22%, pada tahun 2015 pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan persentase sebesar 5.486 atau sebesar 12,77%. Selanjutnya pertumbuhan wajib pajak pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4.961 tetapi persentase mengalami penurunan sebesar 10,24% dari wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2015 terjadi penurunan persentase pertumbuhan WPOP dari tahun sebelumnya sebesar 2,45% (15,22%-12,77%), dan Pada tahun 2016 terjadi penurunan persentase pertumbuhan WPOP dari tahun sebelumnya sebesar 2,35% (12,77%-10,24%) atau rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 5.340 atau 13,64%. Artinya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdampak besar terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.2 Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Penerimaan PPh Pasal 21 bagi karyawan, pegawai, dan buruh bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang ulu.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Penerimaan Pajak Penghasilan Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 KPP Pratama Seberang Ulu

Tahun	PPh 21	Pertumbuhan	Persentase %
2012	21.347.394.485	-	-
2013	26.671.195.304	5.323.800.819	24,94 %
2014	37.944.657.700	11.273.462.396	42,27 %
2015	48.935.882.416	10.991.206.716	28,97 %
2016	37.719.345.254	11.216.537.162	22,92 %

Sumber : Data Diolah 2017

Dapat kita lihat tabel 2 diatas, penerimaan PPh Pasal 21 bagi karyawan, pegawai, dan buruh bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang ulu. Penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berturut-turut terus mengalami kenaikan sebesar Rp 26.671.195.304, Rp 37.944.657.700, Rp 48.935.882.416, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 37.719.345.254, dengan tingkat pertumbuhan yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun dari tahun 2013

sebesar 5.233.800.819 mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 11.273.462.396, mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 10.991.206.716 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang drastis sebesar - 11.216.537.167, dengan rata-rata persentase penerimaan sebesar 18,23% (24,94%+42,27%+28,57%+-22,92:4) dan penerimaan terbesar terjadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebesar 11.273.480.396 (37.944.657.700-26.671.195.304), sedangkan penurunan terbesar terjadi di KPP Pratama Palembang Seberang ulu di tahun 2016 sebesar 37.719.345.254 pertumbuhan penerimaan penghasilan rata-rata Rp4.092.987.692.

3.3 Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25/29

Penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/ pengusaha/pekerjaan bebas, terjadi penurunan di tahun 2014 sebesar 7,53% tetapi untuk tahun 2015 setelah ditetapkan PTKP baru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 menunjukkan bahwa, perubahan PTKP mengalami kenaikan sebesar 18,24%, tetapi penerimaan PPh pasal 25/29 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan di tahun 2016 akibat dari perubahan PTKP yang baru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yaitu sebesar -54,19%.

Tabel 3

Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 25/29 KPP Pratama Seberang Ulu

Tahun	PPh 25/29	Pertumbuhan	Persentase %
2012	1.023.736.241	-	0%
2013	1.157.696.087	133.959.846	13,09%
2014	1.244.897.458	87.201.371	7,53%
2015	3.515.533.551	2.270.636.093	182,45%
2016	1.611.884.801	-1.903.648.750	-54,15%
Rata-rata		147.037.140	37,22%

Sumber : Data Diolah 2017

Berdasarkan tabel 3 penerimaan PPh Pasal 25/29 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 133.959.846 atau sebesar 13,09%, pada tahun 2014 pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 87.201.371 atau sebesar 7,53%, persentase peningkatan penerimaan pajak terbesar pada tahun 2015 sebesar 182,45% dengan pertumbuhan sebesar 2.270.636.093, penerimaan PPh 25/29 menurun pada tahun 2016 sebesar - 1.903.648.750 dengan penurunan persentase sebesar -54,15%. Penurunan persentase

penerimaan pajak dipengaruhi oleh perubahan peraturan pemerintah yang menaikkan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebelumnya Rp36.000.000 menjadi Rp54.000.000 sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil dan menurunkan jumlah penerimaan PPh OP.

PTKP merupakan pengurang penghasilan kena pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang diatur dalam Undang-undang dan memiliki ketentuan jumlahnya. Perubahan PTKP merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah guna meringankan WPOP untuk membayar pajak, dengan jumlah pajak yang terutang menjadi kecil.

4. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengakibatkan tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan persentase dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 16,33%, 15,22%, 12,77%, dan 10,24% dengan PTKP yang baru wajib pajak yang memiliki NPWP berkurang jumlahnya sehingga pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan.
2. Berdasarkan hasil analisis penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan menunjukkan bahwa Perubahan PTKP

yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak akan menurunkan jumlah penerimaan pajak. Dikarenakan penghasilan kena pajak wajib pajak pribadi yang telah dikurang PTKP dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak pribadi menjadi kecil dan penerimaan pajak penghasilan juga menjadi menurun. Penghasilan PPh pasal 21 persentase peningkatan pajak tertinggi pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 penerimaan pajak menurun sebesar 28,97%, di tahun 2016 setelah ditetapkannya dalam peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang berlaku sejak tahun pajak 2016 mengalami penurunan sebesar -22,92%. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 25/29 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu persentase penerimaan pajak tertinggi pada tahun 2015 sebesar 18,24% dan persentase terendah pada tahun 2016 sebesar -54,15%. Artinya perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut mengakibatkan laju pertumbuhan PPh pasal 21 dan 25/29 orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriyanto, Dimas. 2013. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak*

- Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi kasus pada KPP Pratama Malang dan KPP Pratama Banyuwangi).* Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang.
- Sadewo. Doddy. 2016. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi kasus pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang dan KPP Pratama Sekayu).* Skripsi Universitas Bina Darma. Palembang.
- Jonathan, Gorby. 2014. *Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Daerah Kabupaten Kediri.* Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nuritomo. 2011. *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta.* Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Yogyakarta . Yogyakarta .
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 101/PMK.010/2016. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Ramli. 2009. *Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh pasal 21 dan Ekonomi.* Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Republik Indonesia. *Undang-undang NO. 36 Tahun 2008 Tentang pajak Penghasilan.*
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Salemba Empat.
- Salim, Michel. 2008. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.* Jurnal Ilmiah STIE MDP. Palembang.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Cetakan ke-16 Bandung: Alfabeta Bandung.
- Susyanti, 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi.* Malang.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

PENGARUH KOMPONEN ARUS KAS DAN LABA BERSIH TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ 45 BURSA EFEK INDONESIA

Erwin¹, Henni Indriyani², M. Titan Terzaghi²
Dosen Universitas Bina Darma², Mahasiswa Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 12 Palembang
Pos-el: erwiineee10@gmail.com, henniinayah@gmail.com,
Mtitant@gmail.com

Abstract : *This study aims to examine whether there are significant components of cash flow and net income on stock prices. The population in this study consists of all companies listed in LQ 45 period in 2015. The samples used were as many as 45 companies. The results of this study showed that simultaneous variable operating cash flow, investing cash flows, financing cash flow and net income significantly influence stock prices. Partial variable investment cash flow and net income significantly influence stock prices with a positive direction. While variable operating cash flow and financing cash flow does not have a significant effect on stock prices.*

Keywords: *Operating Cash Flow, Cash Flow Investment, Financing Cash Flow, Earnings and Stock Price*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh komponen arus kas dan laba bersih terhadap harga saham. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 periode tahun 2015. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 45 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba bersih berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial variabel arus kas investasi dan laba bersih berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan arah positif. Sedangkan variabel arus kas operasi dan arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Kata Kunci : Arus Kas Operasi, Arus kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, Laba Bersih, dan Harga Saham

PENDAHULUAN

Pasar modal berperan sangat penting dalam perekonomian suatu Negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang membutuhkan dana (*issuer*) dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*investor*) dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*investor*) yang akan melakukan jual beli saham. Fungsi keuangan pada pasar modal merupakan *reward* bagi investor atas hasil investasinya.

Tentang penanaman saham pada pasar modal investor biasanya akan memilih perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus terutama dalam laporan keuangan dan biasanya perusahaan yang seperti ini akan mempunyai kesempatan yang relatif besar untuk mendapatkan dana dari *investor* dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai prospek yang jelas.

Sehingga investor harus mampu menyusun prakiraan harga sekuritas saham yang akan dibeli maupun dijual dari informasi laporan keuangan perusahaan yang ada. Agar harga tersebut dapat mencerminkan nilai *intrinsik* yang sebenarnya. Sehingga para *investor* yang bersedia menyalurkan dananya melalui

pasar modal dapat memiliki perasaan aman akan berinvestasi. Perasaan aman yang diperoleh investor ini terjadi karena memperoleh informasi yang jelas, wajar, dan tepat waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasinya. Karna pada dasarnya harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan/ kinerja perusahaan. Jika harga saham selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa Perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya. Kepercayaan tersebut bermanfaat bagi emiten, semakin banyak yang percaya terhadap suatu emiten maka keinginan untuk berinvestasi pada emiten akan semakin kuat. Semakin banyak permintaan saham pada suatu emiten maka semakin naik harga sahamnya

Sedangkan yang tidak kalah pentingnya bentuk tindakan lain dalam pengungkapan laporan keuangan adalah laporan arus kas, yang ditujukan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, hal ini dipertegas dengan PSAK No.2 yang mengatur tentang laporan arus kas dan menyatakan bahwa laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam asset bersihentitas, struktur keuangan dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah di dalam penanaman saham pada pasar modal.

Jika dilihat secara keseluruhan, indeks LQ 45 yang selama ini dikenal memiliki kapitalisasi pasar sebesar 75% dari kapitalisasi pasar secara keseluruhan serta dapat menggambarkan pergerakan

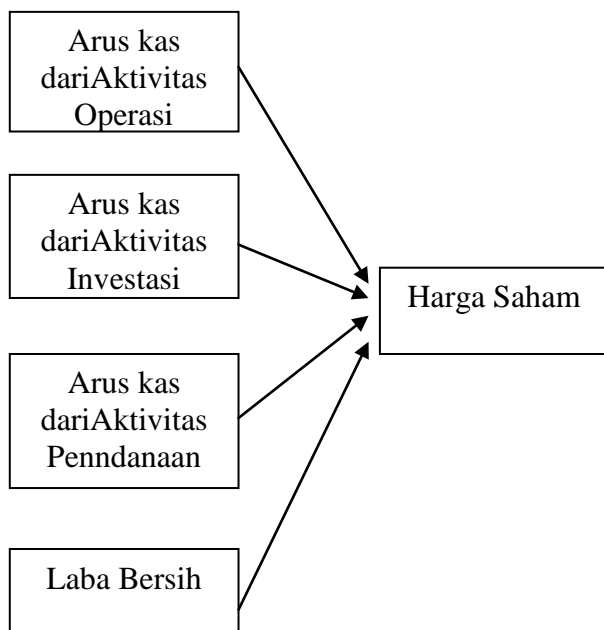
saham dan perdagangan secara aktif mempengaruhi keadaan pasar, tapi fakta ini berbanding terbalik seperti yang diungkapkan Oktavia (2014: 32) menyatakan bahwa ternyata indeks LQ 45 selama enam tahun belakang berada di bawah kinerja saham non-LQ45. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja LQ 45 periode 6 tahun terakhir sebelum tahun 2014 masih kurang baik jika dibandingkan dengan IHSG dan saham non-LQ 45.

Kinerja LQ45 tahun 2008-2013 kinerja LQ 45 selalu berada di bawah kinerja IHSG maupun saham non-LQ 45. Terlebih lagi di tahun 2010, pada saat itu LQ 45 membukukan keuntungan sebesar 32,7% , sedangkan IHSG berhasil mengungguli LQ 45 dengan mencatat keuntungan sebesar 46,1% berkat saham-saham non-LQ45 yang melejit 84,8%. Namun di tahun 2014 indeks LQ45 akhirnya berhasil mengungguli IHSG setelah sebelumnya 6 tahun berturut-turut selalu dikalahkan IHSG dan non-LQ 45 dengan mencatat keuntungan 49,2% sedangkan dipertengahan tahun 2015 indek harga saham LQ45 mencatat keuntungan 44,2% dan ihsg mencatat keuntungan 45,9%.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Komponen Arus kas Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia”**

2. Kerangka Pemikiran dan Dasar Teori

2.1 kerangka pemikiran



2.2 Dasar Teori

2.2.1. Arus Kas Operasi terhadap Harga Saham

Selain laba bersih, arus kas juga diperkirakan dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan baru dari luar (IAI, 2012). Menurut Tendelilin (2010: 324), data aliran kas perusahaan bisa memberikan pemahaman lebih mendalam bagi investor tentang perubahan harga saham yang terjadi.

Dari pemaparan di atas, dengan kata lain dapat dilihat bahwa semakin meningkat arus kas dari kegiatan operasi, maka semakin meningkat pula harga

saham di perusahaan tersebut. Sebaliknya jika arus kas operasi mengalami penurunan, maka harga saham perusahaan tersebut juga akan mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Vicky Oktavia (2008) yang menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

2.2.2 Arus Kas Investasi terhadap Harga Saham

Menurut Reeve *et al.* (2010 :263), arus kas dari kegiatan investasi (*cash flow from investing activities*) adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset nonlancar. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan (IAI, 2012). Oleh karena itu, jika arus kas investasi meningkat, maka arus kas dimasa yang akan datang juga akan meningkat. Hal tersebut akan menarik minat para investor untuk berinvestasi, sehingga permintaan terhadap perusahaan meningkat diikuti dengan harga saham yang meningkat pula. Sebaliknya jika arus kas investasi mengalami penurunan, maka harga saham juga akan mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan oleh Vicky Oktavia (2008) dan Evi Mutia (2012) menyatakan bahwa arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

2.2.3. Arus Kas Operasi terhadap Harga Saham

Arus kas pendanaan merupakan arus kas yang diperoleh karena adanya kegiatan

peminjaman atau pembayaran hutang, perolehan sumber daya dari pemilik perusahaan, serta pemberian imbalan atas investasi bagi pemilik perusahaan (IAI 2012). Menurut Hery (2013:126), arus kas aktivitas pembiayaan/pendanaan, meliputi transaksi-transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemilik dana (investor) dan kreditur. Maka semakin meningkat arus kas dari aktivitas pendanaan pada suatu perusahaan akan diikuti dengan peningkatan harga saham di perusahaan tersebut karena hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan akan mampu meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang. Sebaliknya jika arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan, maka harga saham perusahaan tersebut juga akan mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Taman (2009) menyatakan bahwa arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vicky Oktavia (2008) dan Evi Mutia (2012).

2.7.4. Laba Bersih terhadap Harga Saham

Labanya bersih perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat investor di pasar modal untuk menentukan pilihan dalam menanamkan investasinya, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh investor dalam menanamkan dananya adalah dengan cara membeli saham. Bagi perusahaan, menjaga dan meningkatkan laba bersih adalah suatu keharusan agar saham tetap eksis dan tetap diminati investor (Eva Ariesanti, 2008). Menurut Evi Mutia (2012),

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa semakin besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan, harga saham

cenderung mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, jika laba yang dilaporkan perusahaan menurun, maka permintaan terhadap saham perusahaan tersebut akan menurun dan berdampak pada harga saham yang juga menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Keni (2008), Abdullah Taman (2009), Evi Mutia (2012), dan Selvy Hartanto (2012) menyatakan bahwa variabel laba bersih mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham.

2.3 Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015. Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 pada periode tersebut adalah sebanyak 45 perusahaan. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, dengan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan regresi data panel. Menurut Widarjono (2013:355) ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi metode regresi data panel, yaitu *Statistik Deskriptif, Asumsi Klasik, Berganda, hipotesis*.

3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel arus kas operasi, arus kas pendanaan, laba bersih, dan harga saham pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ArusKasOperasi	45	141.062	45.544.908	5.588.005,84	10.458.690,869
ArusKasInvestasi	45	112.018	56.704.530	5.703.747,16	12.081.451,567
ArusKasPendanaan	45	130.689	13.408.000	2.417.620,22	2.727.137,391
LabaBersih	45	102.412	23.317.000	3.498.910,58	5.257.458,437
HargaSaham	45	343	94.000	8.855,20	16.554,255
Valid N (listwise)	45				

Sumber: data diolah, 2017

Rata-rata variabel arus kas operasi sebesar 5.588.005,84 dan standar deviasi sebesar 10.458.690,869, dengan nilai maksimum sebesar 45.544.908 dan nilai minimum sebesar 141.062. Rata-rata variabel arus kas investasi sebesar 5.703.747,16 dan standar deviasi sebesar 12.081.451,567, dengan nilai maksimum sebesar 56.704.530 dan nilai minimum sebesar 112.018. Rata-rata variabel arus kas pendanaan sebesar 2.417.620,22 dan standar deviasi sebesar 2.727.137,391, dengan nilai maksimum sebesar 13.408.000 dan nilai minimum sebesar 130.689. Rata-rata variabel laba bersih adalah 3.498.910,58 dan standar deviasi sebesar 5.257.458,437 dengan nilai maksimum sebesar 23.317.000 dan nilai minimum sebesar 102.412. Rata-rata variabel harga saham tahun 2015 sebesar

8.855,20 dan standar deviasi sebesar 16.554,255, dengan nilai maksimum sebesar 94.000 dan nilai minimum sebesar 343.

3.2 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel residual sebesar 0,101 dan signifikan pada 0,200 di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi normal yang memperkuat hasil pengujian dengan menggunakan grafik normal probability plot.

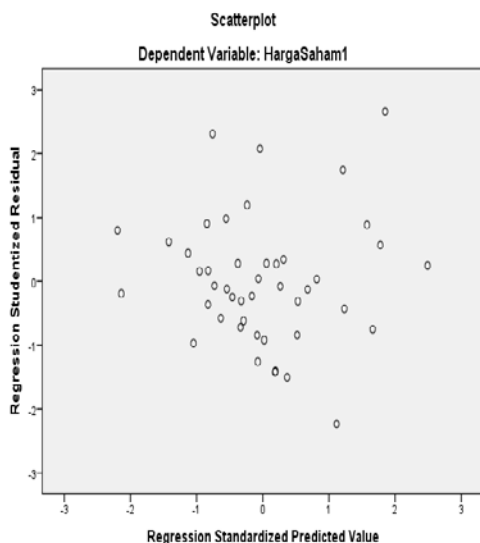
Tabel 3.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Aruskas Operasi	.602	1.660
Arus Kas Investasi	.900	1.111
Arus Kas Pedanaan	.599	1.668
Harga Saham	.925	1.081

a. Dependent Variable: Harga Saham
Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian nilai *tolerance* pada tabel 4.8 di atas, nilai VIF terendah dimiliki oleh variabel Harga Saham sebesar 1,081 sedangkan nilai VIF terbesar dimiliki oleh variabel Laba Bersih yaitu sebesar 1,668 maka nilai VIF untuk setiap variabel bebas < 10 , dengan angka

tolerance berkisar antara 0,599 sampai 0,925.



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.1, grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebut terlihat tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.10
Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1.360	.998		1.363	.181
ArusKasOperasi1	.051	.104	.076	.492	.626
ArusKasInvestasi1	.275	.108	.390	2.549	.015
ArusKasPendanaan1	-.197	.116	-.241	1.702	.097
LabaBersih1	.224	.106	.286	2.122	.040

a. Dependent Variable: HargaSaham1

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut pada kolom B, tercantum nilai konstanta dan nilai-nilai koefisien regresi linear berganda untuk masing-masing variabel bebas. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat ditentukan model regresi linear berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut.

$$Y = 1.360 + (0,076X_1) + (0,390X_2) + (-0,241X_3) + (0,286X_4)$$

Dari persamaan model regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta sebesar 1.360 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen (Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, dan Laba Bersih), maka tingkat Harga Saham yang dihasilkan adalah sebesar 1.360.
2. B_1 sebesar 0,076 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Arus Kas Operasi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Harga Saham sebesar 0,076 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. B_2 sebesar 0,390 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Arus Kas Investasi sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Harga Saham sebesar 0,390 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. B_3 sebesar -0,241 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Arus Kas Pendanaan sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Harga Saham sebesar -0,241 dengan asumsi variabel lain tetap.
5. B_4 sebesar 0,289 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Laba Bersih sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Harga Saham sebesar 0,289 dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 4.11
Adjusted R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.545 ^a	.297	.227	.33276	.297	4.221	4	40	.006

a. Predictors: (Constant), LabaBersih1, ArusKasPendanaan1, ArusKasInvestasi1, ArusKasOperasi1

b. Dependent Variable: HargaSaham1

Sumber: data diolah, 2017

Pada tampilan tabel 4.7 model summary besarnya koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai adjusted R² yaitu 0,297, hal ini berarti 29,7% variabel kebijakan dividen yang diprosikan dengan Harga Saham dapat dijelaskan oleh variabel komponen Arus Kas dan Laba Bersih sedangkan sisanya 70,3% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

3.3 Hasil Regresi Simultan (uji f)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test di atas, didapat F sebesar 4.221 dengan tingkat probabilitas 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa Komponen Arus Kas dan Laba Bersih berpengaruh secara bersama terhadap Harga Saham.

3.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah:

1. Komponen Arus Kas dari Aktivitas Operasi berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.
2. Komponen Arus Kas dari Aktivitas Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.
3. Komponen Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.
4. Laba Bersih berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham .

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

1. Arus Kas Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. hasil pengujian uji t diperoleh nilai t sebesar 0,492 dengan nilai signifikansi sebesar 0,626. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,626 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Arus Kas Operasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham.
2. Arus Kas Investasi berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. Hasil pengujian uji t diperoleh nilai t sebesar 2.549 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,015 < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Arus Kas Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham.
3. Arus Kas Pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. Hasil pengujian uji t diperoleh nilai t sebesar -1,702 dengan nilai signifikansi sebesar 0,097 Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,097 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel

Arus Kas Pendanaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham.

4. Laba Bersih berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. Hasil pengujian uji t diperoleh nilai t sebesar 2.122 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,047 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Laba Bersih berpengaruh negatif signifikan terhadap Harga Saham.

Setelah melakukan analisis regresi berganda dari tabel 4.12 diatas, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi, Persamaan tersebut dapat menunjukkan jika seluruh variabel bebas yaitu Komponen Arus Kas dan Laba Bersih bernilai 0, maka aksebilitas Harga Saham nilainya negatif 1.360.

4.Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uji secara parsial, didapat hasil sebagai Berikut:

1. Arus Kas Operasi mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.588.005,84 dengan standar deviasi sebesar 10.458.690,869 standar deviasi ini lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) Arus Kas Operasi. Nilai rata-rata dari Aktivitas Operasi 5.588.005,844, nilai minimum sebesar 167.069 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 45.544.908 lebih besar dari nilai rata-ratanya, Arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
2. Arus Kas Investasi mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.703.747,16 dengan standar deviasi sebesar 12.081.451,567 standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) Arus Kas Investasi. Nilai rata-rata dari Aktivitas Investasi 11.159.505,3, nilai minimum sebesar 112.018 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 56.704.530 yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, Arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan arah hubungan positif. Artinya semakin meningkat arus kas investasi maka semakin meningkat pula harga saham.
3. Arus Kas Pendanaan mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2.417.620,22 dengan standar deviasi sebesar 2.727.137,391 standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) Arus Kas Pendanaan. Nilai rata-rata dari Aktivitas Pendanaan 4.695.219,681, nilai minimum sebesar 130.689 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 13.408.000 yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, Arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
4. Laba Bersih mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.498.910,58 dengan standar deviasi sebesar 5.257.458,437 standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) Laba Bersih. Nilai rata-rata dari Laba Bersih 5.805.864,348, nilai minimum sebesar 102.412 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 23.317.000 yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, Laba bersih berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan dengan arah hubungan positif.

Artinya semakin meningkat laba bersih maka semakin meningkat pula harga saham.

Daftar Pustaka

- Ariesanti, Eva. (2008). *Pengaruh Laba Bersih Terhadap Harga Saham (Sensus pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Jurnal Akuntansi FE Unsil Volume 3 Nomor 1.
- Arifin, Zaenal. (2011). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hartanto, Selvi. (2012). *Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham*. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 7 Tahun Ke-3 Januari-April..
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jogiyanto. (2009). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: PT. BPF E Yogyakarta.
- Keni. (2008). *Pengaruh Arus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Kimia yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Akuntansi Tahun XII Nomor 2 Mei: 155-166.
- Mobile.kontan.co.id/news_wak
eup/270/Salah-
kprah-di-bursa-
saham(diakses
tanggal 13 Mei 2015)
- Mutia, Evi. (2012). *Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham*. Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1 Oktober: 12-22.
- Oktavia, Vicky. (2008). *Analisis Pengaruh Total Arus Kas, Komponen Arus Kas, dan Laba Akuntansi Terhadap Harga Saham di Bursa Efek Jakarta (Studi Kasus pada Saham LQ 45 Periode 2002-2004)*. Universitas Diponegoro.
- Mangunsong, S., dan Marpaung, E. I. (2001). *Pengaruh Fee Based Income Terhadap Laba Per Lembar Saham*. Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (1), hal. 1-25.
- Hartono, J. (2010). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPF E. Munawir, S 2011. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Yogyakarta : BPF E UGM
- Revee, et al. (2010). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia (Buku Dua)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taman, Abdullah. (2009). *Asosiasi Antara Laba dan Arus Kas terhadap Harga Saham: Bukti Empiris pada Perusahaan Keuangan di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Volume 8 Nomor 1 Halaman 1-8.
- Tandelilin, Eduardus. (2010). *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Widarjono, Agus. (2013).
Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono, Jogyanto. 2009. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi keenam*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
- sogyanto .2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Kieso, Donald E. 2015. *Accounting Intermediate Jilid Satu Edisi Keduabelas*. Jakarta:Erlangga.
- Meythi & Selvy Hartono. 2012. *Pengaruh Informasi Laba Dan Arus Kas Terhadap Harga Saham. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi No. 7* hal: 1-17.
- Bursa Efek Indonesia. *Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan LQ-45 Selama Tahun 2015*. www.idx.co.id. Diunduh tanggal 6 Mei 2016.
- Meythi., dan Hartono, S. (2012). *Pengaruh Informasi Laba dan Arus Kas Terhadap Harga Saham. Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3 (7).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.idx.co.id> diakses 26 November 2016

PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015

Fitri Ayu, Henni Indriyani¹, Andrian Noviardy²
Dosen Universitas Bina Darma^{2.2}, Mahasiswa Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el ayfitriayu@gmail.com, henniinayah@gmail.com¹,
andrian.noviardy@binadarma.ac.id

ABSTRACT : *The purpose of this study was to investigate the effect of disclosure of corporate social responsibility (CSR) to the financial performance in the food and beverage manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2013-2015. The study sample consisted of 10 food and beverage manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) by the number of observations at 16 and selected by purposive sampling. Data audited financial statements and annual reports obtained from Indo-File Exchange (IDX). Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis to examine the effect of disclosure of corporate social responsibility (CSR) on financial performance. In this study the variable corporate social responsibility (CSR) is measured using a control variable, and financial performance is measured by using Return On Assets (ROA), Return on Equity (ROE). Results of research by multiple regression showed that corporate social responsibility (CSR) has no effect on the financial performance.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE)*

ABSTRAK : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Sampel penelitian terdiri dari 10 perusahaan Manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah pengamatan sebesar 16 dan dipilih secara *purposive sampling*. Data laporan keuangan auditan dan laporan tahunan diperoleh dari *Indo-Exchange File* (IDX). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini variabel *corporate social responsibility* (CSR) diukur menggunakan variabel kontrol, dan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE). Hasil penelitian dengan regresi berganda menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility, Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE)*

A. PENDAHULUAN

Pendirian suatu perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Menurut Wira (2015 : 27) peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh

tersebut perusahaan akan mampu memberikan deviden kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan didalam masyarakat.

Keberadaan perusahaan di dalam masyarakat dinilai memberikan dampak positif dan negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Di satu sisi perusahaan dinilai memberikan kontribusi yang positif berupa

penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat merasakan dampak yang negatif yang diakibatkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Banyak perusahaan yang dinilai telah memberikan kontribusi yang baik untuk perkembangan ekonomi tetapi juga menerima kritik karena aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan menimbulkan dampak buruk bagi kondisi sosial dan lingkungan masyarakat.

Banyaknya pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat disekitar perusahaan menimbulkan klaim masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. Klaim masyarakat tersebut mendorong perusahaan untuk aktif berpartisipasi dalam aktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberikan informasi yang transparan atas tanggung jawabnya terhadap aktivitas lingkungan yang dilakukan. Menurut Andreas (2011 : 20) terdapat alasan perusahaan perlu mengungkapkan aktivitas lingkungan dan sosialnya. Perusahaan dapat melakukan penekanan akan timbulnya masalah-masalah sosial yang dikarenakan adanya ketidakpuasan kebijakan perusahaan terhadap lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut salah satunya caranya perusahaan harus mempedulikan keadaan lingkungan

sosial. Laporan tahunan dapat digunakan sebagai salah satu media pengungkapan sosial perusahaan.

CSR dapat menarik simpati dan dukungan dari stakeholder sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dimana para investor cenderung menanamkan modal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Oleh karena itu, Zuhroh dan Sukmawati (2009) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial melalui kegiatan CSR sebagai salah satu keunggulan kompetitifnya. Kemudian Eipstein dan Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial perusahaan dan dituntut atas pengelolaan dana yang diberikan beserta dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosial.

CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitasnya kepada masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma

perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan penting dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, dan bagi perusahaan yang telah go public nilai perusahaan akan tercermin pada harga pasar saham.

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran – ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam mengukur kinerja keuangan perlu diakaitkan antara perusahaan dengan pusat pertanggungjawaban Rudito (2013 : 97). Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan. Dalam evaluasi kinerja keuangan tentunya memerlukan standar tertentu baik bersifat eksternal maupun internal. Standar eksternal mengacu pada competitive benchmarking yang merupakan perbandingan perusahaan dengan pesaing utama atau industri.

Menurut Munawir (2002:269) dalam Nurfiqri (2015:24) “Return On Asset merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keungan yang ditanamkan oleh perusahaan”. Rasio ROA ini sering

dipakai manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai kinerja operasional dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, disamping perlu mempertimbangkan masalah pembiayaan terhadap aktiva tersebut. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktivayang ada dapat menghasilkan laba.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Menurut Sartono (2008:68) dalam Nurfiqri (2015:25) “Return on Assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan”. Return on Asset mengukur berapa persentase laba bersih sesudah pajak terhadap total aset perusahaan tersebut.

Rumus ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Wira (2015) ROE merupakan salah satu alat utama investor yang digunakan dalam menilai kelayakan suatu saham. Melihat gambaran ROE mengenai tiga hal di atas maka dapat dirumuskan perhitungan ROE sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Menurut Wira (2015 : 29). Pasar modal (*Capital Market*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Mengapa pasar modal dijumpai dibanyak negara? Karena pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower.

Menurut Samsul (2010 : 61) legitimasi menjadi dasar perusahaan melakukan pengungkapan aktivitas CSR karena teori legitimasi dipandang sebagai *perspective orientation system*, yakni perusahaan dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh komunitas dimana perusahaan melakukan kegiatannya.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan mulai tahun 2013 sampai 2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data – data tersebut digunakan untuk menghitung indeks CSR.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Perbedaan tahun penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kinerja perusahaan satu tahun yang akan datang. Berdasarkan populasi tersebut akan ditentukan sampel sebagai objek penelitian.

3. Definisi Operasional Variabel

Variabel independennya adalah pengungkapan CSR, dengan menggunakan pengukuran Index CSR. Disini variabel Independen yang berupa CSR(Ekonomi, Lingkungan, Sosial, Tenaga Kerja, Hak Asasi Manusia, dan Tanggung Jawab Produk) diukur secara simultan dan parsial pengaruhnya terhadap variabel dependen.

4. Teknik Analisis Penelitian

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data

yang digunakan telah terdistribusi secara normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau sebelumnya (Ghozali, 2006).

3. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu hubungan linier yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengukur terjadinya ketidaksamaan *variance* dari satu pengamatan kepengamatan lainnya.

5. Analisis Regresi Sederhana

Persamaan untuk mengetahui pengaruh variabel CSR terhadap profitabilitas perusahaan (diukur dengan ROA dan ROE), adalah:

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

X = Pengungkapan
*Corporate Social
Responsibility Index*
Perusahaan

b = Koefisien regresi
untuk mengukur besarnya
pengaruh X terhadap Y

b_{X1} = Ekonomi

b_{X2} = Sosial

b_{X3} = Lingkungan

a = Konstanta

b. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig) di mana jika nilai sig di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen atau variabel

penjelas secara individu dalam menerangkan variabel dependen.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan dalam tabel-tabel sebagai berikut.

1. Normalitas

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	LN_CSR	LN_ROA	LN_ROE	
N	30	29	29	
Normal	Mean	-2.4427	2.2975	2.9586
Parameter ^{a,b}	Std. Deviation	.58825	.89305	.88432
Most	Absolute	.131	.179	.190
Extreme	Positive	.110	.179	.190
Differences	Negative	-.131	-.137	-.146
Test Statistic		.131	.179	.190
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.018 ^c	.009 ^c

2. Uji Autokorelasi

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi Model I

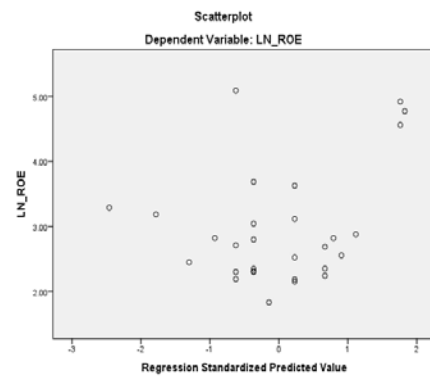
Model Summary^b

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson	
				R Square	F Change	df1	df2	Sig.		
1	.300 ^a	.090	.056	.86751	.090	2.673	1	27	.114	2.286

3. Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Ln CSR	1.000	1.000

4. Heteroskedastisitas



5. Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1 (Constant)	3.390	.668	4.931	.000
Ln CSR	.448	.274	.300	.114

b. Pembahasan

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Hasil penelitian pada model II tabel 4.16 menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan ROA. Hasil uji hipotesis diketahui bahwa variabel CSR menunjukkan t_{hitung} 1,635 lebih kecil dari t_{tabel} 1,703 dan nilai signifikan 0,114 sebesar lebih besar dari 0,05, sehingga H1 ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Cinthya (2014) CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya praktik CSR tidak mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini diakibatkan oleh variabel CSR tidak dapat diukur langsung. Sebagian perusahaan hanya berfokus pada faktor keuangan, sehingga perusahaan kurang berfokus pada non keuangan, misalnya CSR.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Diah (2012) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan CSR sebagai variabel independen berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. CSR dalam penelitian ini hanya menjelaskan luasnya pengungkapan CSR saja.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen dengan menggunakan variabel kontrol ROA dan ROE. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan antara periode penelitian yang kurang panjang penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur makanan dan minuman.
2. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai ROA dan ROE tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena kinerja keuangan perusahaan tidak

dapat dilihat dari laba / keuntungan perusahaannya saja.

Saran

1. Seharusnya perusahaan senantiasa memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk jaminan bagi *stakeholders* atas keterpenuhan berbagai harapan mereka. *Stakeholder* yang membentuk lingkungan bisnis perusahaan merupakan unsur penting bagi keberlanjutan perusahaan, oleh karena itu dengan memenuhi kebutuhan *stakeholder* artinya perusahaan juga menjaga keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan anual report tetapi juga menggunakan laporan lingkungan yang lain agar data penginputan item-item CSR lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Lako 2013. *Dekonstruksi Csr dan Reformasi Paradigma bisnis dan akuntansi* dan bisnis Jakarta : Badan Penerbit Erlangga
- Almilia, L. dan D. Wijayanto. 2007. "Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance." FEUI, *The 1st Accounting Conference*, 7-9 September.
- Ambadar, J. 2008. *CSR Dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Anggraini, Fr. R. R. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)." *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang, 23-26 Agustus.
- Carolina, S. A. 2007. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Tobin's Q)." *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Dahlia, L. dan S. V. Siregar. 2008. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan. (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2005 dan 2006)." *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Pontianak, 23-26 Juli.
- Drever, M., Stanton P., and McGowan S. 2007. "Contemporary Issues in Accounting." *dipublikasi John Wiley & Sons, Australia*.
- Febryani, A. dan R. Zulfadin. 2003. "Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 4, Desember : 38-54.

- Hartono, J. 2012. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi 2012. Yogyakarta: BPFPE.
- Kuncoro, 2011. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ketiga. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Y. 10 Nopember 2007.
- Nurlela, R. dan Islahuddin. 2008. "Pengaruh Corporate Social Reponsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen sebagai Variabel Moderating." *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak, 23-26 Juli.
- Maksum, A. dan A. Kholis. 2003. "Analisis tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (Corporate Responsibilities And Social Accounting), Studi Kasus Empiris di Kota Medan." *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 3 No. 2, Agustus : 101-132.
- Melia Famiola 2015. *Teori Corporate Social Responsibility*. Edisi 2015. Yogyakarta: BPFPE.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- "Dilema Tanggung Jawab Korporasi." *Kumpulan Tulisan*, n.p., <http://www.unisosdem.org>. (dilihat pada tanggal 16 Nopember 2016).

**“EVALUASI EMPIRIS KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL
TEMUAN AUDIT BPK RI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA SELATAN”**

Indah Permata Sari¹, Verawaty², Septiani Fransisca³
Dosen Universitas Bina Darma¹, Mahasiswa Universitas Bina Darma².
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Pos-sel: indahdt18@yahoo.com , verawaty_mahyudin@yahoo.com ,
Septiani_Fransisca@binadarma.ac.id

Abstract

This study aimed to examine the effect of the characteristics of the local government (the level of wealth of local government, the level of dependence of local governments on the central government, the shopping area and than the findings of BPK (Republic of Indonesian) to report Performance accountability of Government Agencies and the district town in South Sumatra. Population Research hearts singer that there are 18 provincial governments and district / city. The total sample there are 16 provinces and districts / cities. All of it based on the category selected by using purposive sampling. All of it based on the category selected by using a sampling purposive. The test results of the variables X and Y in this study showed three had no significant effect and a significant effect, namely the level of wealth of local government, the level of dependency of local governments from dependence on the central government and regional expenditure does not significantly influence performance accountability reports of government agencies of provincial and district / city in Southern Sumatra, while the BPK audit findings significant effect on agency performance accountability report.

Keywords: *Characteristics of the local government , the level of wealth of local government, the level of dependence of local governments on the central government, the shopping area and than the findings of BPK Republic of Indonesian, BPK RI audit findings and report Performance accountability of Government Agencies and the district town in South Sumatra.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah (tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, daerah perbelanjaan dan dari temuan BPK Republik Indonesia) terhadap laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dan kabupaten kota di Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini bahwa ada 18 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten / kota, total sampel ada 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Semua itu berdasarkan kategori yang dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Hasil pengujian terhadap variable X dan Y pada penelitian ini menunjukkan tiga tidak berpengaruh signifikan dan satu berpengaruh signifikan, yaitu tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada ketergantungan pemerintah pusat dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi dan kabupaten / kota di sumatera selatan, sedangkan temuan audit BPK RI berpengaruh signifikan terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi.

Kata Kunci : **Karakteristik pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, daerah perbelanjaan dan dari temuan BPK Republik Indonesia dan laporan akuntabilitas kinerja instansi.**

1. PENDAHULUAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan. Pendanaan sendiri akan dapat diterima oleh penyedia

dana (investor dan kreditur), jika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari perwujudan *good governance* yang sedang dilakukan di Indonesia,

karena menurut Suyanto (2010), akuntabilitas merupakan kunci dari konsep *good governance*, untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, dan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (BPKP, 2007).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN dan RB) mempunyai tugas untuk melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintahan. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui evaluasi (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inarto, 2013). Tujuan dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, dan melihat bagaimana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk pengelompokan predikat, yaitu kategori AA (memuaskan), kategori A (sangat baik), kategori BB (baik), kategori CC (cukup baik/memadai), kategori C

2. TINJAUAN

2.1.1 Pengertian teori keagenan

Menurut Halim dan Abdullah (2006), teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lain disebut

(agak kurang), dan kategori D (kurang). Dalam penelitian ini, evaluasi empiris karakteristik pemerintah daerah yaitu tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK RI.

Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu peneliti ingin menerapkan penelitian terdahulu yang dilakukan di Jawa Timur dilakukan juga diseluruh pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk melihat apakah terdapat perbedaan dan hasil antara karakteristik pemerintah daerah yaitu tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK RI terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama periode 2014. Yang melandasi penelitian ini yaitu melihat banyaknya pembangunan prasarana publik yang telah dibangun di pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan mulai dari proyek LRT yang berada di Palembang, pembangunan jalan Tol Palembang Indralaya, pembagunan sarana olahraga bertaraf Internasional di Jakabaring serta taman-taman kota yang berada di pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang tersebar di Sumatera Selatan. Semua belanja dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatanyang bersangkutan.

agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Dalam pengertian sempit, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) harus bertanggungjawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan inti filosofis dalam manajemen sektor publik.

2.1.3 Pengertian Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.4 Pengertian Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasisi (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut PP Nomor 55 tahun 2005, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.5 Pengertian Belanja Daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Belanja daerah dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdulah, 2006).

2.1.6 Pengertian Temuan Audit BPK RI

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan. Menurut Hall (2007), audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara *internal* bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

Audit dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Audit eksternal seringkali disebut sebagai audit independen karena dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang independen dari manajemen perusahaan kliennya. Auditor eksternal mewakili berbagai kepentingan pemegang kepentingan pihak ketiga atas perusahaan, seperti pemegang saham, *kreditor* dan badan pemerintah (Hall, 2007).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1

Tujuan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Reynaldi Riantiarno dan Nur Azlina (2011).	Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Penerapan akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Secara umum variabel penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas tetapi sebaliknya pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Amy fontanella dan Hilda Rossieta (2014).	Pengaruh desentralisasi fiscal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.	Kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat serta kinerja penyelenggara pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.	Tingkat kemandirian daerah serta kinerja penyelenggara pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara.	Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Taufeni taufik (2013)	Peran monitoring dan evaluasi terhadap system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Peran monitoring dan evaluasi laporan terhadap system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Dalam penyelenggaraan Negara pemangku kebijakan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan kepada <i>stakeholders</i> dan dan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dari

			tahun ke tahun mengalami perbaikan.
Ary Suharyanto dan Sutaryo (2016),	Pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia.	Level kapabilitas APIP, jumlah auditor APIP, jenjang pendidikan auditor APIP, latar belakang pendidikan auditor APIP terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia.	Level kapabilitas APIP, latar belakang pendidikan auditor APIP, berpengaruh pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sedangkan , jumlah auditor APIP, jenjang pendidikan auditor APIP, tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Fandy Nurdin (2013)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.	Tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanda daerah serta temuan audit BPK RI.	Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negative, tingkat belanja daerah tidak berpengaruh dan temuan audit bpk tidak berpengaruh, terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis Penelitian

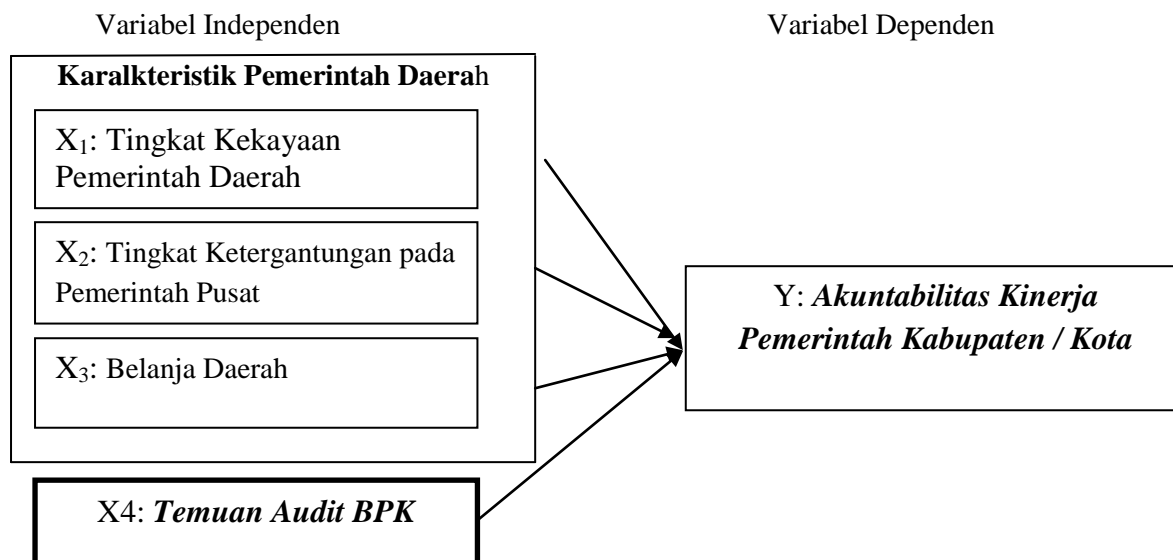
H_1 : *Tingkat kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.*

H_2 : *Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.*

H_3 : *Tingkat Belanja Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.*

H_4 : *Temuan Audit BPK RI berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.*

2.4 Kerangka Penelitian



3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014 yang mempunyai laporan keuangan dan variabel penelitian yang di teliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi 2014). Populasi penelitian ini mencakup seluruh pemerintah provinsi kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Yang memiliki laporan keuangan, serta laporan yang kecurangan yang ditemukan oleh audit BPK RI sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah (tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan

pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah) dan temuan audit BPK RI, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

3.3 Sumber Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Suryana (2010), data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada. Data penelitian ini berasal dari laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD), data laporan hasil temuan audit BPK RI tahun 2014 serta data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang disusun pada tahun tahun 2014 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan yang diperoleh dari situs www.djpk.depkeu.go.id, www.bps.go.id dan www.menpan.go.id.

Tabel 3.1
Daftar Populasi

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kotap
1.	Kab. Ogan Komering Ulu	10.	Kab. Ogan Ilir
2.	Kab. Ogan Komering Ilir	11.	Kab. Empat Lawang
3.	Kab. Muara Enim	12.	Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir
4.	Kab. Lahat	13.	Kab. Musi Rawas Utara
5.	Kab. Musi Rawas	14.	Kota Palembang
6.	Kab. Musi Banyuasin	15.	Kota Prabumulih
7.	Kab. Banyu Asin	16.	Kota Pagar alam
8.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	17.	Kota Lubuklinggau
9.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	18.	Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: www.palembangsumsel.go.id

Adapun teknik penentuan sampel alam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan syarat dengan kriteria-kriteria sehingga disesuaikan dengan objek penelitian. Dari populasi 18 hanya ada 16 yang dijadikan sampel, jadi data sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16

sampel. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:

1. Merupakan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan
2. Memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti melalui website.

Tabel 3.2
Data Sampel Periode 2014

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Ogan Komering Ulu	9.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
2.	Kab. Ogan Komering Ilir	10.	Kab. Ogan Ilir
3.	Kab. Muara Enim	11.	Kab. Empat Lawang
4.	Kab. Lahat	12.	Kota Palembang
5.	Kab. Musi Rawas	13.	Kota Prabumulih
6.	Kab. Musi Banyuasin	14.	Kota Pagar Alam
7.	Kab. Banyuasin	15.	Kota Lubuklinggau
8.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	16.	Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Data diolah

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Pengertian variabel penelitian menurut Sanusi (2014), adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini adalah skor kinerja yang berasal dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN dan RB) pada tahun 2014. Dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi AKIP diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Hasil dari pelaksanaan evaluasi selesai secara keseluruhan, KEMENPAN dan RB memberikan peringkat nilai dengan sebutan:

AA (memuaskan), A (sangat baik), BB (baik), CC (cukup memadai), C (agak kurang), dan D (kurang). Hasil evaluasi berupa skor skala 1-6 dan dikategorikan dalam beberapa rentang penilaian meliputi AA (6), A (5), B (4), CC (3), C (2), D (1).

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, belanja daerah dan hasil temuan audit BPK RI.

1. Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah yang diukur melalui elemen PAD (Haryanto, 2000). Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah,

pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini menggunakan realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi total pendapatan sebagai proksi untuk mengukur kekayaan pemerintah daerah. Proksi tersebut digunakan agar perbandingan kekayaan antar daerah menjadi merata, karena masing-masing daerah mempunyai realisasi PAD yang beragam tergantung dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki daerahnya, sehingga akan tergambar berapa persentase PAD dalam pendapatan daerah. Proksi tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

2. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah selain dari PAD adalah dana transfer dari pemerintah pusat. PAD mencerminkan kondisi pembiayaan riil daerah, jika struktur PAD sudah kuat maka daerah tersebut memiliki pembiayaan yang kuat juga, sedangkan DAU dan berbagai bentuk transfer lainnya seyogyanya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Salah satu dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah adalah dana perimbangan. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam penelitian ini ketergantungan pada pemerintah pusat diproksikan dengan realisasi dana perimbangan dibandingkan dengan realisasi total pendapatan. Proksi tersebut digunakan agar

perbandingan tingkat ketergantungan menjadi merata, karena masing-masing daerah mempunyai Dana perimbangan yang beragam, dengan membandingkan dengan total pendapatan daerah akan tergambar berapa besar persentase dana perimbangan dalam pendapatan daerah proksi tersebut dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Kepmendagri Nomor 13, 2006). Dalam kaitan akuntabilitas realisasi belanja daerah merupakan penggunaan dari sumber daya keuangan yang diperoleh melalui penerimaan daerah untuk menjalankan program/kegiatan. Dalam penelitian ini belanja daerah adalah realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Prinsip keadilan anggaran mewajibkan belanja daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan umum harus dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, belanja harus menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan masyarakat. Ini bermakna bahwa setiap pos belanja daerah harus dapat diukur kinerjanya.

4. Temuan Audit BPK RI

Output dari pemeriksaan BPK yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang di dalamnya terdapat opini atas LKPD serta temuan-temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Petunjuk

Teknis Koding Temuan Pemeriksaan, temuan pemeriksaan terdiri dari Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Temuan Ketidapatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta Temuan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) (BPK, 2011).

Penelitian sebelumnya dilakukan Hilmi (2012), mengukur temuan audit kepatuhan BPK dengan temuan kepatuhan (dalam rupiah) dibandingkan dengan total belanja, sedangkan Mustikarini dan Fitriyasi (2012), menggunakan temuan kepatuhan (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Temuan audit BPK penelitian ini menggunakan jumlah temuan

(dalam rupiah) yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangn dalam rangkaian pemeriksaan LKPD, dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah. Proksi tersebut digunakan karena temuan audit BPK RI dipengaruhi besaran realisasi belanja, semakin besar belanja maka kecenderungan temuan akan meningkat sehingga dengan membandingkan dengan realisasi belanja akan tercermin berapa persentase temuan terhadap belanja.

Definisi Operasional atas variabel diatas dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Definisi Operasional

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (peringkat evaluasi LAKIP).	<i>Ordinal</i>
Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah (X1)	Pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah. • Total Realisasi Pendapatan Daerah. 	<i>Rasio</i>
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X2)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi Dana Perimbangan. • Total Realisasi Pendapatan Daerah. 	<i>Rasio</i>
Belanja Daerah (X3)	Realisasi Belanja Daerah merupakan penggunaan dari sumber daya keuangan yang diperoleh melalui penerimaan daerah untuk menjalankan program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Belanja Daerah. 	<i>Nominal</i>
Temuan Audit BPK RI (X4)	pemeriksaan BPK yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang di dalamnya terdapat opini atas LKPD	Jumlah Temuan Audit BPK RI.	<i>Nominal</i>

	serta temuan-temuan hasil pemeriksaan.		
--	--	--	--

4.1 Rancangan Analisis Data

4.1.1 Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2014. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan realisasi anggaran tahun 2014, hasil temuan Audit BPK RI tahun 2014, dan data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2014 yang terdapat dalam *website* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan *website* Badan Pusat

Statistik. Penarikan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2014 dan 2 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang tidak termasuk dalam sampel penelitian ini adalah Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) dan Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir (PALI) yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Berikut ini deskripsi penarikan sampel penelitian:

Tabel 4.1
Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Frekuensi
1.	Merupakan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan	18	100%
2.	Tidak memiliki kelengkapan data informasi keuangan variabel-variabel yang akan diteliti pada website pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.	(2)	(11%)
Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pada Sampel Penelitian		16	89%

4.1.2 Deskripsi Variabel Bebas (*Independent Variable*)

4.1.2.1 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah (TKPD)

Semakin kaya pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan dengan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pada daerah tersebut. Pada variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah cara menentukannya yaitu jumlah realisasi pendapatan asli daerah di bagi dengan total realisasi pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPD tertinggi yaitu Kota

Palembang sebesar 0,25. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai TKPD terendah yaitu kabupaten Empat lawang dan Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 0,04. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut nilai rata-rata TKPD sebesar 0,08. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPD di atas rata-rata yaitu ada 4 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki nilai TKPD di bawah rata-rata sejumlah 12 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4.1.2.2 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat (TKPDPP)

Suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat yang rendah. Dengan demikian semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat maka bisa dikatakan daerah tersebut merupakan daerah yang mandiri tidak mengharapkan bantuan pada pemerintah pusat. Pada variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi dana perimbangan yang dibagi dengan total realisasi pendapatan daerah yang dihitung berdasarkan dengan laporan realisasi anggaran tahun bersangkutan.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPDPP tertinggi yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,91. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai TKPDPP terendah yaitu Kota Palembang sebesar 0,54. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut nilai rata-rata TKPDPP sebesar 0,79. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPDPP di atas rata-rata yaitu ada 9 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai TKPDPP di bawah rata-rata sejumlah 7 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota..

4.1.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah menggambarkan perbandingan antara belanja daerah langsung dan belanja daerah tidak langsung. Hal ini mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi apa yang direncanakan. Dengan demikian semakin efisien keuangan daerah maka alokasi belanja daerah tersebut telah tepat. Variabel belanja daerah diukur dengan cara belanja tidak langsung ditambah dengan belanja langsung yang terdapat pada laporan realisasi anggaran pemerintah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun tersebut.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai belanja daerah tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 22.445.550.985,-. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai belanja daerah terendah yaitu Kota Pagar Alam Rp. 808.211.981 dan Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 818.399.354,-. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut nilai rata-rata belanja daerah sebesar Rp. 2.742.901.138. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai belanja daerah di atas rata-rata yaitu ada 3 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai belanja daerah di bawah rata-rata sejumlah 13 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di.

4.1.2.4 Hasil Temuan Audit BPK RI (HTA BPK RI)

Hasil temuan audit BPK RI adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semakin banyak temuan audit maka semakin banyak tinggi pula tingkat akuntabilitas pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tersebut .

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki hasil Temuan Audit BPK RI tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Selatan yaitu memiliki 23 hasil temuan audit BPK RI. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan hasil temuan audit BPK RI terendah yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas sebesar 11 hasil temuan audit BPK RI. Dari 16 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut nilai rata-rata 17 hasil temuan audit BPK RI. Jumlah pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki hasil temuan audit BPK RI di atas rata-rata yaitu ada 7 pemerintah Provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota, sedangkan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki hasil temuan audit BPK RI di bawah rata-rata sejumlah 9 pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

4.1.3 Deskripsi Variabel Terikat (Dependent Variable)

4.1.3.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan akuntabilitas kinerja yaitu dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik pemerintah daerah dan hasil temuan audit BPK RI terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin kaya pemerintah daerah tersebut maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas (pertanggungjawaban) daerah tersebut kepada pemerintah pusat atas hasil kekayaan daerah tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah tersebut dengan dana

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tertinggi yaitu pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau sebesar 3. Adapun pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terendah yaitu Kabupaten Empat Lawang sebesar 1.

APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak.

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Alasan karena semakin tinggi tingkat belanja daerah baik belanja langsung atau pun belanja tidak langsung menggunakan dana APBD pada daerahnya maka akan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas (pertanggungjawaban) pada pemerintah pusat atas pengeluaran belanja daerah pada pemerintah daerah tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis belanja daerah berpengaruh terhadap pengalokasian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditolak.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis hasil temuan audit BPK RI memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semakin banyak tingkat temuan audit yang dilakukan oleh lembaga independen Negara BPK RI terhadap daerah tersebut maka akan semakin tinggi pula tingkat

akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut atas laporan hasil temuan tersebut. Namun, hasil evaluasi empiris pada penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis hasil temuan audit BPK RI berpengaruh negatif terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data tahun 2014, dan hanya meneliti satu provinsi saja yaitu semua pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Penelitian selanjutnya agar menggunakan tahun yang lebih baru dan lebih panjang serta penambahan tidak hanya satu provinsi saja tetapi semua provinsi yang ada di Indonesia. Selain dengan periode yang lebih panjang dan

provinsi yang lebih banyak sehingga diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik.

2. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan melalui tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, belanja daerah serta hasil temuan audit BPK RI tahun 2014. Variabel tersebut hanya menjelaskan sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih variatif seperti opini atas LKPD, indikator kinerja kunci (IKK), serta tidak hanya melihat dari data keuangan tetapi variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, misalnya kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan LAKIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rusdi., Pilcher, Robyn dan Perrin, Brian. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. Pasific Accounting Review (Vol. 24 No. 3: 262-291).
- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Asektabililitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparasi Akuntabilitas Pengolaan Keuangan Daerah Jepara. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.2011. Penyajian Laporan Keuangan.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Deskripsi dan Analisis APBD 2012*.
- Fontanella, Amy dan Rossieta, Hilda. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 17. (<http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id>, diakses pada 24 Oktober 2016).
- Green, Keith. 2005. *Decentralization and Good Governance: The Case of Indonesia*. Munich Personal RePEc Archive Paper, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de>. Diakses tanggal 23 oktober 2016.
- Hall, James. 2007. *Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali*.
- Halim, Abdul dan Abdullah, Syukriy. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. <http://www.bppk.depkeu.go.id>
- Haryanto, Tri Joko. 2000. *Kemandirian Daerah:Sebuah Perspektif dengan*

- Metode Path Analysis*. Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.fiskal.depkeu.go.id>, diakses pada 22 November 2016)
- Hartoyo, Nafsi. 2014. *Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (<http://www.bppk.depkeu.go.id>, diakses pada 23 Oktober 2016)
- Hilmi, Zul, Amiruddin dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>, diakses pada 23 Oktober 2016).
- Inarto, Agoes. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (<http://www.stialan.ac.id>, diakses pada 24 Oktober 2016).
- Julitawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1 (1), pp; 15-29.
- Liestiani, Annisa. 2008. *Pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana.FEUI. Depok.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mimba, Putu, Ni. Helden, G Jan dan Tillema, Sandra. 2007. *Public Sector Performance Measurement in Developing Countries*. *Journal of Accounting and Organizational Change* (Vol. 3, No. 3; 192-208). (<http://media.proquest.com>, diakses pada 23 Oktober 2016).
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriyasi, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi.
- Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Nurdin, Fandy. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Peraturan Perundangan Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Perundangan Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Primbangan.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>, diakses pada 22 November 2016).
- Riantiarno, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Pekbis Jurnal* (Vol. 3, No. 3; 560-568)
- Rusmin, Rusmin. Astami, W Emita, dan Scully, Glennda. 2014. *Local Government Unit in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition*. *Australasian Accounting Business and Financial Journal* (Vol. 8, No. 2)
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudarsana, Susila Hafidh. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (4), pp: 1-13.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suharyanto, Ary dan Sutaryo. 2016 *Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia*. (<http://media.proquest.com>, diakses pada 23 Oktober 2016).
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah*

- Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suyanto 2010. *Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). (<http://www.stialan.ac.id>, diakses pada 21 oktober 2015).
- Tarigan, Antonius. 2009. *Urgensi Penguatan Keuangan Daerah – Suatu Tinjauan terhadap Regulasi Daerah dan Implikasinya dalam Penyediaan Pelayanan Publik*. (<http://www.bappenas.go.id>, diakses pada 23 Oktober 2016)
- Taufik, Taufeni 2013. Peran Monitoring dan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Wicaksono, Gunawan. 2008. *Pengurangan Disparitas Pembangunan Ekonomi Regional melalui Desentralisasi Fiskal*. Majalah Triwulanan BPK RI Edisi April-Juni 2008 (No. 112; 24-26).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. www.bpk.go.id Diakses tanggal 21 oktober 2016
- www.menpan.go.id Diakses 21 oktober 2016
- www.djpk.depkeu.go.id Diakses tanggal 21 oktober 2016
- www.bps.go.id Diakses tanggal 21 oktober 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2013-2015)

M. Rahmat Hidayat Muza¹, Ade Kemala Jaya², Yeni Widyanti³
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el: rahmatmuza@gmail.com¹, jaya_ade@yahoo.com²,
yeniwidyanti@binadarma.ac.id³

ABSTRACK: This study aimed to analyze the effect of profitability, size of firm, tax loss carryforwards, and thin capitalization against tax avoidance. The object of this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). The data sample in this study amounted to 192 samples from 64 manufacturing companies listed on the Stock Exchange during the period from 2013 to 2015. Analysis of the transactions are carried out in this study using classic assumption test, multiple regression analysis, descriptive statistical analysis and hypothesis testing with IBM program Statistical Package for Social Science (SPSS) version 22. Based on the results of research show that the negative effect on the profitability of tax avoidance. While the size of the company and tax loss carryforwards have no effect on tax avoidance. and thin capitalization has a positive influence on tax avoidance.

Keywords: *Profitability, Company Size, Compensation Tax Loss, Thin Capitalization and Tax Avoidance*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sampel dalam penelitian ini berjumlah 192 sampel dari 64 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2013 sampai 2015. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan program IBM *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 22. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Thin Capitalization dan Tax Avoidance*

1. Pendahuluan

Pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan dan membebani seorang wajib pajak karena pajak dapat mengurangi kemampuan daya beli masyarakat (Mulyani, 2014). Perusahaan pun juga dapat terbebani dengan adanya pajak, karena keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

akan memberikan sanksi apabila perusahaan tidak membayarkan pajaknya. Perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Lyons (1996) dalam majalah Akuntatan Indonesia (2014), *tax planning* adalah suatu perencanaan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak baik perorangan maupun badan yang bertujuan meminimalkan utang pajak, yang tentunya masih dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawfull*). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah sebagai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (N.A. Barr, S. R. James, A. R. Prest dalam buku Zain, 2008), sedangkan *tax evasion* (penyelundupan pajak) adalah sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang (N.A. Barr, S. R. James, A. R. Prest dalam buku Zain, 2008).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan *thin capitalization*. Menurut Subakti (2012) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal memiliki nilai negatif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang semaksimal mungkin dan modal seminim mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan dengan adanya perbedaan perlakuan peraturan pajak atas bunga (Nuraini, 2014 dalam Ismi dan Linda, 2016).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013 dalam Rinaldi dan Charoline. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI). Karena banyaknya aktifitas-aktifitas yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang membuat perusahaan lebih mudah mencari celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Serta perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, banyak yang menghasilkan laba positif yang menyebabkan perusahaan akan semakin besar melakukan penghidaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, “Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015).

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah seberapa besar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Definisi *Tax Avoidance* menurut Harry Graham Balter dalam buku Zain (2007) merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut N.A. Barr, S. R. James, A. R. Prest dalam buku Zain (2007), *Tax Avoidance* diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal, yang masih sesuung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut. Pertama, sebagai suatu upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak yang harus ditanggung. Kedua, penghindaran pajak dapat dilakukan secara legal yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat

diperaturan perundang-undang perpajakan.

2.2 Profitabilitas

Menurut Kusumawati (2005) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. Menurut Kasmir (2008) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

2.3 Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Machfoedz (1994) dalam Rinaldi dan Charoline (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total

aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Hormati (2009) dalam Laila Mar'fiah (2015) ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total assets, *log size*, dan sebagainya.

2.4 Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Rinaldi dan Charoline (2015), Kompensasi rugi fiskal (*carrying loss*) merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut :

- a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian).
- b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,

- c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

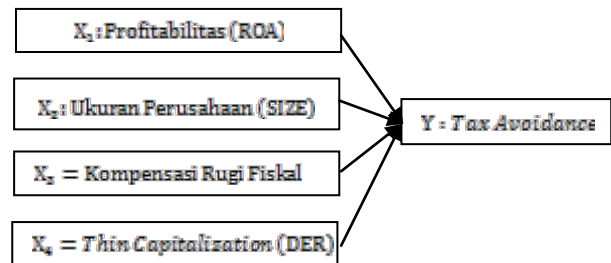
2.5 Thin Capitalization

Thin capitalization (pengecilan modal) adalah pembentukan struktur pemodal suatu perusahaan dengan kontribusi hutang semaksimal mungkin dan modal seminim mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan dengan adanya perbedaan perlakuan peraturan pajak atas bunga (Nuraini, 2014 dalam Ismi dan Linda, 2016). Biaya dari bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

2.6 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Hubungan Profitabilitas (ROA)

Terhadap Tax Avoidance

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Agusti (2014), Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Menurut Kusumawati (2005) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa mendatang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan.

Menurut Surbakti (2012) dalam Rinaldi dan Charoline (2015), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar

pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al., 2010 dalam Kurniasi dan Sari, 2013). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

2.7.2 Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Machfoedz (1994) dalam Rinaldi dan Charoline (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar

saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan.

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007 dalam Rinaldi dan Charoline, 2015). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009 dalam Rinaldi dan Charoline, 2015). *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam memimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi

sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance

2.7.3 Hubungan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Kurniasih dan Sari (2013) mengatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut.

Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil dan perusahaan tidak perlu lagi melakukan tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

2.7.4 Hubungan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance

Thin capitalization adalah pembentukan struktur pemodal suatu perusahaan dengan kontribusi hutang semaksimal mungkin dan modal seminim mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan dengan adanya perbedaan perlakuan peraturan pajak atas bunga (Nuraini, 2014 dalam Ismi dan Linda, 2016). Biaya dari bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar.

Semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan dan mengurangi laba perusahaan (Ifanda, 2016). Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap tax avoidance

3. Metodologi Penelitian

3.1 Operasional Variabel

Adapun Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan *thin capitalization*. Sedangkan yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah *tax avoidance*.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2015. Ada pun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Metode *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian

ini, yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi perusahaan agar dapat digunakan sebagai sampel. Kriteria tersebut antara lain yaitu, (1) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2013-2015, (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2013 sampai tahun 2015, (3) Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit berturut-turut selama tahun pengamatan, (4) Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dalam mata kurs rupiah, dan (5) Perusahaan dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan nilai Effective Tax Rate (ETR) terdistorsi (Richardson dan Lanis, (2007), Zimmerman, 2003 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2013-2015 dan telah dipublikasikan. Data diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id) dan web resmi dari perusahaan yang diteliti, studi pustaka atau berupa literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki kaitan

dengan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan sumber pengumpulan data bagi peneliti.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu berupa kegiatan pengumpulan data sekunder seperti data dari website, laporan keuangan, studi pustaka atau berupa literatur melalui buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki kaitan dengan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan sumber pengumpulan data bagi peneliti.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian

hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_{ROA} + \beta_{SIZE} + \beta_{RFSI} + \beta_{DER} + e$$

Keterangan:

ETR : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

ROA : Propitabilitas, *Return on Assets*

SIZE : Ukuran Perusahaan

RFSI : Kompensasi Rugi Fiskal

DER : *Thin Capitalization, Debt to Equity Ratio*

α : Konstanta

β : Koefisien regresi variabel independen

e : Error term

4 Hasil Dan Pembahasan

4.1 Analisa Deskriptif

Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dari tahun 2013-2015 yang terdaftar dalam wibesite resmi milik Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id dan wibesite milik perusahaan yang bersangkutan. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 (enam puluh empat) perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015 berdasarkan *Indonesia Stock Exchange (IDX) Fack Book 2013-2015* dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti.

4.2 Koefisien Determinasi

Tabel 4.12
Adjusted R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,351 ^a	,123	,105	,115505

a. Predictors: (Constant), DER, RFIS, SIZELOG10, ROA

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder yang diolah 2017

Pada tampilan tabel diatas model summary besarnya koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai Adjusted R² yaitu 0,105, hal ini berarti 10,5% variabel *tax avoidance* yang diprosikan *effective tax rate* dapat dijelaskan oleh variansi dari variabel profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), kompensasi rufi fiskal (RFIS), dan *thin capitalization* (DER).

Sedangkan sisanya 89,5% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

4.3 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,351	4	,088	6,576	,000 ^b
Residual	2,495	187	,013		
Total	2,846	191			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), DER, RFIS, SIZELOG10, ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah 2017

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test di atas, signifikansi simultan bernilai 0,000 dimana tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan *thin capitalization* (DER) secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR).

4.4 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.14
Hasil Regresi Parsial
Coefficients^a

Model	T	Sig.
1 (Constant)	2,247	,026
ROA	-2,944	,004
SIZEL OG10	-1,531	,127
RFIS	,199	,843
DER	3,220	,002

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder yang diolah 2017

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diatas, maka dapat simpulkan sebagai berikut, Profitabilitas (ROA) diperoleh nilai signifikan $0,004 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* (ETR). Ukuran Perusahaan (SIZE) diperoleh nilai signifikan $0,127 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antar SIZE terhadap *tax avoidance* (ETR).

Kompensasi Rugi Fiskal (RFIS) diperoleh nilai signifikan $0,843 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara RFIS terhadap *tax avoidance* (ETR). *Thi Capitalization* (DER) diperoleh nilai signifikan $0,002 < level\ significant\ (\alpha) = 0,05$, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DER terhadap *tax avoidance* (ETR).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Analisis Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan signifikan 0.004 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. serta memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,181. Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian menurut Wirna Yola Agustini (2014) bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hal ini dapat diartikan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan

laba yang meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat yang menyebabkan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tapi apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya.

Penelitian ini bertolak belakang dengan Kurniasih dan Sari (2013) bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Peraturan yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* pada variabel profitabilitas adalah Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1b.

4.5.4 Analisis Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan. Dengan signifikan 0.127 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05. serta memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,526.

Hasil analisis konsisten dengan penelitian menurut Saifudin dan Yunanda bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini di karenakan perusahaan tidak menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Karena pada umumnya perusahaan bersekala besar memiliki asset yang berlimpah, yang didalamnya terdapat kas dan modal yang cukup digunakan dalam pendanaan aktivitas kinerja perusahaan. Hal-hal yang menyebabkan tidak berpengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* tersebut disebabkan oleh variabel lain yaitu *tax avoidance* (ETR). Dikarenakan Proksi ETR (*tax avoidance*) tidak dapat mempengaruhi variabel independent dari ukuran perusahaan. Sedangkan proksi lain dari *tax avoidance* yaitu CETR bisa mempengaruhi variabel independent dari ukuran perusahaan.

Sedangkan menurut Annisa Fadilla Rachmithasari yang menyatakan bahwa

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil, sehingga semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*.

Hal ini bertolak belakang dengan Laila Marfu'ah (2015) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *tax avoidance* yang dimiliki, hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan yang baik. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Peraturan yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* pada variabel ukuran perusahaan adalah Undang-Undang

Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1b.

4.5.5 Analisis Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal (RFIS) tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan signifikan 0.843 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05. serta memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,003. Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian menurut Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang mengalami rugi diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena kerugiannya dapat dikompensasikan sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak yang dapat beresiko terhadap reputasi perusahaan tersebut dan akan menjadi sorotan pemerintah. Data membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam tahun penelitian, banyak yang tidak melakukan kompensasi kerugian jika di bandingkan dengan yang

mendapatkan kompensasi. Karena sebelum terjadinya tahun penelitian banyak perusahaan manufaktur tidak mengalami kerugian, yang menyebabkan perusahaan tidak melakukan kompensasi rugi fiskal. Hal inilah yang menyebabkan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Apabila sebagian dari perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini mendapatkan kompensasi, ada kemungkinan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal lain yang menyebabkan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah pengukuran kompensasi rugi fiskal yang sangat terbatas hanya dengan menggunakan *dummy*. Hasil yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal dalam penelitian ini memiliki 12 sampel dari 6 perusahaan yang melakukan kompensasi rugi fiskal atau dengan nilai 1. Sedangkan 180 sampel dari 58 perusahaan tidak melakukan kompensasi rugi fiskal atau dengan nilai 0. Karena dengan sedikitnya perusahaan manufaktur yang melakukan kompensasi kerugian atau mengalami kerugian, menyebabkan kompensasi rugi

fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini bertolak belakang dengan Saifudin dan Derick Yunanda (2016) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Peraturan yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* pada variabel kompensasi rugi fiskal adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2.

4.5.6 Analisis *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *thin capitalization* (DER) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan. Dengan signifikan 0.002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. serta memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,041. Hasil analisis ini tidak konsisten dengan penelitian dari Fadhil Ismi dan Linda (2016) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Thin capitalization (pengecilan modal) adalah pembentukan struktur pemodalannya suatu perusahaan dengan kontribusi hutang semaksimal mungkin dan modal seminim mungkin. Semakin tinggi nilai dari *thin capitalization* (*debt to equity ratio*), berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai *thin capitalization* maka *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi. Karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak dan membuat perusahaan menggunakan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena

pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Penelitian ini bertolak belakang dengan Fadhil Ismi dan Linda (2016) bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan sedikitnya celah pengelolaan optimalisasi kepemilikan hutang terkait dengan pengelolaan pajak. Peraturan yang digunakan untuk melakukan *tax avoidance* pada variabel *thin capitalization* adalah Undang-Undang Perparjakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1a.

5 Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan daya dan pembahasan diatas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini

- disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya.
2. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Karena pada umumnya perusahaan bersekalanya besar memiliki aset yang berlimpah, yang didalamnya terdapat kas dan modal yang cukup digunakan dalam pendanaan aktivitas kinerja perusahaan.
 3. Variabel kompensasi rugi fiskal (RFIS) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Data membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam tahun penelitian, banyak yang tidak melakukan kompensasi kerugian jika di bandingkan dengan yang mendapatkan kompensasi. Karena sebelum terjadinya tahun penelitian banyak perusahaan manufaktur tidak mengalami kerugian, yang

menyebabkan perusahaan tidak melakukan kompensasi rugi fiskal.

4. Variabel *thin capitalization* (DER) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan Semakin tinggi nilai *thin capitalization* maka *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi. Karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak.
5. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa signifikansi simultan bernilai 0,000 dimana tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), kompensasi rugi fiskal (RFIS), dan *thin capitalization* (DER) secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR).

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi Investor
Investor sebaiknya memperhatikan kajian mengenai kewajiban pembayaran pajak sebuah perusahaan.

Serta mengkaji lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

2. Perusahaan Perusahaan

Pihak perusahaan sebaiknya mampu meningkatkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan pada tiap tahunnya, sehingga persepsi investor terhadap prospek kinerja perusahaan dimasa yang akan datang dapat terjaga dengan baik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya sehingga diperoleh hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya hendaknya mencari objek lain selain perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Seperti perusahaan index LQ 45, perusahaan jakarta islami index (JII), dan lain sebagainya.
2. Dapat dilihat dari Adjusted R^2 hanya sebesar 10,5% yang berarti masih 89,5% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya untuk dapat menjelaskan *tax avoidance* (penghindaran pajak) tersebut, seperti

menggunakan *corporate governance*, pertumbuhan penjualan, *financial lease*, dan lain-lain.

3. Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan proksi lain dalam menghitung *tax avoidance* semisalnya menggunakan proksi *cash effective tax rate*, GAAP ETR, *book tax difference* dan lain-lain agar perhitungan lebih akurat lagi.
4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel dan menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar mendapatkan hasil yang lebih variatif.

DAFTAR REFERENSI

- Ifanda, Bily Al. 2016. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ismi dan Linda. 2016. *Pengaruh Thin Capitalization, Return on Asset, dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index*

- (JII). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Aceh.
- Kurniasih, Tommy dan Sari, Ratna. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana. Bali.
- Mulyani, S., Darminto., dan Endang, M.W. 2014. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya. Malang.
- Rinaldi dan Charoline. 2015. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013)*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Selemba Empat. Jakarta.

PERBANDINGAN PROGRAM TAX AMNESTY ANTARA INDONESIA, CHILI, FILIPINA DAN BELGIA

Marina¹, Ade Kemala Jaya², Yeni Widyanti³.
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.3 Palembang

marina_marwah@yahoo.com, jaya_ade@yahoo.com, yeniwidyanti@binadarma.ac.id

ABSTRACT: *This research aims to compare the tax amnesty program between Indonesia, Chile, the Philippines and Belgium as well as to measure effectiveness of the tax amnesty program in each country. In this research, the data used is secondary data. Methods of data collection is done by library research. The author uses qualitative research and the method used is descriptive method. The results of this study indicate that the tax amnesty program in each country has different features. The tax amnesty program in Indonesia and Chile have been effective this is evidenced by the achievement of predetermined targets. While the tax amnesty program in the Philippines and Belgium is considered less effective because the program failed to achieve the set targets.*

Keywords: *Comparison, Tax Amnesty Programs, Effectiveness*

ABTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan program *tax amnesty* di Indonesia, Chili, Filipina dan Belgia serta mengukur efektifitas program *tax amnesty* di setiap negara tersebut. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program *tax amnesty* di setiap negara mempunyai fitur yang berbeda. Program *tax amnesty* di Indonesia dan Chili sudah efektif hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan program *tax amnesty* di Filipina dan Belgia dinilai kurang efektif karena program tersebut gagal mencapai target yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Perbandingan, Program *Tax Amnesty*, Efektifitas.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak

berperan penting untuk menyediakan dana berkelanjutan yang dibutuhkan untuk program-program sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Para pembuat kebijakan juga berperan untuk menemukan kesinambungan yang tepat antara meningkatkan pendapatan dan memastikan bahwa tarif pajak, dan beban ketaatan pajak tidak menghalangi partisipasi dunia usaha atau menghambat kegiatan usaha.

Laporan terakhir *Paying Taxes* 2015 menunjukkan, banyak negara terus mencapai kemajuan dalam reformasi pajak, namun masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk merampingkan dan mempermudah sistem pajak. Reformasi pajak akan menjadi topik yang sangat penting bagi pemerintah di berbagai negara selama beberapa tahun ke depan. Ekonomi dunia yang akhir-akhir ini mengalami perlambatan menurunkan aktivitas perdagangan (ekspor impor) dunia yang ditandai anjloknya harga-harga komoditas, banyak negara kemudian melakukan reformasi pajak secara menyeluruh yang dimulai dengan program *tax amnesty*.

Penerapan *tax amnesty* yang dilakukan oleh banyak negara bukanlah sesuatu yang tabu namun lebih didorong oleh kondisi adanya kepatuhan wajib pajak di berbagai negara yang masih rendah dan belum sepenuhnya bekerja secara optimal. Kebijakan *tax amnesty* sudah merupakan hal yang lazim dan sudah banyak dilakukan banyak negara. Hal tersebut dilakukan guna menarik modal (repatriasi) dan memperkuat basis wajib pajak baru. Menurut Danny Darussalam (20/6/2016), selaku Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia (UI) bahwa sudah 31 negara menjalankan *tax amnesty*. Bahkan Amerika Serikat, dari total 50 negara bagiannya, 90 persen atau 45 negara bagiannya pernah menerapkan *tax amnesty*, tentu ada yang sukses dan ada yang tidak berhasil (Okezone Finance, 2016).

Di Indonesia *tax amnesty* kembali diterapkan pada tahun 2016 yaitu pada 30 September yang merupakan akhir Periode I, penerapan *tax amnesty* di Indonesia terbilang cukup sukses. Ini bisa dilihat dari data *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)* yang membandingkan perolehan dana dari *tax amnesty* di Indonesia dengan negara lain yang juga sukses dalam menerapkan *tax amnesty*. Pada tahun 2015 Chili juga menerapkan kebijakan serupa yang berhasil menambah basis aset kena pajak sebesar Rp 263 Triliun atau 8,33% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tahun 2007, pemerintah Filipina juga menggelar program *tax amnesty*. Namun pemerintah hanya memperoleh P2 Miliar. Hal

ini jauh dari perkiraan Rep. Danilo Suarez selaku penulis Undang-Undang *tax amnesty* yang memperkirakan bahwa program *tax amnesty* tersebut akan mengumpulkan dana P4 Miliar sampai P6 Miliar. Kegagalan serupa tak hanya dirasakan oleh Filipina. Sebelumnya pada Tahun 2004, Belgia juga menerapkan *tax amnesty*. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar \$76,7 Juta sampai dengan \$89,5 Juta. Namun, realisasi penerimaan pajak hanya sebesar \$59,9 Juta.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana penerapan program *tax amnesty* yang ada di Indonesia, Chili, Filipina dan Belgia, serta apakah program *tax amnesty* yang ada di Indonesia, Chili, Filipina dan Belgia merupakan program yang efektif”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan program *tax amnesty* yang ada di Indonesia, Chili, Filipina dan Belgia, serta untuk mengukur efektifitas program *tax amnesty* di Indonesia, Chili, Filipina dan Belgia menggunakan evaluasi kebijakan publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Secara Umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan

yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batas-batas atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat (Winarno, 2012: 19)

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (dalam Winarno, 2012: 35) adalah tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, yang terakhir yaitu tahap evaluasi kebijakan.

2.1.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang telah diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan.

2.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut (Halim, 2014: 2), yaitu:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan).
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.2.2 Asas-Asas Perpajakan

Menurut Smith (dalam Zain, 2005: 24), bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik *equity*, *certainty*, *convenience* dan *economy*. Akan tetapi, Sommerfeld, dkk (dalam Zain, 2005: 24) mengungkapkan dalam rangka mendesain suatu sistem perpajakan, kriterianya tidak lagi terbatas kepada “*the canos taxation*” yaitu *equity*, *certainty*, *convenience*, dan *economy*, yang dicetuskan oleh Smith, tetapi saat ini perlu ditambah lagi dengan *productivity*, *visibility* dan *political considerations*.

2.2.3 Sistem Perpajakan

Menurut (Zain, 2005: 22), secara historis, pembicaraan mengenai masalah perpajakan selalu didahului dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), kemudian kebijakan perpajakan tersebut diolah dan ditetapkan dalam bentuk undang-undang perpajakan (*tax law*) dan barulah kemudian dibahas masalah yang menyangkut pemungutannya oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*).

2.3.1 Definisi Tax Amnesty

Definisi *tax amnesty* atau pengampunan pajak menurut Pasal 1 UU No 11/2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak (Suharno, 2016: 5).

2.3.2 Asas-Asas Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Dalam pelaksanaannya, menurut Pasal 2 UU No. 11/2016, pengampunan pajak didasarkan pada empat asas (Suharno, 2016: 5-6), yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaata dan asas kepentingan nasional.

2.3.3 Jenis *Tax Amnesty*

Menurut Erwin (dalam Santoso, 2009: 114), ada 4 jenis *tax amnesty*, yaitu:

1. *Tax amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan;
2. *Tax amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya;
3. *Tax amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya; dan
4. *Tax amnesty* yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda,

dan sanksi pidananya, tujuannya agar menambah jumlah wajib pajak dan selanjutnya mulai membayar pajak.

2.3.4 Karakteristik *Tax Amnesty*

Menurut Darussalam dalam *Inside Tax* Edisi 26 (September, 2014: 16), karakteristik dari suatu program *tax amnesty*, yaitu, durasi, kelompok wajib pajak, jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.

2.3.5 Syarat Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Menurut Prasetyo (dalam *Inside Tax*, Edisi 31, Mei 2015: 13), pemberian *tax amnesty* khususnya di negara-negara berkembang harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Sumber ketidakpatuhan wajib pajak harus diidentifikasi.
2. Jika sudah teridentifikasi, sebelum *tax amnesty* diberikan, sumber ketidakpatuhan itu harus sudah teratasi;
3. Terakhir, *tax amnesty* yang diberikan harus:
 - a. Waktunya terbatas;
 - b. *Cut-off date*-nya harus jelas;
 - c. Yang boleh ikut dibatasi untuk wajib pajak yang tidak patuh saja;
 - d. Tidak boleh mengurangi *present value* pajak yang kurang bayar;
 - e. Pemberian *tax amnesty* tidak boleh bertentangan dengan prinsip perpajakan pada umumnya.

2.3.6 Evaluasi *Tax Amnesty*

Suchman (dalam Winarno, 2012: 233), mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini, yaitu durasi, kelompok wajib pajak, jenis pajak, jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan, mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi dan standarisasi kegiatan, [pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain serta beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sekunder untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Metode pengumpulan data

yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara riset kepustakaan (*library research*).

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Program *Tax Amnesty*

Menurut Darussalam dalam *Inside Tax Edisi 26* (2014: 16), suatu program *tax amnesty* mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut, yaitu durasi, kelompok wajib pajak, jenis dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan.

Tabel 4.1
Perbandingan Karakteristik Program *Tax Amnesty* Di Indonesia, Chili, Filipina dan Belgia

Negara	Durasi	Kelompok Wajib Pajak	Jenis Pajak	Jumlah Pajak	Sanksi Administrasi yang diberikan ampunan
Indonesia	9 bulan (1 Juli 2016 s.d 31 Maret 2017)	-Badan -Individu -UKM	- PPh - PPN - PPnBM	Deklarasi dalam negeri atau harta diluar negeri di repatriasi: - Periode I: 2% - Periode II: 3% - Periode III: 5%. Deklarasi diluar negeri: - Periode I: 4% - Periode II: 6% - Periode III: 10%. Untuk peredaran usaha s.d Rp4.8 M: - 0,5% yaitu harta s.d Rp10 M. - 2% yaitu harta lebih dari Rp10 M.	1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang. 2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. 3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan, 4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. 5. Jaminan rahasia, data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun. 6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.
Chile	12 bulan (1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015).	- Badan - Individu	Semua jenis pajak	Tarif tunggal 8% dari nilai aset.	1. Penghapusan bunga 2. Penghapusan denda 3. Penghapusan hukum pidana
Filipina	6 bulan (6 September 2007 s.d 6 Maret 2008)	- Badan - Individu - <i>Estate</i> dan <i>Trust</i> -Badan hukum lainnya termasuk kemitraan.	Semua jenis Pajak	1. Individu : 5% atau P50.000 (pilih yang lebih tinggi). 2. Badan : a. Dengan modal yang disetor diatas P50M : 5% atau P500.000 (pilih yang lebih tinggi). b. Modal disetor diatas P20M hingga P50M : 5% atau P250.000 (pilih yang lebih tinggi). c. Modal disetor dari P5M hingga P20M : 5% atau P100.000 (pilih yang lebih tinggi). d. Modal disetor dibawah P5M : 5% atau P25.000 (pilih yang lebih tinggi). 3. Badan hukum lainnya termasuk kemitraan : 5% atau P50.000 (pilih yang lebih tinggi).	1. Wajib pajak akan kebal dari pembayaran serta tambahan pajaknya, dan yang berhubungan dengan hukum perdata, pidana atau administratif. 2. Dapat menggunakan laporan ini sebagai pertahanan untuk kasus-kasus yang diajukan terhadap dirinya.
Belgia	12 bulan (1 Januari 2004 s.d 31 Desember 2004)	-Individu	Semua jenis pajak	1. 9% untuk WP yang hanya sekedar mendeklarasikan hartanya. 2. 6% untuk WP yang mendeklarasikan kemudian merepatriasikan serta menginvestasikannya di dalam ekonomi Uni Eropa untuk setidaknya tiga tahun.	1. Akan di bebaskan dari kewajiban pajak atau konttribusi jaminan sosial, kenaikan pajak, bunga dan denda. 2. Laporan tidak dapat digunakan untuk memulai penyelidikan

Sumber: Data yang diolah, 2017

4.2 Efektifitas Program *Tax Amnesty*

Peneliti dalam hal ini mengukur efektifitas program *tax amnesty* menggunakan langkah-langkah evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh suchman (dalam Winarno, 2012: 233), sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain;
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak:
 - a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat;
 - b. Dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan;
 - c. Dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang.

Tabel 4.2

Perbandingan Efektifitas Program *Tax Amnesty* di Indonesia, Chili, Filipina dan Belgia.

Ket	Indonesia		Chili		Filipina		Belgia	
Tujuan Tercapai	Pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi	N/A	Meningkatkan pendapatan	Y	Meningkatkan pendapatan administrasi	Y	Menyeimbang-kan anggaran	Y
	Mendorong reformasi perpajakan	N/A	Regulasi pajak internasional	N/A	Memperbarui database wajib pajak	Y		
	Meningkatkan penerimaan pajak	Y	Meningkatkan basis pajak	Y				
Masalah	1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan ketentuan besaran nilai wajar 2. Penyebab belum maksimalnya dana repatriasi dalam program <i>tax amnesty</i> adalah berkembangnya isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta radikalisme.		N/A		1. Kurangnya komunikasi pemerintah berkaitan dengan program <i>tax amnesty</i> . 2. Respon yang terlambat dari para penunggak pajak.			
Perubahan yang terjadi	Jumlah nilai pernyataan harta hingga Selasa, 14 Februari 2017, pukul 18.07 WIB, terpantau menembus Rp4.371 Triliun atau US \$327.931.711.410		Jumlah nilai pernyataan harta di Chili sebesar US \$1.502.000.000		Jumlah pernyataan harta di Filipina sebesar P2.000.000.000 atau US \$40.218.821		Jumlah pernyataan harta di Belgia sebesar \$59.000.000	
Dampak terhadap masalah publik atau orang yang terlibat	Berdampak pada peningkatan restitusi. Seyogyanya, adanya program <i>tax amnesty</i> bisa menekan jumlah wajib pajak yang meminta restitusi. Namun, pada tahun <i>amnesty</i> ini jumlah restitusi yang harus dibayar melonjak.		WP yang telah jujur dan benar dalam menyampaikan sumpah deklarasinya tidak akan merasa cemas sehubungan dengan kewajiban pajaknya.		WP yang tidak patuh merasa khawatir dikarenakan pemerintah akan merilis daftar pengemplang pajak.		Kewajiban untuk mendeklarasikan dana langsung ke otoritas pajak Belgia telah menjadi pencegah para wajib pajak untuk membayar pajaknya.	
Dampak terhadap keadaan atau kelompok diluar sasaran atau tujuan	Permasalahan likuiditas yang tidak merata. Hal ini dikarenakan program <i>tax amnesty</i> hanya menguntungkan bank-bank besar yang ditunjuk sebagai bank persepsi sementara bank-bank kecil mengalami kekeringan likuiditas.		N/A		N/A		Di Belgia tiga bank besar diuntungkan ketika mengimplementasi-kan <i>tax amnesty</i> dikarenakan menampung dana <i>tax amnesty</i> dari wajib pajak.	
Dampak terhadap keadaan sekarang dan dimasa yang akan datang	Dimasa mendatang investasi meningkat, dimana investasi membuat pertumbuhan ekonomi naik. Akan tetapi juga bisa menimbulkan <i>moral hazard</i> yang ditanggung oleh wajib pajak patuh.		Wajib pajak akan mulai merasa stres, karena pemerintah mulai untuk bertukar informasi dengan yudiksi asing dan lembaga keuangan untuk meneliti kebenaran deklarasi tersumpah.		Berkurangnya kepatuhan wajib pajak yang sudah patuh dan wajib pajak nakal bisa bergantung terlalu banyak pada program-program serupa dimasa mendatang.		Terdapat hukuman yang berat bahwa semua penggelap pajak yang tidak memanfaatkan <i>tax amnesty</i> akan menghadapi hukuman 100% dari pajak yang telah dirugikan.	

Sumber : Data yang diolah, 2017

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, maka analisis program *tax amnesty* di Indonesia, Chili, Filipina, dan Belgia dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Program *tax amnesty* di Indonesia dan Chili sudah efektif hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan program *tax amnesty* di Filipina dan Belgia dinilai kurang efektif karena program tersebut gagal mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Program *tax amnesty* di Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap wajib pajak yang lebih lama memanfaatkan program *tax amnesty*. Sedangkan di Chili menerapkan tarif tunggal 8% dari aset wajib pajak.
3. Ketika Filipina mengimplementasikan program *tax amnesty* terdapat kurangnya komunikasi kepada wajib pajak dan juga respon yang terlambat dari wajib pajak. Sedangkan pada pelaksanaan program *tax amnesty* di Belgia masih banyak ketidakpastian, pelaksanaan program dihambat oleh masalah-masalah politik (dimana partai-partai politik menentang undang-undang *tax amnesty*)

5.2 Saran

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya salah satunya disebabkan adanya ganjalan kepercayaan, oleh sebab itu wajib pajak

harus diberikan keyakinan bahwa program *tax amnesty* yang dilaksanakan merupakan program jangka panjang yang hanya akan dilakukan sekali atau paling banyak dua kali seumur hidup.

2. Sebuah kajian program *tax amnesty* harus direncanakan secara sungguh-sungguh, apabila tidak direncanakan dengan penuh perhitungan maka akan mengakibatkan banyak dampak negatif yaitu akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Suharno. 2016. Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia. Jakarta: Kompas
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS
- Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, Icuk Ranga Bawono & Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015 Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
http://m.okezone.com/read/2016/06/21/20/1421377/ekonomi-dunia-melambat_banyak-negara-terapkan-tax-amnesty._diakses_pada_tanggal_25/11/2016.
- Aritonang, Tio Fanny & Akie Rusaktiva Rustam, S.E., MSA., Ak. 2016. Review Implementasi *Tax Amnesty* (Studi Literatur Implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia dan di Beberapa Negara Lainnya). *Jurnal*. Universitas Brawijaya

- Santoso, Urip & Justina M. Setiawan. 2009. *Tax Amnesty* dan Pelaksanaannya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 11, No. 2: 111-125
- Darussalam, Danny. 2014. *Tax Amnesty* Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, Edisi 26 Desember 2014
- Prasetyo, Kristian Agung. 2015. *Sunset Policy* (lagi): Perluah?. *Inside Tax*, Edisi 31 Mei 2015
- Widihartanto, Sekti dan Herru Widiatmanti. 2016. *Tax Amnesty* dan Faktor Penentu Keberhasilannya: Pelajaran Dari Otoritas Pajak. *Working Paper*. No 1415, April 2016
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2: 57-65
- Ragimun. 2014. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Jurnal*. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI
- Mukarromah, Awwaliatul, Suci Noor Aeny & Retno Megawati. 2016. Pentingnya Peran *Tax Amnesty* di 2016. *Inside Tax*. Edisi 37, Maret 2016
- Fadhilah, M. Fatkur. 2016. *Tax Amnesty*: Partisipasi dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat. *Inside Tax*. Edisi 37, Maret 2016
- Www.Bir.Gov.Ph/Index.Php/Tax-Information/Income-Tax.Html#Index. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2017
- Www.Chanrobles.Com;/Egal6title23.Htm#.Wiocti2viv. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2017
- https://En.Wikipedia.Org/Wiki/List_Of_Countries_By_Tax_Rates#Cite_Note_Vat_Live-3. Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2017
- <https://Pengampunanpajak.Com/2016/08/17/Minat-Pengusaha-Ikut-Tax-Amnesty-Tinggi-Tapi-Keluhakan-Masalah-Ini/>. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2017
- Www.Bbc.Com/Indonesia/Berita_Indonesia/2016/06/160629_Indonesia_Tax_Amnesty_Reformasi. Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2017
- <https://Www.Linkedin.Com/Pulse/Civil-Criminal-Effects-Voluntary-Disclosure-Chile-Cristian-Garate>. Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2017
- <https://Pengampunanpajak.Com/2017/01/26/Aviliani-Tax-Amnesty-Untungkan-Bank-Bank-Besar/>. Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2017
- <https://Pengampunanpajak.Com/2017/01/24/Isu-Sara-Dan-Radikalisme-Hambatu-Repatriasi-Amnesti/>. Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2017
- <https://Pengampunanpajak.Com/2017/01/03/Realisasi-Repatriasi-Dorong-Surplus-Npi-Lebih-Besar/>. Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2017
- <https://Pengampunanpajak.Com/2017/01/20/Amnesti-Pajak-Belum-Mampu-Dongkrak-Jumlah-Wajib-Pajak/>. Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2017
- <https://Pengampunanpajak.Com/2016/08/15/Ini-Manfaat-Tax-Amnesty-Bagi-Masyarakat/>. Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2017
- M.Katadata.Co.Id/Berita/2016/10/04/Ada-Tax-Amnesty-Penerimaan-Pajak-Melonjak-15-Persen. Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2017
- Www.Pajak.Go.Id/Statistik-Amnesti. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2017
- Oecd. 2010. Offshore Voluntary Disclosure

- Oecd. 2015. Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway To Tax Compliance
- Bir. 2007. Revenue Memorandum Circular No. 69-2007
- Bir. 2007. Revenue Memorandum Circular No. 55-2007
- Miguel, Atty. 2007. Tax Amnesty. Bdb Lawa Wts
- Republic Act No. 9480
- Abogados, Garnham. 2014. Mayor International Tax Aspects Of The Chilean Tax Reform. Chile
- Newsletter Chilean Tax Reform. Law 20.780 Published On September 29th, 2014
- Sii. 2015. Aplicacion Del Artículo 24 Transitorio De La Ley No. 20.780
- Saxton, Phillippe. 2016. Programade Amnestia Fiscal En Lareforma Tributaria 2014. Universidad De Chile
- Garate, Cristian. 2015. Civil And Criminal Effects Of Voluntary Tax Disclosure Declaration In Chile: Lessons For Brazil And Argentina. University Of Chile Law School
- Articulo 24 Transitorio De La Ley No. 20.780 De 2014
- Quaghebeur, Marc. 2004. New Analysis: Tax Amnesty Falls Short Of Expectations. Tax Notes International
- Quaghebeur, Marc. 2004. What Belgium's Tax Amnesty Will Mean. International Tax Review
- Quaghebeur, Marc. 2004. Belgium Tax Amnesty A Fait Acompli But Uncertainties Remain. Tax Notes International
- Quaghebeur, Marc. 2004. Belgium Tax Amnesty A Fait Acompli But Uncertainties Remain. Tax Notes International
- Quaghebeur, Marc & Bart Coel. 2006. Belgium's Permanent Regularization Procedure: The 2004 Tax Amnesty Redux?. Tax Notes International

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN
PINJAMAN KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) PADA PT. RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) UNIT DWIKORA PALEMBANG**

**Mita Purwasi¹, Verawaty², Andrian Novriardy²
Dosen Universitas Bina Darma², Mahasiswa Bina Darma¹**

Jalan Jendral Ahmad Yani No.12 Palembang

**Pos-el: mitapurwasi03@gmail.com , verawaty_mahyudin@yahoo.com ,
andrian.novriardy@binadarma.ac.id**

ABSTRAK : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit usaha rakyat, khususnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap pegawai bank dan nasabah KUR di BRI, dan data sekunder yang merupakan data primer yang sudah diolah. Variabel yang diukur adalah lama usaha berjalan, pendapatan rumah tangga dalam sebulan, tingkat pendidikan, agunan, jumlah tanggungan keluarga, dan usia. Data-data yang sudah didapat dari bank BRI selama 5 bulan terakhir, dianalisis untuk menentukan karakteristik debitur yang manakah yang paling berpengaruh signifikan terhadap pemberian pinjaman KUR. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut : *pertama*, proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang dilakukan beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit, tahap pencairan kredit, tahap pembuatan perjanjian kredit. *Kedua*, faktor-faktor pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peneliti mengumpulkan hasil analisis antara faktor lama usaha berjalan, jumlah pendapatan rumah tangga dalam sebulan, tingkat pendidikan, agunan, jumlah tanggungan keluarga dan faktor usia.

Kata kunci : Kredit Usaha Rakyat (KUR).

ABSTRACK : *The purpose of this study was to find out what are the factors that affect the provision of small loans, especially in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang. This study uses qualitative descriptive method, the data used is primary data obtained through interviews with bank employees and customers KUR BRI, and secondary data is primary data that has been processed. The variables measured are long running business, household income in the month, the level of education, mortgage, number of dependents, and age. The data has been obtained from BRI bank over the past 5 months, were analyzed to determine the characteristics of the debtor where the most significant effect on lending KUR. Based on the results of research and discussion are as follows: first, the process of business credit (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang do several steps: the credit application stage, the stage of the review and analysis of credit, credit disbursement stage, the stage of manufacture of the credit agreement. Second, the factors lending Kredit Usaha Rakyat (KUR). Researchers pooled the results of analysis of the factors the business long run, the number of households in a month income, education level, collateral, the number of dependents and the age factor.*

Keywords: People's Business Credit (KUR).

PENDAHULUAN

Dilihat dari perkembangan dunia usaha yang semakin mengalami peningkatan baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jenis usaha lainnya, dimana di dalam pembiayaan perusahaan tidak dapat memenuhi dari modal sendiri saja dan memerlukan

tambahan modal dari pihak lain. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman adalah bank. Dalam menjalankan usahanya bank mempunyai dua tugas pokok yang utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan dan menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat melalui kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas utama bank dalam memperoleh keuntungan di samping kegiatan seperti tabungan, deposito, dan jasa-jasa lainnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang paling banyak diminati oleh para pelaku usaha dan cukup prospektif untuk dikembangkan. UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis serta terbukti sebagai sektor usaha yang mampu bertahan terhadap krisis ekonomi global yang sedang melanda kalangan usaha di tingkat internasional maupun kalangan usaha di Indonesia salah satunya di sektor agribisnis.

Menurut Ratnawati diacu dalam Ashari (2009), pada tahun 2002-2006 pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian rata-rata hanya 5,72%, padahal perbankan memiliki potensi yang cukup besar dalam pembiayaan pertanian. Perbankan kurang antusias dalam menyalurkan kredit untuk pertanian karena sifat komoditas pertanian yang musiman sehingga pendapatan yang diperoleh petani tergantung dari hasil panen musiman, sedangkan pembayaran kredit dilakukan secara bulanan. Resiko pada bidang pertanian juga relatif tinggi, cuaca yang tidak menentu dan hama tanaman sering mengakibatkan tanaman rusak sehingga

petani mengalami gagal panen. Selain itu, tidak adanya jaminan sebagai syarat pengajuan kredit serta kurangnya pemahaman petani terhadap administrasi perbankan menyebabkan petani kesulitan dalam mengakses kredit perbankan. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan petani, telah meluncurkan beberapa kredit program atau bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian melalui beberapa pembiayaan pertanian salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR merupakan kredit pertanian baru yang diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 5 November 2007. Program kredit ini bertujuan untuk membantu aksesibilitas kredit bagi para petani yang dikembangkan melalui kerjasama dengan beberapa bank komersil yang ditunjuk oleh pemerintah dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah serta suku bunga maksimal sebesar 14 persen untuk KUR Ritel dan 22 persen untuk KUR Mikro. Kredit Usaha Rakyat merupakan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usahaproduktif. KUR diperuntukkan bagi usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*. Tujuan dari program

KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja.

Agunan pokok KUR adalah proyek yang dibiayai, sedangkan agunan tambahan sebagian dicover oleh program penjaminan (PT. Askrindo dan Jamkrindo) sebesar 80 persen untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri, dan untuk KUR tenaga kerja Indonesia serta 70 persen untuk sektor lainnya. Hal ini dikarenakan UMKM pada umumnya jarang memiliki agunan tambahan. Dari hasil pengamatan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang diperkirakan dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini, dan dapat mewakili perusahaan lain yang sejenis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah lama usaha berjalan, pendapatan rumah tangga dalam sebulan, tingkat pendidikan, agunan, jumlah tanggungan keluarga, dan usia mempengaruhi pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (studi kasus pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Kredit Usaha Rakyat dalam bidang kredit usaha kecil menengah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat, sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai penunjang untuk bahan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti
Sebagai suatu pengalaman belajar dalam kegiatan penelitian, sehingga dapat melakukan komparasi antara teori dan kenyataan.
 - b. Bagi Bank Rakyat Indonesia
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perkembangan dalam menentukan strategis pemasaran khususnya yang berkaitan dengan Pemberian Kredit.
 - c. Bagi pihak lain

Memberikan informasi yang berguna bagi penelitian yang akan datang sehingga bermanfaat bagi pihak luas.

TINJAUAN PUSTAKA

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pemberian pinjaman tersebut diturunkan berdasarkan analisis 5C Menurut Ariyanti (2009:133), yaitu *charchter, capital, capacity, condition of economy, dan colleteral*. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat BRI Unit Dwikora Palembang adalah :

a. Lama usaha berjalan

Lama usaha berjalan adalah lamanya seorang nasabah dalam menjalankan usahanya, yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Lama usaha sudah berjalan sangat berpengaruh terhadap pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagian besar nasabah sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan usahanya sedangkan berdasar analisis kredit lama usaha kredit berjalan termasuk kedalam prinsip 5C yaitu *capicity*.

b. Pendapatan rumah tangga dalam sebulan

Pendapatan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang

paling penting yang mempengaruhi besar pinjaman yang dicairkan. Pendapatan rumah tangga merupakan keseluruhan pendapatan bersih usaha ditambah dengan pendapatan lain diluar usaha yang dibiayai sedangkan berdasarkan analisis kredit pendapatan rumah tangga dalam sebulan termasuk kedalam prinsip 5C yaitu *condition of economy*.

Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan/penghasilan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Berdasarkan defenisi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh dari seluruh anggota keluarga baik yang berasal dari kepala keluarga atau seluruh anggota keluarga. Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi, biasanya makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi semakin tinggi. Karena tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar.

Atau mungkin juga pola hidup makin konsumtif, sedikit-tidaknya semakin menuntut kualitas yang baik. Contoh yang amat sederhana adalah jika pendapatan sang ayah masih sangat rendah, biasanya beras yang dipilih untuk konsumsi juga kelas rendah/menengah.

c. Tingkat pendidikan

Pendidikan adalah usaha sabar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperoleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sedangkan berdasarkan analisis kredit tingkat pendidikan termasuk kedalam prinsip 5C yaitu *character*.

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap

informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

d. Agunan

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (*collateral*). Agunan merupakan material berupa surat berharga atau garansi risiko yang disediakan oleh nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan, agunan tersebut dapat dijual atau dialihkan

kepada bank untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya. Agunan (collateral) memiliki pengaruh nyata dan bernilai positif terhadap besarnya KUR yang dicairkan sedangkan berdasarkan analisis kredit agunan termasuk kedalam prinsip 5C yaitu *Collateral*. Undang-Undang Pokok Perbankan mengisyaratkan bahwa dalam pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha debitur dan agunan kredit.

e. Jumlah tanggungan keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya orang menjadi tanggungan debitur dalam keluarganya saat ini yang dihitung dalam satuan orang. Jumlah anggota keluarga biasanya terdiri dari 2 jiwa, 3 jiwa, 4 jiwa, 5 jiwa, 6 jiwa. Berarti secara umum telah mengikuti anjuran pemerintah dengan prinsip catur warga dan menunjukkan bahwa orang

menyadari semakin banyak tanggungan keluarga maka semakin sulit untuk mengalokasikan pendapatannya untuk hal-hal yang sangat penting dalam meningkatkan status ekonomi panjang sedangkan berdasarkan analisis kredit jumlah tanggungan keluarga termasuk kedalam prinsip 5C yaitu *condition of economy*.

f. Usia

Usia adalah umur debitur yang diperhitungkan dari waktu kelahiran sampai saat pencairan yang diukur dalam satuan tahun. Usia seseorang dapat mempengaruhi tingkat kemampuan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas usaha. Seseorang yang masih berusia muda lebih aktif dan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya dibandingkan seseorang yang memiliki usia lebih tua untuk menjalankan pekerjaannya akan semakin menurun. Seseorang yang mempunyai usia muda cenderung menyukai tantangan dan bersikap lebih aktif terhadap tantangan daripada seseorang yang mempunyai usia yang lebih tua yang cenderung pasif terhadap tantangan sedangkan berdasarkan analisis kredit usia termasuk

kedalam prinsip 5C yaitu *character*.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau menguraikan keadaan situasi pada tempat observasi, melakukan penelitian serta kemudian melakukan analisis sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Teknik Pengumpulan Data

Metode Observasi

Menurut Sanusi (2011:111) observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode observasi menurut penelitian ini adalah mengumpulkan data tentang pelaksanaan dari kegiatan kredit, catatan, laporan yang berkaitan dengan kredit dan merupakan data penunjang dalam menganalisis data yang dibahas.

Metode Wawancara

Menurut Sanusi (2011:105) wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tanpa daftar pertanyaan (wawancara bebas). Wawancara tersebut tidak menggunakan daftar lampiran wawancara.

Metode Dokumentasi

Menurut Sanusi (2011:114) cara dokumentasi adalah cara yang biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Metode dokumentasi menurut penelitian ini adalah mencari, mencatat, mengumpulkan informasi mengenai KUR BRI.

HASIL

Faktor Lama Usaha Berjalan

Dari hasil analisis diatas bahwa faktor lama usaha berjalan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian pinjaman kredit usaha rakyat. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu Wangi, SP (2008:87) “faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi dan pemberian pinjaman kredit usaha rakyat”, dijelaskan dari hasil penelitiannya bahwa salah satu faktor lama usaha berjalan. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor lama usaha berjalan mempunyai pengaruh yang baik dalam pemberian pinjaman KUR.

2. Faktor Pendapatan Rumah Tangga dalam sebulan

Melihat hasil analisis dan kesimpulan yang ada dapat dijelaskan bahwa faktor pendapatan rumah tangga dalam sebulan dapat mempengaruhi pemberian pinjaman kredit usaha rakyat. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu Sembiring, Immanuel (2013:51) “faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) disektor agribisnis”, dijelaskan dari hasil penelitiannya bahwa salah satu faktor pendapatan rumah tangga dalam sebulan peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor pendapatan rumah tangga dalam sebulan mempunyai pengaruh yang baik dalam pemberian pinjaman kredit usaha rakyat.

3. Faktor Tingkat Pendidikan

Dari hasil analisis diatas bahwa faktor tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pemberian pinjaman kredit usaha rakyat. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu Carla Rizka Marantika (2013:60) “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) mikro”, dengan memiliki tingkat pendidikan peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor tingkat pendidikan tidak mempunyai Pdalam pemberian pinjaman kredit usaha rakyat.

4. Faktor Agunan

Melihat hasil analisis dan kesimpulan yang ada dapat dijelaskan

bahwa faktor agunan dapat mempengaruhi pemberian pinjaman kredit usaha rakyat. Dalam penelitian terdahulu Immanuel Sebing (2013:45) “faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit usaha rakyat (KUR) disektor agribisnis”. Dengan memiliki agunan peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor agunan mempunyai mempengaruhi yang baik dalam pemberian pinjaman kredit usaha rakyat.

5. Faktor Jumlah Tanggungan Keluarga

Melihat hasil analisis dan kesimpulan yang ada dapat dijelaskan bahwa faktor jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi pemberian pinjaman kredit usaha rakyat. Dalam penelitian terdahulu Carla Rizka Marantika (2013:52) “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) mikro”. Dengan memiliki jumlah tanggungan peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor jumlah tanggungan mempunyai pengaruh yang baik dalam pemberian pinjaman kredit usaha rakyat.

6. Faktor Usia

Melihat hasil analisis dan kesimpulan yang ada dapat dijelaskan bahwa faktor usia tidak mempengaruhi pemberian pinjaman kredit usaha rakyat. Dalam penelitian terdahulu Carla Rizka Marantika(2013:50) “analisis faktor-faktor

yang mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) mikro". Peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor usia tidak mempunyai pengaruh dalam pemberian pinjaman kredit usaha rakyat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian ini diperoleh pengaruh Lama Usaha Berjalan, Pendapatan Rumah Tangga dalam sebulan, Agunan dan Jumlah Tanggungan Keluarga di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang mempengaruhi pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat.
2. Berdasarkan penelitian ini diperoleh Tingkat Pendidikan dan Usia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Dwikora Palembang tidak mempengaruhi pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat.
3. Berdasarkan penelitian ini juga diperoleh bahwa agunan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Dwikora. Hal ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung agunan sangat penting sebagai alat pengaman dan sebagai bahan pertimbangan bagi bank. Apabila

nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan, agunan tersebut dapat dijual atau dialihkan kepada bank untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aidil. 2010. *Analisis Pijaman Kredit Usaha Rakyat*. Diakses pada 22 November 2016.
- Amanda, Praiselia. 2015. *Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Diakses pada 22 November 2016.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariana, Yunita. 2011. *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat*. Diakses pada 22 November 2016.
- Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965.
- Penpres No. 17 tahun 1965 *tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia*.
- PERPU No. 41 tahun 1960 *dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 *tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*.

- Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009.
- Republik Indonesia. 2010. Surat Edaran No. S.9-DIR/ADK/03/2010 *Tentang Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta: Bank Rakyat Indonesia.
- Sembiring, Immanuel. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi kredit usaha rakyat (KUR) disektor agribisnis. Semarang: Universitas diponegoro.
- Surat Edaran Kanpus BRI S.112-DIR/BUD/8/89
- Undang-Undang No. 14 tahun 1967 *tentang Undang-undang Pokok Perbankan* dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 *tentang Undang-undang Bank Sentral*.
- Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*. *Bab 1 pasal 1 ayat (1)* menyatakan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 *tentang Perbankan* yang terdapat dalam pasal 8 ayat 2.
- Wardani, Nurul. 2010. *Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. Diakses pada 22 November 2016.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Moch. Vikram Roza Septian, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti

Universitas Bina Darma Palembang Jalan Jenderal Ahmad Yani No.03 Palembang
geneiryodan266@yahoo.com, yeniwidyanti@binadarma.ac.id, hasankuzery@binadarma.ac.id

ABSTRACT

The study led by Drs. H. Hasan Kuzery., AK., MM., CA and Yeni Widyanti, SE., M.Ak. This study aimed to analyze the factors that affect tax management with indicators of effective tax rates on property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange. There are six variables used in this study. These variables include firm size, profitability, debt levels, tax facilities, the number of commissioners, and the intensity of fixed assets. The sample used in this study is the property and real estate company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2015. The study population had 45 with the selection of the sample was selected using purposive sampling of companies with the observation period of 4 (four) years. Data were analyzed using multiple regression analysis model, which is preceded by the classical assumption test consisting of normality test, heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation test. Hypothesis testing is done by using the F test, t test, and test the coefficient of determination. The results of this study indicate that the size and intensity of fixed assets significantly influence tax management. As for profitability, debt levels, tax facilities, and the number of commissioners no significant effect on tax management.

Keywords: *Tax Management, Company Size, Profitability, Level Debt, Tax Facilities, Total Board of Commissioners, and the intensity of Fixed Assets.*

ABSTRAK

Penelitian dibimbing oleh Drs. H. Hasan Kuzery., AK.,MM., CA dan Yeni Widyanti, SE., M.AK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel tersebut antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat utang, fasilitas perpajakan, jumlah dewan komisaris, dan intensitas aset tetap. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Populasi penelitian ini sebanyak 45 dengan pemilihan sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* perusahaan dengan periode pengamatan 4 (empat) tahun. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang didahului oleh uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan autokorelasi. Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan profitabilitas, tingkat utang, fasilitas perpajakan, dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kata kunci: *Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Tingkat Utang, Fasilitas Perpajakan, Jumlah Dewan Komisaris, dan Intensitas Aset Tetap.*

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2013: 18).

Sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana perusahaan tersebut dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, selain tugasnya menjalankan *self assessment system*, wajib pajak juga berkewajiban memungut dan memotong pajak. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, dimana sebagian besar wajib pajak berpendapat pajak merupakan beban yang harus ditekan jumlahnya.

Salah satu tujuan perusahaan pasti untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Dan untuk memperoleh laba maksimum dengan cara meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan perusahaan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terhutang. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan

benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan, 1996).

Para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan sering menggunakan tarif pajak efektif perusahaan (Effective Tax Rate/ETR) sebagai salah satu acuan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan.

Penggunaan perusahaan *property* dan *real estate* karena di Indonesia ini, prospek dalam hal *property* dan *real estate* sangat baik. Dalam usaha properti dan real estate terdapat banyak aspek pajak seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPh Final. Oleh karena itu, pajak atas sektor properti dan real estate dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak Negara. (sumber www.pajak-kita.com). Dengan uraian di atas manajemen pajak merupakan isu penting yang menarik untuk diteliti, karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan Negara yang menitikberatkan pajak sebagai pendapatan utama Negara dan menginginkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Berdasarkan uraian

di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**”.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling merupakan hal dasar untuk memahami konsep corporate governance. Jensen dan William (1976) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Dalam pendelegasian wewenang pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*), manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik

2.1.2 Pajak

Pengertian pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.3 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan Pohan (2016), manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif (Darmadi, 2013). Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan.

2.1.4 Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*)

Effective tax rate (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif

menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Meilinda, 2013).

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak

2.2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito, dalam Atarwaman, 2011).

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak (Noor et al., 2007). Nicodème (2007) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Dengan banyaknya sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar beban pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan.

2.2.2 Profitabilitas

Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen

perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki.

Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan (Atarwaman, 2011).

2.2.3 Tingkat Utang

Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana utang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Munawir, dalam Rahmawati, 2012).

Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa pemilihan utang dan modal sebagai sumber pendanaan merupakan keputusan penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya biaya bunga pada utang menjadi pertimbangan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Modigliani dan Miller dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa biaya bunga merupakan faktor pengurang pajak

penghasilan sehingga dapat digunakan untuk menghemat pajak.

2.2.4 Fasilitas Perpajakan

Tarif pajak badan ditentukan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak sebesar 25% merupakan update dari pasal 17 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) yang berlaku untuk tahun 2009. Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak badan karena tarif telah diturunkan sehingga tidak lagi terlalu membebani perusahaan.

2.2.5 Jumlah Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham.

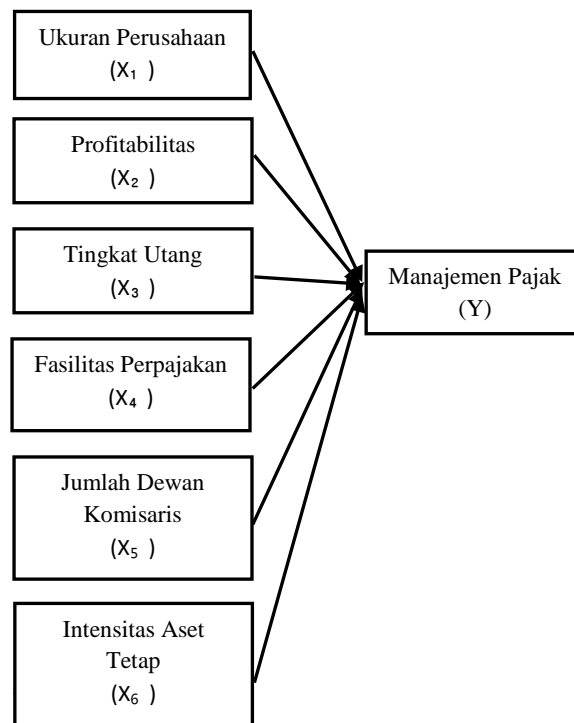
2.2.6 Intensitas Aset Tetap

Aset tetap yang dimanfaatkan perusahaan akan menyusut nilainya, ini

dikarenakan sifat harus yang dimiliki oleh aset tetap.

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.5.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). **Perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak**

2.5.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar

pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Roman dan Lanis (2007) profitabilitas digambarkan dengan ROA.

H₂ : Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

2.5.3 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak

Biaya bunga utang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

H₃ : Tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak

2.5.4 Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak

Alm dalam Hutagaol et al. (2007) menjelaskan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya (Alm, dalam Hutagaol et al., 2007).

H₄ : Fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak

2.5.5 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Minnick dan Tracy (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.

H₅ : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

2.5.6 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap.

H₆ : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.2.1 Operasional Variabel

1. Variabel Bebas (X)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat utang, fasilitas perpajakan, jumlah dewan komisaris, dan intensitas aset tetap.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel Dependen yang digunakan pada penelitian ini merupakan manajemen

pajak yang diproyeksikan dengan tarif pajak efektif.

3.2.2 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2015 yang berjumlah 45 perusahaan.

2. Sampel

Sampel yang di ambil pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1.	Agung Podomoro Land Tbk	17.	Greenwood Sejahtera Tbk
2.	Alam Sutera Realty Tbk	18.	Jaya Real Property Tbk
3.	Bekasi Asri Pemula Tbk	19.	Kawasan Industri Jababeka Tbk
4.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	20.	Lamicitra Nusantara Tbk
5.	Sentul City Tbk	21.	Lippo Cikarang Tbk
6.	Bumi Serpong Damai Tbk	22.	Lippo Karawaci Tbk
7.	Ciputra Development	23.	Modernland Realty Tbk

	Tbk		
8.	Ciputra Property Tbk	24.	Metropolitan Kentjana Tbk
9.	Ciputra Surya Tbk	25.	Metropolitan Land Tbk
10.	Duta Anggada Realty Tbk	26.	Plaza Indonesia Realty Tbk
11.	Intiland Development Tbk	27.	Roda Vivertex Tbk
12.	Duta Pertiwi Tbk	28.	Pikkoland Development Tbk
13.	Gading Development Tbk	29.	Danayasa Arhatama Tbk
14.	Gowa Makassar Tourism Development Tbk	30.	Suryamas Dutamakmur Tbk
15.	Perdana Gapura Tbk	31.	Summarecon Agung Tbk
16.	Pudjiadi Prestige Tbk		

3.2.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data yang merupakan data kuantitatif. Sumber data yang diperoleh merupakan jenis data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2015.

3.2.5 Teknik Analisis Data

3.2.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak (Priyatno, 2010:36).

3.2.5.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dalam bentuk kuantitatif dengan tidak menyertakan hipotesis dalam pengambilan keputusan.

3.2.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis yang sebelumnya telah penulis buat, maka penulis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis regresi ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mencari persamaan regresi dan menguji ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang dapat digunakan untuk memperkirakan variabel dependen (Y) di masa yang akan datang karena pengaruh variabel independen (X). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

3.2.5.4 Pengujian Hipotesis

1) Uji Signifikansi/ Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji keberartian model (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

3) Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh atau kuat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependennya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.3.1.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan *Property dan Real Estate*

Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

4.3.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan *Property dan Real Estate*

Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak.

4.3.3.1 Pengaruh Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan *Property dan Real Estate*

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, tingkat utang perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa peran tingkat utang perusahaan dalam meningkatkan kualitas manajemen pajak belum dapat berfungsi secara semestinya.

4.3.4.1 Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan *Property dan Real Estate*

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, fasilitas perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

4.3.5.1 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan *Property dan Real Estate*

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, jumlah dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

4.3.6.1 Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan *Property dan Real Estate*

Hasil penelitian menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dari pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan, variabel ukuran perusahaan mempunyai arah pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Kemudian pada variabel profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan *property dan real estate*.
2. Variabel tingkat utang mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan *property dan real estate*. Sedangkan variabel fasilitas perpajakan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan *property dan real estate*.
3. Variabel jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan *property dan real estate*. Kemudian variabel intensitas aset tetap mempunyai arah pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.
4. Dari pengujian hipotesis secara simultan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat utang, fasilitas perpajakan, jumlah

dewan komisaris, dan intensitas aset tetap secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak.

Saran

1. Dalam penetapan kebijakan manajemen pajak yang akan dilakukan perusahaan, terlebih dahulu manajer perusahaan sebaiknya memperhatikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi membaik dan memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan. Sehingga manajer perusahaan dapat mengurangi risiko memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan.
2. Manajemen pajak dalam sebuah perusahaan sebaiknya dioptimalkan. Apabila pengelolaan pajak dalam suatu perusahaan belum optimal maka akan mengakibatkan kerugian berupa pembayaran beban pajak yang terlalu besar. Namun ada baiknya perusahaan tersebut melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian ini kembali, sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti biaya penelitian dan pengembangan, tenaga kerja profesional, dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian.

4. Selain itu, memperluas periode penelitian dan menambahkan jumlah sampel perusahaan yang tidak hanya berfokus pada perusahaan *property* dan *real estate* saja, tetapi perusahaan dagang dan jasa yang terdaftar di BEI juga dapat dijadikan sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R.J.D., 2011. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktik Perataan laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Manufaktur Pada Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi Advantage, Vol. 2, No. 2
- Aunalal, A. 2011. "Pengaruh Size, Profitability & Ownership Structure Sebagai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate Perusahaan. Thesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Darmadi, Iqbal Nur Hakim dan Zulaikha. 2013. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Fuad, M, dkk. 2000. "Pengantar Bisnis". Jakarta: Gramedia.
- Fullerton. 1983. *Which Effective Tax Rate*. Working Paper No. 1123. National Bureau of Economic Research. Wiley Finance.
- Handayani, Desi. 2013. "Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif". Skripsi
- Hanum Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI 2009-2011)*. Universitas Diponegoro. Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013.
- Imelia, Septi. 2015. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (ETR) Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012*. Skripsi. Universitas Riau
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm : Managerial Behavior, Ageency and Ownership Structure". *Journal of Financial Economic*. Vol. V3 No.4
- Karayan, John E and Charles W.Swenson. 2007. *Strategic Business Tax Planning, 2nd edition*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Lusiana, Yani. 2016. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
- Mardiyanto, Handoyono. 2009. *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. "Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt*". *Jurnal Magister Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Meilinda, Maria. 2013. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak". Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang

- Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pohan, Chairil Anwar. "Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis". Jakarta : PT. Gramedia.
- Prabowo, Yusdianto. 2006. *Akuntansi Perpajakan dan Terapan*. Edisi pertama. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2010. "Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS, Yogyakarta: Gava Media.
- Rahmawati. 2015. *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Good Corporate Governance Terhadap Biaya Utang*. Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No.1.
- Resmi, Siti. 2013. "Perpajakan : Teori dan Kasus". Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Richardson, G., dan Lanis, R. 2007. *Determinants Of The Variability In Corporate Effective Tax Rate and Tax Refrom : Evidance From Australia*. Journal Of Accounting and Public Policy.
- Ridwan, Achmad Zein. 2016. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rodrigues and Arias. 2013. *Do bussiness characteristic determine an effective tax rate?. The Chinese Economy*
- Sawir, Agnes. 2004. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Zulkarnaen, Novriansyah. 2015. "Pengaruh Good Corporate Terhadap Manajemen Pajak". Skripsi

www.pajak-kita.com

www.idx.co.id

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN
MURABAHA TERHADAP PROFITABILITAS PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2011-2015**

Muhamad Alfian¹, Siti Nurhayati Nafsiah², Ade Kemala Jaya³
Mahasiswa Universitas Bina Darma¹, Dosen Universitas Bina Darma^{2,3}
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 12 Palembang
e-mail: malfian.ubd@gmail.com¹, siti_nurhayati@mail.binadarma.ac.id²,
adekemala@binadarma.ac.id³

***ABSTRACT:** Population and sample in this study is Islamic Bankings' financial statements that Islamic banks and Islamic business units in Indonesia 2011-2015. The analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple linear regression test, coefficient determination test and hypothesis tests. Based on the test results, it can be concluded that mudharabah effects positive and significant to profitability, musyaraka effects negative and significant to profitability and murabaha effects positive and no significant to profitability. While simultaneously, mudaraba, musharaka and murabaha effect positive and significant to profitability in Islamic Banking.*

Keywords: Mudaraba, Musharaha, Murabaha, Profitability and Return On Assets

ABSTRAK : Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan syariah yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara simultan, pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Profitabilitas dan *Return On Assets*

1. Pendahuluan

Sistem perbankan syariah secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah, menjunjung tinggi kejujuran, menjamin keseimbangan, menekankan sifat saling percaya dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak. Peran bank syariah adalah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana untuk disalurkan kepada masyarakat atau lembaga yang membutuhkannya melalui pembiayaan. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat kemudian disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan

prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ijarah dan akad pelengkap.

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana dari perbankan syariah. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha perbankan syariah, artinya pembiayaan memegang peranan penting dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan perbankan syariah berasal dari

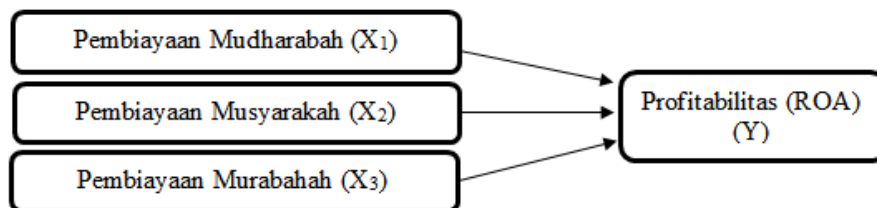
kegiatan penyaluran pembiayaan. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan nilai dari profitabilitas perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya, dengan menggunakan pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli sebagai variabel independen, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dipilih. Peneliti menambahkan unit usaha syariah sebagai objek penelitian untuk memperluas cakupan analisis objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitian ini, yaitu "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015".

2. Landasan Teori

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank, khususnya penyaluran pembiayaan bagi hasil dan

penyaluran pembiayaan jual beli. Penyaluran pembiayaan bagi hasil yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mudharabah dan musyarakah sedangkan penyaluran pembiayaan jual beli yang digunakan dalam penelitian ini yaitu murabahah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan sumber utama pendapatan perbankan syariah berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan, semakin tinggi penyaluran pembiayaan yang dilakukan pada perbankan syariah maka diharapkan dapat meningkatkan nilai profitabilitas dari bank. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets (ROA)* ini menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan semua kekayaan dan sumber daya yang dimilikinya. Semakin besar nilai *Return On Assets (ROA)* yang dihasilkan bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan dan pengelolaan aset.



Gambar 1 Paradigma Penelitian

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia, yang terdiri dari bank

umum syariah dan unit usaha syariah. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*.

Tabel 1 Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah perbankan syariah di Indonesiasampaitahun 2015	35
2	Jumlahperbankansyariahyang tidakmempublikasikanlaporankeuangans elamaperiodepengamatan 2011-2015	(2)
3	Jumlahperbankan syariah yangtidaktersedianyakelengkapan data variabel yang diteliti	(5)
4	Jumlahperbankan syariah yangmengalamikerugianselamaperiodepe ngamatan 2011-2015	(9)
Total Sampel		19

Berdasarkanpemilihansampel di atas, makadiketahui bahwa sampel yang digunakan sebanyak 19 perbankan syariah di Indonesia, yang terdiri dari: 4 bank umum syariah dan 15 unit bank syariah dengan periode laporan keuangan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sehingga data yang digunakan ada sebanyak 95 laporan keuangan.

4. Hasil Penelitian

a. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Dasar dalam pengambilan keputusan ini adalah hasil dari *2-tailed* > 0,05. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 UjiNormalitasSebelumDitransform

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	ROA
N		95	95	95	95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	26617.89	90101.26	133119.96	2.5717
	Std. Deviation	15050.652	87531.239	131087.130	1.58153
	Most Extreme Differences				
	Absolute	.070	.182	.202	.074
	Positive	.070	.182	.202	.074
	Negative	-.069	-.180	-.177	-.054
Test Statistic		.070	.182	.202	.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.000 ^c	.000 ^c	.200 ^{c,d}

Sumber: Hasilolahan SPSS 22, 2017

Data variabel musyarakah dan variabel murabahah memiliki angka probabilitas sebesar 0,000. Kedua variabel tersebut perlu dilakukan transformasi data agar plot distribusi normal semakin baik bila dibandingkan data biasa, sehingga perlu ditretmen dengan menggunakan

model logaritma, yaitu melakukan transformasi data ke dalam logaritma natural (LN) (Ghozali, 2011:165). Hasil dari uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dengan data yang telah dinormalkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 UjiNormalitasSetelah Data Ditransform

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Mudharabah	lnMsh	lnMrh	ROA
N		95	95	95	95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	26617.89	10.9676	11.2973	2.5717
	Std. Deviation	15050.652	.97344	1.04321	1.58153
	Most Extreme Differences				
	Absolute	.070	.052	.081	.074
	Positive	.070	.052	.081	.074
	Negative	-.069	-.046	-.073	-.054
Test Statistic		.070	.052	.081	.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.136 ^c	.200 ^{c,d}

Sumber: Hasilolahan SPSS 22, 2017

Setelahditransformdata variabel independen (mudharabah,

musyarakah dan murabahah) dan variabel dependen yaitu

profitabilitas (ROA) memiliki angka probabilitas (*Asym. Sig*) masing-masing 0,200; 0,200; 0,136 dan 0,200 yang berarti variabel-variabel independen dan variabel dependen lebih probabilitas yaitu 0,05 atau 5%, maka data untuk penelitian ini telah memiliki distribusi yang normal.

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan meperhitungkan nilai *tolerance* serta nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 yang berarti tidak terdapat gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

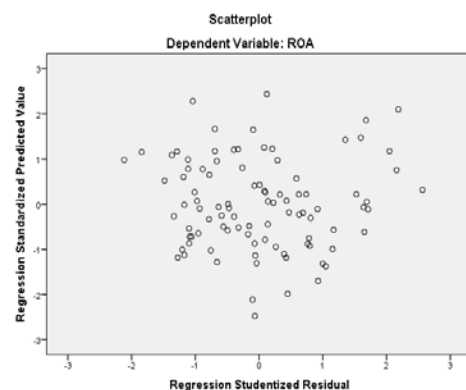
Tabel 4 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Mudharabah	.992	1.008
lnMsh	.910	1.099
lnMrh	.915	1.092

Sumber: Hasilolahan SPSS 22, 2017

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan untuk semua variable independen tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas yang digunakan dengan grafik *scatterplot*. Berdasarkan gambar grafik *scatterplot* tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.



Sumber: Hasilolahan SPSS 22, 2017

Gambar 2 Uji Heterokedastisitas

Uji Autokorelasi menggunakan Durbin Watson (DW). Jika nilai $d > d_u$ dan $< 4 - d_u$, maka tidak ada autokorelasi antar residual. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 UjiAutokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.369 ^a	.136	.108	1.49380	1.803

a. Predictors: (Constant), LnMrh, Mudharabah, LnMsh

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Hasil Olahan SPSS22, 2017

Dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi antar

residual, yang dibuktikan dengan nilai $du < d < 4 - du$, yaitu $1,732 < 1,803 < 2,268$.

b. UjiRegresiLinier Berganda

Tabel 6 Uji Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.967	2.128		1.394	.167
	Mudharabah	3.292E-5	.000	.313	3.203	.002
	LnMsh	-.337	.166	-.208	-2.032	.045
	LnMrh	.215	.154	.142	1.391	.167

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Hasilolahan SPSS 22, 2017

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,967 + 3,292X_1 - 0,337X_2 + 0,215X_3 + e$$

Hasil dari persamaan regresi berganda di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 2,967 artinya apabila mudharabah (X_1), musyarakah (X_2) dan murabahah (X_3) bernilai 0 (nol), maka profitabilitas (ROA) sebesar 2,967.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel mudharabah (X_1) sebesar 3,292 menyatakan bahwa setiap penambahan

Rp 1,- dari nilai mudharabah, maka akan menyebabkan kenaikan profitabilitas (ROA) sebesar 3,292.

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel musyarakah (X_2) sebesar -0,337 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1,- dari nilai musyarakah, maka akan menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) sebesar 0,337.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel murabahah (X_3) sebesar 0,215 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp 1,- dari nilai murabahah, maka akan menyebabkan kenaikan profitabilitas (ROA) sebesar 0,215.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.369 ^a	.136	.108	1.49380

a. Predictors: (Constant), Mudharabah, LnMsh, LnMrh

Sumber: Hasil Olahan SPSS22, 2017

Berdasarkan hasil pada tabel 7 diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,136 atau 13,6%, artinya kombinasi variabel independen (X) yang terdiri dari mudharabah (X_1), musyarakah (X_2) dan murabahah (X_3) mampu

menjelaskan variabel dependen (Y) yaitu profitabilitas yakni *return on assets* (ROA) sebesar 13,6%, sisanya sebesar 86,4% (100% – 13,6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

d. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Simultan (F Test)

Tabel 8 Uji Signifikansi Simultan (F Test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.054	3	10.685	4.788	.004 ^b
	Residual	203.062	91	2.231		
	Total	235.116	94			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), LnMrh, Mudharabah, LnMsh

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22, 2017

Berdasarkan uji signifikansi simultan diperoleh nilai F sebesar 4,788 dengan tingkat signifikansi 0,004. Hal ini berarti hasil uji ini memiliki tingkat signifikansi < 0,05

(kurang dari 0,05), maka pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

2. Uji Signifikansi Parsial (t test)

Tabel 9 Uji Signifikansi Parsial (t test)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.967	2.128		1.394	.167
	Mudharabah	3.292E-5	.000	.313	3.203	.002
	LnMsh	-.337	.166	-.208	-2.032	.045
	LnMrh	.215	.154	.142	1.391	.167

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Hasil Olahan SPSS versi 22, 2017

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang diperoleh pada tabel 4.13 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel mudharabah (X_1) memiliki nilai t sebesar 3,203, nilai koefisien sebesar 3,292 dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Hal ini berarti signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
2. Variabel musyarakah (X_2) memiliki nilai t sebesar $-2,032$, nilai koefisien sebesar $-0,337$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,045. Dapat disimpulkan bahwa musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
3. Variabel murabahah (X_3) memiliki nilai t sebesar 1,391, nilai koefisien sebesar 0,215 dan tingkat signifikansi sebesar 0,167. Hal ini berarti signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa musyarakah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

5. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji signifikansi parsial (*t test*) menunjukkan bahwa variabel mudharabah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan variabel musyarakah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan variabel murabahah (X_3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
2. Hasil uji signifikansi simultan (*F test*) menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari mudharabah (X_1), musyarakah (X_2) dan murabahah (X_3) secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

b. Saran

Beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lainnya seperti ijarah, istishna dan qardh, kemudian dapat memperbanyak sampel penelitian serta memperluas periode penelitian sehingga lebih diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Bagi manajemen perbankan syariah diharapkan dapat mengatur serta mempertahankan struktur pembiayaan agar pertumbuhannya menjadi semakin lebih baik dan tetap stabil. Selain itu juga, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih optimal dalam melakukan pengelolaan asetnya agar dapat menyesuaikan nilai *Return On Assets* (ROA) dengan standar industri perbankan yaitu 1,5%.

c. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel penelitian yang kecil sehingga belum menggambarkan keadaan perbankan syariah secara keseluruhan.
2. Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan sebesar 13,6%. Hal ini berarti bahwa masih terdapat 86,4% faktor lain di luar model penelitian ini yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sehingga mendapatkan deskripsi yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2015. *Statistika Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2015*. Jakarta: Bank Indonesia. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2016 dari <http://www.bi.go.id>
- Buchori, Imam dan Aji Prasetyo. 2013. "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya". *Jurnal EL-Qist*, Vol.03 No.01 p 27.Surabaya
- Budianas, Nanang. 2013. *Pengertian Bank Syariah*. Diambil pada tanggal 17 Oktober 2016 dari <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-bank-syariah.html>
- DSAK IAI. 2014. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah". Jakarta: IAI
- DSAK IAI. 2014. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah". Jakarta: IAI
- DSAK IAI. 2014. "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah". Jakarta: IAI
- Fadholi, AmriDziki. 2015. "PengaruhPembiayaanMurabahah, MusyarakahdanMudharabahterhadap profitabilitas Bank UmumSyariahTahun 2011-2014". *ArtikelPenelitian*. UniversitasMuhammadiyah Surakarta
- Fadhila, Novi. 2015. "AnalisisPembiayaanMudharabahdanMurabahahterhadapLaba Bank SyariahMandiri". *JurnalRisetAkuntansiandanBisnis*, Vol 15 No. 1. UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara
- Firdaus, H RachmatdanMaya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 edisikelima*. Semarang: Diponegoro
- Horne, J.C. Van dan J.M. Wachowicz. 2013. *Prinsip-PrinsipManejemenKeuanganEdisi Ke-13*. Jakarta: SalembaEmpat
- Karim,Adiwarman A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisikelima*. Jakarta:RajawaliPers
- Mingka, Agustianto. 2015. *TantanganPerbankanSyariah 2016*. Diambilpadatanggal 11 Nopember 2016 dari<http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/tantangan-perbankan-syariah-2016>
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Nurhayati, Sri danWasilah. 2013. *AkuntansiSyariah di Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat
- Puteri, DeasyRahmi. 2014. "PengaruhPembiayaanMudharabah, Musyarakah, Murabahah, IstishnadanIjarahterhadapProfitabilitas Bank UmumSyariah di Indonesia PeriodeTahun 2009-2013".*Skripsi*. UniversitasSriwijaya
- Rahman, Aulia FuaddanRidha Rochmanika. 2012. "Pengaruh Pembiayaan JualBeli, Pembiayaan

- Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8No.1. p 1.Malang.
- Riyadi, Slamet dan Agung Yulianto. 2014. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Analisis Akuntansi*. Universitas Negeri Semarang
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Ribad dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saidi, Zaim. 2012. *Tidak Syar'inya Bank Syariah*. Yogyakarta : Delokomotif
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Siamat, Dahlan. 2010. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Triuwono, Iwan. 2012. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tubastuvi, Naelati dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. 2013. “The Effect of Funding toward Financing and Islamic Bank Social Performance in Indonesia”. *The 2nd IBSM, International Conference on Business and Management*. Chiang Mai – Bangkok
- Ulfah, Permata. 2008. “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perolehan Laba Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Purwokerto”. *Jurnal Pendidikan Agama*, Vol, 9 no.1 Purwokerto
- Yaya, Riza, Aji Erlangga Martawirejadan Ahim Abdurahim. 2013. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT PLN PALEMBANG

Muhammad Rinaldi¹, Verawaty², Agus Hendryanto²
Dosen Universitas Bina Darma²² Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el : muhammad.rinaldi2606@gmail.com¹verawaty_mahyudin@yahoo.com²
ahendrianto@gmail.com²

Abstrak

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER — 01/MBU/2011. Salah satu kegiatan yang perlu menerapkan *good corporate governance* adalah pada sektor pengadaan barang/jasa. Dalam praktek pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada suatu badan publik, masih merugikan keuangan negara dan kepentingan rakyat. Uji Koefisien Determinasi antara variabel *e-procurement* (X) dengan variabel GCG (Y) didapat sebesar 0,910 sedangkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 82,8 Penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada variabel implementasi sistem *e-procurement*, diperoleh nilai signifikansi $0,00 < \text{nilai level of significant } (\alpha) = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT PLN Palembang.

Kata kunci : *e-procurement, good corporate governance, PT PLN*

Abstract

Good corporate governance is set based on the regulation of the Minister of State-owned enterprises Number PER — 01/MBU/2011 One of the activities that need to apply good corporate governance is procurement's sector of goods/services. In practice the implementation of the procurement of goods/services on a public service, is still harming the financial interests of the State and the people. Test Coefficient Determination between the variable *e-procurement* (X) and (Y) GCG variables were obtained of independent variable whereas 0.910 was able to explain the dependent variable of 82.8%. The research indicates there is influence between independent variable the dependent variables against partially. On variable implementation of *e-procurement* system, the retrieved value significance level value of $0.00 < \text{significant } (\alpha) = 0.05$, then it can be concluded that the implementation of *e-procurement* positive effect towards the implementation of good corporate governance in PT PLN Palembang.

Keywords: *e-procurement, good corporate governance, PT PLN*

1. Pendahuluan

Pada saat berhasil meraih kemerdekaannya, Indonesia mewarisi ratusan perusahaan yang sebelumnya kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut dipegang oleh penjajah. Kemudian Ir. Soekarno mengambil kebijakan untuk menasionalisasi

perusahaan-perusahaan tersebut. Saat ini, perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi tersebut berada di bawah Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Salah satu sektor vital tersebut adalah sektor industri listrik, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) merupakan perusahaan BUMN yang sangat

mendominasi dalam sektor industri listrik nasional. Kedudukan PLN yang secara langsung berada di bawah tangan pemerintah membuatnya kesulitan untuk dapat keluar dari intervensi politik. Selain itu, sebagai sebuah perusahaan besar, tentunya PLN memiliki potensi yang besar dalam hal terjadinya penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tentu saja manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses tata kelola berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Instrumen baru tersebut adalah GCG (*Good Corporate Governance*).

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER — 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Menurut Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan

peraturan perundangan dan nilai-nilai etika..

Perusahaan di negara-negara maju telah merasakan manfaat yang didapat dari penerapan konsep GCG. Selain kinerja perusahaan terus membaik, harga saham dan citra perusahaan terus naik. Dengan adanya GCG, para *stakeholder*, seperti: pemegang saham, karyawan, pemerintahan, LSM, konsumen dan masyarakat hanya mau menghargai perusahaan yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* serta menghindari *conflict of interest*. Perusahaan yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* adalah perusahaan yang dicari oleh investor. Namun masih banyak perusahaan yang menerapkan GCG hanya untuk memenuhi kewajiban dari peraturan menteri negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN.

Salah satu BUMN yang melakukan *e-procurement* adalah PT PLN. E-Proc PLN adalah *e-Procurement* di lingkungan PT PLN (Persero) untuk sarana pengadaan barang/jasa, informasi pengadaan antar Unit PLN, sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) yang dilakukan secara online/elektronik dengan menggunakan fasilitas aplikasi e-Proc PLN. Tujuan dari pelaksanaan *e-procurement* PT PLN

adalah untuk lebih meningkatkan integrasi antar unit PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntabilitas, memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan material di gudang (baik material *fast moving* maupun material *slow moving*). Dengan memberlakukan *e-procurement*, PT PLN dinilai dapat memenuhi *Value for Money* yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas (3E) sekaligus terimplementasi *Good Corporate Governance* serta dapat memberantas KKN.

Walaupun banyak manfaat yang diberikan, pada kenyataannya *e-procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya (pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya *skill* dan pengetahuan tentang *e-procurement*, serta jaminan keamanan sistem tersebut. Hal lain yang sering terjadi adalah penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami aplikasi *e-procurement*, tingkat kelalaian yang sangat tinggi, penetapan harga yang sangat tinggi dari pihak vendor, serta pengurangan kuantitas dan kualitas yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.

Meskipun lelang sudah banyak dilakukan melalui *e-procurement*, tidak menjamin bebas dari korupsi. Banyak korupsi yang dilakukan melalui *e-procurement*. Dalam tujuannya, penerapan GCG memiliki salah satu tujuan yang sama dengan *e-procurement* yaitu bertujuan untuk mengontrol seluruh kegiatan agar terhindar dari penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator *e-procurement* yaitu efektif, efisien, transparansi, daya saing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel yang sejalan dengan indikator dari GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness.

Untuk melihat dan meninjau kesesuaian tujuan PT PLN dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui pelaksanaan sistem *e-procurement* pada PT PLN Palembang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa berbasis Elektronik (*E-Procurement*) terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT PLN Palembang.”**

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pengadaan Barang/jasa

Pengertian pengadaan barang/jasa menurut Sutedi (2012), yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

2.1.1 Aturan Pengadaan Barang/Jasa BUMN

Dalam prakteknya sebagian besar BUMN/BUMD berpedoman pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya, selain disebabkan karena khawatir bermasalah juga disebabkan mereka sendiri tidak memiliki aturan pengadaan untuk internal BUMN/BUMD. Peraturan pengadaan barang/jasa BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMN dan ketentuan Pasal 99, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa:

1. Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi.

2.2 Pengertian *E-Procurement*

E-procurement menurut Sutedi (2012) adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dari Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) bahwa *e-procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Definisi lebih sederhana disampaikan oleh Andrianto (2007), bahwa *e-procurement* adalah proses

pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

2.2.1 Tujuan dari *E-Procurement*

Tujuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah ini adalah agar pemerintah mendapatkan barang/jasa yang diperlukan, dengan harga sama atau lebih rendah dari harga pasar (efisien), dengan kualitas, jumlah (*volume*), waktu penyerahan, dan tempat penyerahan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien (*value for money*), efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/non-diskriminatif, serta akuntabel. Ekspektasi implementasi *e-government* dengan aplikasi *e-procurement*, diharapkan dengan prinsip-prinsip tersebut, tujuan-tujuan yang diharapkan akan tercapai.

2.3 Pengertian *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Cadbury dalam Sutedi (2011) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Menurut *Center for European Policy Study (CEPS)*, GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Menurut Noensi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari

Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi

2.3.1 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan GCG pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN No 117/M-MBU/2002 Pasal 4 adalah :

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan

- memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun Internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian *organ*.
 3. Mendorong agar *organ* dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
 5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
 6. Menyukseskan program privatisasi BUMN.

2.3.2 Aspek-Aspek dalam *Good Corporate Governance*

Dalam Busyra Azheri (2012) pasal 2 Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembina Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 13 Mei

2000 tentang pengembangan praktik GCG dalam perusahaan (persero) menegaskan bahwa GCG adalah prinsip perusahaan yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG amat tergantung pada kondisi perusahaan, sehingga masing-masing perusahaan diharapkan membuat standar GCG (*best practices*) dengan memperhatikan beberapa aspek GCG yaitu:

- a. Tujuan perusahaan
Berkaitan dengan upaya perusahaan menjamin sustainable bisnis untuk jangka panjang dan menjaga hubungan dengan shareholders yang efektif. Perusahaan seharusnya mengungkapkan informasi secara akurat, memadai dan tepat waktu, transparan terhadap investor tentang akuisisi, hak dan kewajiban kepemilikan, serta penjualan saham.
- b. Hak Suara
Perusahaan harus menjamin hak suara dari setiap ownership dan mewajibkan adanya keterbukaan yang

- berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.
- c. *Non-Executive Corporate Board*
Melibatkan anggota *non-executive* yang independen dalam jumlah dan kompetensi yang memadai. *Non-executive* seharusnya tidak kurang dari 221 orang dan sama banyaknya dengan substancial majority. Komite audit, remunerasi dan nominasi sebaiknya beranggotakan *non-executive*.
- d. Kebijakan Remunerasi Perusahaan
Sebaiknya dalam laporan tahunan perusahaan mengungkapkan kebijakan *board* tentang remunerasi, sehingga investor dapat memutuskan apakah praktik dan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan standar, kepatutan dan kepatuhan.
- e. Fokus Strategi
Setiap modifikasi atas bisnis utama harus dilakukan atas persetujuan *shareholders*. Begitu pula halnya bila terjadi perubahan yang signifikan pada perusahaan dan secara materil berpengaruh melemahkan ekuitas atau mengikis *economic interest* atau hak kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada.
- f. Kinerja Operasional
Board Directors harusnya memfokuskan perhatiannya pada *corporate governance framework* dalam upaya mengoptimalkan kinerja perusahaan.
- g. *Shareholders Returns*
Board Directors harusnya memfokuskan perhatiannya pada *corporate governance framework* dalam upaya mengoptimalkan *retuns* kepada *shareholders*.
- h. *Corporate Citizenship*
Perusahaan harus tunduk dan taat pada berbagai ketentuan perundangundangan yang berlaku pada wilayah hukum dimana perusahaan melakukan bisnisnya.
- i. Implementasi *Corporate Governance*
Apabila suatu negara telah mempunyai code dalam

rangka praktik GCG maka perusahaan harus melaksanakannya.

2.3.3 *Corporate governance* di Indonesia

Bae,dkk (2003) menyatakan bahwa untuk memperbaiki *corporate governance*, Pemerintah harus memperkuat ketentuan hukum yang melindungi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan tersebut. Demikian juga perusahaan harus memperbaiki *corporate governancenya*. Becht,dkk (2005) menyatakan bahwa paling tidak terdapat sedikitnya dua alasan perlunya intervensi dari regulator. Pertama, regulasi yang dikeluarkan regulator (pemerintah) akan mendukung peraturan-peraturan pokok yang ada di perusahaan, karena peraturan yang dibuat oleh pendiri perusahaan atau pemegang saham bersifat subyektif dan tidak efisien dan tidak mungkin dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat sehingga dengan regulasi yang ada dapat mencapai persetujuan yang komprehensif. Kedua, walaupun perusahaan pada awalnya memiliki hak untuk mendesain peraturan yang efisien, mereka mungkin ingin membatalkan atau mengubahnya di kemudian hari, masalah akan timbul ketika perusahaan tidak memiliki komitmen untuk tidak mengubah atau membatalkan peraturan yang telah dibuatnya. Ketika

pemegang saham tersebar dan tidak terlibat aktif dalam perusahaan hal itu mungkin terjadi bahwa manajemen mengubah aturan untuk kepentingannya sendiri. Berkaitan dengan *corporate governance* perusahaan publik di Indonesia paling tidak terdapat dua peraturan yang terkait, yaitu undang-undang perseroan dan undang-undang di pasar modal.

2.3.3 Faktor-Faktor Penghambat Transformasi Menuju *Good Corporate Governance*

Menurut Raka (2001) dari segi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sangat “*Straight Forward*”. Namun demikian, dalam kenyataannya perubahan menuju praktik *Good Corporate Governance* yang lebih baik seringkali tidak mudah. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan implementasi perubahan seringkali tidak berjalan seperti yang diharapkan:

1. Tidak mampu menunjukkan dengan jelas hubungan antara prinsip-prinsip GCG dengan visi dan nilai-nilai (budaya) perusahaan.
2. Tidak mampu mengakomodasikan konsep GCG menjadi sesuatu yang punya makna bagi setiap anggota perusahaan dimana saja mereka berada.

3. Tidak mampu menggalang dukungan untuk perubahan
4. Tidak menyiapkan secara baik proses “*unlearning*”
5. Tidak melakukan penyelarasan “*alignment*”
6. Gagal mempertahankan perhatian dan antusiasme
7. Tidak dapat mengubah praktik GCG menjadi kebiasaan dan menimbulkan kesadaran bahwa hal itu menjadi bagian penting dari identitas perusahaan yang dapat dibanggakan oleh semua warga perusahaan.

2.4 Pengaruh *E-Procurement* terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance

Sebelum adanya *e-procurement*, pengadaan barang/jasa masih memiliki kelemahan dalam sistem prosedur, diantaranya (Riezka,2008) :

1. Tidak transparan/terbuka;
2. Tidak dapat diketahui dengan mudah dan terus-menerus
3. Ketentuan-ketentuan pengadaan tidak jelas dan multitafsir serta persyaratan-persyaratan yang berlebihan.
4. Adanya peluang yang memungkinkan *stakeholders* terkait untuk saling intervensi

5. Tata cara evaluasi penawaran yang kurang jelas mengandung ketidakpastian
6. Menghasilkan penyedia jasa yang diragukan kemampuan dan keahliannya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas.

Tujuan utama dari diterapkannya sistem *e-procurement* adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya *e-Procurement*, kontak langsung antara penyedia barang / jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaannya dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya, serta mudah dalam pertanggungjawaban keuangannya. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari diterapkannya GCG pada BUMN yaitu bertujuan untuk mengontrol seluruh kegiatan agar terhindar dari penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Persamaan prinsip GCG dan *e-procurement* juga saling berhubungan dengan suksesnya penerapan pada BUMN. Prinsip-Prinsip GCG antara lain (BUMN.go.id):

- a. Transparency (Transparansi) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan

- penyampaian informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif.
 - c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 - d. *Independency* (Kemandirian) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 - e. *Fairness* (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya *e-procurement* diharapkan dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan tanggungjawab. Dengan terpenuhinya prinsip tersebut, maka pemerintah dapat menciptakan *good governance*, yang mana prinsip dalam pengadaan barang/jasa tersebut memenuhi kriteria sebagaimana suatu perusahaan menjalankan tata kelola yang baik atau *good corporate governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.

Penelitian yang dilakukan Rieska (2008), Menunjukkan E-Procurement memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam e-procurement memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan demi mencapai pengadaan barang/jasa yang baik. Setelah pemerintah mampu menjalankan *good procurement governance*, tentunya akan berdampak langsung terhadap terwujudnya *good governance*. Menurut Astrid (2008), menunjukkan waktu proses dan pemilihan penyedia barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian pengadaan barang/jasa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012), penerapan *e-procurement* pada pengadaan di

Pemerintah kota surabaya dapat dikategorikan sebagai *full e-procurement*. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pengadaan meliputi Pemusatan manajemen yang lebih baik Menciptakan proses pengadaan yang bersih transparan dan dapat diterima dan Meningkatkan kepuasan klien (*costomer statisfaction*) sedangkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan meliputi Mengurangi biaya per tender (*Cost per Tender*) dan Mengurangi waktu proses pengadaan.

Menurut Suarini (2015), pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Hampir seluruh dari pelayanan PT PLN kepada pelanggan tersebut melalui proses pengadaan barang dan jasa, maka dari itu pengadaan barang dan jasa sangatlah dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh PT PLN.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis, yaitu: “implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*”.

3. Objek dan metodologi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT.PLN Palembang yang beralamat pada Jl, Kapten A. Rivai No. 37, Sungai Pangeran, Ilir Timur I.

Sampel pada penelitian adalah 41 karyawan pada PT PLN yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *e-procurement* yaitu pegawai yang pernah menjadi Verifikator sebanyak 5 Orang, PKK (Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Kegiatan) sebanyak 6 orang dan Pegawai yang pernah menjadi panitia yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota sebanyak 30 orang.

3.2.4 Metode Penganalisaan Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa berbasis Elektronik (*E-Procurement*) terhadap Pelaksanaan GCG pada PT.PLN Palembang.

3.2.5.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. Menurut Sugiono (2010) untuk menguji validitas konstruk dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. Rumus yang digunakan untuk

menguji validitas instrumen ini adalah Product Moment dari Karl Pearson, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Kemudian hasil dari rxy dikonsultasikan dengan harga kritis product moment (r tabel), apabila hasil yang diperoleh r hitung > r tabel, maka instrumen tersebut valid.

3.2.5.2 Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui suatu instrumen dinyatakan reliabilitas, menurut Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa : “Suatu instrumen dinyatakan reliabel, bila koefisien reliabilitas minimal 0.60”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Alpha \geq 0.60, sedangkan suatu instrumen dinyatakan tidak reliabel jika nilai Alpha < 0.60.

3.2.6 Uji Hipotesis

3.2.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Dengan menggunakan nilai *adjusted* R^2 , dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan, nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif, jika dalam uji empiris didapatkan nilai *adjusted*

R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol (Ghozali,2011)

3.2.6.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) (Ghozali,2011). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut

1. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_1 (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi t \leq 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_1 (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

4.1 Hasil dan pembahasan

Dari tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki r hitung > dari r tabel (0,325) dan bernilai positif dan beberapa

dibawah dari r tabel. Dengan demikian pertanyaan yang tidak valid akan dikeluarkan

Dari keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel memiliki Cronbach Alpha $> 0,60$. Dengan demikian variabel *e-procurement* dan GCG dikatakan reliabel.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) antara variabel *e-procurement* (X) dengan variabel GCG (Y1) didapat sebesar 0,910 sedangkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 82,8 %, sedang yang 17,2% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti).

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada variabel implementasi sistem *e-procurement*, diperoleh nilai signifikansi $0,00 < \text{nilai level of significant } (\alpha) = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT PLN Palembang.

Berdasarkan hasil analisis variabel implementasi sistem *e-procurement*, memperoleh t_{hitung} 13,724 dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$, artinya implementasi *e-procurement* berpengaruh

positif terhadap pelaksanaan GCG di PT PLN Palembang, dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) oleh PT.PLN Palembang selaku panitia pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-Procurement*) telah terlaksana, dengan memberikan akses dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kepada para peserta lelang melalui sistem online yang dapat dengan mudah diakses melalui media internet. Informasi yang diberikan berupa paket pekerjaan yang dilelangkan, unit, lokasi lelang, jadwal undangan pelelangan, kualifikasi dsb.

PT PLN Palembang selaku BUMN dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/Mbu/2012 Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pengelolaan yang dijalankan atas setiap tujuan dari yang ingin dicapai oleh perusahaan. Untuk semua PLN termasuk PT PLN Palembang apabila terjadi ketidaksesuaian dalam hal pengelolaan perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan ketidaknyamanan pada *stakeholders*, maka semua *stakeholders* baik itu meliputi masyarakat

umum ataupun yang termasuk sebagai peserta lelang apabila menemukan hal-hal pada pengelolaan PLN yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat, maka masyarakat dapat melaporkan dalam hal memberikan keluhan atau saran dengan cepat tanpa adanya batasan waktu yang tentunya akan langsung dengan cepat ditanggapi oleh PLN. Dengan kata lain, untuk semua PLN termasuk PLN Palembang dalam memberikan pertanggungjawaban telah terlaksana, dapat dilihat dari komitmen PLN dalam memberikan tanggapan atas setiap keluhan/saran yang ditujukan kepada PLN dengan cepat dan baik.

Dalam rangka mendapatkan umpan balik bagi perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG, PLN melakukan asesmen kualitas penerapan GCG secara berkala sejak tahun 2002. Melalui asesmen berkala tersebut, PLN mempertimbangkan dengan seksama rekomendasi yang dikemukakan untuk memperbaiki kualitas penerapan praktik terbaik GCG, kemudian melakukan asesmen lagi untuk mendapatkan umpan balik perbaikan di periode selanjutnya.

Dalam kurun waktu 2002 hingga 2014, PLN telah melakukan 9 (sembilan) kali penilaian kualitas penerapan praktik GCG. Penilaian kualitas penerapan GCG pada umumnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), dengan pada ketentuan dari Kementerian BUMN mengenai praktik GCG di lingkungan BUMN. Pada setiap periode penilaian, PLN berupaya melakukan perbaikan beberapa kebijakan, mekanisme kerja maupun pembentukan infrastruktur tata kelola baru sesuai rekomendasi penilai. PLN kemudian kembali melakukan asesmen penerapan praktek GCG pada periode dimaksud, dengan memperhatikan skor penilaian dan berupaya melakukan perbaikan sesuai rekomendasi *assessor*.

Pada tahun 2012 PLN melakukan penilaian kualitas penerapan GCG untuk periode tahun 2011, yang dilakukan oleh Trisakti *Governance Center* selaku konsultan independen. Penilaian dilaksanakan dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG dari Kementerian BUMN yang didasarkan pada dokumen, kuesioner dan hasil wawancara. Pada tahun 2013 PLN kembali melakukan penilaian penerapan praktik GCG untuk periode tahun 2012 berdasarkan metode yang mengacu kepada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG dari Kementerian BUMN yang terbaru, yang dilaksanakan oleh BPKP dengan mendapatkan skor hasil penilaian sebesar 81,52. Pada 2014, PLN melakukan self assessment atas kualitas penerapan GCG untuk periode tahun 2013, yang pelaksanaannya didampingi oleh BPKP.

Persentase capaian skor tertinggi terdapat pada aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi yaitu 8,68 dari nilai maksimum 9 atau 97%. Hal ini sejalan dengan hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa PLN mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan dan pengelolaan perusahaan.

Persentase capaian skor Pemegang saham dan RUPS/Pemilik modal yaitu 7,49 dari nilai maksimum 9 atau 83%. Hasil ini menunjukkan bahwa PT PLN Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. PT PLN juga memberikan perlakuan setara dan wajar kepada para *stakeholders* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara berkelanjutan yang mendapatkan skor terendah sebesar 5,45 dari nilai maksimum 7 atau 78%. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan menunjukkan dengan jelas hubungan antara prinsip-prinsip GCG dengan visi dan nilai-nilai (budaya) perusahaan, tidak mampu mengakomodasikan konsep GCG menjadi sesuatu yang punya makna bagi

setiap anggota perusahaan dimana saja mereka berada, serta tidak dapat mengubah praktik GCG menjadi kebiasaan dan menimbulkan kesadaran bahwa hal itu menjadi bagian penting dari identitas perusahaan yang dapat dibanggakan oleh semua warga perusahaan.

Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rieska (2008), *E-procurement* adalah salah satu bentuk penerapan dari *IT Governance* yang merupakan wujud hubungan *government-to-business* (G2B) dari pemasok/penyedia barang/jasa ke instansi pemerintah melalui internet dan wujud hubungan *citizen-to-government* (C2G) yang mana masyarakat mendapatkan akses untuk memantau proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. *E-Procurement* memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Didalam *e-procurement* memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan demi mencapai pengadaan barang/jasa yang baik. Setelah pemerintah mampu menjalankan *good procurement governance*, tentunya akan berdampak langsung terhadap terwujudnya *good governance*. Pengaruh *e-procurement* terhadap terwujudnya GCG disebabkan, prinsip-prinsip dalam *e-procurement* telah memenuhi syarat terhadap terwujudnya GCG dimana efisien, efektif, persaingan, transparansi, dan tanggung jawab sangat

dibutuhkan dalam *e-procurement* begitu juga dengan GCG.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Astrid Damayanti (2008), Perubahan sistem pengadaan barang/jasa dari cara lama ke sistem pengadaan elektronik, mau tidak mau memerlukan perubahan dalam pengendaliannya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi kegiatan yang didasarkan pada teknologi informasi, khususnya media internet.

Implementasi e-procurement di PT. PLN dapat memberikan output yang positif terhadap optimalisasi waktu proses pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan *e-procurement* rata-rata 20 hari, jadwal kegiatan proses pengadaan tepat waktu, evaluasi kualifikasi dilakukan tepat waktu, cepat, dan akurat. Tatap muka yang selama ini dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa dengan calon penyedia barang/jasa (CPBJ) berkisar 2-3 kali yaitu pada saat pembelian rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), pembukaan dokumen, dan penjelasan (*aanwijzing*). Implementasi e-procurement di PT. PLN Palembang telah memberikan output positif terhadap peluang tatap muka antara panitia pengadaan barang/jasa dengan CPBJ, dimana peluang tatap muka dapat diminimalisir.

Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan *e-procurement* secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hary Wijaya (2012) yang menunjukkan bahwa Secara simultan, biaya berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Pengadaan. Secara parsial, Mengurangi biaya administrasi, Biaya kesempatan modal (*Opportunity cost of capital*), Meningkatkan pemasukan perusahaan (*revenue*), dan Mengurangi *cost per tender* berpengaruh positif terhadap efisiensi pengadaan. Sedangkan Mengurangi biaya tenaga kerja tidak mempengaruhi efisiensi pengadaan.

Hasil penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan Luh Putu Dwi Suarini (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi. Hampir seluruh dari pelayanan

PT PLN kepada pelanggan tersebut melalui proses pengadaan barang dan jasa, maka dari itu pengadaan barang dan jasa sangatlah dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh PT PLN.

Pengadaan barang dan jasa di PT PLN melibatkan banyak pihak, baik itu dari pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat untuk mengurus pengadaan tersebut ataupun dengan calon penyedia barang dan jasa. Pada proses ini sangat rentan sekali terjadi persaingan usaha tidak sehat, harga yang terlalu tinggi atau rendah dalam penawaran. Namun, dengan adanya *e-procurement* dan tata cara yang benar dalam pengadaan barang dan jasa ini serta konsep GCG yang juga menjiwai prinsip dari pengadaan barang dan jasa, maka penerapan GCG dalam pengadaan barang dan jasa pada PLN dapat berjalan sesuai dengan transparan, jelas, bertanggungjawab, mandiri, wajar dan adil.

Selama tahun 2005-2008, *eProc* mencatat *saving* sebesar 4,56% terhadap realisasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yakni Rp.249,40 Milyar dan penghematan sebesar Rp.1,6 Trilyun dari Realisasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap Total RAB. Sedangkan total pengadaan yang telah direalisasikan melalui *e-Proc* selama 4 tahun tersebut adalah sebanyak 3352 pengadaan dari total rencana sebanyak 5071 pengadaan atau

66,1%. Jumlah realisasi pengadaan yang dilakukan melalui *e-Proc* terhadap rencana pengadaan cenderung meningkat dari tahun 2005 hingga tahun 2008 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pengadaan sebesar 63.91% setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 5,89%. Sedangkan pada tahun 2008, *e-Proc* berhasil mencatat *saving* sebesar Rp.90,80 Milyar atau sebesar 4.91% berdasarkan Perolehan HPS terhadap Realisasi HPS dan sebesar Rp.457,9 Milyar atau sebesar 8,06% terhadap Realisasi RAB.

Penekanan terhadap HPS tersebut dapat diraih dengan pelaksanaan *e-Auction* pada pengadaan melalui pelelangan umum, seleksi umum, dan lainnya. *e-Auction* adalah teknik penyampaian penawaran harga melalui *eProc* PLN dimana harga yang sudah disampaikan tersebut dikompetisikan di antara CPBJ selama selang waktu tawar menawar yang ditentukan. Aplikasi *eProc* PLN merupakan representasi dari Kepres 080 tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga implementasi *eProc* nanti dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi Instansi Pemerintah atau BUMN lainnya.

Aplikasi *e-procurement* di PT. PLN (Persero) Palembang tidak mengalami perubahan baik penambahan aplikasi

maupun pengurangan aplikasi. Aplikasi sudah ditentukan dan dibuat oleh PT. PLN (Persero) pusat, sehingga PT. PLN (Persero) Palembang tinggal menjalankan aplikasi tersebut. Aplikasi *e-procurement* di PT. PLN (Persero) Palembang terdiri dari inisiasi pengadaan; persetujuan pengadaan; jadwal pengadaan; kriteria evaluasi; rencana kerja dan syarat; pendaftaran/pengumuman; pengambilan dokumen, penjelasan pengadaan; pemasukan dokumen penawaran; evaluasi dokumen penawaran; usulan calon pemenang; penetapan pemenang; masa sanggah; dan penunjukan pemenang. Aplikasi *e-procurement* tersebut dapat diakses di website <http://eproc.pln.co.id>.

Keuntungan *e-procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan yang biasanya terdapat dalam *supply chain*. Keuntungan *e-procurement* meliputi pengurangan biaya overhead seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur. Sistem *e-procurement* membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya penerapan *e-procurement* pada PT PLN Palembang, pelaksanaan GCG pada PT PLN Palembang semakin terealisasi dari segi biaya, persaingan, waktu, independensi, serta keadilan dalam Perusahaan PT PLN. Dengan adanya *e-Procurement*, kontak langsung antara penyedia barang / jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaannya dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya, serta mudah dalam pertanggungjawaban keuangannya sehingga mempermudah untuk mengontrol seluruh kegiatan agar terhindar dari penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan

Kesimpulan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi sistem pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) berpengaruh positif terhadap pelaksanaan GCG pada PT PLN Palembang. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya penerapan *e-procurement* pada PT PLN Palembang, pelaksanaan GCG pada PT PLN Palembang semakin terealisasi dari segi biaya, persaingan, waktu, independensi, serta keadilan dalam Perusahaan PT PLN. Dengan adanya *e-Procurement*, kontak langsung antara penyedia barang / jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah,

sehingga proses pengadaannya dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya, serta mudah dalam pertanggungjawaban keuangannya sehingga mempermudah untuk mengontrol seluruh kegiatan agar terhindar dari penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Saran

1. PT PLN Palembang diharapkan melakukan pengawasan lebih pada pelaksanaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dikarenakan pengadaan barang / jasa merupakan titik rawan terjadinya korupsi, kolusi. Serta nepotisme (KKN)
2. PT PLN Palembang diharapkan mampu mengembangkan implementasi *e-procurement* yang menguntungkan pihak penyedia maupun pihak PT PLN dengan cara pengenalan lebih mengenai sistem *e-proc.* Hal ini dapat meningkatkan minat serta pengetahuan pihak penyedia sehingga akan tertarik melakukan penawaran yang dapat menguntungkan PT PLN Palembang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.* Malang : Banyumedia Publishing.
- Damayanti, Astrid, 2008. *Pengaruh Penerapan e-procurement Sebagai Alat Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintahan Kota Surabaya.* Universitas Trunojoyo
- Effendi, Muh Arif. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implikasi.* Jakarta : Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002. *Good Corporate Governance*
- Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003. *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*
- Maharani, Rieska. 2008. *Pengaruh e-procurement Terhadap Terwujudnya Good Governance.* Universitas Trunojoyo

- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik(*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 Tahun 2008. Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMN
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005. Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
- Purnamasari, Niken. 2010. *e-Procurement Tak Jamin Bebas Korupsi, KPK Minta Pengawasan Tender Tak Kendor*
(<http://news.detik.com/berita/3281637/e-procurement-tak-jamin-bebas-korupsi-kpk-minta-pengawasan-tender-tak-kendor>)
(Diakses 21 Novermber 2016)
- PLN, PT. 2016. *E-Procurement* di PT.PLN.<http://eproc.pln.co.id/>
(Diakses 21 November 2016)
- Suarini, Luh Putu Dwi. 2015. Penjabaran *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT PLN (PERSERO) Distribusi Bali. Universitas Udayana
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan ke-17*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002. *Corporate Governance*
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta, Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance, Edisi Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tjager,I.Nyoman,dkk. 2003. *Corporate Governance;Tantangan dan kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT Prenhallindo,Jakarta.
- UBB.ac.id. 2010. Kpk beberkan modus korupsi pengadaan barang/jasa. <http://ubb.ac.id/content/kpk-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa>
(Diakses 1 Desember 2016)
- Verawaty, 2012. *Clustering Formation and National Network of E-Procurement: A Case Study in Indonesia*. Seminar Internasional International Conference on Business Management and Information Systems (ICBMIS

2012, Singapore). Proceedings International Journal of Academic Conference Proceedings (IJACP); Recent Trends in Business Management and Information Systems, 2012, Academic Reference Series, No. 48, page 353-360.

<http://www.newhealth.in/ojs/index.php/ICBMIS/article/view/83>,

diakses 2 Desember 2016)

Wijaya, Wahyu Hary. 2011. Pengaruh Penerapan E-procurement terhadap Kinerja dan Efisiensi Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Willem, Siahaya. (2012) *Manajemen Pengadaan, Procurement Management*. Bandung. Alfabeta

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mulisa Zakia¹, Drs H Hasan Kuzery², Rolia Wahasusmiah³
Mahasiswa Universitas Bina Darma¹, Dosen Universitas Bina Darma^{2,3}
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.03 Palembang
E-Mail : mulisazakia1122@gmail.com¹, hasankuzery@binadarma.ac.id²
roliawahasusmiah@binadarma.ac.id³

ABSTRACT : This study aims to determine the effectiveness of tax revenues motor vehicles and motor vehicle title transfer fee in the year 2013-2015 and to determine the level of contribution of the motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fee to the local tax revenue at local Revenue Office of the province of South Sumatra Province year 2013-2015. The source and data collection techniques used are primary data and secondary data. Data analysis is done in data processing is the analysis of quantitative and qualitative analysis. The results show based on the calculation of the overall effectiveness of the motor vehicle tax revenue can be said to be effective, while in receipt of a motor vehicle title transfer fee that is quite effective. For contributions to the motor vehicle tax and the transfer tax on the motor vehicle tax revenue of South Sumatra Province during the years 2013-2015 the average criteria sufficiently well and has supported local tax revenues.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax, Customs of Vehicle, Local Taxes.

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013-2015 dan untuk mengetahui tingkat kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah provinsi pada Dinas Pendapatan Dearah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015. Adapun sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan efektif, sedangkan dalam penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu cukup efektif. Untuk kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2013-2015 rata-rata dengan kriteria cukup baik dan telah mendukung penerimaan pajak daerah.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Dearah.

1. PENDAHULUAN

Pajak termasuk sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terpenting bagi negara. Pajak dapat menentukan kelancaran pembangunan suatu negara maupun daerahnya. Hal ini disebabkan, banyak sekali kegiatan dari negara maupun daerah yang bergantung dari penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan wewenang pemungutan, pajak digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak

daerah. Tujuan dari penggolongan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan dalam proses pemungutan pajak. Karena hierarki di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Maka dari itu, sangat jelas tujuan dari penggolongan pajak ini, yaitu agar tiap pihak bertanggung jawab atas pemungutan pajaknya masing-masing dan

tidak mencampuri pemungutan pajak yang menjadi kewenangan dari pihak lain.

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi dan pajak daerah serta sumber pendapatan lainnya, sehingga pendapatan asli daerah menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah.

Fungsi-fungsi pemerintah daerah yaitu peraturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kemampuan pajak dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kemampuan pajak

daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat yang menjadi pada umumnya. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pajak yang sangat besar pengaruhnya terhadap pemasukan kas daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor karena realisasi penerimaannya terhadap pajak daerah lebih dari 50%, tetapi

dalam pencapaian target dan realisasi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan dan tidak tercapainya target yang telah ditentukan. Kontribusi bertujuan untuk mengetahui peranan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dapat dilakukan dengan cara menghitung kontribusinya, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan apa saja yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai usaha peningkatan perannya terhadap penerimaan pajak.

Dalam realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih banyak ditemukan kendala-kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kontribusinya seperti, kurangnya sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan juga ditunjang rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan dalam membayar pajak kendaraan membuat penerimaan pajak dari sektor ini menjadi berkurang. Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan harus memperhatikan tingkat efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut harus disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan yang berpotensi pada penerimaan pajak. Hal ini penting karena penerimaan pajak yang efektif akan

memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal. Berikut ini merupakan terget dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jl. POM IX Kampus DISPENDA Palembang.

Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu :

1. Variabel Independen (variabel X)

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Variabel Dependen (variabel Y)

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen disini yaitu pajak daerah provinsi pada dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis efektivitas dan teknik analisis kontribusi. Halim (2012:129) mengatakan bahwa teknik analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasi Pajak Kendaraan Bermotor. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB Tahun ke-n}}{\text{Target PKB Tahun ke-n}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi BBNKB Tahun ke-n}}{\text{Target BBNKB Tahun ke-n}} \times 100\%$$

Menurut Suprpto dalam Saleh, Muhlis (2012:30) analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama

kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB Tahun ke-n}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun ke-n}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BBNKB Tahun ke-n}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun ke-n}} \times 100\%$$

Keterangan :

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

BBNKB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. HASIL

3.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 adalah 99,93% kriteria Efektif. Pada tahun 2014 adalah 92,16% kriteria Efektif. Sedangkan tahun 2015 adalah 101,36% kriterianya Sangat Efektif. Jumlah rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 97,82 %. Berdasarkan pada kriteria tersebut maka penilaiannya adalah Efektif. Tingkat efektivitas yang tergolong efektif karena prosedur pelaksanaan dan pemungutannya dari pajak kendaraan bermotor dan sudah berjalan efektif meskipun disetiap tahun dalam penerimaannya mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan dapat disebabkan

karena dalam pembayaran PKB oleh wajib pajak yang menunda dalam melakukan pembayaran, atau masih terdapat wajib pajak yang belum memahami mekanisme pembayarannya. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, prosedur yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah sudah efektif dengan adanya kerjasama dengan pihak Polri dalam hal ini yaitu Samsat, sehingga wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran hingga pembayaran PKB akan dengan cepat dan mudah.

3.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013 adalah 80,93% kriteria Cukup Efektif. Pada tahun 2014 adalah 78,91% kriteria Kurang Efektif. Sedangkan tahun 2015 adalah 84,01% kriteria Cukup Efektif. Jumlah rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 81,28%. Berdasarkan pada kriteria tersebut maka penilaiannya adalah Cukup Efektif. Tingkat efektivitas yang tergolong cukup efektif karena dalam prosedur pelaksanaan dan pemungutannya dari bea balik nama kendaraan bermotor sudah cukup baik tetapi masih perlunya peningkatan lagi dalam penerimaannya sehingga tingkat efektivitas akan semakin tinggi, karena jika tingkat efektivitasnya semakin tinggi maka semakin efektif kinerjanya.

3.3 Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Seluruh Penerimaan Pajak Daerah

Menunjukkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak daerah pada tahun 2013 adalah 35,24% kriteria Cukup Baik. Pada tahun 2014 adalah 33,04% kriteria Cukup Baik. Sedangkan pada tahun 2015 adalah 33,80% kriteria Cukup Baik. Jumlah rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 34,03%. Berdasarkan pada kriteria tersebut adalah Cukup Baik. Dapat disimpulkan kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah yaitu cukup baik. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Sumatera Selatan cukup baik dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi Pemerintah Sumatera selatan juga perlu lebih meningkatkan lagi penerimaan pajak kendaraan bermotor ini sehingga tidak terjadi penurunan dalam tingkat kontribusi terhadap Pajak Daerah. Misalnya dengan menambah faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak atas kendaraan bermotor seperti adanya pemutihan pajak sehingga dengan adanya pembebasan pajak ini, masyarakat yang tidak membayar pajak dapat membayar kembali pajaknya untuk tahun-tahun selanjutnya dan tidak dibiasakan lagi untuk menunda-nunda pembayaran pajak.

Kriteria kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah diatas yang dikatakan Cukup Baik seperti pada tahun pada tahun 2013-2015 Dan kriteria rata-rata dari kontribusi pajak kendaraan bermotor diatas juga merupakan kriteria yang Cukup Baik

yaitu karena dalam persentase pencapaiannya adalah berkisar antara 30,10%-40%.

3.4 Analisis Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Seluruh Penerimaan Pajak Daerah

Menunjukkan bahwa kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 adalah 37,42% kriteria Cukup Baik. Pada tahun 2014 adalah 30,29 kriteria Cukup Baik. Sedangkan pada tahun 2015 adalah 25,66% kriteria Sedang. Jumlah rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 31,12%. Berdasarkan pada kriteria tersebut maka penilaiannya adalah Cukup Baik. Dapat disimpulkan kontribusi dari bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pajak daerah yaitu cukup baik. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Sumatera Selatan cukup baik dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi pemerintah perlu mengatasi agar tidak terjadi lagi penurunan dalam penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, seperti dengan adanya pemutihan pajak sehingga masyarakat yang tidak membayar pajak dapat membayar kembali pajaknya untuk tahun-tahun selanjutnya dan tidak dibiasakan lagi untuk menunda-nunda pembayaran pajak. Adanya penurunan dalam bea balik nama kendaraan bermotor ini disebabkan makin bertambahnya jumlah dealer kendaraan bermotor yang memudahkan pembelian kredit kendaraan, bertambahnya jenis kendaraan bermotor dengan kualitas dan harga relatif

murah dari tahun ke tahun, kondisi ini menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor bekas, yang berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor. Kriteria kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pajak Daerah diatas pada tahun 2013 dan tahun 2014 kriterianya Cukup Baik karena dalam persentase pencapaiannya berkisar antara 30,10%-40%. Sedangkan pada tahun 2015 kriterianya Sedang karena persentase pencapaiannya hanya 20,10%-30%. Jumlah rata-rata dari tahun 2013-2015 itu kriterianya adalah Cukup Baik karena 30,10%-40% itu merupakan kriteria Cukup Baik.

3.5 Kendala Dari Tidak Tercapainya Target

Kendala yang terjadi akibat dari tidak tercapainya target adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembayaran PKB dan BBNKB oleh wajib pajak yang menunda-nunda dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mengakibatkan penurunan dan tidak tercapainya target yang diharapkan.
3. Wajib pajak yang belum memahami mekanisme pembayarannya, yang mengakibatkan wajib pajak enggan membayarkan pajaknya.
4. Masih adanya kendaraan bermotor asal luar provinsi (plat non BG) yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan yang seharusnya setelah berada di wilayah Sumatera Selatan

selama 3 (tiga) bulan harus dimutasi. Kenyataannya bahwa pemilik kendaraan masih mengoperasikan kendaraannya yang berasal dari luar provinsi (plat non BG) sehingga pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraan bermotor asal luar provinsi menikmati jalan raya tanpa membayar pajak di wilayah tersebut.

5. Kendaraan Bermotor yang rusak baik terkena bencana alam, mengalami kehilangan dan tingkat kecelakaan yang tinggi sehingga mengakibatkan wajib pajak tidak membayar pajak.

3.6 Upaya Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bila Tidak Tercapai Target

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan target penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor yaitu melakukan estimasi berdasarkan realisasi tahun lalu yang standarnya dihitung peningkatan 10% dengan perkiraan perekonomian yang stabil. Faktor yang amat penting dan mempengaruhi dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah di Sumatera Selatan adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Adapun cara-cara tersebut antara lain adalah :

1.Melihat potensi wajib pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan bermotor yang ada di Sumatera Selatan.

2.Melihat pertumbuhan perolehan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dari tahun-tahun sebelumnya.

3.Melihat rata-rata persentase penerimaan pajak daerah khususnya Pajak KendaraanBermotor terhadap target yang ditetapkan pada periode-periode sebelumnya.

4.Melakukan prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun cara-cara yang lain dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut :

1.Melakukan dor to dor menghimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak daerah yang tertunggak.

2. Melakukan ekstentifikasi pada kantor-kantor samsat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan samsat-samsat pembantu. Hal ini dapat memudahkan para wajib pajak yang bertempat tinggal di daerah-daerah pelosok Provinsi Sumatera Selatan.

3.Melakukan intensifikasi/peningkatan kemampuan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertkan pegawai-pegawai samsat dalam pelatihan kerja sehingga mereka lebih kompeten dalam melayani para wajib pajak.

4. Melakukan sweeping dan razia kendaraan bermotor secara berkala yang bekerjasama dengan pihak kepolisian.

5. Mempermudah proses pembayaran pajak contohnya yaitu adanya SAMSAT keliling dan membayar pajak melalui via ATM.

Diharapkan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut dalam menetapkan target untuk tahun-tahun berikutnya dapat tercapai, sehingga dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat meningkat setiap tahunnya. karena jika tingkat efektivitasnya semakin tinggi maka semakin efektif kinerjanya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Secara keseluruhan efektivitas dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dikatakan Efektif. Ini terlihat dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013-2015 yaitu sebesar 99,93%, 92,16%, dan 101,36% (Efektif dan Sangat Efektif)

2. Efektivitas dari penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dikatakan Cukup Efektif. Terlihat dari rasio efektivitas penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2013-2015 adalah 80,93%, 78,91%, dan 84,01% (Kurang Efektif dan Cukup Efektif)

3. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah dapat dikatakan Cukup Baik. Terlihat dari persentase pencapaian tahun 2013-2015 adalah 35,24%, 33,04%, dan 33,80% (Cukup Baik)

4. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Daerah dapat dikatakan Cukup Baik. Terlihat dari persentase pencapaian dari tahun 2013-2015 adalah 37,42%, 30,29, dan 25,66% (Cukup Baik dan Sedang)

5. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah 72,66% + 63,32% + 59,45% dengan rata-rata kontribusi setiap tahun adalah 65,14% (Dengan Kriteria Sangat Baik)

DAFTAR RUJUKAN

- Fitriandi, Primandita. dkk. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Edisi-1. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2016. *Perpajakan*. Edisi
- Lestari, Triayu Suci. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Bina Darma. Palembang

Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*.
Jakarta.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian
Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

.

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA BAZNAS SUMSEL

Novitasari¹, Ade Kemala Jaya², Andrian Noviardy³
Dosen Universitas Bina Darma¹ dan Mahasiswa Universitas Bina Darma²
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Palembang
Sur-el: Vnovitasari18@yahoo.co.id¹, jaya_ade@yahoo.com²,
Andrian.noviardy@binadarma.ac.id³

Abstract: *This objective of this study was know how the application of zakat, infaq/alms and understanding accounting zakat, infaq/alms on BAZNAS Provincial SUMSEL. The analytical method used is descriptive qualitative. Results and conclusions of this study are BAZNAS provincial SUMSEL has not prepared financial statements in accordance with Statement of Financial Accounting Standard No. 109. BAZNAS Provincial SUMSEL applying the single entry bookkeeping of accounting records by just making a note in the form of cash which is commonly used record all expenditures zakat, infaq/alms and amil zakat in Provincial SUMSEL minus understand with PSAK 109. This study recommends a design BAZNAS Provincial SUMSEL financial statements in accordance with PSAK 109 to except can be applied in the preparation of financial statements BAZNAS Provincial SUMSEL.*

Keywords: *Financial Statements, Zakat, Infaq, PSAK 109*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan pemahaman akuntansi zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem pencatatan *single entry bookkeeping* dengan hanya membuat catatan dalam bentuk kas umum yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, infaq/sedekah dengan menerapkan pendekatan *cash basic*. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga belum memahami PSAK No.109. Penelitian ini merekomendasikan suatu perancangan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan PSAK No.109 dengan harapan dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Zakat, Infaq, PSAK 109

1. PENDAHULUAN

Berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam tentangnya. Bukan hanya kajian dari sisi landasan konseptual dan penerapan fikihnya, namun juga berkaitan langsung dari sisi manajemen operasional, khususnya dalam hal pendokumentasian transaksi syariah. Ditengah pesatnya perkembangan transaksi syariah tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah makin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus

dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung.

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat islam yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, terbuka, dan profesional.

Pengelola zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang professional memiliki sumber daya manusia, memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama serta keahlian khusus. Dalam pandangan akuntansi Islam, konsep zakat merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis. Akuntansi Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat keseluruhan. Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariat Islam, menuntut pengelola zakat harus bertanggung jawab dan terbuka. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa terdapat 2 organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, Provinsi, dan Kota. Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggung jawaban operasinya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Dalam rangka mempermudah penyusunan akuntansi zakat bagi lembaga pengelola zakat, Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi No.109 (PSAK 109)

tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. PSAK No.109 menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk mempermudah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas atau lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Seiring berkembangnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) maka laporan keuangan Amil zakat pun harus sesuai dengan transaksi yang ada di Organisasi Pengelola Zakat tersebut. Untuk itu, akuntansi dalam hal menangani laporan keuangan harus mengikuti perkembangan yang ada. Laporan keuangan Amil Zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Selain masalah pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No.109, yang juga harus menjadi perhatian adalah pengelolaan Badan Amil Zakat. Pengelola Badan Amil Zakat harus melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariah atas dana ZIS. Sehingga dalam penyusunan dan penyajian

laporan keuangan syariah, diperlukan kebijakan akuntansi tertentu yang terkait dengan transaksi dan pos-pos laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi para pemakai laporan keuangan. Akan tetapi masih banyak BAZNAS yang belum menggunakan akuntansi zakat, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat.

Dari fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap akuntansi zakat yang dilakukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Akan sangat disayangkan juga jika dalam suatu organisasi zakat sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat serta memiliki berbagai macam program atau kegiatan yang sangat bermanfaat dan sudah berlangsung dengan baik dalam pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah itu sendiri ketika tidak memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan benar menurut standar yang sudah ada seperti PSAK No.109. Yang mana standar akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Menurut pernyataan Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Bapak

Drs.H.Ardi Husin yang bekerja di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum memahami PSAK.109. Selama ini, amil dalam melaporkan laporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), belum mengacu pada PSAK 109. Dimana, pelaporan keuangannya masih dilaksanakan secara manual dengan sistem pembukuan tunggal dan PSAK No.109 susah dibaca sehingga BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum menerapkan PSAK No.109. Penyebab lainnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan masih fokus terhadap transisi Undang-Undang Zakat, yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999 namun dikarenakan Undang-Undang tersebut tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia maka diadakan perumusan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 serta belum sampai nya Surat Edaran untuk menerapkan PSAK No.109 sehingga PSAK No.109 di terapkan berdasarkan keputusan BAZNAS sendiri apakah ingin menerapkan atau tidak.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan merupakan sebuah badan yang berada di lingkungan pemerintahan Sumatera Selatan yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam operasionalnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan telah menghimpun dana dari masyarakat Sumatera Selatan baik dana zakat, infaq atau sedekah. Setelah menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah, selanjutnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang

terkumpul pada masyarakat. Untuk melakukan tugas tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan perlu akuntansi zakat yang berupa PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini perlu dilakukan agar BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menjadi baik dan masyarakat juga dapat menilai kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat yang dikelolanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, karena dengan penerapan standar akuntansi zakat, infaq, dan sedekah secara baik dan benar dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang baik dan profesional pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sehingga para muzakki dapat mempercayai penyaluran zakatnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.”**

2. Metodologi Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

2.2 Definisi Operasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan merupakan Lembaga Amil Zakat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencatatan atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah secara periodik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada pemahaman sumber daya manusia yang terkait dengan hal tersebut atas PSAK No.109 yang menjadi acuan standar pertanggungjawaban. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman akan PSAK No.109 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, serta bagaimana standar tersebut diterapkan selama ini. Pemahaman akan PSAK No.109 diukur dalam 2 (dua) metode, yaitu pertama, menggunakan daftar pertanyaan wawancara yang mana peneliti mewawancarai informan. Pertanyaan yang diajukan berisi tentang pokok-pokok pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam PSAK No.109. Kedua, pemahaman akan PSAK No.109 juga akan diamati melalui proses observasi untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian ini, baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data primer berasal dari informasi yang akan diperoleh dari para pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini yaitu buku-buku tentang zakat, infaq/sedekah, PSAK syari'ah, Undang-Undang N0.23 Tahun 2011, jurnal dan artikel mengenai akuntansi zakat, serta laporan keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif

2. Wawancara

3. Pencarian Data Melalui Kontak Langsung

2.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, penulis menggunakan metode deskripsi dan analisis kualitatif yaitu analisis dilakukan dengan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, terutama dengan menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

3. Hasil

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber dana tidak hanya berasal dari muzaki (pemberi zakat) saja tetapi juga dari uang Infaq dan diperoleh dari donator-donatur sekitar Sumatera Selatan dan luar Sumatera Selatan.

Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berasal dari donatur-donatur sekitar Sumatera Selatan dan luar Sumatera Selatan, para donator ada yang menyerahkan dananya sendiri ke BAZNAS Provisis Sumatera Selatan, ada juga yang minta dijemput. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengumpulan dana melalui berbagai dana diantaranya adalah dana zakat dan dana infaq.

Pengumpulan atau penghimpunan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Layanan Langsung

Donatur dapat memberikan langsung dana zakat dan dana infaq ke kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

2. Layanan di Jemput

Donator dapat memberikan langsung dana zakat dan dana infaq pada petugas (kolektor) yang ditunjuk khusus oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada mustahik sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada 8 (delapan) golongan (ashnaf) yang berhak menerima (mustahik) dengan program-program yang efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemulihan mustahik dan mengantarkannya menjadi muzakki. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan zakat di seluruh wilayah dalam Provinsi kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Penyaluran dana zakat dan infaq terdiri dari 5 (Lima) bidang penyaluran, yaitu :

1. Bidang Ekonomi

Penyaluran di bidang ekonomi merupakan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran di bidang ekonomi ini bertujuan untuk

membantu mustahik dalam meningkatkan kemampuan ekonominya.

Penyaluran di bidang ekonomi ini meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan usaha atau profesi
- b. Bantuan modal/dana untuk usaha atau akses pekerjaan, dan
- c. Pendampingan pengelolaan usaha atau pengembangan karir

2. Bidang Pendidikan

Penyaluran di bidang pendidikan merupakan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran di bidang pendidikan ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan mereka sampai pada tingkat sarjana sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonominya.

Penyaluran di bidang pendidikan ini meliputi:

- a. Bantuan biaya pendidikan
- b. Pembinaan kepribadian/karakter, dan
- c. Bantuan biaya kebutuhan hidup minimal selama pendidikan

3. Bidang Kesehatan

Penyaluran di bidang kesehatan merupakan penyaluran yang bersifat karitatif dan produktif. Penyaluran di bidang kesehatan ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam mengobati penyakit dan masalah kesehatan yang dialami dan melakukan pencerdasan

kepada mustahik agar dapat menjaga kualitas kesehatan mereka.

Penyaluran di bidang pendidikan ini meliputi:

- a. Pelayanan pengobatan gratis
- b. Bantuan biaya untuk pengobatan, dan penyadaran dan pencerdasan masalah kesehatan

4. Bidang Dakwah

Penyaluran di bidang dakwah merupakan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran di bidang dakwah ini bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah.

Penyaluran di bidang Dakwah ini meliputi:

- a. Program tebar da'i di desa binaan
- b. Bantuan pengembangan dakwah di masjid/musholla, sekolah, dan pondok pesantren
- c. Bantuan pengembangan dakwah di daerah terpencil

5. Bidang Sosial Kemanusiaan

Penyaluran di bidang social kemanusiaan merupakan penyaluran yang bersifat karitatif dan sesaat atau sementara waktu, seperti bantuan kebutuhan pangan minimum, perumahan minimum, penyelesaian hutang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawab terhadap muzaki dan masyarakat. Karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan BAZNAS

Provinsi Sumatera Selatan bukan merupakan milik BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, tetapi merupakan titipan para muzaki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggungjawab terhadap para muzaki dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat secara periodik dan secara transparan serta wajar.

Untuk siklus pencatatan dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dimana berisi informasi mengenai nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, dan jumlah dana yang diberikan. Dari jumlah dana yang diterima kemudian dibuat jurnal sesuai dana yang didapat perhariannya, setelah itu dibuatkan laporan kas harian dalam buku harian kemudian dibuat ringkasannya dalam bentuk laporan penerimaan dana zakat perbulan dan akhirnya dijadikan laporan pertahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan penerimaan dana zakat perbulan merupakan kumpulan laporan kas harian, dari laporan penerimaan dana zakat dibuatkan rekapitulasi oleh bagian keuangan sebelum akhirnya dijadikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dibuat laporannya dalam bentuk perbulan maupun pertahun.

Laporan keuangan yang dibuat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah bulanan yang bertujuan untuk evaluasi kinerja pengelola yang meliputi dana yang terkumpul

per bulan, sedangkan laporan tahunan merupakan laporan yang menginformasikan seluruh jumlah penerimaan dana dan penyalurannya selama satu tahun penuh dan juga sebagai evaluasi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) terhadap kinerjanya.

Pencatatan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109. Pada laporan skripsi ini penulis akan menganalisis penerapan pencatatan akuntansi, pelaporan keuangan dan pemahaman akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan PSAK No.109 dengan berdasarkan ilmu dan wawancara penulis selama melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

Penerapan dan pemahaman akuntansi zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di seluruh Indonesia ini akan mendorong BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzaki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak disalahgunakan.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dalam prinsip-prinsip PSAK No.109 pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bapak Drs.H.Ardi Husin,

mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah.

“Pertama, peneliti menanyakan mengenai pengelolaan dana dimana seperti halnya PSAK No.109 adanya dana zakat, infaq, dan sedekah. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hanya mengelola dua dana yaitu dana zakat dan infaq saja sedangkan untuk sedekah tidak dikategorikan sebagai dana. Kedua, peneliti menanyakan mengenai penyelenggaraan pencatatan terkait atas aktivitas tersebut. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tentunya harus menyelenggarakan karena adanya Undang-Undang yang mengatur akan tetapi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum menerapkan PSAK No.109 beliau berkata sebenarnya tidak ada kendala untuk menerapkan PSAK No.109 tersebut namun sampai saat ini belum adanya surat edaran resmi dan sebaiknya diadakan pelatihan khusus terhadap amil untuk lebih mengetahui atau memahami PSAK No.109 tersebut.

Ketiga, peneliti menanyakan laporan apa yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sistem tata buku tunggal (*Single Entry Bookkeeping*). Pembukuan tunggal ini mencatat transaksi akuntansi hanya sekali, hanya untuk mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas serta saldo akhir kas dan beliau berkata

bahwa untuk laporan keuangannya boleh dikatakan tidak ada masalah, setiap akhir tahun BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus menerbitkan laporan keuangan yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan BAZNAS Pusat”.

2. Hasil wawancara dengan Bendahara Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bapak Hendra Praja, SE.I , mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

- Pengakuan, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infaq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan diakui pada saat dana zakat dan infaq diterima atau dikeluarkan (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan.
- Pengukuran, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak mengukur penurunan nilai asset karena tidak ada penerimaan zakat berupa nonkas.
- Penyajian, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah menggunakan sistem tata buku tunggal (*Single Entry Bookkeeping*). Pembukuan tunggal ini mencatat transaksi akuntansi hanya sekali, hanya untuk mencatat penerimaan kas,

pengeluaran kas serta saldo akhir kas.

- Pengungkapan, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.
3. “Winarsyah dan Puspita. (2012). *Tingkat Pemahaman Amil Zakat di Kota Bengkulu terhadap PSAK No.109*. Skripsi. Universitas Bengkulu, mengatakan berdasarkan hasil kuisisioner amil zakat dikota Bengkulu tidak memahami PSAK No.109”.
“Ini sejalan dengan yang diungkapkan Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Drs.H.Ardi Husin mengenai pemahaman akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) bahwa yang bekerja di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum memahami PSAK.109 sehingga perlu adanya pelatihan untuk pemahaman PSAK No.109.Selama ini, amil dalam melaporkan laporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), belum mengacu pada PSAK 109. Dimana, pelaporan keuangannya masih dilaksanakan secara manual dengan sistem pembukuan tunggal dan PSAK No.109 susah dibaca sehingga BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum menerapkan PSAK No.109. Penyebab lainnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan masih fokus

terhadap transisi Undang-Undang Zakat, yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999 namun dikarenakan Undang-Undang tersebut tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia maka diadakan perumusan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 serta belum sampai nya Surat Edaran untuk menerapkan PSAK No.109 sehingga PSAK No.109 di terapkan berdasarkan keputusan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sendiri apakah ingin menerapkan atau tidak”.

Hasil wawancara yang penulis tampilkan diatas sesuai dengan fakta yang penulis dapatkan dari narasumber seperti yang kuncoro katakan sebagai salah satu pendukung dalam penelitian kualitatif adalah kebenaran dari hasil wawancara yang tidak menutupi semua fenomena-fenomena yang ada disesuaikan dengan waktu yang berbeda tapi mendapatkan jawaban yang relatif hampir sama.

Tabel
Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq pada
BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Pengakuan	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infaq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi
------------------	---

	Sumatera Selatan diakui pada saat dana zakat dan infaq diterima atau dikeluarkan (<i>cash basic</i>), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan.
Pengukuran	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak mengukur penurunan nilai asset karena tidak ada penerimaan zakat berupa nonka
Penyajian	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah menggunakan sistem tata buku tunggal (<i>Single Entry Bookkeeping</i>). Pembukuan tunggal ini mencatat transaksi akuntansi hanya sekali, hanya untuk mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas serta saldo akhir kas
Pengungkapan	BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum mengungkapkan 5

	komponen Laporan keuangan PSAK No.109.
--	--

Sumber: Data Diolah

Penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infaq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan diakui pada saat dana zakat dan infaq diterima atau dikeluarkan (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi dimana hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima.

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak mengukur penurunan nilai asset karena tidak ada penerimaan zakat berupa nonkas.

Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat dan infaq dan dana amil serta dana nonhalal secara terpisah. Penyajian laporan keuangan yang dibuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan adalah menggunakan sistem tata buku tunggal (*Single Entry Bookkeeping*).Pembukuan tunggal ini mencatat transaksi akuntansi hanya sekali, hanya untuk mencatat penerimaan kas, pengeluaran kas serta saldo akhir kas. Seharusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan melakukan penjurnalan setiap transaksinya dan menggunakan sistem pencatatan *double entry bookkeeping*, dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan audit internal yang

dilakukan setiap tahun. Namun belum dilakukan audit eksternal yang dilakukan oleh KAP terdaftar.

Pengungkapan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 29 disebutkan bahwa setiap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) wajib mengungkapkan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan juga membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan infaq setiap bulannya, namun dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sekarang ini masih melakukan pencatatan dengan sistem tata buku tunggal (*Single Entry Bookkeeping*) dengan pendekatan basis kas (Cash Basic) maka laporan yang dihasilkan hanya berbentuk laporan kas umum yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas direkap dan disusun berdasarkan tanggal terjadinya transaksi kemudian di hitung akumulasi dari total penerimaan yang dikurangkan dengan total pengeluaran yang menghasilkan sisa saldo akhir periode.

Data yang penulis buat ini di sesuaikan dengan pengamatan yang peneliti lakukan dibandingkan dengan buku dan materi akuntansi syariah dan jurnal tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 dalam penyusunan Laporan

Keuangan peneliti menyatakan penerapan basis akuntansi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya memadai karena basis yang digunakan basis kas (*cash basic*).

4.Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 yang penulis sajikan dalam BAB IV , maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dalam penyusunan Laporan Keuangan, dapat disimpulkan penerapan basis akuntansi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya sudah memadai karena basis yang digunakan basis kas (*cash basic*). Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No.109.
2. Dilihat dari hasil akhir data sekunder, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan cukup memadai dimana karakteristik kualitatif yang digunakan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
3. Dilihat secara keseluruhan bahwa penyajian Laporan Keuangan yang disusun BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak cukup memadai dan bisa penulis simpulkan bahwa belum sesuai dengan PSAK No.109 karena

Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan masih berisi tentang kas masuk, kas keluar dan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sistem pencatatan tata buku tunggal(*single entry bookkeeping*)serta belum melakukan lima komponen keuangan menurut PSAK No.109. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum diaudit oleh akuntan publik.

4. Pemahaman akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) bahwa yang bekerja di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum memahami PSAK.109 sehingga perlu adanya pelatihan untuk pemahaman PSAK No.109. Selama ini, amil dalam melaporkan laporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), belum mengacu pada PSAK 109. Dimana, pelaporan keuangannya masih dilaksanakan secara manual dengan sistem pembukuan tunggal dan PSAK No.109 susah dibaca sehingga BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum menerapkan PSAK No.109.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Ikatan Akuntansi Indonesia.2014. *Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah No. 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.*

Kholifah, Siti. (2015). *Analisis Kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar*

- Akuntansi Keuangan No.109 Mengenai penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Kuncoro, 2011. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tillah, Mardho. (2015). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 101 (Lampiran C) dan PSAK pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lubuk Linggau.* Skripsi. Universitas Bina Darma. Palembang
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parmono, Agung. (2015). *Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Jember. Jember
- Pujianto. (2015). *Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang).* Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*. UU No.23 Tahun 2011. (online), (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelolaan-zakat>) diakses Tanggal 26 Oktober 2016 Pukul: 19.54 WIB
- Shahnaz, Sabrina, (2016). *Penerapan PSAK No.109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*.

KEBIJAKAN SUNSET POLICY JILID II DALAM MENGANALISIS RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2009

(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)

Novriyan Diman¹, Hasan Kuzery², Yeni Widyanti²

Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹

Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang

Pos-el : novriyandimankhan@gmail.com¹, hasan_kuzery@mail.binadarma.ac.id², yeniwidyanti@yahoo.com²

ABSTRACT : *The scope of this study is to analyze the compliance ratio individual taxpayer against the sunset policy of volume II (TPWP) 2015 at the tax office Madya Palembang in 2014 until 2015. The purpose of this study is to Know the Taxpayer Compliance people person of 2014 before the entry into force and when the Sunset Policy Policy volume II in 2015 and to see the level of Taxpayer Compliance Tax Office Madya Palembang. The research design used by the author in this research is quantitative descriptive. Data analysis techniques used by the author in this study was independent samples t test (Independent Sample t-Test). Sunset Policy is a program of the Income Tax abolition of administrative sanctions as a form of tax facilities. These penalties will be charged to the taxpayer by the Tax Office (KPP), where the taxpayer is registered through the issuance of STPs (STP), For Taxpayers who take advantage of the Sunset Policy, STP will not be published.*

Keywords: *Tax, SPT, Taxpayer Compliance Ratio, Volume II Sunset Policy*

ABSTRAK : Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio kepatuhan wajib pajak badan terhadap adanya kebijakan sunset policy jilid II (TPWP) tahun 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Kepatuhan Wajib pajak badan Tahun 2014 sebelum berlakunya dan saat adanya Kebijakan *Sunset Policy* jilid II Tahun 2015 serta untuk melihat Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Uji T sampel bebas (*Independent Sampel t-Test*). *Sunset Policy* merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan. Sanksi tersebut akan ditagih ke Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di mana Wajib Pajak terdaftar melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*, STP tidak akan diterbitkan.

Kata Kunci: *Perpajakan, SPT, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak, Sunset Policy Jilid II*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan penerimaan kas negara dari sektor pajak masih menjadi pokok utama yang salah satu sumber pembiayaannya. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang paling sering dihadapi dan hampir semua negara yang menerapkan sistem

perpajakan. *Sunset Policy* merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan. Sanksi tersebut akan ditagih ke Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di mana Wajib Pajak terdaftar melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Bagi Wajib Pajak yang

memanfaatkan Sunset Policy, STP tidak akan diterbitkan. Sebagai bagian upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi maka pihak Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh, salah satu diantaranya adalah menetapkan besarnya target rasio kepatuhan penyampaian SPT, target nasional rasio kepatuhan 2014 dan 2015 yaitu 70%, tetapi pada saat jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh masing-masing KPP/KANWIL DJP diharapkan telah mencapai minimal 90% sesuai kualifikasinya pada tahun 2014-2015.

Karena wilayah IIR Barat merupakan paling terbanyak masyarakat yang tidak terdaftar di KPP pratama Palembang IIR Barat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik memilih KPP pratama Palembang IIR Barat untuk membuat penelitian dengan judul: **“Kebijakan Sunset Policy Jilid II Dalam Menganalisis Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang IIR Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum berlakunya Kebijakan *sunset policy* jilid II (TPWP) Pajak Tahun 2014?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan adanya Kebijakan *sunset policy* jilid II (TPWP) Tahun 2015?
3. Apakah terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan pada saat adanya Kebijakan *sunset policy* jilid II (TPWP) Tahun 2015?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pajak

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Sunset Policy Jilid II (Tahun Pembinaan Wajib Pajak)

Setiap pergantian Presiden dan jajaran kabinet pasti setiap kebijakan berubah-ubah tergantung siapa yang memimpin. Di Indonesia khususnya Direktorat Jendral Pajak pernah menerapkan Paket kebijakan demi tercapainya target pajak yang ditetapkan. Kebijakan terbesar yang pernah dilakukan yaitu :

1. *Sunset Policy* Tahun 2008
2. Tahun Pembinaan Wajib Pajak atau sering di sebut *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015
3. Tax Amnesty (pengampunan pajak) Tahun 2015 yang masih dalam proses.

2.3 Dasar Hukum *Sunset Policy* Jilid II (TPWP)

Landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada *Sunset Policy* Jilid I adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana *Sunset Policy* Jilid II penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP

2.3.1 Sanksi Administrasi yang dapat Dikurangkan atau Dihapuskan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015

Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Sanksi administrasi Pasal 19 ayat (1) Undang Undang KUP yang belum dibayar Wajib Pajak diberikan dalam hal:

1. Utang Pajak sebagai dasar penerbitan STP timbul sebelum 1 Januari 2015
2. Utang Pajak tersebut dilunasi tersebut sebelum 1 Januari 2016

2.3.2 Batasan Atas Sanksi Administrasi yang dapat Dikurangkan atau Dihapuskan

Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Anda atau bukan karena kesalahan Anda terbatas atas:

1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak

- Desember 2014 dan sebelumnya;
2. keterlambatan pembayaran/penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
 3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
 4. pembetulan yang Anda lakukan dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.
1. permohonan untuk 1 STP, kecuali atas utang pajak yang sama diterbitkan lebih dari 1 STP maka 1 permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 STP,
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
 3. melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak
 4. disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar
 5. ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP dilampiri surat kuasa khusus

2.3.3 Syarat *Sunset Policy* Jilid II (TPWP)

Dalam *sunset policy* Jilid II (TPWP) Permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Dalam hal ini, TPWP 2015 dilandasi semangat untuk memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Karena sifatnya yang diatur secara terbuka melalui UU KUP, dibutuhkan ketentuan yang lebih rinci mengatur kebijakan tersebut, yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Karena sifatnya yang lebih terbuka dalam UU KUP, maka TPWP 2015 memiliki kelebihan seperti:

1. Insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak.
2. Insentif diberikan kepada Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pertama kalinya atau SPT pembetulan.
3. Insentif diberikan atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan SPT yang dilakukan di tahun 2015.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

kepatuhan Wajib Pajak Menurut Safri Nurmanto dan Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.3.4 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan diukur menggunakan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Menurut Surat Edaran DJP Nomor: SE-08/PJ/2014 dan SE-18/PJ/2015 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan tahun 2014-2015, Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak =
$$\frac{\text{SPT Tahunan diterima}}{\text{WP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$$

WP terdaftar wajib SPT Tahunan

Rasio ini digunakan untuk menghitung kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi sehingga jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio ini adalah SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan jumlah Wajib Pajak yang digunakan adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan.

3. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamatkan di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut, Bukit Kecil, Kota Palembang, Kode pos : 30135 , Telp : (0711) 357-077, website : <http://pajak.go.id/> . Waktu yang digunakan penelitian yaitu pada bulan November – Januari 2016.

3.1 Metodologi Penelitian

3.1.1 Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Agar penelitian lebih jelas, maka perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut :

1. Variabel Independen
(Variabel X)

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini variabel independennya Kepatuhan Wajib Pajak Berkaitan dengan Sebelum adanya Kebijakan *sunset policy* Jilid II (TPWP) pada Tahun 2015 (X¹) dan Kepatuhan Wajib Pajak Berkaitan dengan adanya Kebijakan *sunset policy* Jilid II (TPWP) Tahun 2015 (X²)

2. Variabel Dependen
(Variabel Y)

Variabel dependen disebut variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan .

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah Uji T sampel bebas (*Independent Sampel t-Test*). Dalam mengolah data maka harus dilakukan pengujian, penulis dalam penelitian ini menggunakan uji t sebagai uji statistik. Uji T sampel bebas disebut sebagai *Independent Sampel t-Test*. Uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji t untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji bersifat acak. Tabel pengujian disebut tabel t-student. Kriteria data untuk uji t sampel independen :

1. Data untuk dua sampel bersifat independen
2. Data yang di uji adalah data kuantitatif (data interval atau rasio)
3. Sampel acak dari distribusi normal

4.1 ANALISIS DATA

4.1.1 Analisis Data Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2014 dan Tahun 2015 Berkaitan Kebijakan Sunset Policy Jilid II.

a. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

Menurut surat edaran DJP No:SE/08/PJ/2014 tentang target rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan pada Tahun 2014, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan adalah jumlah seluruh SPT Tahunan yang diterima selama satu tahun dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT

Tahunan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:74/PMK.03/2012 Bab 2 pasal 2 dan 3 mengatur bahwa Wajib Pajak disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah SPT Tahunan yang digunakan dalam perhitungan rasio kepatuhan wajib pajak adalah WPOP yang tepat waktu. Perhitungan ini dilakukan pada Tahun 2014. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu =

$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tepat waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$

WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan

b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Tepat Waktu

Jumlah SPT Tahunan WPOP yang digunakan dalam perhitungan ini adalah SPT Tahunan WPOP yang tidak tepat waktu yaitu: disampaikan lebih dari tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perhitungan ini dilakukan untuk Tahun

2014, rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Tepat Waktu =

$\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tdk tpt waktu}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$

WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan

c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT

Jumlah WPOP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam perhitungan ini adalah selisih antara jumlah WPOP terdaftar yang wajib SPT Tahunan dengan jumlah seluruh penerimaan SPT Tahunan WPOP selama satu tahun. Perhitungan ini dilakukan untuk tahun 2014, dengan rumus:

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT = $\frac{\text{SPT Tahunan WPOP tidak melaporkan SPT}}{\text{WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan}} \times 100\%$

WPOP terdaftar wajib SPT Tahunan

4.1.2 Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha Baik menggunakan Media kertas maupun e-Spt di KPP Pratama Palembang Ilir Barat per 31 Desember tahun 2014 dan 2015. Kemudian jumlah

penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dengan formulir 1770 di KPP Pratama KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka ditarik kesimpulan pada sebagai berikut:

Jumlah Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yaitu 19.955 WP - 16.874 WP hasilnya 3.081 WP berarti jumlah wajib pajak meningkat. Jumlah Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan yang tidak tepat waktu atau terlambat antara tahun 2015 dengan tahun 2014 yaitu 5.896 WP – 5.181 WP hasilnya 715 WP, walaupun jumlah wajib pajak bertambah.

Jumlah Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan antara tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 39.668 WP – 34.099 WP hasilnya bertambah 5.569 WP.

DAFTAR PUSTAKA

Data Riset. 2013. Uji t Sampel Independen.

[“http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-uji-t-sampel](http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-uji-t-sampel)

[Independen](#)

Djoko, Slamet Surjoputro. Junaedi, Eko Widodo. 2006. *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Dalam Buku *Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*, ed. Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa. Jakarta: JICA

Fatmawati. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan). Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Ortax. 2014. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=5&page=show&id=15514>

Putusan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang *Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak*

Putusan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang *Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*

Rahman, Abdul. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung : Nuansa Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang - undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak. 2014.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ./2014 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak. 2015.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-18/PJ./2015 tentang Penetapan Target Dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Pajak.
2015

**Ini Bedanya Sunset Policy 2008 vs
TPWP 2015**

<http://www.pajak.go.id/content/article/ini-bedanya-sunset-policy-2008-vs-tpwp-2015>

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti, M., Haris, W. Dan Intan, Immanuel. (2014) Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP pratama Kota Madiun). Jurnal.

Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep,Teori,dan Isu*, Satu,Jakarta: 2006

**PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
TERHADAP MANAJEMEN LABA
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2013-2015)**

Okta Rivaldi¹, Henni Indriyani², Andrian Noviardy³
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Pos-el: Oktarivaldi111@gmail.com¹, Henniinayah@gmail.com²,
Andrian.noviardy@binadarma.ac.id³

Abstract

The aim of this study is to examine the influence of corporate social responsibility disclosure on earning management practice. Independent variable used in this study is corporate social responsibility disclosure that measured using PROPER (RANK). Dependent variable used in this study is earning management that measured using proxy of discretionary accruals. Leverage, and return on asset also used as control variables. The population in this study consists of all listed firm in Indonesia Stock Exchange in year 2013, 2014, and 2015. Sampling method used is purposive sampling. A firm criteria are Manufacture at that year which publish sustainability report and also the completed information of financial report. The total sample are 11 firm data. Analysis test using a model of ordinary least square regression analysis. The result of this study show that corporate social responsibility disclosure not significant influenced and have positively on earning management. This result can be proved in the t-test by 5% significant level.

Keyword : *Corporate Social Responsibility Disclosure, Earning Management, Leverage, and return on asset.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap praktik manajemen laba. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR (*CSR disclosure*) yang diukur menggunakan PROPER (RANK). Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba yang diukur menggunakan proksi *discretionary accrual*. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu *leverage*, dan *return on assets*. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013, 2014, dan 2015. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan Manufaktur pada tahun bersangkutan, dan menerbitkan laporan berkelanjutan serta laporan keuangan yang lengkap. Total sampel dalam penelitian ini adalah 11 sampel perusahaan. Uji analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi *ordinary least square*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dilihat pada uji t dengan tingkat signifikansi 5%.

Kata Kunci: *Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Manajemen laba, leverage, dan Return on Assets.*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), pada kenyataannya lebih berorientasi pada masyarakat dan bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan

tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. Perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial mungkin akan kehilangan kesempatan investasi dalam sektor keuangannya, karena perusahaan harus mengorbankan kesempatan tersebut untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Jika tanggung jawab sosial dilakukan secara konsisten, maka perusahaan yang melakukannya akan dianggap sebagai perusahaan yang beroperasi untuk kesejahteraan

masyarakat (Osho,(2009) dalam Velda, (2013:40).

Tanggung jawab sosial dilakukan oleh pihak perusahaan secara sukarela untuk membangun citra positif di masyarakat, tetapi pada tahun 2007, Indonesia mewajibkan perusahaan- perusahaan yang memiliki usaha berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Undang- undang No. 40 mengenai Perseroan Terbatas pasal 74 yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 15(b) disebutkan bahwa setiap penanam modal

berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan pada pasal 34 disebutkan pula bahwa perusahaan yang tidak

memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam pasal 15 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pada laporan tahunan perusahaan, *corporate social responsibility* ini tentunya menjadi salah satu strategi bisnis perusahaan untuk meningkatkan labanya. Laba merupakan salah satu indikator yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan yang digunakan para investor untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, kualitas laba yang baik sangatlah dibutuhkan para investor atau pemegang saham. Jika investor atau pihak lainnya tidak percaya pada angka- angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan, maka pasar modal akan rusak. Pihak manajemen dalam perusahaan juga dapat memberikan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan proses penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang dapat menentukan kualitas laporan keuangan dengan memilih

kebijakan akuntansi manajer seperti manajemen laba.

Manajemen laba ini memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri maupun perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Manajemen laba sebagai tindakan manajer dalam menggunakan kebijakan akuntansi terhadap pelaporan angka-angka akuntansi yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya dan menyesatkan pihak investor dalam mengambil keputusan ekonomi dengan adanya angka laba tersebut. Banyak penyebab yang membuat pihak manajer melakukan manajemen laba, salah satunya yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonus yang diperolehnya. Selain itu, manajer dapat juga mengurangi laba bersih yang dilaporkan agar nilai pembayaran pajak yang lebih kecil. Adanya aktivitas tanggung jawab sosial ini dapat membuat pihak manajemen yang berada dalam perusahaan lebih leluasa untuk melakukan praktik manajemen laba, karena dengan dilakukannya kegiatan CSR akan membuat respon positif dimata investor maupun masyarakat sehingga dapat menutupi kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan pihakmanajer.

Pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan membuat informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan lebih jelas dan transparan. Laporan tahunan menjadi lebih terpercaya bagi investor maupun pihak yang menggunakan laporan tersebut dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial yang mengeluarkan usaha dan sumber daya dalam memilih dan menerapkan praktek *corporate social responsibility* untuk memenuhi harapan etis para pemegang saham dalam masyarakat, cenderung membatasi penggunaan manajemen labanya sehingga memberikan investor informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Kim, Park, dan Wier (2012:765) yang meneliti keterkaitan antara

tanggung jawab sosial dan kualitas laba yang diukur melalui manajemen laba. Penelitian Kim *et al.* (2012:65) juga menemukan adanya hubungan negatif antara CSR dengan manajemen laba. Pada penelitian Kim *et al.* (2012:66), *corporate social responsibility* sebagai variabel independen diukur melalui kinerja CSR dengan menggunakan *CSR Scores* berdasarkan informasi dari *KLD Research & Analytics*, yang pada penelitian ini CSR diukur menggunakan pengungkapan CSR dengan menggunakan *CSR Index* yang pengungkapannya disyaratkan pada *GRI (Global Reporting Initiative)*. Sedangkan manajemen laba sebagai variabel dependen diukur menggunakan *discretionary accrual*, *real activities manipulation*, dan *Accounting and Auditing Enforcement Releases (AAERs)*, yang pada penelitian ini diukur menggunakan *discretionary accrual*.

Adanya pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan akan membuat informasi keuangan lebih transparan bagi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Transparansi ini akan membuat pihak manajemen membatasi penggunaan praktik manajemen labanya. Di sisi lain, pihak manajemen dapat juga menutupi kecurangan-kecurangan yang telah diperbuat dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial untuk mendapat respon positif dari pihak masyarakat dan tentunya pihak investor pula.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengungkap pengaruh tanggung jawab sosial terhadap manajemen laba. Dengan demikian penulis mengangkat topic penelitian tersebut dengan judul **“PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP MANAJEMEN LABA STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013, 2014, DAN 2015”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan suatu

sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan atau *stakeholders* dalam mempertanggung jawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* (Mardikanto (2014:93) tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat, baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ini berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus didasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau *dividen* melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.

Pengungkapan CSR

Pengungkapan sosial merupakan proses mengungkapkan informasi terkait kinerja dan manfaat kebijakan CSR perusahaan. Hadi (2011:10) mendefinisikan laporan CSR sebagai laporan aktivitas CSR perusahaan berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan. Jadi, praktik pengungkapan CSR adalah proses komunikasi dan pertanggungjawaban perusahaan mengenai kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan kepada *stakeholder*-nya.

Di Indonesia, pengungkapan CSR diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP- 431/BL/2012 poin 2g. Peraturan tersebut mengatur pelaporan CSR

meliputi kebijakan, jenis dan biaya yang dikeluarkan, terkait aspek lingkungan, ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan produk. Selain itu UU. No. 40 tahun 2007, juga mengatur kewajiban pelaporan kegiatan CSR pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Namun elemen pelaporan CSR terus diperdebatkan. Salah satunya adalah, pandangan bahwa pelaporan CSR seharusnya tidak hanya mengukur data-data keuangan yang dikeluarkan perusahaan saja namun juga mengukur manfaat dan keefektifan dari program tersebut. Sehingga diperlukan sebuah mekanisme pelaporan yang diperlukan untuk mengukur dan menjelaskan kegiatan dan mafaat CSR perusahaan secara detail. Konsep yang dikenal dengan Laporan CSR adalah bagian dari laporan berkelanjutan yang berfokus pada kegiatan-kegiatan CSR perusahaan dan bersifat sukarela dalam pengungkapannya.

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Menurut Edward.J (2011:7) Manajemen laba merupakan salah satu pertanggung jawaban manajemen terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and dicision making*), yang meliputi penganggaran dan perencanaan laba, manajemen kas, dan keputusan- keputusan lain yang berkaitan dengan operasi perusahaan seperti: keputusan kapan perusahaan harus membeli dan menyewa fasilitas, kapan peralatan harus diperbaiki atau diganti, kapan perubahan rencana pemasaran, dan kapan harus dimulai pengembangan produk baru.

Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sofyan (2011:248), secara umum ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan earning management, antara lain sebagai berikut:

1. Motivasi bonus

Manajer akan berusaha mengatur laba bersih perusahaan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan didapatnya.

2. Motivasi kontrak
Manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default* dalam utang jangka panjangnya.
3. Motivasi politik
Manajer tidak dapat melepaskan aspek politis dari perusahaan, khususnya perusahaan besar dan industri yang strategis karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak.
4. Motivasi pajak
Manajer terkadang mengambil tindakan untuk mengurangi laba bersih perusahaan yang dilaporkan untuk pembayaran pajak yang lebih kecilpula.
5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)
Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, serta CEO baru yang sengaja melakukan manajemen laba untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya.
6. Penawaran saham perdana (IPO)
Manajer perusahaan yang *going public* melakukan *earnings management* untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan.
7. Motivasi pasar modal
Manajer sengaja melakukan manajemen laba misalnya untuk mengungkapkan informasi pribadi yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor.

Leverage

Dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan

industri, jasa, maupun perusahaan dagang dalam beroperasi selain menggunakan modal kerja, juga menggunakan aktiva tetap, seperti tanah, bangunan pabrik, mesin, kendaraan dan peralatan lainnya yang mempunyai masa manfaat jangka panjang atau lebih dari satu tahun. Dengan penggunaan aktiva tersebut perusahaan harus menanggung biaya yang bersifat tetap, misalnya berupa penyusutan. Oleh karena itu masalah *Leverage* dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau penggunaan dana yang berakibat perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. Irawati (2006:172) menjelaskan bahwa leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Sedangkan menurut Halim (2007:64) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *leverage* adalah penggunaan aset atau dana, di mana atas penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung beban tetap berupa penyusutan atau berapabunga.

Return on Assets

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan.

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara faktor *net income margin* dengan perputaran aktiva.

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Laba

Perusahaan yang lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai aktivitas perusahaannya akan lebih membatasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Sebaliknya, perusahaan yang kurang terbuka dalam pengungkapan informasi kegiatan perusahaan cenderung melakukan berbagai bentuk manajemen laba baik untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan (Patten dan Trompeter, 2003). Hal ini mengakibatkan adanya hubungan negatif antara pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dengan manajemen laba. Begitu pula pada penelitian Putri (2012) dan Palguna Putra (2013) yang menemukan adanya hubungan negatif dari pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap manajemen laba. Pengungkapan tanggung jawab sosial akan membuat pelaporan keuangan menjadi transparan sehingga mendorong manajer untuk mengurangi praktik manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

Hubungan antara *corporate social responsibility* dengan manajemen laba bisa digambarkan dengan teori legitimasi. teori legitimasi ini hampir memiliki kesamaan dengan stakeholders teori dimana kedua teori ini menjelaskan hubungan tersebut dalam kontrak sosial. Legitimasi teori menjelaskan bahwa organisasi secara kontinuitas akan memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batasan dan norma yang ada pada masyarakat. Teori legitimasi ini akan merujuk pada teori etika karena legitimasi mendasarkan pada norma dan batasan yang ada di masyarakat yang merujuk pada etika perusahaan guna mendapatkan legitimasi dari masyarakat itu

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Penelitian

Corporate Social Responsibility

CSR adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. CSR diukur peringkat PROPER (RANK) Kinerja lingkungan perusahaan (*environmental*

performance) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan ini diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima (5) warna. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan memberi skor untuk masing-masing warna, yaitu :

Emas : Sangatbaik;	skor=5
Hijau :Sangatbaik;	skor = 4
Biru:Baik;	skor = 3
Merah: Buruk;	skor =2
Hitam :Sangatburuk;	skor = 1

Manajemen laba

Variabel dependen manajemen laba diukur menggunakan proksi *discretionary accrual* (DAC) dari model Jones yang dimodifikasi (*Modified Jones Model*) melalui empat tahap:

1. Menghitung nilai total akrual dengan menggunakan pendekatan arus kas (*cash flow approach*):

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun ke t.

NI_{it} = Laba bersih setelah pajak perusahaan i pada tahun ke t.

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun ke t.

2. Mencari nilai koefisien β₁, β₂ dan β₃ dari regresi total akrual :

$$TAC_{it}/TA_{it-1} = \beta_1 (1 / TA_{it-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

TA_{it-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan total pendapatan pada tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan total piutang bersih pada tahun t

PE_{it} = *Property, Plant, and Equipment* perusahaan pada tahun t

ε_{it} = *Error item*

3. Menghitung *Nondiscretionary Accruals* (NDAC)

Perhitungan *nondiscretionary Accruals* (NDAC) dilakukan dengan memasukkan nilai koefisien β₁, β₂, dan β₃ yang diperoleh dari regresi. Perhitungan dilakukan untuk seluruh sampel perusahaan pada masing-masing periode.

$$NDAC_{it} = \beta_1 (1 / TA_{it-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it} / TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

NDAC_{it} = *Nondiscretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

4. Menentukan *discretionary accrual*

$$DAC = (TAC/TA_{it-1}) - NDAC$$

Keterangan:

$$DAC = \text{Discretionary Accruals}$$

Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, *growth*, dan *return on assets*. Dalam penelitian ini, *leverage* dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada tahun bersangkutan. ROA dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak tahun sebelumnya dengan total aset tahun sebelumnya.

Leverage

Leverage adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya yang dapat diperoleh melalui pihak ketiga yaitu pihak selain investor jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity ratio*, *leverage* dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada tahun bersangkutan.

$$LEV = \frac{T}{T + E}$$

Return on Assets

Return on assets (ROA) dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol untuk memisahkan dampak etis CSR pada manajemen laba setelah mengontrol akibat potensial dari kinerja keuangan perusahaan. ROA yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak tahun sebelumnya dengan total aset tahun sebelumnya.

$$ROA = \frac{L}{TA}$$

Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 11 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan variabel penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia situs-situs resmi perusahaan yang bersangkutan, serta *Sustainability Reporting Award* untuk memperoleh laporan berkelanjutan. Laporan berkelanjutan digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari subjektivitas yang menjadi

kelemahan proses skoring dalam *content analysis* yang dilakukan melalui laporan tahunan. Sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan 11 sampel perusahaan yang sesuai dengan variabel penelitian. Kriteria sampel yang akan digunakan yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2013, 2014, dan 2015.
2. Menyediakan laporan tahunan yang terdaftar di BEI lengkap selama tahun ,2014,dan2015.
3. Perusahaan tersebut telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Tahun 2013, 2014 dan 2015

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI maupun perusahaan itu sendiri. Data dalam laporan berkelanjutan ditelusuri dengan menggunakan instrumen penelitian berupa *check list* pengungkapan pertanggung jawaban sosial.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu *Ordinary Least Square* (OLS). Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Model persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$$DACit = \alpha + \beta1 CSRIit + \beta2 LEVit + \beta3 MBit + \beta4 ROAit-1 + \epsilon it$$

Keterangan :

DACit = Manajemen laba yang diukur menggunakan proksi *discretionary*

$accrual$ perusahaan i tahun bersangkutan

$CSRlit$ = Pengungkapan CSR melalui CSR index perusahaan i tahun bersangkutan

$LEVit$ = *Leverage* perusahaan i tahun bersangkutan

$ROAit-1$ = *Return on Assets* perusahaan i pada tahun sebelumnya

ε = *Error item*

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selain perusahaan keuangan dan jasa dengan periode tahun 2013, 2014, dan 2015. Perusahaan yang tercakup dalam sampel penelitian ini antara lain perusahaan manufaktur. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Kriteria dari sampel penelitian ini antara lain perusahaan yang tergolong perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan perusahaan tersebut membuat dan menerbitkan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) serta laporan tahunan (*annual report*). Perincian sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1

Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013,2014 dan 2015	143

Tidak menyediakan laporan Tahunan berkelanjutan yang terdaftar di BEI lengkap selama tahun 2013,2014 dan 2015	(49)
Tidak mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun Sampel Penelitian	(83)
	11

Sumber : Data yang diolah, 2017

Analisis Data Statistik Deskriptif

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah total data setiap variabel (N) adalah 33 perusahaan selama periode 2013, 2014, dan 2015. Variabel dependen manajemen laba (DAC) memiliki nilai rata-rata sebesar -0,3377, standar deviasi sebesar 0,19820, nilai terendah sebesar -0,075, dan nilai tertinggi sebesar 0,06. Nilai terendah -0,75 pada *discretionary accruals* ini berarti bahwa perusahaan tersebut kurang terlibat dalam praktik manajemen laba. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,06 ini berarti bahwa perusahaan cukup terlibat dalam praktik manajemen laba.

Tabel 2 Statistic Deskriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PROPER	33	3.00	5.00	3.3636	.60302
ROA	33	.02	.56	.1976	.15773
LEV	33	.16	2.26	.8596	.63292
DAC	33	-.75	.06	-.3377	.19820
Valid N (listwise)	33				

Variabel independen CSR Proper Rank memiliki nilai terendah sebesar 3,00 dan nilai tertinggi sebesar 5 yang berarti bahwa perusahaan melakukan pengungkapan penuh terhadap tindakan CSR yang telah dilakukan. Sedangkan untuk nilai rata-rata, proper rank

memiliki nilai sebesar 3,3636 dengan standar deviasi sebesar 0,60302. Variabel kontrol *leverage* (LEV) memiliki nilai terendah sebesar 0,16 nilai tertinggi sebesar 2,26, nilai rata-rata sebesar 0,8596 dengan standar deviasi sebesar 0,63292. Variabel ROA memiliki nilai terendah sebesar 0,02, nilai tertinggi sebesar 2,26, nilai rata-rata sebesar 0,1976, dan standar deviasi sebesar 0,15773.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas dari uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki hasil signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,151. Hasil nilai signifikansi Z yang lebih besar dari 0,05 berarti menolak H0 dan menerima H1 normalitas, yang artinya bahwa data terdistribusi secara normal.

Hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,, serta variabel kontrol yang juga menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil uji Autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson sebesar 1,790. Nilai du diperoleh sebesar 1,193 dan dl sebesar 1,730. Dengan demikian nilai DW berada diantara nilai dl dan du ($dl < d < du$), sehingga model regresi memberikan hasil yang tidak dapat dipastikan apakah memiliki masalah autokorelasi atau tidak. Untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih pasti apakah model regresi mengalami autokorelasi atau tidak, penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *runs test*. Hasil uji non-parametrik *runs test* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,207 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi nilai residual dalam model regresi penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji F pada model regresi dengan variabel dependen manajemen laba (DAC) adalah sebesar 5,804 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Hal ini berarti variabel independen pengungkapan CSR Proper Rank yang dimasukkan dalam model secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen manajemen laba (DAC) dikarenakan model regresi dalam penelitian ini memiliki nilai F hitung lebih dari 4 dan signifikansi kurang dari 0,05. Nilai *adjusted R2* (koefisien determinasi) pada model regresi yaitu sebesar 0,472, yang artinya 47,2% variabel dependen manajemen laba (DAC) dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel independen pengungkapan CSR (PROPER) dan variabel kontrol ROA, dan *leverage* (LEV). Sedangkan untuk 53,8% variabel dependen manajemen laba harus dijelaskan dengan variabel lain.

Hasil menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,311 yang memiliki arti bahwa 31,1% perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel Proper, LEV dan ROA. Sedangkan sisanya 68,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini menguji signifikansi koefisien variabel independen dalam memprediksi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 ($\alpha=5\%$).

Tabel 3 Uji t
Pengaruh Corporate social responsibility terhadap Manajemen Laba

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.056	.169		-.333	.741		
PROPER	-.028	.052	-.085	-.532	.599	.846	1.182
ROA	-.393	.207	-.313	-1.900	.067	.795	1.257
LEV	-.128	.048	-.408	-2.661	.013	.917	1.090

a. Dependent Variable: DAC

Pada tabel hasil uji t diatas bahwa CSR memiliki koefisien yang bernilai negatif

sebesar -0,028. Adapun nilai t yang diperoleh adalah sebesar -0,532 dengan signifikansi sebesar 0,599 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti menerima H_0 dan dapat disimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba

Hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikutini:

1. Variabel Proper Rank(Proper)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,599 $>level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Corporate Social Responsibility (PROPER) terhadap Manajemen laba.

2. Variabel Leverage(LEV)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,177 $>level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *Return on assets* terhadap Manajemen Laba.

3. Variabel *Return on assets*(ROA)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,067 $<level\ of\ significant\ (\alpha) = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *Return on assets* terhadap Manajemen Laba.

Hasil pengujian menunjukkan leverage terhadap manajemen laba menunjukkan nilai t -2.661. Lalu pada nilai signifikansi 0,177 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 ($\alpha = 5\%$). Maka secara parsial *Leverage* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Pengaruh *Return on Assets* terhadap manajemen laba

Pada tabel hasil uji t diatas bahwa ROA memiliki koefisien yang bernilai negatif sebesar -0,393. Adapun nilai t yang diperoleh adalah sebesar -1.900 dengan signifikansi sebesar 0,067 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti menerima H_0 dan dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap manajemenlaba.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari hipotesis yang telah dirumuskan dan telah diuji, maka dapat disimpulkan :

1. Variabel independen pengungkapan CSR terhadap variabel dependen manajemen laba (DAC) tidak memiliki pengaruh positif dan tidaksignifikan.
2. Variabel independen pengungkapan CSR dengan menggunakan variabel kontrol *leverage* terhadap variable dependen manajemen laba (DAC) tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan.
3. Hasil pengujian ketiga variabel independen pengungkapan CSR dengan menggunakan variabel kontrol variabel kontrol *return on assets* terhadap variabel dependen manajemen laba (DAC) memiliki pengaruh positif dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. Manajemen Keuangan Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arief, Arvina. 2014. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Non keuangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). Jurnal Pogram Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Blocher, Edward J, Chen, Kung H, Cokins, Gary, Lin Thomas W, 2011, "Manajemen Biaya Penekanan Strategis" ,Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta

- Fan, Olivia. 2013. The Interaction between Corporate Social Responsibility and Earnings Management. *Amsterdam Business School Research Institute*. Universiteit Van Amsterdam.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali.
- Blocher, Edward J, Chen, Kung H, Cokins, Gary, Lin Thomas W, 2007, "Manajemen Biaya Penekanan Strategis" ,Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Kasmir, 2012, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kim, Y., M.S. Park, and B. Wier. 2012. Is Earning Quality Associated with Corporate Social Responsibility?. *The Accounting Review*, Vol. 87 No.3: 761-796. Diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto : Pengantar Bisnis, Buku Satu, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kim Y, Park, dan Wier. 2011. Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility?. *Accounting Review*, Forthcoming.
- Kotler, P. dan N. Lee. 2005. CSR: Doing The Most Good Most For Your Company and Your Cause. John Wiley and Sons, Inc. New Jersey.
- LNH Sitanggang, 2011, depository. usu.ac.id/bitstream/123456789/23069/ 3/ chapter II.pdf.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-431/BL/2012 poin2g.
- Putri, Ajeng Rusmalina Sari. 2012. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011). *Jurnal Pogram Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- PROPER (RANK),
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA.
- Rahmawati, dan Danita, putri: 2011, Analysis of the Effect of Corporate Social Responsibility on Financial Performance With Earnings Management as a Moderating Variable, *Journal of Modern Accounting and Auditing*, Vol. 7, No. 10, 1034-1045
- Shleifer, A.: 2004, 'Does Competition Destroy Ethical Behavior?', *Journal of, Harvard University*.
- Sulistiyanto, H. Sri. 2008. Manajemen Laba, Teori dan Model Empiris. Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 pasal 15(b) tentang Penanaman Modal
- Velda, T. M. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Enterprise Value dengan Earning Management Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Pogram Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Yip, E., Chris Van Staden, and Steven Cahan. 2011. Corporate Social Responsibility Reporting and Earnings Management: The Role of Political Costs. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, Vol. 5, No. 3.

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Palen Jayanti¹, Hasan Kuzery², Rolia Wahasusmiah³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Jalan Ahmad Yani No.12, Seberang Ulu Kota Palembang

Palenjyanti17@gmail.com, [Hasan Kuzery @binadarma.ac.id](mailto:Hasan.Kuzery@binadarma.ac.id), [Rolia Wahasusmiah@binadarma.ac.id](mailto:Rolia.Wahasusmiah@binadarma.ac.id)

ABSTRACT: *The research in this thesis aims to find out how effective admission amusement tax and restaurant tax in Palembang against a target acceptance, and the contribution of amusement tax and restaurant tax on the total revenues of Local Tax Palembang. This type of research is descriptive with qualitative approach. Data obtained using the method of documentation and interviews. Based on the research, entertainment tax revenue for the years 2013-2015 by an average of 107.84 hit the target. When viewed under the criteria or indicators are then penilaiannya very effective due to above 100% of the percentage criteria of effectiveness, as well as tax revenue this restaurant every year has increased, with an average of 116.43% and has reached a very effective criteria for the achievement of more than 100%. The amusement tax contributions to tax revenues Palembang City area average of the years 2013-2015 amounted to 2.37%. If based on the criteria or indicators do not contribute to the assessment said, but with a different restaurant tax contribution to the tax revenue of the Sumatran region south of the year 2013-2015 with an average of 10.64% is said to be less contribute, because achievement is only 10% -20% ,*

Keywords: *amusement tax, restaurant tax, Local Tax Revenue Palembang*

ABSTRAK: Penelitian dalam tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran di Kota Palembang terhadap target penerimaannya dan seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap keseluruhan penerimaan Pajak Daerah kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerimaan pajak hiburan untuk tahun 2013-2015 rata-rata sebesar 107,84 mencapai target. Jika dilihat berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya sangat efektif dikarenakan diatas 100% dari kriteria presentase efektivitas, begitu juga penerimaan Pajak Restoran ini setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata 116,43% dan sudah mencapai kriteria sangat efektif karena pencapaian lebih dari 100%.

Adapun kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 2,37%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya dikatakan tidak berkontribusi, namun berbeda dengan kontribusi Pajak Restoran terhadap penerimaan Pajak daerah sumatera selatan dari tahun 2013-2015 dengan rata-rata 10,64% dikatakan kurang berkontribusi, karena pencapaiannya hanya 10%-20%.

Kata kunci: *Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang*

I PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari menghendaki daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 atas perubahan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan daerah.

Undang-undang tersebut sekarang telah resmi berlaku, maka telah resmi pula berlangsung proses pergeseran pendelegasian dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan kata lain

desentralisasi lebih besar porsinya pada Undang-undang tersebut dibandingkan dengan Undang-undang pendahulunya.

Pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berarti bahwa memberi otonomi kepada daerah harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya partisipasi seluruh masyarakat.

Salah satu indikasi yang menunjukkan suatu daerah itu dapat dikatakan mampu dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri. Oleh karena itu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan meningkatkan sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya. Upaya peningkatan sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan untuk dipungut pajak maupun retribusi. Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menetapkan Pajak Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah.

Terdapat 11 sektor penerimaan pemerintah kota Palembang dari pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah kota Palembang mengelola (11) jenis Pajak Daerah, salah satu Pajak Daerah tersebut adalah Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Berikut ini adalah gambaran mengenai realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dan keberadaannya dibandingkan dengan jenis pajak lainnya Kota Palembang tahun 2013-2015. Berikut ini data Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dari Tahun 2013-2015.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran pada Tahun 2013-2015

No	Jenis pajak	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
1	P. Restoran	35.926.603.685	45.527.716.420	57.718.132.607
2	P. Hiburan	7.706.129.728	10.846.608.407	12.608.936.834

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dari data diatas diperoleh gambaran mengenai perkembangan pajak daerah, khususnya Pajak Hiburan dan Pajak Restoran serta perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di kota Palembang dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran setiap tahunnya mengalami

kenaikan.

Gambaran mengenai penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran yang selalu mengalami kenaikan menunjukkan bahwa potensi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah masih bisa untuk dioptimalkan sehingga penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dapat meningkat. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif.

Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Daerah Kota Palembang sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Pemerintah Kota Palembang mengklasifikasikan Hiburan di Palembang menjadi beberapa jenis tontonan film, pertunjukan kesenian musik/tari, pameran, pertunjukan, diskotik, karaoke, permainan bilyar, pertandingan olahraga dan sebagainya. Sedangkan Pajak Restoran dibagi menjadi rumah makan dan cafe. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG.**

II Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pajak

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintah yang berperan mengatur seluruh

kepentingan masyarakat, dalam menjelaskan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Ada beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli dimana memberikan definisi yang berbeda-beda.

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2011:2) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam buku Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang tidak dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa cirri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

2.1.1 Fungsi pajak

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, menurut Andriani dalam buku Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembeiyaaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah

2.1.2 Pajak daerah

2.1.2.1 Pengertian pajak daerah

Menurut Siahaan (2013:9) mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksana penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiyai penyelenggara pemerintah daerah.

2.1.2.2 Jenis-jenis pajak daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
 - b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 - d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
 - f. Pajak Mineral Bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 - g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan

- dan/ atau perusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Logam Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
15. Bea Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Pajak Hiburan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Soelarno (1996:25) mendefinisikan Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya.

2.1.3.2 Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan dengan di pungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaranya di tentukan menjadi objek adalah:

1. Tontonan Film
2. Pegelaran kesenian, musik dan tari
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat dan sulap
7. Permainan bilyar, golf, dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran
10. Pertandingan olahraga

2.1.3.3 Dasar Pengenaan pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya di terima oleh penyelenggara Hiburan.

2.1.4 Pajak Restoran

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas

penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2.1.4.1 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang di sediakan oleh Restoran. Pelayanan yang di sediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Efektivitas Pajak Hiburan dan Pajak Restoran (X_1) dan Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran (X_2). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Penerimaan Pajak Daerah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data diperoleh secara langsung dari sumbernya dan sebagian data diperoleh melalui penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber instansi terkait yaitu :

1. Data Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran tahun 2013 - 2015
2. Penerimaan Pajak Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.6.1 Analisis Efektivitas Penerimaan

4.6.2 Pajak Hiburan

Efektivitas merupakan perbandingan antara target Pajak Hiburan dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan. Berikut ini terdapat juga tabel kriteria dari hasil perhitungan Efektivitas penerimaan Pajak

Hiburan dan Pajak Restoran yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kriteria Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap penerimaan pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah.

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
40,10% - 50%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepdagri No.690.900.327 Tahun1996 (dalam Elbi)

Pada tabel dibawah ini dirangkum perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hiburan tahun 2013-2015 pada dinas pendapatan daerah kota Palembang dengan cara sebagai berikut:

1. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{7.706.129.728,00}{7.025.000.000,00} \times 100\% = 109,70\%$$

2. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{10.846.608.407,00}{10.500.000.000,00} \times 100\% = 103,30\%$$

3. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{12.608.936.834,00}{11.500.000.000,00} \times 100\% = 109,64\%$$

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun 2013-2015 :

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Kriteria
2013	7.025.000.000,00	7.706.129.728,00	109,70%	Sangat Efektif
2014	10.500.000.000,00	10.846.608.407,00	103,30%	Sangat Efektif
2015	11.500.000.000,00	12.608.936.834,00	109,64%	Sangat Efektif
Rata-rata			107,84%	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data diolah peneliti.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan Pajak Hiburan dari tahun 2013-2015 rata-rata sebesar 107,84 mencapai target. Jika dilihat berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya sangat efektif dikarenakan diatas 100% dari kriteria presentase efektivitas. Hal ini berarti wajib pajak rutin dan tepat waktu dalam membayar Pajak Hiburan, sehingga penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2013-2015 dapat mencapai targetnya.

4.6.2 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Efektivitas adalah berkaitan dengan seberapa besar pencapaian yang diperoleh pemerintah daerah kota Palembang. Pada tabel dibawah ini dirangkum perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Restoran tahun 2013-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dengan cara sebagai berikut:

1. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{35.926.603.685,26}{31.500.000.000,00} \times 100\% = 114,05\%$$

2. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{45.527.716.420,82}{38.000.000.000,00} \times 100\% = 119,81\%$$

3. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{57.718.132.607,00}{50.000.000.000,00} \times 100\% = 115,44\%$$

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian %	Kriteria
2013	31.500.000.000,00	35.926.603.685,26	114,05%	Sangat Efektif
2014	38.000.000.000,00	45.527.716.420,82	119,81%	Sangat Efektif
2015	50.000.000.000,00	57.718.132.607,00	115,44%	Sangat Efektif
Rata-rata			116,43%	Sangat Efektif

Tahun 2013-2015:

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data diolah peneliti.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Restoran ini setiap tahun mengalami peningkatan, karena sudah mencapai kriteria sangat efektif dikarenakan lebih dari 100% dari kriteria persentase efektivitas, dan juga dikarenakan kinerja dari karyawannya yang sudah bekerja keras dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, terutama dari Pajak Hiburan dan Pajak Restoran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 109,70%.

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp 12,608,936,834.00, sedangkan Target Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2015 adalah Rp 11,500,000,000.00. hal ini juga menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Hiburan untuk tahun 2015 juga sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 109,65%.

4.6.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2013-2015.

Kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan daerah.

Berikut ini terdapat juga tabel kriteria dari hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kriteria kontribusi penerimaan pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap penerimaan pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Klasifikasi kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Tidak Berkontribusi
10% - 20%	Kurang Berkontribusi
20,10% - 30%	Cukup Berkontribusi
30,10% - 40%	Berkontribusi
40,10% - 50%	Sangat Berkontribusi

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepdagri No.690.900.327 Tahun1996 (dalam Elbi)

Pada tabel dibawah ini dirangkum perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2013-2015 pada dinas pendapatan daerah kota Palembang dengan cara sebagai berikut:

1. Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{7.706.129.728,00}{357.230.028.259,12} \times 100\% = 2,16\%$$

2. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{10.846.608.407,00}{463.574.599.151,32} \times 100\% \\ &= 2,34\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{12.608.936.834,00}{479.112.899.223,00} \times 100\% = 2,63\%$$

Tabel 4.5

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah di Kota Palembang

Tahun	Realisasi i PH	Realisasi PD	Pencapaian %	Kriteria
2013	7.706.129.728,00	357.230.028.259,12	2,16%	Tidak Berkontribusi
2014	10.846.608.407,00	463.574.599.151,32	2,34%	Tidak Berkontribusi
2015	12.608.936.834,00	479.112.899.223,00	2,63%	Tidak Berkontribusi
Rata-rata			2,37%	Tidak Berkontribusi

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Palembang rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 2,37%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya tidak berkontribusi dikarenakan berada dibawah 10% pada persentase kontribusi. Penerimaan Pajak Hiburan Tidak Berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah, hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor Pajak Hiburan sangat kecil sehingga tidak berkontribusi terhadap Pajak Daerah.

4.6.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah di kota Palembang.

Kontribusi adalah sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total penerimaan daerah. Sementara itu Kontribusi Pajak Restoran di Kota Palembang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Pada tabel dibawah ini dirangkum perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Restoran tahun 2013-2015 terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan daerah kota Palembang dengan cara sebagai berikut:

1. Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{35.926.603.685,26}{357.230.028.259,12} \times 100\% = 10,06\%$$
2. Tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{45.527.716.420,82}{463.574.599.151,32} \times 100\% = 9,82\%$$
3. Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{57.718.132.607,00}{479.112.899.223,00} \times 100\% = 12,05\%$$

Tabel 4.6

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi PR	Realisasi PD	Pencapaian %	Kriteria
2013	35.926.603.685,26	357.230.028.259,12	10,06%	Kurang Berkontribusi
2014	45.527.716.420,82	463.574.599.151,32	9,82%	Tidak Berkontribusi
2015	57.718.132.607,00	479.112.899.223,00	12,05%	Kurang Berkontribusi
	Rata-rata		10,64%	Kurang Berkontribusi

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data diolah oleh peneliti.

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap penerimaan pajak daerah sumatera selatan rata-rata dari tahun 2013-2015 adalah sebesar 10,64%. Jika berdasarkan pada Kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya Kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak belum membayar Pajak Restoran, sehingga penerimaan Pajak Restoran masih kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah.

tahun 2015 Pajak Hiburan masih dapat dikatakan Tidak Berkontribusi bagi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah melakukan Pemungutan pajak Hiburan dan Pajak Restoran dengan sangat efektif tetapi masih menunjukkan Kurang Berkontribusi, untuk tahun 2013 dan 2015 dan untuk tahun 2014 tidak berkontribusi. Keadaan sangat efektivitas pada pencapaian target Pajak Hiburan dan Pajak Restoran disebabkan target realisasi pencapaian targetnya sudah cukup baik, sedangkan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya tidak berkontribusi, untuk Pajak Restoran tahun 2013 dan 2015 kurang berkontribusi, dan untuk tahun 2014, Tidak Berkontribusi. Hal tersebut disebabkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah berada pada peringkat ke 8, dan ke 4 dari 11 jenis Pajak Daerah.

4.6.5 Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap target penerimaan kedua jenis pajak tersebut.

Untuk mencari Efektivitas realisasi tersebut diatas maka digunakan rumus:

$$\text{efektifitas} = \frac{\text{Penerimaan Pjok Hiburan} + \text{Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah tersebut}} \times 100\%$$

Untuk, tahun 2013 yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 7.706.129.728,00 + \text{Rp } 35.926.603.685,00}{\text{Rp } 7.025.000.000,00 + \text{Rp } 31.500.000.000,00} \times 100\% = \frac{\text{Rp } 43.632.733.413,00}{\text{Rp } 38.525.000.000,00} \times 100 = 113,26\%$$

Tahun 2014 yaitu:

$$\frac{\text{RP } 10.846.608.407,00 + \text{Rp } 45.527.716.420,00}{\text{Rp } 10.500.000.000,00 + \text{Rp } 38.000.000.000,00} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 56.374.324.827,00}{\text{Rp } 48.500.000.000,00} \times 100\% = 116,24\%$$

Tahun 2015 yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 12.608.936.834,00 + \text{Rp } 57.718.132.607,00}{\text{Rp } 11.500.000.000,00 + \text{Rp } 50.000.000.000,00} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 70.327.069.441,00}{\text{Rp } 61.500.000.000,00} \times 100\% = 114,35\%$$

Tabel 4.7

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Target Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Tahun 2013-2015.

Tahun	Target Penerimaan PH dan PR (Rp)	Realisasi Penerimaan PH dan PR (Rp)	Pencapaian Target (%)	Kriteria Efektivitas
2013	38.525.000.000	43.632.733.413	113,26%	Sangat Efektif
2014	48.500.000.000	56.374.324.827	116,24%	Sangat Efektif
2015	61.500.000.000	70.327.069.441	114,35%	Sangat Efektif
Rata-rata setiap tahun			114,62%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dibandingkan dengan target kedua jenis pajak tersebut dalam tahun 2013-2015 semuanya sangat efektif atau berada diatas 100% dan dengan rata-rata pertahun adalah 114,62% atau dengan kriteria sangat efektif. Hal tersebut disebabkan kinerja karyawan dalam mengelola Pajak Hiburan dan Pajak Restoran sudah baik atau kerjanya sudah baik.

4.7.3 Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap seluruh jenis penerimaan Pajak Daerah dalam tahun 2013-2015.

Untuk mencari besarnya kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran

terhadap seluruh jenis penerimaan Pajak Daerah dapat di jelaskan sebagai berikut:

Efektivitas

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Seluruh Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Untuk tahun 2013 yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 7.706.129.728,00 + \text{Rp } 35.926.603.685}{\text{Rp } 357.230.028.259} \times 100$$

$$= \frac{\text{Rp } 43.632.733.413}{\text{Rp } 357.230.028.259} \times 100\% = 12,21\%$$

Tahun 2014 yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 10.846.608.407,00 + \text{Rp } 45.527.716.420,00}{\text{Rp } 463.574.599.151} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 56.374.324.827,00}{\text{Rp } 463.574.599.151,00} \times 100\% = 12,16\%$$

Tahun 2015 yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 12.608.936.834,00 + \text{Rp } 57.178.132.607}{\text{Rp } 479.112.899.223,00} \times 100$$

$$= \frac{\text{Rp } 70.327.069.441,00}{\text{Rp } 479.112.899.223} \times 100\% = 14,68\%$$

Tabel 4.8

Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran

terhadap seluruh jenis Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan PH dan PR (Rp)	Realisasi Seluruh Jenis PD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2013	43.632.733.413	357.230.028.359	12,21%	Kurang Berkontribusi
2014	56.374.324.827	463.574.599.151	12,16%	usi
2015	70.327.069.441	479.112.899.112	14,68%	Kurang Berkontribusi

.441	899.223	usi
		Kurang berkontribusi
		usi
Rata-rata setiap tahun	13,02%	Kurang Berkontribusi
		usi

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap seluruh jenis Penerimaan Pajak Daerah dalam tahun 2013-2015 semua tahun kurang berkontribusi yaitu antara 12% - 15% atau dengan rata-rata 13,02% dengan kriteria Kurang Berkontribusi.

Hal tersebut diatas disebabkan yang dibandingkan adalah Penerimaan dari dua jenis Pajak Hiburan dan Pajak Restoran sedangkan pembandingnya adalah sebanyak 11 jenis Pajak Daerah. Di mana dari 11 jenis Pajak Daerah tersebut yang tertinggi penerimaannya adalah Pajak Penerangan Jalan Listrik PLN/ Non PLN, BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan, sehingga Kriteria Kontribusi dari Pajak Hiburan dan Pajak Restoran tersebut Kurang Berkontribusi.

Apabila ketiga jenis pajak daerah tersebut (yang tertinggi ke 1, 2 dan 3), maka Kriterianya adalah Sangat Berkontribusi.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan dan Analisis dari Bab IV, Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Targetnya dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pencapaian Target Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran untuk
 - Tahun 2013 Pajak Hiburan sebesar 109,70% (sangat efektif) dan Pajak

- Restoran sebesar 114,06% (sangat efektif)
- Tahun 2014 Pajak Hiburan sebesar 103,31% (sangat efektif) dan Pajak Restoran sebesar 119,81% (sangat efektif)
- Tahun 2015 Pajak Hiburan sebesar 109,65% (sangat efektif) dan Pajak Restoran sebesar 115,44% (sangat efektif)

2. Apabila kedua jenis pajak daerah tersebut digabungkan penghasilannya terhadap targetnya juga digabungkan maka diperoleh hasil efektivitasnya adalah:

Tahun 2013 sebesar 113,26%, Tahun 2014 sebesar 116,24%, Tahun 2015 sebesar 114,35%. Dan rata-rata pertahunnya adalah 114,62% atau dengan kriteria sangat efektif.

3. Kontribusi penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap seluruh jenis penerimaan Pajak Daerah adalah:
 - a. Sebelum digabungkan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Untuk Pajak Hiburan

Tahun 2013 sebesar 2,16% Tidak Berkontribusi, Tahun 2014 sebesar 2,34% Tidak Berkontribusi, Tahun 2015 sebesar 2,63% Tidak Berkontribusi. Atau rata-rata setiap tahun sebesar 2,37% atau dengan kriteria Tidak Berkontribusi Untuk Pajak Restoran

Tahun 2013 sebesar 10,6% Kurang Berkontribusi, Tahun 2014 sebesar 9,82% Tidak Berkontribusi, Tahun 2015 sebesar 12,05% Kurang Berkontribusi. Atau rata-rata setiap tahun sebesar 10,64% dengan Kriteria Kurang Berkontribusi.

- b. Setelah digabungkan (Pajak Hiburan dan Pajak Restoran)

Tahun 2013 sebesar 12,21% Kurang Berkontribusi, tahun 2014 sebesar 12,16% Kurang Berkontribusi, Tahun 2015 sebesar 14,68% Kurang Berkontribusi. Atau rata-rata setiap tahun sebesar 13,02% atau dengan kriteria Kurang Berkontribusi.

Dari uraian diatas apabila belum digabung maka kriteria kontribusi Pajak Hiburan adalah Tidak

Berkontribusi, tetapi setelah digabung meningkat menjadi Kurang Berkontribusi.

SARAN

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar meningkatkan lagi pengelolaan penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran sehingga pencapaian efektivitas penerimaan kedua jenis pajak tersebut tetap selalu sangat efektif.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar lebih meningkatkan kinerja petugas Pajak Hiburan supaya penerimaan Pajak tersebut ditingkatkan lagi sehingga kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Daerah meingkat dari Tidak Berkontribusi menjadi Kurang Berkontribusi.
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar meningkatkan kecakapan para petugas Pajak Daerah dengan memberikan pelatihan kepada para karyawannya atau memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk melanjutkan pendidikan ke fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang mengajarkan ilmu perpajakan baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah, sehingga petugas / karyawannya ahli dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2011. *Pengertian Pajak*. Buku Waluyo
- Dara Riszky supriadi, Dwiatmanto Suhartini Karjo. 2015. *Jurnal Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Malang*.
- Danang. 2015. *Penelitian Elbi*
- Freddy De Rooy, Dkk. 2015. *Jurnal Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap*
- Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Empat*.
- Halim Abdul.Damayanti Theresia, 2004. *Efektivitas menurut Jones dan Pandlebury*.
- Irian Fery, Dkk. 2013. *Jurnal Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyu Asin*.
- Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta; Salemba Empat
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Primandita, Dkk. 2014. *Komplikasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap*: Salemba Empat.
- Purbasari, Ratih. 2007. *Jurnal Analisis Penerimaan Pjaks Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*.
- Sanusi. 2014. *Sumber dan Teknik Pengumpulan Data*.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak daerah dan redistribusi daerah. Edisi revisi Jakarta: Rajawali Pers*.
- Mardiasmo, Soemitro 2006. *Perpajakan (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-undang No.12 Tahun 2008 Atas perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

*Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.*

*Undang- undang No.6 Tahun 1983
sebagaimana diubah
Undang-undang No. 42
Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2013-2015)**

**Puteri Bizzaugi¹, Poppy Indriani², M. Titan Terzaghi³
Mahasiswa Universitas Bina Darma 1, Dosen Universitas Bina Darma 2,3
Jalan Jendral Ahmad Yani No.03 Palembang**

Email :putri.bizzaugi@gmail.com¹, Poppy_indriani@binadarma.ac.id²,mtitan4@gmail.com³

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tanggung Jawab Sosial merupakan praktik pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi harapan publik, sehingga menciptakan legitimasi publik atas keberadaan perusahaan. Faktor-faktor yang diuji adalah profitabilitas, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan umur perusahaan sebagai variabel independen sedangkan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode yang digunakan untuk mengukur pengungkapan Tanggung Jawab Sosial adalah dengan *content analysis*. Metode pengukuran *content analysis* dilakukan dengan memberikan *checklist* pada item Tanggung Jawab Sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 24 perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2015. Model analisis untuk penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sedangkan variabel profitabilitas, kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas dan dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang terdaftar di BEI.

Kata Kunci : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris.

Abstract : This study aims to analyzed the factors that influence Corporate Social Responsibility disclosure in annual reports companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). Corporate Social Responsibility is the practices of the company to meet the expectations of the public , thus creating public legitimacy for the existence of the company . The examined factors are profitability , public ownership , firm size , leverage , likuidity , age of the company, and board of commissioners an independent variable while Corporate Social Responsibility disclosure as the dependent variable . The data used in this study are secondary data and selection of samples using purposive sampling method . The method used to measure Corporate Social Responsibility disclosure is the content analysis . The measurement method of content analysis is done by providing a checklist on the items of the financial statements of Corporate Social Responsibility in the company's annual report. Sample consisted of 24 companies that listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2013-2015 . Model analysis for this study using multiple linear regression analysis . Based on the analysis results of the study showed that the only variable. variable firm size and age of the company significantly affect the disclosure of Corporate Social Responsibility, while the variable profitability, firm size, leverage , likuidity , and board of commissioners does not have a significant influence on the disclosure of Corporate Social Responsibility companies listed on the Stock Exchange .

Keywords : Corporate Social Responsibility disclosure, profitability, public ownership , firm size, leverage , likuidity, age of the company, board of commissioners

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena perkembangan isu tanggung jawab sosial cukup populer di Indonesia, banyak perusahaan yang mulai antusias dalam menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial dengan beberapa alasan, diantaranya agar dapat meningkatkan citra perusahaan, dan membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan, serta agar dapat menjamin keberlangsungan perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai bentuk jaminan keberlangsungan hidup perusahaan di masa depan, dan dengan adanya jalinan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, perusahaan dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan sekitar.

Perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam seperti perusahaan pertambangan karena kegiatan operasional perusahaan pertambangan dalam kenyataannya memberikan dampak negatif kepada lingkungan, seperti: masalah-masalah polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan pertambangan memiliki berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi. Berikut ini merupakan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia dan

menjadi pemicu berkembangnya praktik tanggung jawab sosial perusahaan adalah peristiwa yang terjadi pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk sekitar bulan Oktober 2009, PT Newmont Minahasa Raya yang beroperasi di wilayah Teluk Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara tahun 2004 banjir lumpur panas Sidoarjo, juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo.

Melihat beberapa kasus negatif yang terjadi pada perusahaan pertambangan di atas maka pemerintah juga berperan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Untung (2008:55), Pemerintah telah mengatur penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Profitabilitas adalah suatu perusahaan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan ekuitas atau aset yang menghasilkan laba tersebut. Dengan tingginya profitabilitas yang didapatkan, tentu akan membuka peluang lebih besar kepada perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial mereka.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar, oleh karena itu perusahaan besar akan lebih

banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil

Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang. Scott (2000) dalam Fahrizqi (2010) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage* kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak hutang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan.

Umur perusahaan diukur sejak berdirinya perusahaan. Perusahaan yang telah lama berdiri biasanya dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang baru berdiri.

Menurut Mulyadi dalam Fahrizqi (2010:31) dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk manajemen.

Dalam penelitian ini penulis akan menguji variabel profitabilitas, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, umur perusahaan dan dewan komisaris terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan

pertambangan dipilih karena merupakan perusahaan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam yang berhubungan erat dengan limbah dan pencemaran lingkungan, sehingga memiliki tingkat risiko industri dan lingkungan yang tinggi

II. KAJIAN LITERATUR

Teori Stakeholders (*Stakeholder Theory*)

Asumsi teori stakeholder dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar sehingga masyarakat memiliki hubungan tak langsung dengan perusahaan dan memperhatikan perusahaan.

Teori Legitimasi

Legitimasi perusahaan dimata *stakeholder* merupakan faktor signifikan untuk mendukung citra dan reputasi perusahaan dimata *stakeholder*.

Tanggung Jawab Sosial

Menurut *World Bussiness Council For Sustainability Development* (WBSD) dalam Rudito dan Famiola (2013:13), tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Sembiring dalam Dalina (2013:6), Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Profitabilitas

Sutrisno dalam Sari (2015:19), Profitabilitas adalah suatu perusahaan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan ekuitas atau aset yang menghasilkan laba tersebut. Laba yang tinggi sebagai akibat dari kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, tentu akan menarik minat para investor untuk berinvestasi di perusahaan mereka. Adapun pengukuran profitabilitas perusahaan menggunakan rumus :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia. Publik adalah individu atau institusi yang memiliki kepemilikan saham di bawah 5% yang berada diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Adapun pengukurannya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Oleh Publik}}{\text{Total Lembar Saham Beredar}}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston dalam Rahajeng (2010:24), ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan.

Adapun pengukurannya menggunakan rumus :

$$\text{SIZE} = \log (\text{nilai total aset})$$

Leverage

Menurut Kasmir (2008:151), *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva

perusahaan yang dibiayai dengan utang. Tingginya *leverage* menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya.

Adapun untuk mengukur leverage perusahaan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal (Equity)}}$$

Likuiditas

Menurut Kasmir (2008:133), Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan).

Adapun pengukuran likuiditas adalah menggunakan rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

Umur Perusahaan

Menurut Sri dan Sawitri dalam Marina (2011:6), umur perusahaan mengindikasikan berapa lama perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Semakin lama perusahaan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut.

Adapun pengukuran likuiditas yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan rumus :

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Listing}$$

Dewan Komisaris

Menurut Mulyadi dalam Fahrizqi (2010:31), dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab atas manajemen.

Adapun pengukuran dewan komisaris menggunakan rumus :

$$DK = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan}$$

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Kasmir (2008:114) Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki.

$H_1 =$ Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Suchman dalam Santi, 2015:19).

H₂ : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Brigham dan Houston dalam Rahajeng (2010:24), ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan.

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Kasmir (2014:151), *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Tingginya *leverage* menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya.

H₄ :Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Kasmir (2014:151), *Likuiditas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang. Tingginya *leverage* menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2010) bahwa semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin tinggi pula.

H₅ : Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Sri dan Sawitri dalam Marina (2011:6), umur perusahaan mengindikasikan berapa lama perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Semakin lama perusahaan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut.

H₆ : Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Menurut Mulyadi dalam Fahrizqi (2010:31), dewan komisaris adalah wakil

shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab terhadap manajemen.

H₇ : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab social

III. Metode Penelitian

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi populasi dalam penelitian ini 40 perusahaan pertambangan, yang terdiri dari beberapa sektor yaitu batubara, minyak dan gas, logam dan mineral, dan batu-batuan. Metode pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sampel penelitian adalah:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar dan tidak *delist* (keluar) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015.
2. Perusahaan pertambangan yang mempunyai laporan keuangan berakhir 31 Desember dan menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan.
3. Perusahaan yang tidak berpindah sektor pada tahun pengamatan.
4. Perusahaan selalu mendapatkan laba positif atau tidak mengalami kerugian pada tahun pengamatan.
5. Perusahaan memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan penelitian.

Dari jumlah 40 perusahaan pertambangan yang dijadikan populasi dalam penelitian ini maka ditariklah 8 perusahaan untuk dijadikan sampel yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi berganda. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	= Indeks pengungkapan taanggung jawab sosial perusahaan
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$	= Koefisien regresi
X ₁	= Profitabilitas
X ₂	= Kepemilikan Saham Publik
X ₃	= Ukuran Perusahaan
X ₄	= Leverage
X ₅	= Likuiditas
X ₆	= Umur Perusahaan
X ₇	= Dewan Komisaris
ϵ	= <i>Error</i> (Kesalahan Pengganggu)

Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dipenuhi untuk mengetahui bahwa metode analisis regresi benar – benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Untuk memenuhi semua asumsi klasik, maka dilakukan beberapa pengujian diantaranya uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

IV. Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.3
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation
ROA(X ₁)	24	.15	15.88	6.4179	5.12636
Kepemilikan Saham Publik(X ₂)	24	2.08	4.69	3.2704	.65433
Ukuran Perusahaan(X ₃)	24	5.21	7.23	6.4121	.53899
DER(X ₄)	24	.70	3.88	1.9675	1.07034
CR(X ₅)	24	86.51	373.46	185.83 29	65.73261
Umur Perusahaan(X ₆)	24	4	20	11.63	5.046
Dewan Komisaris(X ₇)	24	2	7	4.50	1.642
Tanggung jawab sosial(Y)	24	.11	.97	.3808	.23020
Valid N (listwise)	24				

Sumber: Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah)

Hasil analisis deskriptif dari Tabel 4.3 terlihat bahwa Nilai rata-rata variabel adalah tanggung jawab sosial 0,3808 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, tanggung jawab sosial dari perusahaan sampel termasuk kurang relative stabil.

Untuk nilai rata-rata variabel Profitabilitas adalah 6.4179 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Profitabilitas dari perusahaan sampel termasuk kurang relative stabil.

Untuk nilai rata-rata variabel Kepemilikan Saham Publik adalah 3.2704 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Kepemilikan Saham Publik

dari perusahaan sampel termasuk relative stabil.

Untuk nilai rata-rata variabel Ukuran Perusahaan adalah 6.4121 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Ukuran Perusahaan dari perusahaan sampel tersebut cenderung kurang stabil.

Untuk nilai rata-rata variabel Leverage adalah 1.9675 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Leverage dari perusahaan sampel termasuk relative stabil.

Untuk nilai rata-rata variabel Likuiditas adalah 185.8329 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Likuiditas dari perusahaan sampel termasuk relative stabil.

Untuk nilai rata-rata variabel Umur Perusahaan adalah 11.63 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Umur Perusahaan dari perusahaan sampel termasuk relative stabil.

Untuk nilai rata-rata variabel Dewan Komisaris adalah 4.50 yang menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan, Dewan Komisaris dari perusahaan sampel termasuk relative stabil.

Tabel 4.7
Analisis Regresi Berganda
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
-------	--------------------------------	------------------------------

		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-1.760	.489	
	ROA	.008	.009	.177
	Kepemilikan Saham	.055	.073	.155
	Ukuran Perusahaan	.247	.074	.578
	DER	.010	.037	.045
	CR	.000	.001	.100
	Umur Perusahaan	.016	.007	.343
	Dewan Komisaris	.014	.026	.098

Sumber : Output SPSS 22, diolah penulis, 2017

Dari pengolahan data dengan menggunakan regresi linear berganda pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = -1,760 + 0,008X_1 + 0,055 X_2 + 0,247 X_3 + 0,010X_4 + 0,000 X_5 + 0,016 X_6 + 0,014X_7$$

Angka yang dihasilkan dalam pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a)

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -1,760 dengan arah hubungannya negatif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka tanggung jawab sosial telah mengalami penurunan sebesar -1,223.

2. Koefisien regresi variabel Profitabilitas (X₁)

Nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar 0,008 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas maka akan diikuti oleh kenaikan tanggung jawab sosial sebesar 0,008

dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

3. Koefisien regresi variabel Kepemilikan Saham Publik (X₂)

Nilai koefisien variable kepemilikan saham publik sebesar 0,055 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan kepemilikan saham publik maka akan diikuti oleh kenaikan tanggung jawab sosial sebesar 0,055 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

4. Koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan (X₃)

Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan sebesar 0,247 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan maka akan diikuti oleh kenaikan tanggung jawab sosial sebesar 0,247 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

5. Koefisien regresi variabel Leverage (X₄)

Nilai koefisien variabel leverage sebesar 0,010 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan leverage maka akan diikuti oleh kenaikan tanggung jawab sosial sebesar 0,010 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

6. Koefisien regresi variabel Likuiditas (X₅)

Nilai koefisien variabel likuiditas sebesar 0,000 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan likuiditas maka akan diikuti oleh kenaikan tanggung jawab social sebesar 0,000 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

7. Koefisien regresi variabel Umur Perusahaan (X_6)

Nilai koefisien variabel umur perusahaan sebesar 0,016 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan umur perusahaan maka akan diikuti oleh kenaikan tanggung jawab sosial sebesar 0,016 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

8. Koefisien regresi variable Dewan Komisaris (X_7)

Nilai koefisien variabel dewan komisaris sebesar 0,014 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan dewan komisaris maka akan diikuti oleh kenaikan tanggung jawab sosial sebesar 0,006 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Model regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah – masalah asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji

multikolaritas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Multikolinieritas

masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian.

2. Uji Autokorelasi

hasil uji Durbin-Watson sebesar 1520. angka DW sebesar 1,520 angka tersebut berada diantara 1,10 dengan 1,54 hal ini menunjukkan suatu kesimpulan bahwa model regresi linear dalam penelitian menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi, sehingga model regresi penelitian ini masih layak digunakan.

3. Uji Normalitas

bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig, (2-tailed)*) sebesar 0,141 > nilai signifikansi 0,05 dan Z_{hitung} (*Kolmogorov-Smirnov*) 0,200 < Z_{tabel} . Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan *normal probability plot* juga menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

4. Uji Heterokedastisitas

titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan berada disekitar angka 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk

memprediksi pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan masukan variabel independennya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian variabel bebas Profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, kepemilikan saham public dan dewan komisaris terhadap variabel terikat tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diuraikan secara statistik dengan menggunakan program SPSS, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi arah positif yaitu sebesar 0,008 dengan nilai sig 0,378 > 0,05 dan nilai t_{hitung} (0,906) < t_{tabel} (2,110). Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H_1) ditolak.

Ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Hal ini karena adanya UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan program tahunan yang harus dilakukan oleh

perusahaan. Oleh karena itu, besar kecilnya tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu sebesar 0,055 dengan nilai sig 0,466 > 0,05 dan nilai t_{hitung} (0,747) < t_{tabel} (2,110). Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kaba' (2014) dan Puspitasari (2009).

Tidak berpengaruhnya penelitian ini diduga adanya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab sosial tersebut. biaya-biaya tersebut digunakan untuk melakukan investasi atau ekspansi maupun dibagikan dalam bentuk dividen ke pemegang saham ketimbang digunakan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi arah positif yaitu sebesar 0,247 dengan nilai sig 0,004 < 0,05 dan nilai t_{hitung} (3,341) > t_{tabel} (2,110). Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H_3) diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2014) dan Nur (2012), mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh tidak signifikan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang mendukung sebelumnya yaitu Kaba' (2014) dan Sembiring (2005).

Dengan demikian, semakin besar suatu perusahaan maka total aktiva yang dimiliki perusahaan juga akan semakin banyak sehingga kebijakan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya juga semakin besar.

Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu sebesar 0,010 dengan nilai sig 0,795 > 0,05 dan nilai t_{hitung} (0,264) < t_{tabel} (2,110). Maka dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan

dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H_4) ditolak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, besar kecilnya antara utang dan aktiva tidak mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu sebesar 0,000 dengan nilai sig 0,526 > 0,05 dan nilai t_{hitung} (-0,649) < t_{tabel} (2,110). Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H_5) ditolak.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng (2010) dan Sutomo (2004) yang tidak menemukan bukti bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu, tanggung jawab sosial bukan lagi menjadi sekedar kegiatan, tetapi tanggung jawab sosial merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan yang berguna untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, sehingga semakin tinggi atau rendahnya tingkat

likuiditas perusahaan tidak memengaruhi besarnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yaitu sebesar 0,016 dengan nilai sig $0,037 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung}(2,280) > t_{tabel}(2,110)$. Maka dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H_6) diterima.

Dengan demikian Semakin lama perusahaan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang bahwa umur perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak dan mengetahui kebutuhan komitmennya atas informasi tentang perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin meningkat.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Dari hasil output SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi arah positif yaitu sebesar 0.014 dengan nilai sig 0,607

$> 0,05$ dan nilai $t_{hitung}(0,525) < t_{tabel}(2,110)$. Maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H_7) ditolak.

Penelitian yang mendukung sebelumnya yaitu oleh Fahrizqi (2010,) mengungkapkan bahwa besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, hal ini dikarenakan dewan komisaris merupakan wakil shareholder dalam perusahaan yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen, hal ini disebabkan tujuan dari manajemen yang hanya mementingkan profit semata.

Penambahan atau pun penempatan dewan komisaris dimungkinkan karena hanya sekedar memenuhi ketentuan formal dari BEI yang mewajibkan adanya dewan komisaris.

V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) yang penulis sajikan dalam Bab IV, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan besar atau kecilnya tingkat profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi dalam pengungkapan tanggung jawab sosialnya.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara pemegang saham publik dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti semakin besar suatu perusahaan maka total aktiva yang dimiliki perusahaan juga akan semakin banyak sehingga kebijakan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya juga semakin besar.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel leverage tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan besar kecilnya antara hutang dan aktiva tidak mempengaruhi tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas perusahaan belum tentu berpengaruh terhadap pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang lebih luas.
6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya umur perusahaan maka bertambah pula tanggung jawab serta beban perusahaan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kemampuan perusahaan dan efektifitas untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

7. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variable dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan dewan komisaris merupakan wakil shareholder dalam perusahaan yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perusahaan harus mempertimbangkan setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan. Apakah aktivitas perusahaan dapat mengganggu dan merusak lingkungan serta merugikan masyarakat disekitar tempat perusahaan beroperasi. Penting bagi perusahaan untuk menerapkan program tanggung jawab sosial dalam perusahaan dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Dalam melakukan penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan sehingga tidak diketahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk perusahaan di luar sampel penelitian sehingga bagi penelitian selanjutnya

dapat lebih memperluas area penelitian.

3. Pada penelitian ini, periode pengamatan sebaiknya diperluas agar dapat lebih memprediksi hasil penelitian jangka panjang, dan juga mampu menghasilkan data yang lebih valid. Penelitian selanjutnya juga diharapkan tidak hanya mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui standar saja, akan tetapi kualitas pengungkapan juga ikut dipertimbangkan didalamnya.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan menguji variabel lain di luar *profitabilitas*, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan, *leverage*, *likuiditas*, umur perusahaan, dan dewan komisaris karena masih banyak karakteristik perusahaan yang lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, selain itu juga agar dapat menambah variasi dalam variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan - Perusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang.
- Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan 2013-2015. <http://www.idx.co.id/>. Diakses terakhir tanggal 01 Desember 2016.

- Dalina. 2014. Analisis Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya
- Fahrizqi, Anggara. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. No.1 Rev 2009. Jakarta :SalembaEmpat.
- Kaba', Ricky. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Laporan Tahunan Di Indonesia. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Sosial Responsibility (Tanggung Jawab Korporasi)*. Bandung: Alfabeta
- Marina, Yosy. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Study Empiris Pada Perusaan Pertambangan. Jurnal Mahasiswa Universitas Diponegoro
- Rahajeng, R. G. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Rfek Indonesia)*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Rudito, Bambang dan Famiola Melia. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta :Salemba Empat
- Sari, Herista. 2015. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas Bina Darma. Palembang
- Sari, Rina dan Nursiam. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). Jurnal Mahasiswa Universitas Muhamadiyah. Surakarta
- Siregar, Syofian.2014. Statistik Parametik untuk Penelitian Kualitatif. Jakarta : BumiAksara
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta
- Untung, Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

ANALISI PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BIOLOGIS TERNAK UNGGUL (Studi Kasus BPTU-HPT Sembawa)

Rahmad¹, Siti Nurhayati², Septina Fransisca²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el : rahmadteguh@gmail.com¹, siti_nurhayati@binadarma.ac.id²,
septina.fransisca@binadarma.ac.id²

ABSTRACT : *Biological assets are animal and plant life. Biological asset is an asset that is unique because of the biological transformation that consists of a process of growth, degeneration, production, and procreation that cause changes both qualitatively and quantitatively. This study aims to clarify the accounting treatment of biological assets in the public sector in Indonesia. And the object of this study is the Livestock Breeding Center for Excellence Forage Forage Sembawa (BPTU-HPT Sembawa), which is one public sector organization that has superior biological assets in the form of livestock. However, based on research results, it can be concluded that BPTU-HPT Sembawa has not conducted an assessment of the biological assets and fixed assets that are owned. Based on IPSAS 27 (International Public Sector Accounting Standards), biological assets should be measured at fair value on initial recognition and at each balance sheet date. while SAP (Government Accounting Standards), they enter into the inventory of biological assets and requires measurement of the cost of acquisition. Because SAP is still based on the acquisition cost (historical cost), then use the cost of acquisition is still justified in the valuation of biological assets to the public sector in Indonesia. Hence, it is advisable to BPTU-HPT Sembawa assessment of biological assets owned at the beginning and at the balance sheet date. If an assessment based on the fair value is considered difficult, the valuation of biological assets can be done by using the acquisition cost of the biological assets.*

Keywords: *Accounting Treatment, Biological Assets, IPSAS 27, the fair value, the acquisition cost*

ABSTRAK : Aset biologis adalah hewan dan tumbuhan hidup. Aset biologis merupakan aset yang unik karena mengalami transformasi biologis yang terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan terjadinya perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi aset biologis di sektor publik di Indonesia. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Sembawa (BPTU-HPT Sembawa) yang merupakan salah satu organisasi sektor publik yang mempunyai aset biologis berupa ternak unggul. Namun, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPTU-HPT Sembawa ini belum melakukan penilaian terhadap aset biologis maupun aset tetap yang dimiliki. Berdasarkan IPSAS 27 (International Public Sector Accounting Standard), aset biologis harus diukur berdasarkan nilai wajarnya pada pengakuan awal dan pada setiap tanggal neraca. sedangkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), masih memasukkan aset biologis ke dalam persediaan dan mensyaratkan pengukuran dengan biaya perolehan. Karena SAP masih mendasarkan pada biaya perolehan (historical cost), maka penggunaan biaya perolehan masih dibenarkan dalam penilaian aset biologis untuk sektor publik di Indonesia. karena itulah, disarankan untuk BPTU-HPT Sembawa melakukan penilaian terhadap aset biologis yang dimiliki pada saat awal dan pada saat tanggal neraca. Jika penilaian berdasarkan nilai wajar dirasa menyulitkan, maka penilaian aset biologis bisa dilakukan dengan menggunakan biaya perolehan aset biologis tersebut.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Biologis, IPSAS 27, nilai wajar, biaya peroleha

1. PENDAHULUAN

Aset Biologis adalah aset yang unik, karena mengalami transformasi pertumbuhan bahkan setelah aset biologis menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan

perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Aset biologis dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam *agricultural produce* atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama. Karena mengalami transformasi biologis itu maka diperlukan

pengukuran yang dapat menunjukkan nilai dari aset tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran keuntungan ekonomis bagi perusahaan.

Karena karakteristiknya yang unik, organisasi sektor publik yang bergerak di bidang agrobisnis mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan informasi yang lebih bias dibandingkan dengan organisasi sektor publik yang bergerak di bidang lain, terutama dalam hal mengukur, menyajikan, sekaligus mengungkapkan terutama mengenai aset tetapnya yang berupa aset biologis.

Agrikultur mempunyai sifat yang spesifik. Dikatakan sebagai karakteristik yang unik karena tumbuhan dan hewan merupakan *Biological Asset*, hasil produksi tidak bersifat mekanistik karena banyak faktor yang mempengaruhi dan hasil pertumbuhan dipengaruhi kombinasi beberapa faktor yang berada diluar kendali manajemen.

Perlakuan akuntansi terhadap Aset Biologis suatu organisasi publik merupakan hal yang sangat penting. Apabila terjadi salah pengalokasian biaya tersebut akan menyebabkan kesalahan dalam pengidentifikasian nilai Aset Biologis, maka laporan keuangan yang merupakan sumber informasi menjadi tidak relevan dan tidak andal.

BPTU-HPT Sembawa merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

International Accounting Standard Board (IASB) telah mempublikasikan dalam *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS), perlakuan akuntansi bagi aset biologis yang diatur dalam *International Public Sector Accounting Standard 27* (IPSAS 27) yang melingkupi tentang akuntansi bagi sektor usaha agrikultur. Berbeda dengan SAP IPSAS 27 (*International Public Sector Accounting Standard*), aset biologis harus diukur berdasarkan nilai wajarnya pada pengakuan awal dan pada setiap tanggal neraca" sedangkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), masih memasukkan aset biologis ke dalam persediaan dan mensyaratkan pengukuran dengan biaya perolehan

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Ternak Unggul pada Organisasi sektor publik (Studi Kasus pada BPTU-HPT Sembawa)”**.

II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Aset Biologis merupakan jenis aset berupa hewan dan tumbuhan hidup, seperti yang didefinisikan dalam IPSAS 27:

Jika dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh aset maka aset biologis dapat dijabarkan sebagai tanaman pertanian atau hewan ternak yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi publik yang diperoleh dari kegiatan masa lalu aset biologis merupakan aset yang sebagian besar digunakan dalam aktivitas agrikultur, karena aktivitas agrikultur adalah aktivitas usaha dalam rangka manajemen transformasi biologis dari aset biologis untuk menghasilkan produk yang siap dikonsumsi atau yang masih membutuhkan proses lebih lanjut.

Karakteristik khusus yang membedakan Aset Biologis dengan aset lainnya yaitu bahwa Aset Biologis mengalami transformasi biologis. transformasi biologis merupakan proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang disebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif pada makhluk hidup dan menghasilkan aset baru dalam bentuk produk agrikultur atau Aset Biologis tambahan pada jenis yang sama.

Dalam IPSAS 27 transformasi biologis dijelaskan sebagai berikut: “transformasi biologis (*biological transformation*) terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis..”

Transformasi biologis menghasilkan beberapa tipe outcome, yaitu:

- 1) perubahan aset melalui: (a) pertumbuhan (peningkatan dalam Kuantitas atau perbaikan kualitas dari *Biological Asset*); (b) degenerasi (penurunan nilai dalam kuantitas atau deteriorasi dalam kualitas dari *Biological Asset*); atau (c) prokreasi (hasil dari penambahan *Biological Asset*).
- 2) produksi produk agrikultur misalnya, daun teh, wol, susu, dan lain sebagainya.

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU) Sembawa yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang – Pangkalan Balai KM 29

Desain penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Oleh karena itu, desain ini perlu disusun terlebih dahulu sebelum peneliti melaksanakan penelitian.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan

data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Operasional Variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Agar penelitian lebih jelas, maka perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut : dalam penulisan ini akan diberikan suatu rumusan mengenai definisi operasional, yaitu penjelasan secara operasional dan variabel - variabel yang akan diteliti seperti pada uraian berikut. BPTU-HPT Sembawa merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aset biologis berupa Ternak Unggul BPTU-HPT Sembawa meliputi Sapi Dalam laporan keuangan BPTU-HPT Sembawa pengakuan aset biologis berupa ternak unggul Sapi yaitu sebagai Aset Lainnya Ekstrakomtable. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomtable.

Aset biologis berupa ternak unggul (Sapi dan Ayam) diukur berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan dari ternak unggul terdiri atas:

- a. Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
- b. Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa harga perolehan ternak unggul diperoleh dari mengkapitalisasi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan ternak unggul yang dimiliki oleh BPTU-HPT Sembawa

Ternak Unggul diukur berdasarkan nilai yang telah direklasifikasi dari ternak unggul. Kapitalisasi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan ternak unggul tidak lagi dilakukan untuk mengukur ternak unggul karena biaya-biaya tersebut dianggap tidak lagi memberikan kontribusi bagi perkembangan ternak unggul.

Hasil dari ternak unggul pada BPTU-HPT Sembawa diakui sebagai persediaan ketika produk agrikultur tersebut merupakan produk agrikultur yang siap untuk dijual atau merupakan produk agrikultur yang digunakan sebagai bahan baku dari proses produksi untuk

menghasilkan produk baru. Produk agrikultur yang diakui sebagai persediaan diukur berdasarkan harga yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*lower cost or net realizable value*).

Harga perolehan dari produk agrikultur diperoleh dari mengkapitalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan produk agrikultur dari hewan kecil sampai dengan produk agrikultur tersebut siap untuk dijual atau digunakan dalam proses lebih lanjut. Biaya-biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan dari produk agrikultur yaitu biaya angkut, biaya produk agrikultur, serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan proses produk agrikultur.

Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) diperoleh dari estimasi harga jual dari produk agrikultur setelah dikurangi dengan biaya pelepasan langsung (biaya penjualan).

Selain produk agrikultur berupa produk utama ternak unggul, ternak unggul juga dapat menghasilkan produk sampingan yang dapat digunakan sebagai persediaan dan atau bibit baru pada BPTU-HPT Sembawa, jika bibit tersebut diperuntukkan untuk dijual maka bibit tersebut diakui sebagai persediaan, sedangkan jika diperuntukkan sebagai bibit baru maka bibit tersebut diakui berdasarkan harga perolehannya.

Harga perolehan dari bibit diperoleh dari kapitalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan upaya untuk menghasilkan bibit yang diinginkan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan

penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BPTU-HPT Sembawa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BPTU-HPT Sembawa dalam melakukan pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian aset biologis berupa ternak unggul telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, yaitu prinsip akuntansi yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta peraturan pemerintah yang lain yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.
2. Pengukuran aset biologis berupa ternak unggul pada BPTU-HPT Sembawa yang berdasarkan harga perolehan dipandang belum mampu memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, karena nilai tersebut belum mampu menunjukkan informasi tentang nilai sebenarnya yang dimiliki oleh aset biologis. Maka dari itu dapat diperbandingkan dengan IPSAS 27 yang pengukuran aset biologis berdasarkan nilai wajar.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi perusahaan

Kelemahan yang berkaitan dengan kesulitan untuk mengidentifikasi biaya-biaya terkait dengan aset biologis berupa ternak unggul harus segera diatasi agar informasi yang dihasilkan tidak mengalami salah saji.

2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini hanya mampu memberikan gambaran tentang pengukuran, pengukuran, pengungkapan dan penyajian aset biologis hanya pada ternak unggul saja, maka sebaiknya bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memberikan gambaran tentang pengukuran, pengukuran, pengungkapan dan penyajian aset biologis berupa tanaman perkebunan, sehingga mampu melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Achmad Ridwan. (2011). *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero)*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Anggraeningtyas, Delvi M.D. 2013. *Implementasi International Accounting Standards IAS 41 Tentang Biological Asset Pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Getas*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anwar Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Brigham dan Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1* (Edisi 11). Jakarta : Salemba Empat.
- Damba Satria, Dandy. 2008. *Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Biologis dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan Perusahaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. “*Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*”. Jakarta:RajaGrafindo Persada
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. *Standar Akuntansi Keuangan. PSAK. Cetakan Keempat, Buku Satu*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi 69*. Jakarta:
- Internasional Public Sector Accounting Standar 27*
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty
- Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.03/2008 tentang *Penyusutan Atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu*.

Stephani, T. dan Yuyetta, E.N. (2012).
“*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (ICD)*”,
Diponegoro Journal of Accounting. Vol.1
No.2, p. 2-8. [Online].

Sugiana, A. Gima, (2013), *Manajemen Aset Pariwisata*, Guardaya Intimarta, Edisi 1, Bandung.

Sedláček, Jaroslav. 2010. *The methods of valuation in agricultural accounting*. Czech Republic: Masaryk University

yunita kurnia ekawati (2016). “*Pengakuan dan Pengukuran Aset Biologis pada Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Malang)*”

PENGARUH IMBALAN JASA AUDIT ABNORMAL, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN AUDIT CLIENT TENURE TERHADAP OPINION SHOPPING

Restu Pratiwi, Ade Kemala Jaya, Verawaty

Dosen Universitas Bina Darma, Mahasiswa Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Palembang

Surel: verawaty@binadarma.ac.id , jaya_ade@yahoo.com , restupratiwi.rpt@gmail.com

***ABSTRACT.** The purpose of this research is to find out the effect of abnormal audit fee, liquidity, profitability and audit client tenure on opinion shopping of a company. The object of this research is from manufacturing company that listed on Indonesian Stock Exchange in 2015. This research using purposive sampling method, to determine the sample of this research with 143 companies as population and 40 companies as sample. This research using logistic regression analyzed method by SPSS program version 22 for windows. The result of this research shown that only liquidity has a positive effect on opinion shopping, while abnormal audit fee, profitability and audit client tenure doesn't have any positive effect on opinion shopping.*

***Keywords:** opinion shopping, abnormal audit fee, liquidity, profitability, audit client tenure.*

***ABSTRAK.** Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh imbal jasa audit abnormal, likuiditas, profitabilitas dan audit client tenure terhadap opinion shopping pada suatu perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk penentuan sampel dengan populasi sebanyak 143 perusahaan dan sampel sebanyak 40 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dengan program SPSS versi 22 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya likuiditas yang berpengaruh positif terhadap opinion shopping, sedangkan imbal jasa audit abnormal, profitabilitas, dan audit client tenure tidak berpengaruh positif terhadap opinion shopping.*

***Kata kunci:** opinion shopping, imbal jasa audit abnormal, likuiditas, profitabilitas, audit client tenure.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini telah banyak terjadi kasus hukum yang melibatkan entitas bisnis, terutama dalam manipulasi akuntansi. Peristiwa ini telah terjadi pada perusahaan besar di Amerika seperti Enron, WorldCom, Xerox, dan lain-lain yang pada akhirnya bangkrut. Kasus ini menyebabkan profesi akuntan publik menjadi kritikan karena diasumsikan

memberikan informasi yang salah. Ini membuktikan bahwa auditor memiliki peranan penting dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan.

Isu mengenai laporan auditor dan hubungannya dengan *opinion shopping* di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1995. Contohnya adalah bangkrutnya Bank Summa, meskipun bank tersebut mendapatkan opini wajar pada laporan keuangannya namun itu tidak

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia, isu mengenai *opinion shopping* semakin menjadi sorotan publik. Perekonomian yang terpuruk menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak dapat melanjutkan usahanya. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar karena kekurangan dana dan ditinggalkan oleh para investornya, menjadikan banyak perusahaan mencari cara agar para *stakeholder* perusahaannya tetap berinvestasi di perusahaan. Untuk menjaga kepercayaan para *stakeholder*, perusahaan harus memastikan bahwa opini yang dikeluarkan oleh auditor adalah opini yang terbaik bagi perusahaan tersebut.

Dalam melakukan audit, auditor harus memastikan bahwa manajemen telah melaporkan kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Opinion shopping adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mempengaruhi atau bahkan melakukan manipulasi atas keputusan auditor dalam berbagai cara agar memberikan opini yang lebih menguntungkan bagi manajemen (Xie dkk., 2010). Definisi *opinion shopping* menurut *Securities and Exchange Commission* (SEC) adalah pencarian auditor yang bersedia untuk memberikan dukungan atas perlakuan

akuntansi yang diajukan oleh manajemen. Hal ini bertujuan agar perusahaan mencapai tujuan pelaporan, meskipun perlakuan tersebut melemahkan keandalan pelaporan (SEC, 2008 dalam Bernardus dan Fitriany 2015).

Dalam melakukan audit, auditor harus memastikan bahwa manajemen telah melaporkan kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Multitafsir atas standar membutuhkan *professional judgement* yang baik dan tepat dalam melakukan interpretasi (Barbadillo dkk., 2006). Perbedaan pendapat antara manajemen dengan auditor sangat mungkin terjadi karena perbedaan sudut pandang, dan diselesaikan dengan melakukan negosiasi. Maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit adalah hasil negosiasi antara manajemen dengan auditor atas berbagai konflik interpretasi (Antle dan Nalebuff 1991 dalam Bernardus dan Fitriany, 2015).

1.2 *Opinion Shopping*

Opinion shopping adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mempengaruhi atau bahkan melakukan manipulasi atas keputusan auditor dalam berbagai cara agar memberikan opini yang lebih menguntungkan bagi manajemen (Xie dkk, 2010). Definisi *opinion shopping* menurut *Securities and*

Exchange Commision (1988) dalam Bernardus dan Fitriany (2015) adalah pencarian auditor yang bersedia untuk memberikan dukungan atas perlakuan akuntansi yang diajukan oleh manajemen.

1.3 Imbalan Jasa Audit Abnormal

Imbal jasa audit abnormal adalah selisih antara imbal jasa audit *factual* yang dibayarkan kepada auditor untuk pekerjaan audit atas laporan keuangan tahunan dengan ekspektasi imbal jasa audit normal yang harus dibebankan untuk penugasan sejenis tersebut (Choi dkk, 2010). Berdasarkan definisi tersebut, imbal jasa audit terdiri atas imbal jasa audit normal dan abnormal.

1.4 Likuiditas

Menurut Subramanyam (2012) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas perusahaan serta komponen aset serta kewajiban lancarnya. Adapun menurut Ahmad dkk (2008) likuiditas diartikan sebagai mudahnya mengkonversikan suatu asset menjadi uang dengan biaya transaksi yang cukup rendah.

1.5 Profitabilitas

Menurut Sartono (2010), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya

dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Adapun menurut Fahmi (2012), profitabilitas adalah rasio yang mengukur aktivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

1.6 Audit Client Tenure

Audit client tenure merupakan jumlah tahun dimana KAP melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama. Perikatan yang lama dapat menyebabkan kurangnya independensi auditor, sehingga beberapa negara menetapkan peraturan mengenai rotasi KAP. Peraturan terkait rotasi ini pertama kali diterbitkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik.

1.7 Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada pengaruh imbalan jasa audit abnormal, likuiditas, profitabilitas, dan *audit client tenure* terhadap *opinion shopping* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015.

1.8 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh imbalan jasa audit abnormal terhadap kemungkinan sebuah perusahaan dalam melakukan praktik *opinion shopping*.
2. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kemungkinan sebuah perusahaan dalam melakukan praktik *opinion shopping*.
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kemungkinan sebuah perusahaan dalam melakukan praktik *opinion shopping*.
4. Menganalisis pengaruh *audit client tenure* terhadap kemungkinan sebuah perusahaan dalam melakukan praktik *opinion shopping*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Obyek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan - perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 31 Desember 2015. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa *annual report* 2015 yang terdapat dalam *website* perusahaan manufaktur yang diperoleh dari *Indonesia Stock Exchange* (IDX). Penarikan sampel

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah 143 perusahaan manufaktur dengan sampel penelitian sebanyak 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan *Indonesia Stock Exchange* (IDX).

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang digunakan sebagai acuan yang relevan yaitu berupa data laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2015 yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini.

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan terhadap seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, dengan 40 perusahaan sebagai sampel. Penelitian ini memiliki 4 variabel bebas yaitu imbalan jasa audit, likuiditas, profitabilitas dan *audit client tenure* dan 1 variabel terikat yaitu *opinion shopping*.

3.1 Uji Model

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara hasil observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model. Langkah pertama adalah menilai *fit* model terhadap data. Beberapa tes statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model adalah:

H0 : Model yang dihipotesakan *fit* dengan data

H1: Model yang dihipotesakan tidak *fit* dengan data

3.1.1 Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Goodness fit test

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	10,242	8	,248

Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and*

Lemeshow Goodness of fit adalah 10,242 dengan tingkat signifikan 0,248 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Angka tingkat signifikan $> 0,05$ sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah *fit* dan model dapat diterima sehingga dapat digunakan untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

3.1.2 Uji Nilai Cox and Snell R Square

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	38,132 ^a	,235	,334

Hasil pengujian nilai *Cox and Snell R Square* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,235 dan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,334. Hasil pengujian ini berarti variabilitas variabel dependen yaitu *Opinion Shopping* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu imbal jasa audit abnormal, likuiditas, profitabilitas dan *audit client tenure* sebesar 33,4%. Sementara itu, variabilitas sisanya 66,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.1.3 Uji Regresi Logistik

		B	df	Sig.
Step 1 ^a	ABFEE1	-1,335	1	,259
	CR	1,095	1	,045
	ROA	-,035	1	,179
	TEN	-19,338	1	,999
	Constant	102,158	1	,999

Dari tabel uji regresi logistik diatas dapat dilihat nilai signifikan masing-masing variabel bebas ABFEE adalah 0,259, CR sebesar 0,045, ROA sebesar 0,179, dan TEN sebesar 0,999.

3.2 Analisis Hasil Penelitian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa imbal jasa audit abnormal tidak berpengaruh positif terhadap *opinion shopping* dengan nilai signifikansi 0,259 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,1 ($\alpha = 10\%$). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Bernardus dan Fitriany (2015) yang menyatakan bahwa imbal jasa audit abnormal memiliki pengaruh terhadap *opinion shopping*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *opinion shopping* dengan nilai signifikansi 0,045 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$ dan 10%). Tingkat likuiditas dianggap sebagai indikator penting kesehatan secara umum, karena untuk melihat kesehatan sebuah perusahaan yang

pertama kali dilihat adalah tingkat likuiditasnya. Besar dan kecilnya tingkat likuiditas sebuah perusahaan akan mempengaruhi opini audit yang akan diterima perusahaan tersebut, penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif likuiditas sebuah perusahaan terhadap *opinion shopping*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap *opinion shopping* dengan nilai signifikansi 0,179 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 ($\alpha = 5\%$ dan 10%). Perusahaan yang mengalami kerugian pada suatu periode tidak berarti bahwa perusahaan tersebut melakukan suatu kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya, karena auditor memeriksa apakah perusahaan tersebut telah menerapkan standar akuntansi yang berterima umum atau tidak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *audit client tenure* tidak berpengaruh positif terhadap *opinion shopping* dengan nilai signifikansi 0,999 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 ($\alpha = 5\%$ dan 10%). Lama perikatan antara auditor dan perusahaan *auditee* telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masa perikatan yang lama antara KAP dengan pihak perusahaan akan mendapat atensi dan pengawasan lebih oleh OJK.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh imbal jasa audit abnormal, likuiditas, profitabilitas dan *audit client tenure* terhadap *opinion shopping* yang penulis sajikan dalam Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa hanya satu variabel bebas yang berpengaruh positif terhadap *opinion shopping* yaitu likuiditas, sedangkan tiga variabel bebas lainnya yaitu imbal jasa audit abnormal, dan *audit client tenure* tidak berpengaruh positif terhadap *opinion shopping*. Ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya nilai imbal jasa audit abnormal dan profitabilitas serta panjang pendeknya masa perikatan antara auditor dengan manajemen tidak berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan melakukan *opinion shopping*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Salemba Empat: Jakarta
- Arma, Ulkri Endra. 2013. *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada BEI)*. Skripsi, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Astuti, Irtani Retno. 2012. *Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going concern*. Skripsi, Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan.
- Bernardus, Louis dan Fitriany. 2015. *Pengaruh Imbalan Jasa Audit Abnormal Terhadap Opinion Shopping Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Choi, J.H., Kim, F., Kim, J.B. & Zang, Y.S. 2010. *Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing*. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 29(1), 73-97.
- Chen, S., Sun, S. Y. J. dan Wu, D. 2010. *Client importance, institutional improvements, and audit quality in China: An office and individual auditor level analysis*. *The Accounting Review*, 85(1):127–158
- Chow, Chee W. and Steven J. Rice. 1982. *Qualified Audit Opinions and Auditor Switching*. *The Accounting Review*. Vol L VII, Issue 2, 326-335.
- Engel, E., Hayes, R. M., dan Xue, W. 2009. *Audit Committee Compensation and the Demand for Monitoring of the Financial Reporting Process*. *Journal of Accounting and Economics*, 136-154.
- Eisenhardt, Kathleem. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*, 57-74.
- Gavious, I. 2007. *Alternative perspectives to deal with auditor's agency problem*. *Critical Perspectives on Accounting* 18, 451-467
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. BPFE Undip: Semarang

- Hangoluan, Brilliant. 2014. *Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Opinion Shopping, dan Audit Client Tenure terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012)*. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Hanjani, Andreani. 2014. *Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor, Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor KAP di Semarang)*. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Li, Yang, Donald Stokes, Stephen Taylor dan Leon Wong. 2009. *Audit Quality, Earnings Quality, and the Cost of Equity Capital*. School of Accounting University of NSW, Monash University, dan University of Technology, Sydney.
- Lestari, Tri Novi Puji. 2013. *Analisis persepsi auditor mengenai faktor penentu Audit Fee Berdasarkan Client Attributes, Auditor Attributes dan Engagment Attributes (Survey pada KAP di Bandung)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Moore, Don A., Philip E. Tetlock, Lloyd Tanlu, and Max H. Bazerman. 2006. *Conflicts of Interest and the case of auditor independence: moral seduction and strategic issue cycling*. *Academy of Management Review* 31(1): 10-29.
- Nindita, Chairunissa dan Sylvia Veronica Siregar. 2012. *Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 14 No. 2: Universitas Indonesia.
- Nuratama, I Putu. 2011. *Pengaruh Tenur dan Reputasi Kantor Akuntan Publik pada Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2004-2009)*. Tesis: Universitas Udayana.
- Nursasi, Enggar dan Evi Maria. 2015. *Pengaruh Audit Tenure, Opinion Shopping, Leverage, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Perbankan dan Pembiayaan yang Go Public di BEI*. STIE Malangkececwara: Malang.
- Noverio, Rezkhy dan Totok Dewayanto. 2012. *Analisis Pengaruh Kualitas Auditor, Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. Universitas: Semarang.
- Securities and Exchange Commission. 1988. *Disclosure Amendments to Regulation S-K, Form 8-K and Schedule 14A regarding changes in accountants and potential opinion shopping situations*. SEC Financial Reporting Release No.31, Washington, D.C.
- Seetharaman, A., Senthilvelmurugan, V dan Rajan Periyanyagam. 2004. *Anatomy of Computer Accounting Frauds*. *Managerial Auditing Journal*, Vol 19 Issue 8, Pages 1055 – 1072.
- Setyarno, Eko Budi, Indira Januarti, dan Faisal. 2006. *Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern*. Makalah Disampaikan dalam Simposium

Nasional Akuntansi IX. Padang: 23-26 Agustus.

Xie, Z., Chun, C., dan Jianming, Y. 2010. *Abnormal Audit Fees and Audit Opinion - Further Evidence from China's Capital Market*. *China Journal of Accounting Research*, 51-70.

Wanous, J. P., T. L. Keon, and J. C. Latack. 1983. *Expectancy Theory and Occupational/Organizational Choices: A Review and Test*. *Organizational Behavior and Human Performance* 32: 66–86.

PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO KEUANGAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN *DEVIDEN PAYOUT RATIO* TERHADAP *INCOME SMOOTHING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010 - 2015

Ricky Naldo Simare Mare¹, Verawaty², Citra Indah Merina².

Dosen Universitas Bina Darma², Mahasiswa Bina Darma¹

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 12 Palembang

Pos-el: rickynaldo98@gmail.com¹, Verawaty_mahyudin@yahoo.com², CitraIms@yahoo.com²

Abstract : The effect of profitability, company size, financial risks, the managerial ownership structure and dividend payout ratio on income smoothing. This study aims to verify and analyze the effect of profitability, company size, financial risks, the managerial ownership structure and dividend payout ratio on income smoothing. This research was conducted in 5 companies of the 41 companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2015, who were selected through purposive sampling techniques and analytical methods used in this research is multiple regression analysis. The results of this study prove that: (1) profitability has a positive influence on income smoothing, (2) the dividend payout ratio has a negative influence on income smoothing, (3) the size of the company, financial risk, and the structure of managerial ownership has no influence on income smoothing.

Keywords: Profitability, Company Size, Financial Risk, Managerial Ownership Structure, Dividend Payout Ratio, Income Smoothing

ABSTRAK : Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, struktur kepemilikan manajerial dan *dividen payout ratio* terhadap *income smoothing*. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, struktur kepemilikan manajerial dan *dividen payout ratio* terhadap *income smoothing*. Penelitian ini dilakukan pada 5 perusahaan dari 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2015, yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: (1) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *income smoothing*, (2) *dividen payout ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap *income smoothing*, (3) ukuran perusahaan, risiko keuangan, dan struktur kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *income smoothing*.

Kata kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Risiko Keuangan, Struktur Kepemilikan Manajerial, *Dividen Payout Ratio*, *Income Smoothing*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penilaian kinerja perusahaan maupun kinerja manajemen merupakan salah satu penilaian yang dilakukan oleh para investor. Dimana, investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik sehingga investor dapat memperoleh pengembalian modal atas investasi yang dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan investor dalam menilai kinerja perusahaan dan kinerja manajemen adalah dengan menilai tingkat laba

perusahaan. Hal tersebut karena tingkat laba perusahaan yang dilaporkan dianggap bukanlah tingkat laba perusahaan yang sebenarnya. Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui berbagai cara akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan, tidak terkecuali penerapan perataan laba oleh suatu perusahaan.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah ukuran perusahaan. Besarnya aktiva

perusahaan sangat menentukan ukuran perusahaan. Hal tersebut karena apabila suatu perusahaan memiliki total aktiva besar maka perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang baik dan lebih mampu menghasilkan laba daripada dengan total aset kecil.

Resiko keuangan adalah resiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Menurut Bitner dan Dolan (1996) dalam Widyaningdyah (2001) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki risiko keuangan yang tinggi yang menyebabkan manajemen cenderung untuk tidak melakukan perataan laba karena perusahaan tidak ingin membuat sesuatu yang membahayakan di dalam jangka panjang.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi perataan laba adalah struktur kepemilikan manajerial. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat menekan masalah keagenan, dan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri dengan mengurangi resiko keuangan perusahaan melalui penurunan tingkat hutang.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi perataan laba adalah *dividen payout ratio*. Rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*) menentukan jumlah laba yang dapat ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen.

Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba?
3. Apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap perataan laba?
4. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap perataan laba?
5. Apakah *dividen payout ratio* berpengaruh terhadap perataan laba?

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Penelitian

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *income smoothing* (perataan laba). Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, dan kepemilikan manajerial.

Definisi Operasional

Variabel Dependen

Perataan laba dapat dihitung menggunakan *Indeks Eckel*. *Indeks Eckel* menggunakan *coefficient variation* (CV) untuk variabel laba dan variabel penjualan bersih. *Indeks Eckel* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks perataan laba} = \frac{CV\Delta I}{CV\Delta S}$$

Perusahaan dianggap sebagai perataan laba apabila *indeks Eckelnya* lebih kecil dari 1 dan dianggap bukan perataan laba apabila *indeks Eckelnya* lebih dari 1. Variabel ini merupakan variabel *dummy*, perusahaan perataan diberi nilai 1, sementara perusahaan bukan perataan laba diberi nilai 0.

Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:

1. Profitabilitas

Rumus dalam menghitung *Return on Asset*, (Munawir, 2004) adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Ukuran Perusahaan

Purwanto, (2004) dalam Ratnasari, (2012) meneliti bahwa pengukuran perusahaan berdasarkan total aset dengan rumus:

$$SIZE = \text{Log}(\text{Total Asset})$$

3. Risiko Keuangan

Menurut Syamsuddin (2006:30) *Debt to Total Assets Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang.

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajemen diukur dengan proporsi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajerial (Mudrajat, (2003) dalam Amanza, (2012).

$$KM = \frac{\text{jumlah saham manajerial}}{\text{total saham beredar}} \times 100\%$$

5. *Deviden Payout Ratio*

Deviden payout ratio diukur dengan membandingkan antara *dividend per share* dengan *earning per share* dengan rumus :

$$DPR = \frac{\text{Devidend per share}}{\text{Earning per share}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 – 2015. Berdasarkan Indonesia *Stock Exchange* (IDX), terdapat 41 perusahaan pertambangan.

Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2015.
2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) periode 2010 – 2015.
3. Perusahaan yang memiliki nilai ROA negative
4. Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial
5. Perusahaan yang tidak membagikan deviden

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena penelitian ini berdasarkan data skunder yang diperoleh dari *annual report* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015. *Annual report* perusahaan diperoleh dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi.

Metode Analisis

Statistik Deskriptif

Gambaran atau deskripsi suatu data dapat dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

Uji Asumsi Klasik

Pengukuran asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi.

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian regresi melalui aplikasi model penelitian berikut ini:

$$IS = \alpha_0 + \beta_1 ROA + \beta_2 Size + \beta_3 LEV + \beta_4 KM + \beta_5 DPR + \epsilon_i$$

Keterangan :

IS = Perataan Laba, ROA = Profitabilitas, Size = Ukuran Perusahaan, DAR = *Debt to Total Asset Ratio*, KM = Struktur Kepemilikan Manajerial, DPR = *Deviden Payout Ratio*, ϵ = Error

Uji Hipotesis

Uji t

Uji F

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2015 yang diperoleh dari situs resmi yang dimiliki BEI, yaitu www.idx.co.id.

Deskripsi Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Profitabilitas

Pada tabel 4.2 dibawah, Perusahaan yang memiliki tingkat ROA tertinggi yaitu Indo Tambangraya Megah Tbk pada tahun 2011 sebesar 0.4478. Adapun perusahaan dengan tingkat ROA terendah yaitu Radiant Utama Interinsco Tbk pada tahun 2011 sebesar 0.0033.

Ukuran Perusahaan

Pada tabel 4.3 dibawah, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan tertinggi yaitu Adaro Energy Tbk tahun 2013 sebesar 31.8351. Adapun perusahaan dengan ukuran perusahaan terendah yaitu Radiant Utama Interinsco Tbk tahun 2010 sebesar 27.1117.

Risiko Keuangan

Pada tabel 4.4 dibawah, Perusahaan yang memiliki DAR tertinggi yaitu Radiant Utama Interinsco Tbk pada tahun

2010 sebesar 2.4555. Adapun perusahaan dengan DAR terendah yaitu Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk pada tahun 2010 sebesar 0.2616.

Struktur Kepemilikan Manajerial

Pada tabel 4.5 dibawah, Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan manajerial tertinggi yaitu Radiant Utama Interinsco Tbk pada tahun 2015 sebesar 0.379975. Adapun perusahaan dengan struktur kepemilikan manajerial terendah yaitu Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk pada tahun 2013 dengan nilai sebesar 0.000026. Dari

Devident Payout Ratio

Pada tabel 4.6 dibawah, Perusahaan yang memiliki DPR tertinggi yaitu Petrosea Tbk tahun 2014 sebesar 6.8795. Adapun perusahaan dengan DPR terendah yaitu Radiant Utama Interinsco Tbk tahun 2014 sebesar 0.1037.

Deskripsi Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Income Smoothing (Perataan Laba)

Pada tabel 4.7 dibawah, Perusahaan yang memiliki IS tertinggi yaitu Indo Tambangraya Megah Tbk sebesar 1.7757. Adapun perusahaan dengan IS terendah yaitu Radiant Utama Interinsco Tbk sebesar 0.3390.

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel penelitian, terlihat bahwa dari 30 sampel yang berasal dari 5 perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian, variabel IS mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.8343 dengan standar deviasi sebesar 0.5195, nilai minimum sebesar 0.3390 dan nilai maksimum sebesar 1.7757

ROA mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.1192 dengan standar deviasi sebesar 0.1102, nilai minimum sebesar 0.0033 dan nilai maksimum sebesar 0.4478 yang

SIZE mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29.7530 dengan standar deviasi sebesar 1.3858, nilai minimum sebesar 27.1117 dan nilai maksimum sebesar 31.8351.

DAR mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.5621 dengan standar deviasi sebesar 0.3936968, nilai minimum sebesar 0.2616 dan nilai maksimum sebesar 2.4555.

KM mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.103004 dengan standar deviasi sebesar 0.1184, nilai minimum sebesar 0.000026 dan nilai maksimum sebesar 0.379975.

DPR mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.1409 dengan standar deviasi sebesar 1.4676, nilai minimum

sebesar 0.1037 dan nilai maksimum sebesar 6.8795.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada tabel 4.9 terlihat bahwa angka signifikan yang diperoleh nilai sig sebesar 0.412 (41.2%). Karena nilai sig 41.2% > 5% maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10 merupakan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel bebas (profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, struktur kepemilikan manajerial, dan *devident payout ratio*) masing – masing mempunyai nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar varibel bebas dalam model regresi ini.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, struktur kepemilikan manajerial, dan *devident payout ratio*) memiliki nilai sig \geq 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pada tabel 4.12, hasil pengujian diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 0.859.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Pada tabel 4.13 diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar 0.608 atau 60.8% yang berarti pengaruh variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, struktur kepemilikan manajerial, dan *devident payout ratio*) secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen (*income smoothing*) hanya sebesar 60.8% dan sisanya ($100\% - 60.8\% = 39.2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Pada tabel 4.14 diperoleh nilai sig $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya, model penelitian variabel independen (profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, struktur kepemilikan manajerial, dan *devident payout ratio*) layak digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Hasil pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 22 pada tabel 4.15 diperoleh hasil:

- 1 Variabel profitabilitas perusahaan (X1) diperoleh nilai sig $0.010 \leq 0,05$ dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak.

- 2 Variabel ukuran perusahaan (X2) diperoleh nilai sig $0,500 \geq 0,05$ dengan demikian H_o diterima dan H_a ditolak.
- 3 Variabel risiko keuangan (X3) diperoleh nilai sig $0,229 \geq 0,05$ dengan demikian H_o diterima dan H_a ditolak.
- 4 Variabel struktur kepemilikan manajerial (X4) diperoleh nilai sig $0,007 \leq 0,05$ dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak dengan nilai beta negatif.
- 5 Variabel *devident payout ratio* (X5) diperoleh nilai sig $0,895 \geq 0,05$ dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima.

Pembahasan

Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap *Income Smoothing*

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Buadiah (2006) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba.

Sehingga dengan semakin baiknya ROA suatu perusahaan menyatakan bahwa semakin baik kinerja perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki begitu pula sebaliknya. Hal tersebut sama dengan *income smoothing* yang merupakan tindakan manajemen dalam meratakan laba perusahaan agar terlihat

baik. Sehingga dengan semakin baiknya laba perusahaan maka anggapan bahwa perusahaan tersebut mengelola laba dari aset yang dimiliki akan semakin baik.

Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap *Income Smoothing*

Hasil pengujian hipotesisi kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanza (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap perataan laba.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin mampu meminimalisir risiko yang dihadapi begitupula sebaliknya. Perataan laba yang dilakukan manajemen tersebut bukan karena ukuran perusahaan melainkan karena tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga besar kecilnya ukuran suatu perusahaan bukan merupakan dasar bagi manajemen dalam melakukan praktik perataan laba di dalam perusahaan.

Risiko Keuangan Berpengaruh Positif terhadap *Income Smoothing*

Hasil pengujian hipotesisi ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil analisis tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanza (2012) yang

menyatakan bahwa risiko keuangan berpengaruh positif terhadap perataan laba.

Dalam praktik perataan laba dimana tingkat laba yang dihasilkan perusahaan memiliki trend yang baik dari satu periode ke periode berikutnya yang memberikan sinyal positif bagi pihak eksternal dalam menilai perusahaan. Hal tersebut karena laba perusahaan dianggap baik. Dengan demikian maka kepercayaan investor akan meningkat sehingga risiko keuangan yang dihadapi perusahaan akan semakin kecil.

Struktur Kepemilikan Manjerial Berpengaruh Positif terhadap *Income Smoothing*

Hasil pengujian hipotesisi keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanza (2012) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perataan laba.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindakan praktik perataan laba yang dilakukan oleh manajemen bukan karena manajemen memiliki saham perusahaan melainkan karena manajemen ini memperlihatkan bahwa laba perusahaan baik agar kinerja manajemen juga dianggap baik.

Devident Payout Ratio Berpengaruh Positif terhadap Income Smoothing

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budiasih (2006) yang menyatakan bahwa *devident payout ratio* berpengaruh signifikan terhadap *income smoothing*.

Pembagian deviden merupakan kebijakan dari manajemen, apabila manajemen menetapkan bahwa pada suatu periode akan dibagikan deviden maka deviden tersebut akan dibagikan kepada investor meskipun pada periode tersebut tidak menghasilkan laba begitupula sebaliknya. Oleh karena itu, dengan demikian maka besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan tidak akan mempengaruhi deviden yang akan dibagikan kepada investor. Hal tersebut karena pembagian deviden merupakan kebijakan dari pihak manajemen.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko keuangan, struktur kepemilikan manajerial dan *deviden payout ratio* terhadap perataan laba (*income smoothing*) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek

Indonesia tahun 2015, yang penulis sajikan dalam Bab IV, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *income smoothing*.
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel struktur kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negative terhadap *income smoothing*.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan, risiko keuangan, dan *devident payout ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *income smoothing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanza, Arya Hagaganta. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2006-2010)*. Skripsi. FE. Universitas Diponegoro.
- Budiasih. 2006. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik PerataanLaba". AUDI Jurnal

- Akuntansi dan Bisnis, 4 (1), Januari 2009, Hal: 44-50.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali.I. Chariri. A. 2007. *Teori Akuntansi. Edisi Ketiga*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Munawir, 2004. *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Keempat, cetakan ketigabelas. Liberty. Yogyakarta.
- Ratnasari, Dhiar. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007-2010*. Jurnal Universitas Diponegoro: Semarang.
- Richardson, Vernon J. 1998. *Information Asymmetry and Earning Management: Some Evidence*. Working Paper.
- Syamsuddin, Lukman. 2006. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tarjo, 2008. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Instutisional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham Serta Cost of Equity Capital*. Simposium Nasional Akuntansi 11.
- <http://www.idx.co.id/idid/beranda/perusahaan/tercatat/laporankeuangandantahunan.aspx> diakses tanggal 15 November 2016.

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2012-2015

Risna Hardianti¹, Fitriasuri², Andrian Noviardy²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el: risnarisna@gmail.com, Fitriasuri@binadarma.ac.id ,
Andrian.noviardy@binadarma.ac.id

ABSTRACT: This study aims to determine the level of effectiveness, contribution and growth of public roadside parking charges to income levies Palembang year 2012 -2015 and how the realization of cost trend forecasting public roadside parking Palembang years 2017-2019. The selected data is secondary data and primary data. Data were obtained by interview and documentation. Technical analysis of the data used is a technical analysis of quantitative data and qualitative data analysis techniques. The results showed (1) the effectiveness of roadside parking retribution common in Palembang from 2012 until 2015 to reach an average of 78.24% per year, which shows the effectiveness of the parking levy receipts can not be said to be effective (2) contributions common roadside parking charges to income fluctuated levies and categorized very less, which is the average - average of 5.89%. (3) the growth retribution roadside parking public in 2012, 2014, 2015 experienced growth in 2013, while no growth. (4) Realization of trend forecasting public roadside parking fees Palembang from year 2017 to 2019 continued to increase.

Keywords: Effectiveness and Contributions, Levy Parking Bank Public Roads, Local charges

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan retribusi daerah Kota Palembang tahun 2012 -2015 dan bagaimana realisasi biaya tren peramalan parkir tepi jalan umum Kota Palembang tahun 2017-2019. Data yang dipilih adalah data sekunder dan data primer. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kuantitatif dan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) efektivitas penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mencapai rata-rata sebesar 78,24% per tahunnya, hal ini menunjukkan efektivitas penerimaan retribusi parkir tidak dapat dikatakan efektif (2) kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan retribusi daerah mengalami fluktuasi dan dikategorikan sangat kurang, yaitu rata-rata sebesar 5,89%. (3) pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2012, 2014, 2015 mengalami pertumbuhan sedangkan tahun 2013 tidak mengalami pertumbuhan. (4) Realisasi tren peramalan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Palembang dari tahun 2017-2019 terus meningkat.

Kata Kunci : Efektivitas dan Kontribusi, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi daerah

1. PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu Negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Dengan demikian

pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah atau kota lebih dituntut untuk

menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya. Salah satu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah retribusi daerah. Salah satu alternative retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan retribusi daerah adalah retribusi parkir.

Retribusi Parkir sebagai salah satu sumber retribusi daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Palembang. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kota Palembang mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan maupun diluar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik roda dua maupun roda empat sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi di lokasi parkir tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Pemerintah Kota Palembang berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi

parkir tepi jalan umum yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut serta dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan Pemerintah Kota Palembang dari pos penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan retribusi daerah, kontribusi, laju pertumbuhan dan trend peramalan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sementara Retribusi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. objek retribusi daerah terdiri dari tiga yaitu:

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu

Pemungutan Retribusi Daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan dibawah ini .

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- c. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- d. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.
- f. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2.2 Pengertian Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Parkir ditepi jalan umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 adalah orang pribadi dan / atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum.

2.3 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sarana dan tata cara pemungutan retribusi yaitu Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

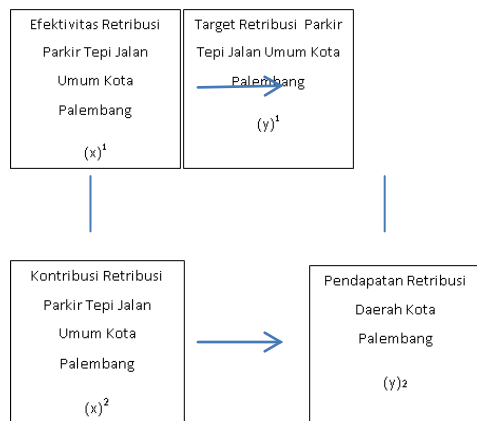
2.4 Penelitian Terdahulu

P. Heru Prasetyo (2008) dengan penelitian yang berjudul Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2003-2006 mengungkapkan bahwa pada tahun 2004 dan 2005 menunjukkan pertumbuhannya positif sedangkan tahun 2006 negatif, efektivitas dari tahun 2003 -

2006 mencapai 85,34% pertahun hal ini menunjukkan penerimaan retribusi parkir di Yogyakarta tidak efektif dan kontribusi mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Rahmawati Widya Putri (2015) Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang menunjukkan Kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten sumber sendiri Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh pembaharuan peraturan daerah tentang pengumuman resmi kebijakan biaya parkir dan Pertumbuhan retribusi parkir mengalami fluktuasi sedangkan tingkat efektivitas Retribusi Parkir tergolong efektif. Sementara Realisasi tren peramalan biaya parkir Kabupaten Malang di 2015-2019 terus meningkat.

2.5 Paradigma Penelitian



Gambar 1 Paradigma Penelitian

2.5 Kerangka Pemikiran

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era

otonomi daerah sekarang ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang,

khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu sektor yang memberi kontribusi pendapatan daerah yang cukup besar adalah retribusi jasa umum dimana termasuk retribusi parkir tepi jalan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Parkir adalah keadaan tidak bergeraknya suatu kendaraan dan Retribusi parkir adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkirkan kendaraan di badan jalan, dan ruang atau tempat parkir. Kehadiran parkir tepi jalan umum di Kota Palembang selain diharapkan dapat merumuskan strategi untuk mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kota dalam Pendapatan Asli Daerah. Tentu saja ada hambatan-hambatan dalam permasalahan perparkiran, salah satunya adalah terbatasnya tempat parkir, karena semakin tahun semakin banyak kendaraan maka semakin banyak pula kendaraan tersebut membutuhkan tempat untuk parkir saat beraktivitas. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam menangani masalah-masalah tersebut.

Mekanisme kerja dalam proses pengumpulan retribusi parkir di seluruh parkir tepi jalan umum di Kota Palembang

adalah sama dimana pertama para juru parkir mengambil karcis yang telah disiapkan dan diberikan oleh bagian administrasi kepada koordinator parkir. Kemudian para juru parkir menarik retribusi kepada pengunjung yang parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis. Para juru parkir menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada koordinator parkir sesuai dengan jumlah karcis yang keluar, setelah itu koordinator parkir menyerahkan kepada bagian administrasi yang kemudian bagian administrasi melaporkan hasil pungutan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan dan pada akhirnya masuk ke Kas Daerah. Untuk memperoleh penerimaan yang sesuai dengan target maka pengelola harus memperhatikan faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian target retribusi parkir, serta mengambil keputusan. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut serta dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi parkir tepi jalan umum Kota Palembang.

3 METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Dalam penyusunan penelitian ini dapat dilakukan pengumpulan data-data yang memiliki hubungan dengan pokok masalah yang dibahas. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Teknik pengumpulan menggunakan :

- a. wawancara
- b. observasi

3.2 Teknis Analisis data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2011:115). Untuk menjawab permasalahan-masalah yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk menyimpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Efektivitas

untuk menjawab permasalahan pertama yaitu efektifitas dari penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Palembang tahun 2011 sampai dengan 2015, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

b. Kontribusi

Untuk menjawab permasalahan kedua yaitu untuk mengetahui besarnya Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Retribusi Daerah digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Jumlah Retribusi Parkir}$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah}}{100\%} \times$$

c. Pertumbuhan

Untuk menjawab permasalahan ketiga yaitu penerimaan pertumbuhan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Palembang tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x : Pertumbuhan (rate of growth) retribusi parkir

X_t : Besarnya retribusi parkir pada tahun tertentu

X(t-1) : Tahun sebelum tahun perhitungan

d. Analisis Trend

Untuk menjawab permasalahan keempat yaitu tren peramalan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Palembang tahun 2016-2018 digunakan rumus sebagai berikut :

Metode yang digunakan yaitu metode jumlah kuadrat terkecil (Least Square Method).

$$Y_t = a + b \cdot x$$

XY

$$b = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{n}}{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}$$

Keterangan :

Y_t : variabel dependen yang di cari trendnya

a : konstanta

b : parameter

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan skripsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Efektivitas

Tabel 1

Efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2012-2015

Tahun	Realisasi (Rupiah)	Target (Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria
2012	5.723.129	11.555.000	49,54%	Tidak Efektif
2013	5.253.836	6.297.000	83,43%	Cukup Efektif
2014	6.322.212	7.241.500	87,30%	Cukup Efektif
2015	6.713.224	7.241.500	92,70%	Efektif
Rata – rata			78,24%	Cukup Efektif

if

sumber : data diolah

Tabel diatas menunjukkan efektivitas penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang pada tahun 2012,2013,2014 dan 2015 tidak dapat dikatakan efektif karena efektivitasnya kurang dari 100%, yaitu sebesar 49,54% (tidak efektif) pada tahun 2012; 83,43% (cukup efektif) pada tahun 2013; 87,30% (cukup efektif) pada tahun 2014; 92,70% (efektif) pada tahun 2015. Rata-rata setiap tahun sebesar 78,24% (cukup efektif).

4.2 Analisis Kontribusi

Tabel 2

Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2012 – 2015.

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	5.723.8	106.509.	5,37 %	Sangat kurang
2013	11.192	830.739		
2014	5.253.8	118.616.	4,43 %	Sangat kurang
2015	36.863	385.724		
2014	6.322.2	84.875.3	7,45 %	Sangat kurang
2015	12.321	48.555		

2015	6.713.2	106.312.	6,31 %	Sangat kurang
Rata – Rata			5,89 %	Sangat kurang

sumber : data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata – rata kontribusi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan retribusi daerah dari tahun 2012 – 2015 sebesar 5,89%, pada tahun 2012 sebesar 5,37% (sangat kurang), pada tahun 2013 sebesar 4,43% (sangat kurang), pada tahun 2014 sebesar 7,45% (sangat kurang) dan pada tahun 2015 sebesar 6,31% (sangat kurang).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kontribusi pada tahun 2012 – 2015 setiap tahunnya hanya berkontribusi rata-rata sebesar 5,89% (sangat kurang). Hal tersebut disebabkan kontribusi retribusi hanya dari satu jenis kontribusi parkir saja dibagi dengan empat puluh jenis retribusi. Dari empat puluh jenis retribusi tersebut yang terbesar adalah retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 86.159.301.412, dengan kriteria kontribusi 72,64% (sangat baik).

4.3 Analisis Pertumbuhan

Tabel 3

Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2012-2015

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
-------	-----------	-----------------

2012	5.723.811.192	28,69%
2013	5.253.836.863	(8,21%)
2014	6.322.212.321	20,34%
2015	6.713.224.000	6,18%
Rata - Rata		11,75%

Sumber : data diolah

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kota Palembang pada tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 28,69%. Pada tahun 2013 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum menunjukkan penurunan yang negatif, yaitu sebesar (8,21%). Selanjutnya pada tahun 2014 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 20,34%. Dan pada tahun 2015 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 6,18% yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,18% dari tahun 2014. Kenaikan ini disebabkan kinerja Dinas Perhubungan UPTD pengelolaan perparkiran yang semakin baik dan. Selain itu pesatnya jumlah kendaraan di Kota Palembang juga mendukung tingginya penerimaan retribusi parkir. Dan untuk tahun 2013 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,21% hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan perparkiran sehingga pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang negatif, sehingga pihak pengelola diharapkan lebih mengoptimalkan

pengelolaan retribusi parkir. Rata – rata pertumbuhan penerimaan retribusi parker tepi jalan umum tahun 2012 – 2015 sebesar 11,75%.

4.4 Analisis Trend

Tabel 4
Perhitungan Trend

Tahun	Y	T	t	T2
2012	5.723.811.192	1	1	5.723.811.192
2013	5.253.836.863	4	2	10.507.673.726
2014	6.322.212.321	9	3	18.966.636.963
2015	6.713.224.000	16	4	26.852.896.000
2016	24.013.084.376	30	1	62.051.017.881

Sumber : Data diolah

$$b = \frac{24.013.084.376 \times 10) - 62.051.017.881}{4} = \frac{2.018.306.941}{5} = 403.661.388,2$$

$$a = \frac{24.013.084.376}{4} - 403.661.388,2 = 6.003.271.094 - 1.009.153.470,5 = 4.994.117.623,5$$

Perkiraan persamaan trend adalah $y = 4.994.117.623,5 + 403.661.388,2t$

Tabel 5
Trend
Peramalan Realisasi Retribusi Parkir Tepi
Jalan Umum
Tahun 2017-2019

Tahun	Trend Realisasi
2017	7.416.085.952,7
2018	7.819.747.340,9
2019	8.223.408.729,1

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk tahun masa yang akan datang menggunakan analisis trend peramalan yaitu tahun 2017 sebesar Rp. 7.416.085.952,7; tahun 2018 sebesar Rp. 7.819.747.340,9; dan tahun 2019 sebesar Rp. 8.223.408.729,1. Hal ini menunjukkan setiap tahunnya penerimaan retribusi mengalami peningkatan. Adapun hal ini tidak lepas dari semakin tingginya jumlah penduduk menurut badan pusat statistik Kota Palembang tahun 2015 sebesar 1.558.491 jiwa yang didukung dengan kebutuhan terhadap kendaraan sepeda motor yang meningkat dan potensi titik parkir yang semakin bertambah. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk Dinas Perhubungan menjadi tolak ukur dalam mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dimasa yang akan datang pihak pengelola perparkiran dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum setiap tahunnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dalam bab IV penerimaan

retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang tahun 2012 - 2015 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Palembang tahun 2012 – 2015 tidak dapat dikatakan efektif karena rata-rata efektivitasnya kurang dari 100% yaitu sebesar 78,24% (cukup efektif)
2. Rata-rata kontribusi yang diberikan retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan retribusi daerah tahun 2012 – 2015 sebesar 5,89% yang dikategorikan sangat kurang karena hanya mencapai rasio 0,00% - 10,00%. Hal tersebut disebabkan yang memberikan kontribusi hanya satu jenis retribusi saja terhadap empat puluh jenis retribusi, yang paling tinggi jenis retribusi yang berkontribusi dari empat puluh jenis tersebut adalah retribusi izin mendirikan bangunan sebesar 72,64% (sangat baik)
3. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2012 sebesar 28,69%, 2013 sebesar - 8,21% (tidak ada pertumbuhan), 2014 sebesar 20,34% (mengalami pertumbuhan), dan tahun 2015 sebesar 6,18% (mengalami pertumbuhan). Pada tahun 2013 tidak ada pertumbuhan atau negatif disebabkan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan perparkiran antara lain juru parkir sering tidak hadir dan tidak jujur untuk menyetorkan kewajibannya.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dikarenakan:

- 1) Penetapan target yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan resiko tidak tepungutnya retribusi parker
- 2) Banyaknya tempat titik parkir yang tidak sebanding dengan petugas pengawas
- 3) Kurangnya disiplin dari juru parkir karena sering tidak berjaga sehingga menyebabkan turunnya setoran yang diberikan
- 4) Adanya tindakan manipulasi penerimaan pungutan uang parker
- 5) Maraknya preman yang meminta setoran parkir dari juru parkir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan memperingatkan UPTD pengelolaan perparkiran untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum agar kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan retribusi daerah tahun berikutnya bertambah.
2. Kepala Dinas Perhubungan khususnya UPTD pengelolaan perparkiran untuk lebih meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk tahun berikutnya
3. UPTD pengelolaan perparkiran diharapkan agar selalu bekerja lebih baik dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir agar setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang positif
4. Kepala Dinas Perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru

parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, jangan sampai ada jukir yang tidak jujur yang mengabaikan aturan sehingga merugikan target penerimaan retribusi daerah dan menguntungkan oknum-oknum tertentu saja. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR REFERENSI

- J. Supranto 2016. Statistik : Teori dan Aplikasi Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga.
- Kumaladewi, Mieke, 2015. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok. Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Mardiasmo 2016, Perpajakan, Penerbit Andi, Jakarta.
- Novia, Della, 2014. Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012. Jurnal, Universitas Mulawarman Kota Samarinda.
- Priantara, Diaz 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi.

Prasetyo, P. Heru, 2008, Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Putri, Rahmawati Widya 2016, Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

Republik Indoneisa, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.

Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sanusi, Anwar 2011, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.

Sulistiyarningsih, Harum 2008, Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebelum dan Sesudah Perda No. 19

Tahun 2002 Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

REKONSILIASI FISKAL PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. FANTASI JAYA MAKMUR ABADI PALEMBANG

Rizkia Novparani¹, Siti Nurhayati Nafsiah, S.E., M.Si², Yeni Widyanti, S.E., M.Ak³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Jalan Ahmad Yani No.12, Seberang Ulu Kota Palembang
rizkianovarani@gmail.com, yeniwidianti@binadarma.ac.id, siti_nurhayati@binadarma.ac.id,
Jaya_ade@yahoo.co.id,

ABSTRACT : The purpose of this study was to determine the value of income tax payable by the company to reconcile the commercial financial statements into the financial statements of the fiscal. By doing reconciliation, companies do not need to make two sets of records for different purposes. Company corrects enough to posts that are not in accordance with tax regulations. Positive adjustments will increase taxable income, whereas negative correction will reduce taxable income. Writing method use is descriptive quantitative method is a research is to understand about what is experienced by the object of research is based on figures for the correction of fiscal positively and negatively on the financial statements of the company, whether the application of income and expense have been prepared in accordance with the principles of Fiscal (according to Law No.36 of 2008). The results of this study concluded that there is a difference between profit and loss according to the commercial with the profit and loss of fiscal. This difference occurs because the fiscal correction of the costs and revenue in the commercial financial statements based on tax regulations.

Keywords: Income Tax, Commercial Financial Statements, Financial Reports Fiscal Fiscal Correction.

ABSTRAK : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan nilai pajak penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan berbeda. Perusahaan cukup mengoreksi terhadap pos-pos yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif akan menambah penghasilan kena pajak, sedangkan koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Metode penulisan yang digunakan adalah metode Deskriptif Kuantitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh objek penelitian berdasarkan angka-angka untuk dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif terhadap laporan keuangan perusahaan, apakah penerapan pendapatan dan biaya telah disusun menurut prinsip-prinsip Fiskal (menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba-rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting dalam negeri yang sangat diandalkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Salah satunya merupakan pajak yang disetorkan oleh perusahaan adalah pajak penghasilan badan yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari

dalam negeri maupun di luar negeri. Kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang

menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditujukan untuk pihak intern dan ekstern.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (komersial) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode penyusutan dapat memilih salah satu sesuai dengan PSAK No. 16 tahun 2007 yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Suandy, 2010:75). Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan tersebut sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan

keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan Badan pada PT. Fantasi Jaya Makmur Abadi Palembang”**.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Henry (2013:7), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK (2007) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2.3 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

2.4 Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2012:272), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak perusahaan (penghasilan objek pajak tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

2.5 Penyusutan dan Amortisasi

Metode penyusutan yang dipergunakan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) dan (2) adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode penyusutan tersebut.

2.6 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Dalam hal ini koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Koreksi Fiskal Positif
Menurut Anastasia Diana (2010:362), koreksi fiskal positif adalah koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar. Rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.
- b. Koreksi Fiskal Negatif
Menurut Anastasia Diana (2010:362), koreksi fiskal negatif adalah koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan

penghasilan kena pajak bertambah kecil. Rekonsiliasi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Operasional Variabel

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Rekonsiliasi Fiskal, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, dan masih harus diolah lagi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Berikut ini disajikan laporan keuangan perusahaan tahun 2015 :

Tabel 4.1

Uraian	Laba Rugi menurut UU Pajak Sebelum Rekonsiliasi Fiskal	
	Laba Rugi Komersial	
A. Pend. Usaha		
- Pendapatan	1.942.565.000	1.942.565.000
Jumlah Pendapatan	1.942.565.000	1.942.565.000
<u>HPP</u>		
Persediaan Awal	7.550.000	7.550.000
Pembelian	44.037.500	44.037.500
Barang Tersedia	51.587.500	51.587.500
Persediaan Akhir	(15.250.000)	(15.250.000)
HPP	36.337.500	36.337.500

Laba Kotor	1.906.227.500	1.906.227.500	-Biaya Adm Bank	385.451.970	385.451.970
B. Biaya Usaha			Jumlah Pend. Diluar Usaha		
-Beban Makan/Minum	2.156.500	2.156.500	Laba Sblm Pajak	44.363.130	44.363.130
-Beban Listrik	359.454.064	359.454.064	Pajak Penghasilan	48.718.682	48.718.682
-Honor	754.650.000	754.650.000	Laba Setelah Pajak	(716.245)	(716.245)
-Beban BBM	9.650.000	9.650.000			
-Beban Asuransi	18.000.000	18.000.000		92.365.567	92.365.567
-Beban Kendaraan				477.817.537	477.817.537
-Pemeliharaan Wahana	2.480.000	2.480.000		119.454.384	119.454.384
-Beban Kantor				358.363.153	358.363.153
-Pajak Daerah	46.956.000	46.956.000			
-Biaya Promosi	6.219.800	6.219.800	4.2 Analisis dan Pembahasan		
-Beban Logistik	215.117.803	215.117.803	4.2.1 Pemilihan Metode Penyusutan		
-Biaya Peny. Bangunan	3.874.500	3.874.500	Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) dan (2) adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Perusahaan menilai aset tetap berdasarkan harga perolehannya dan disusutkan secara garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat menurut kebijakan perusahaan dan yang disesuaikan dengan aturan perpajakan serta dicatat sebesar penyusutan untuk periode yang bersangkutan. Beban penyusutan dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan perpajakan untuk setiap jenis aset dan diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam tahun buku yang bersangkutan.		
-Biaya Peny. Perlengkapan Arena	27.159.889	27.159.889			
-Biaya Peny. Mesin					
-Biaya Peny. Kendaraan	46.048.324	46.048.324			
-Biaya Peny. Peralatan Kantor	7.161.250	7.161.250			
Jlh By Usaha					
Laba Usaha	4.625.000	4.625.000			
C. Pend. Diluar Usaha	332.400	332.400	4.2.2 Pemilihan Metode Pencatatan Akuntansi		
-Pend. Jasa Giro	1.520.775.530	1.520.775.530	Terdapat dua metode pencatatan akuntansi, yaitu Kas Basis dan Akruwal Basis. Kas Basis adalah basis akuntansi yang		
-Pend. Lain-lain					

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan. Sedangkan Akrua Basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. PT. Fantasi Jaya Makmur Abadi Palembang menggunakan Kas Basis dalam pencatatan akuntansi, dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya akan diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Beban atau biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan. Hal ini menyebabkan laba perusahaan yang tinggi yang berdampak dalam peningkatan PPh terutang. Selain itu, dengan menggunakan metode Kas Basis, perusahaan akan kesulitan dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar serta timbulnya kesulitan manajemen dalam menentukan kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan pada kas.

4.2.3 Koreksi atas Perhitungan Aset Tetap

Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aset tetap perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1). Perhitungan yang dilakukan menggunakan tarif dan kelompok aset serta masa manfaat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009. Namun dalam perhitungan beberapa jenis aset, perusahaan melakukan kesalahan pencatatan, sehingga besarnya penyusutan yang dicatat berbeda dengan jumlah yang

seharusnya. Berikut ini akan disajikan koreksi terhadap kesalahan perhitungan penyusutan tersebut :

Tabel 4.2

Koreksi Atas Perhitungan Penyusutan Aset Tetap berupa Perlengkapan Arena

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Penyusutan
I Harta Berwujud			
(Bangunan Tidak Tetap)			
		53.960.970	5.396.097
1.	Water Treatment	141.941.435	14.194.144
2.	Water Boom	45.631.350	4.536.135
3.	Bun Slide	100.348.850	10.034.885
4.	Kolam Renang	240.921.650	24.092.165
5.	Kolam Arus dan Play Pool		
	Total	582.804.255	58.253.426
II Harta Berwujud			
(Bukan Bangunan Kelompok 1)			
		44.598.680	11.149.670
1.	Sky Train	36.393.525	9.098.381
2.	Go-Kart	35.168.180	8.792.045
3.	Go-Kart II	112.500.000	28.125.000
4.	Battery Car	57.500.000	14.375.000
5.	Water Bike	52.000.000	13.000.000
6.	ATV		

Total	338.160.385	84.540.096	UP
			1. Suzuki APV
			25.000.000
			6.250.000

Tabel 4.3

Koreksi Atas Perhitungan Penyusutan Aset Tetap			
			2.
			67.500.000
			16.875.000
		Total	92.500.000
			23.125.000

berupa Mesin dan Perlengkapan

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Penyusutan
	Harta Berwujud		
	(Bukan Bangunan Kel. 1)		
	Pompa Air		
1.	Pompa Keong		
2.	Genset	5.125.000	1.281.250
3.		12.600.000	3.150.000
		125.500.000	31.375.000
	Total	143.225.000	35.806.250

Tabel 4.4

Koreksi Atas Perhitungan Penyusutan Aset Tetap berupa Kendaraan

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Penyusutan
	Harta Berwujud		
	(Bukan Bangunan Kel. 1)		
	Kijang Pick		

Tabel 4.5

Koreksi Atas Perhitungan Penyusutan Aset Tetap berupa Perlengkapan Kantor

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Penyusutan
	Harta Berwujud		
	(Bukan Bangunan Kel. 1)		
	Komputer & Printer		
1.		6.648.000	1.662.000
	Total	6.648.000	1.662.000

Sumber : Data yang diolah penulis

Dari hasil perhitungan diatas, ditemukan perbedaan antara besarnya penyusutan yang dihitung perusahaan yaitu Rp 85.326.863 dengan hasil perhitungan menurut penulis yaitu Rp 230.546.661. Sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp 145.219.798. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi fiskal negatif sebagai berikut (menambah biaya penyusutan yang berakibat berkurangnya Penghasilan Kena Pajak / PPh Badan berkurang) yaitu :

- Biaya penyusutan perlengkapan arena dikoreksi negatif sebesar Rp 96.745.198 atau menjadi Rp

$$46.048.324 + \text{Rp } 96.745.198 = \text{Rp } 142.793.522$$

- b. Biaya penyusutan mesin dikoreksi negatif sebesar Rp 28.645.000 atau menjadi Rp 7.161.250 + Rp 28.645.000 = Rp 35.806.250
- c. Biaya penyusutan kendaraan dikoreksi negatif sebesar Rp 18.500.000 atau menjadi Rp 4.625.000 + Rp 18.500.000 = Rp 23.125.000
- d. Biaya penyusutan peralatan kantor dikoreksi negatif sebesar Rp 1.329.600 atau menjadi Rp 332.400 + 1.329.600 = Rp 1.662.000

Perhitungan PPh Badan menurut perusahaan sebagai berikut :

Laba bersih sebelum Pajak sebesar Rp 477.817.537.

PPh Badan terutang :

$$25\% \times \text{Rp } 477.817.000 = \text{Rp } 119.454.250$$

Perhitungan PPh Badan menurut Undang-Undang Fiskal sebagai berikut :

Laba bersih sebelum Pajak sebesar Rp 332.597.739

PPh Badan terutang :

$$25\% \times \text{Rp } 332.597.739 = \text{Rp } 83.149.250$$

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan (Bab IV) sebelumnya dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Fantasi Jaya Makmur Abadi Palembang menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan asset tetap yang dimiliki karena penggunaan metode garis lurus menghasilkan jumlah penyusutan yang sama besar setiap bulan / tahun, sehingga perusahaan tidak perlu

menghitung kembali setiap bulan / tahunnya.

2. PT. Fantasi Jaya Makmur Abadi Palembang telah melakukan perhitungan besarnya penyusutan asset tetap, dimana pengenaan tarif penyusutan yang dihitung lebih rendah dari tarif yang telah ditetapkan menurut Fiskal. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam penetapan persentase oleh perusahaan dengan menurut ketentuan fiskal (Undang-Undang), sehingga penyusutannya harus dilakukan koreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp 145.219.798.
3. Setelah menerapkan rekonsiliasi fiskal, PT. Fantasi Jaya Makmur Abadi Palembang dapat menurunkan Beban PPh yaitu dari Rp 119.454.250 menjadi Rp 83.149.250 atau menurun sebesar Rp 36.305.000

5.2 Saran

Dari uraian dalam pembahasan dan analisis pada Bab IV, peneliti memberikan saran kepada pimpinan perusahaan sebagai berikut :

1. Direktur Utama PT. Fantasi Jaya Makmur Abadi Palembang selain melakukan penyusutan aktiva tetap menurut perusahaan juga harus melakukan penyusutan aktiva tetap menurut ketentuan fiskal untuk menyampaikan SPT PPh Badan ke KPP Palembang Seberang Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda Darminta. Siregar. 2011. Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya PPh Terutang pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
- Gindo M. Sigalingging. 2010. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung PPh Terutang pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan.
- Hery, 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mindo S. Sianipar. 2008. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Berdasarkan Laba Komersial dengan Laba Fiskal pada PT. Indograha Nusa Sarana Medan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Pengelompokan aktiva berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur.

PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks.

Sunyoto, Danang. 2013. *Metode dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi dan Bisnis)*. Cetakan Pertama. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Perpajakan*.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) tentang *Pajak Penghasilan*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.

Wardoyo, Amin Subiyakto, dan Sapto Windi Argo. 2014. *Pajak Terapan Brevet A dan B Buku II*. TaxSYS. Jakarta.

**ANALISIS HORIZONTAL LAPORAN POSISI KEUANGAN TERHADAP TRANSISI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN KWH METER PASCABAYAR KE KWH METER
PRABAYAR
PT. PLN (PERSERO) AREA PALEMBANG**

**Rizky Aditama¹, Fitriasuri², Septiani Fransisca³,
Fakultas Universitas Bina Darma^{1,2,3}
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el : Rizkyaditama800@yahoo.co.id¹, Fitriasuri@binadarma.ac.id²
Septiani.fransisca@binadarma.ac.id³,**

ABSTRACT : *this study aimed to analyze the financial statements. PLN (Persero) Area Palembang in connection with the use of policy changes before applying Kwh Meter Prepaid Postpaid into a system which was implemented at the end of 2011. The object of this study is the Balance Sheet and Income Statement PT. PLN (Persero) Area Palembang the period 2008 - 2015. The analysis method used in this research is the analysis of Horizontal. And posts related to the policy change is of Electricity Sales, Accounts Receivable, and Depreciation Kwh Meter. The results showed that the use of the policy change Kwh Meter Prepaid to Postpaid be applied by PT. PLN (Persero) Area Palembang positive impact on account of Electricity which is indicated by an increase in every year, and have a negative impact on Accounts Receivable as indicated by the number of accounts receivable is soaring significantly, but these policies have positive impact on depreciation Kwh Meter is seen from the figures depreciation has decreased in recent years.*

Keywords: *Accounts Receivable, Electricity Sales, Financial Statement, Horizontal Analysis, Kwh Meter Depreciation.*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan PT. PLN (Persero) Area Palembang sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan penggunaan Kwh Meter yang sebelumnya bersistem Pascabayar menjadi sistem Prabayar yang mulai diterapkan pada akhir tahun 2011. Objek penelitian ini adalah Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. PT. PLN (Persero) Area Palembang periode 2008 – 2015. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Horizontal. Dan pos-pos yang berkaitan dengan perubahan kebijakan tersebut ialah Penjualan Tenaga Listrik, Piutang Usaha, dan Penyusutan Kwh Meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perubahan kebijakan penggunaan Kwh Meter Pascabayar ke Kwh Meter Prabayar yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Area Palembang ini berdampak positif pada akun Penjualan Tenaga Listrik yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan di setiap tahun, dan berdampak negatif untuk akun Piutang Usaha yang ditunjukkan dengan adanya angka piutang yang melonjak tinggi secara signifikan, namun kebijakan ini berdampak positif terhadap penyusutan Kwh Meter yang terlihat dari angka penyusutan yang mengalami penurunan di tahun terakhir.

Kata Kunci: *Analisis Horizontal, Laporan Keuangan, Penjualan Tenaga Listrik, Penyusutan Kwh Meter, Piutang Usaha.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa listrik telah menjadi sumber energi

utama dalam setiap kegiatan baik dirumah tangga maupun industri. Kebutuhan masyarakat akan energi listrik terus meningkat seiring dengan meningkatnya gaya hidup dan peralatan yang dipakai. Pada akhir tahun 2011,

PT. PLN (Persero) berinovasi dengan mengeluarkan program Listrik Prabayar atau disebut juga Listrik Pintar untuk menggantikan sistem Kwh Pascabayar yang selama ini sudah diterapkan. Program listrik prabayar, yaitu mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsinya. Pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatat atau pembaca meter yang biasanya dilakukan setiap bulan oleh petugas dan tidak terkait dengan jadwal pembayaran listrik bulanan. Alasan PT. PLN (Persero) mengganti program listrik pascabayar menjadi listrik prabayar karena program listrik prabayar merupakan program yang mempermudah pelanggan dalam pengontrolan penggunaan listrik. Selain itu pelanggan juga terlepas dari masalah kesalahan mencatat penggunaan listrik serta terbebas dari sanksi pemutusan terlambat membayar listrik dan juga terbebas dari biaya beban. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Horizontal Laporan Posisi Keuangan Terhadap Transisi Kebijakan Penggunaan Kwh Meter Pascabayar Ke Kwh Meter Prabayar pada PT. PLN (Persero) Area Palembang”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Transisi Kebijakan Tersebut Dengan Penjualan Tenaga Listrik ?
2. Bagaimana Pengaruh Transisi Kebijakan Tersebut Dengan Pergerakan Piutang yang sulit

ditekan selama penggunaan Kwh Meter Pascabayar ?

3. Bagaimana Pengaruh Transisi Kebijakan Tersebut Dengan Penyusutan Kwh Meter ?
- 4.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh transisi kebijakan penggunaan Kwh Meter Pascabayar ke Kwh Meter Prabayar yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Palembang terhadap penjualan tenaga listrik.
2. Untuk menganalisis pengaruh transisi kebijakan penggunaan Kwh Meter Pascabayar ke Kwh Meter Prabayar yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Palembang terhadap piutang usaha (tunggakan pelanggan).
3. Untuk menganalisis seberapa besar jumlah penyusutan yang timbul akibat transisi kebijakan penggunaan Kwh Meter Pascabayar ke Prabayar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2011), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Ada 5 macam laporan keuangan yaitu, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal,

laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

2.2 Analisis Laporan Keuangan yaitu meneliti hubungan yang ada diantara unsur-unsur dalam laporan keuangan, dan membandingkan unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur yang sama pada laporan keuangan tahun yang lalu atau angka pembandingan lain serta menjelaskan sebab perubahannya (Kasmir, 2011).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya dilakukan penelitian ini untuk meneliti adanya perubahan posisi laporan keuangan pada PT. PLN (Persero) Area Palembang terkait dengan adanya transisi kebijakan operasional perusahaan yang melakukan penggantian sistem Kwh Meter Pascabayar menjadi Kwh Meter Prabayar pada tahun 2011.

Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan dari PT. PLN (Persero) Area Palembang terhadap transisi kebijakan penggunaan Kwh Meter Pascabayar menjadi Kwh Meter Prabayar dilakukan dengan menggunakan Analisis Horizontal.

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan terfokus pada 3 (tiga) pos utama yang berpengaruh terhadap Transisi Kebijakan Penggunaan Kwh Meter Pascabayar menjadi Kwh Meter Prabayar pada PT. PLN (Persero) Area Palembang yaitu Penjualan Tenaga Listrik (Penyambungan Pelanggan), Piutang

(Tunggakan Pelanggan), dan Akumulasi Penyusutan Kwh Meter (Tata Usaha Langgan). Hasil dari analisis horizontal tersebut dapat menggambarkan seberapa besar kenaikan atau penurunan yang diakibatkan oleh perubahan kebijakan yang diterapkan PT. PLN (Persero) Area Palembang.

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. PLN (Persero) Area Palembang tahun 2008-2015.

3.2 Operasional Variabel

a. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yang menjadi adalah Penjualan Tenaga Listrik, Piutang Usaha, dan Penyusutan Kwh Meter.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Transisi Kebijakan Penggunaan Kwh Meter Pascabayar ke Kwh Meter Prabayar.

3.3 Jenis & Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Data Kuantitatif yaitu data yang merupakan kumpulan dari data angka-angka seperti neraca dan laba rugi.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan menjadi analisis dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan neraca dan laporan laba rugi serta dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan objek yang sedang dibahas.

3.4 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada laporan keuangan digunakan untuk mengukur, mengetahui, menggambarkan, menentukan serta membandingkan proporsi pada pos-pos dalam laporan neraca, laba/rugi dan arus kas. Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis horizontal.

3.5.1 Analisis Horizontal

Menurut Warren (2016), dalam analisis horizontal jumlah setiap pos laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan pos yang sama dari laporan keuangan periode sebelumnya. Peningkatan dan penurunan jumlah suatu pos dihitung bersama dengan persentase kenaikan dan penurunannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Penjualan Tenaga Listrik

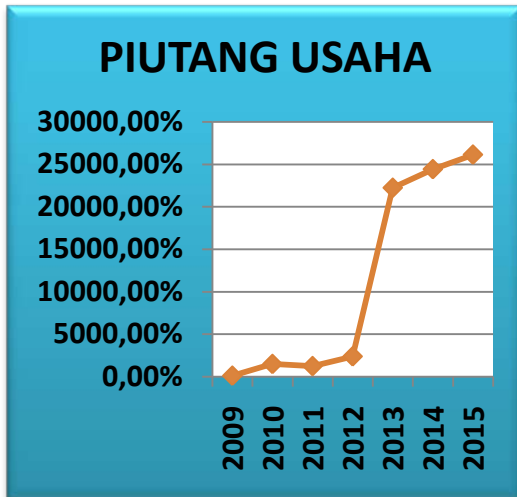


Sumber : Diolah Peneliti, 2017

Gambar 1.1 Grafik Analisis Horizontal Akun Penjualan Tenaga Listrik

Pada rentang periode tahun 2008–2011 yang menggunakan sistem Kwh Meter Pascabayar, total peningkatan pendapatan yang terjadi sebesar Rp 407.926.541.725 atau mengalami peningkatan sebesar 39,70% selama 4 tahun dari 2 periode 2008–2011. Sedangkan untuk Akun Penjualan Tenaga Listrik pada rentang periode tahun 2012–2015 yang telah menggunakan sistem Kwh Meter Prabayar, total peningkatan yang terjadi sebesar Rp 1.226.594.972.002 atau mengalami peningkatan sebesar 119,38% selama 4 tahun dari periode 2012–2015.

b) Piutang Usaha

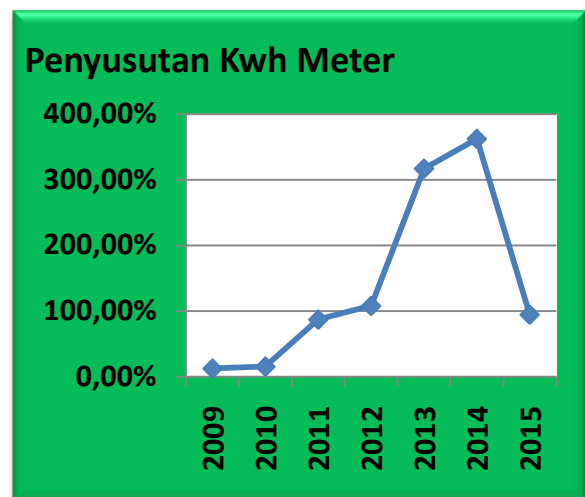


Sumber : Diolah Peneliti, 2017

Gambar 1.2 Grafik Analisis Horizontal Akun Piutang Usaha

Untuk Akun piutang usaha bahwa pada rentang periode tahun 2008–2011 yang menggunakan system Kwh Meter Pascabayar, total peningkatan piutang yang terjadi sebesar Rp15.184.125.828 atau mengalami peningkatan sebesar 1238,42% selama 4 tahun dari periode 2008–2011. Sedangkan untuk Akun Piutang Usaha pada rentang periode tahun 2012–2015 yang telah menggunakan sistem Kwh Meter Prabayar, total peningkatan piutang yang terjadi sebesar Rp 291.107.504.960 atau mengalami peningkatan sebesar 23742,73% selama 4 tahun dari periode 2012–2015.

c) Penyusutan Kwh Meter



Sumber : Diolah Peneliti, 2017

Gambar 1.2 Grafik Analisis Horizontal Akun Penyusutan Kwh Meter

Untuk Akun Penyusutan Kwh Meter bahwa pada rentang periode tahun 2008–2011 yang menggunakan sistem Kwh Meter Pascabayar, total peningkatan penyusutan Kwh Meter yang terjadi sebesar Rp 16.449.081.730 atau mengalami peningkatan sebesar 86,91% selama 4 tahun dari periode 2008–2011. Sedangkan untuk akun penyusutan Kwh Meter pada rentang periode tahun 2012–2014 yang telah menggunakan sistem Kwh Meter Prabayar, mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp48.166.886.475 atau sebesar 107,78% sejak akhir tahun 2012 yang telah menggunakan sistem Kwh Prabayar. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan penyusutan Kwh Meter yang signifikan yaitu sebesar Rp 86.444.123.147 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Akun Penjualan Tenaga Listrik mengalami trend positif yang terlihat

dari peningkatan pendapatan yang diterima oleh PLN melalui penjualan tenaga listrik.

2. Untuk Akun Piutang Usaha, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggantian sistem Kwh Pascabayar menjadi Kwh Prabayar ini yang pada intinya diterapkan untuk menanggulangi atau menekan piutang usaha yang selama ini menjadi sumber kerugian PLN berdasarkan hasil Analisis Horizontal Laporan Keuangan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 justru mengalami trend meningkat yang terlihat dari peningkatan jumlah piutang yang melonjak tinggi.

3. Untuk Akun Penyusutan Kwh Meter, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggantian sistem Kwh Pascabayar menjadi Kwh Prabayar yang diterapkan pada akhir tahun 2011, maka berdasarkan hasil Analisis Horizontal dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 Akun Penyusutan Kwh Meter trend positif meskipun mengalami peningkatan penyusutan pada tahun 2008-2014 yang diakibatkan oleh masih banyaknya perbaikan yang dibutuhkan Kwh Meter sehingga rentan mengalami kerusakan, tetapi di tahun terakhir pada 2015 pada Akun Penyusutan Kwh Meter mengalami penurunan yang sangat tajam, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh transisi kebijakan penggunaan Kwh Meter Pascabayar menjadi Kwh Meter Prabayar untuk Akun Penyusutan Kwh

Meter berdampak positif bagi PT. PLN (Persero) Area Palembang.

5.2 Saran

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pelayanannya dengan lebih memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi pada Kwh Meter, khususnya dimasa yang akan datang sehingga dapat menghindari adanya kerugian baik untuk PT. PLN (Persero) Area Palembang maupun untuk masyarakat.
2. PT. PLN (Persero) Area Palembang sebaiknya lebih memperkenalkan Kwh Meter Prabayar pada masyarakat dengan cara memasang iklan di media massa maupun elektronik agar pelanggan yang telah memiliki Kwh Meter Pascabayar memilih untuk migrasi ke Kwh Prabayar untuk menghindari tunggakan pembayaran di kemudian hari.
3. PT. PLN (Persero) Area Palembang sebaiknya terus mematangkan inovasi mengenai Kwh bersistem Prabayar sehingga Kwh Meter tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mengkonsumsi listrik dan juga tidak mudah mengalami kerusakan.
4. PT. PLN (Persero) Area Palembang sebaiknya memperbanyak agen-agen atau tempat pembayaran listrik sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk membayar listrik sehingga tunggakan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, Astri. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Sulawesi Selatan. Universitas Hasunuddin : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- Arief, Elizar. 2013. Analisis Laporan Keuangan PT. Pegadaian (Persero) Secara Vertikal dan Horizontal serta Perhitungan Rasio (Tahun 2010-2012) Makassar : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat.
- Burhanuddin, Rizky Amalia. 2014. Analisis Kinerja Keuangan PT. BPR Sulawesi Mandiri Secara Vertikal dan Horizontal serta Perhitungan Rasio (Tahun 2011-2013). Makassar : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Harmono, 2009, Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard (Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis). Jakarta : Bumi Aksara.
- Hidayana, Ian Aprianti. 2008. Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Suatu Perusahaan. Universitas Widyatama, Fakultas Ekonomi.
- IAI. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- Indrawan, Dinar Purna. 2013. Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Metode Vertikal – Horizontal dan Rasio Keuangan pada PT. PLN (PERSERO) PUSAT periode 2008-2012. Makassar : Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Edisi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Munawir, S. 2008. Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta : Liberty.
- Natan dan Setiana. 2010. Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Astra International Tbk Periode 2007-2009. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1 September-Desember 2010. Bandung : Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Ekonomi.
- Pangaribuan dan Yahya. 2009. Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia. Medan : Universitas Negeri Medan.
- Prastowo Dwi dan Rifka Juliaty. 2008. Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi (Edisi Kedua). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pratiwi, Octarie. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Secara Vertikal dan Horizontal serta Perhitungan Rasio PT. BPR Hasamitra. Makassar : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Pratiwi, Ratih. 2012. Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Return On Asset Perusahaan (Studi Kasus Pada Toko Global Computer Periode 2006- 2010). Bandung : Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi.

Rahardjo, Budi. 2001. Akuntansi dan Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan. Edisi Satu. Yogyakarta : Andi.

Setiawan, Ade. 2013. Analisis Laporan Keuangan PT. Bumi Sarana Utama secara Vertikal dan Horizontal serta Perhitungan Rasio (Tahun 2010-2012). Makassar : Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sucipto. 2003. Penilaian Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.

Warren, Reeve, Duchac, Suhardianto, Kalanjati, Jusuf, Djakman, 2016. Pengantar Akuntansi, Edisi 25. Jakarta : Salemba Empat.

ANALISIS PENERAPAN LISTRIK PRABAYAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA PALEMBANG

Rozalia Roleza¹, Yeni Widyanti,S.E., M.Ak², Rolia Wahasusmiah, S.E.,Ak.,MM³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Jalan Ahmad Yani No.12, Seberang Ulu Kota Palembang
rozaliaroleza7@gmail.com, yeniwidvanti@binadarma.ac.id,
rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id

ABSTRACT : This study aims to analyze how the application and development of the prepaid electricity in the city of Palembang, and see how the application of prepaid electricity that contribute to the tax revenue of street lighting in the city of Palembang during 2014 and 2015. In the study authors used multiple variables such as research object, the application prepaid electricity in the city of Palembang and the application of prepaid electricity contribution to tax revenues street lighting. The method used in this research is descriptive kuantitatif. Hasil this study indicate that the application of prepaid electricity affect the tax revenue of street lighting and reduces the number of customer arrears PLN. Enthusiastic people of Palembang to the use of prepaid electricity classified as positive, as is evident in 2014 and 2015 accounted for 100% of the tax revenue of street lighting. So it can be concluded that the application of prepaid electricity effective in reducing arrears and increase tax revenues street lighting.

Keywords: *Prepaid Electricity, Contributions, street lighting tax*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan dan perkembangan listrik Prabayar di Kota Palembang, dan melihat bagaimana penerapan listrik Prabayar yang berkontribusi dalam penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang selama tahun 2014 dan 2015. Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa variabel yang dijadikan objek penelitian seperti, penerapan listrik Prabayar di Kota Palembang dan kontribusi penerapan listrik Prabayar terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan listrik Prabayar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan dan dapat menurunkan jumlah tunggakan pelanggan PLN. Antusias masyarakat Kota Palembang terhadap penggunaan listrik Prabayar tergolong positif, ini terbukti tahun 2014 dan 2015 berkontribusi sebesar 100% terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan listrik Prabayar efektif dalam memperkecil terjadinya tunggakan serta meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.

Kata kunci : *Listrik Prabayar, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam mengoptimalkan penerimaan guna pembiayaan rutin untuk pemerintahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan adanya pajak dapat membantu pemerintah yang ada untuk melaksanakan

pembangunan. Pembangunan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterahkan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara seimbang, selaras, dan saling menunjang antar satu bidang dan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat mengelola berbagai sumber yang

ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. salah satu bidang yang dapat memberi peran yang cukup signifikan terhadap indikasi pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan.

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lain – lain pendapatan yang sah. Peningkatan pendapatan asli daerah diupayakan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah secara efektif sejalan dengan pengelolaan keuangan negara. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama lima tahun terakhir realisasi PAD Kota Palembang mengalami kenaikan selalu mencapai target hal ini menunjukkan bahwa

penggalan dana pembangunan melalui PAD yang berupa pajak dan sebagainya dapat berjalan dengan baik. Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan) dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2012 – 2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (PPJ)	% Kontribusi
2012	333.104.821.406	77.971.321.821	23,4
2013	357.230.028.259	94.671.200.935	26,5
2014	463.574.599.151	115.097.485.053	24,8
2015	479.112.899.223	134.093.161.585	27,98

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang selalu meningkat setiap tahun yang telah ditetapkan sehingga akan mengalami peningkatan PAD secara signifikan dari tahun ke tahun untuk itu peneliti akan mengukur efektivitas yang berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan yang dinyatakan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Dari tahun ke tahun, Kota Palembang terus mengalami peningkatan diberbagai sektor seperti peningkatan penduduk, objek wisata dan tempat hiburan. Peningkatan diberbagai sektor tersebut sejalan dengan pemakaian listrik di Kota Palembang yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan dianggap merupakan salah satu pajak daerah yang pada kenyataannya memang sangat potensial untuk dioptimalkan penerimaannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan yang didefinisikan sebagai pungutan yang

wajib disetorkan kepada Pemerintah atas penggunaan tenaga listrik baik dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Karena keterbatasan dalam mengelola penerimaan daerah, pemerintah menyerahkan pelaksanaannya kepada instansi pemerintah yang terkait dalam hal ini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (DISPENDA).

PLN dituntut agar pencapaian target keuangan dapat mencapai kondisi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kenyataannya pihak PLN mengalami kerugian-kerugian tiap tahunnya sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan maka PLN memandang perlu untuk melakukan peningkatan target keuangan, peningkatan pelayanan kepada pelanggan, dan peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Menyikapi hal tersebut sejak 2010 PLN mulai mengembangkan suatu produk yaitu dengan menerapkan layanan listrik Prabayar (LPB).

Sistem Prabayar menjadi pilihan PLN karena banyak manfaat yang bisa didapat oleh pelanggan maupun oleh PLN. Selama ini pelanggan PLN mendapat layanan listrik pascabayar, yaitu pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan, pada bulan berikutnya. Setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung, dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu.

Mekanisme tersebut diatas tidak dilaksanakan pada sistem Prabayar. Pada sistem Prabayar, pelanggan harus mengeluarkan uang atau membayar dulu energi listrik yang akan dikonsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan kedalam Meter Prabayar (MPB) yang terpasang dilokasi pelanggan melalui sistem 'token' atau stroom. Adapun keunggulan dari Listrik Prabayar yaitu pelanggan secara mandiri lebih mudah mengendalikan pemakaian listriknya, pelanggan dapat mengatur pemakaian sesuai dengan anggaran yang dimiliki, pelanggan terhindar dari kesalahan pencatatan kedudukan angka meter, pelanggan dapat melakukan

pembelian stroom isi ulang dapat dilakukan kapan saja, calon pelanggan baru tidak perlu menyediakan uang jaminan langganan (UJL) atau uang muka tagihan listrik (UMTL), dan privasi pelanggan terjaga.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan ditentukan oleh dua faktor yaitu Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN yaitu listrik pascabayar dan listrik Prabayar sedangkan penggunaan tenaga listrik yang bersumber dari Non PLN yaitu berupa genset (generator set). Besar kecilnya Pajak Penerangan Jalan diukur melalui kemampuan tenaga listrik dan jumlah pelanggan listrik. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan dijalan umum meliputi pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan lampu jalan namun masih banyak daerah di Kota Palembang yang belum menikmati fasilitas penerangan jalan. Untuk itu penulis ingin mengetahui tingkat efektivitas penerapan listrik Prabayar dan seberapa besar kontribusi penerapan listrik Prabayar terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang.

Berdasarkan keterangan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **ANALISIS PENERAPAN LISTRIK PRABAYAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA PALEMBANG** “.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan

yang bersifat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah daerah.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 mengenai Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan yang wajib disetorkan kepada Pemerintah atas penggunaan tenaga listrik baik dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan yang rekeningnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan

pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan dengan *Withholding System* dengan PT PLN dengan wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik didalamnya termasuk pembebanan pungutan Pajak Penerangan Jalan hal ini membuat Pajak Penerangan Jalan cocok sebagai Pajak Daerah.

2.3.1 Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No. 15 Tahun 2010 Pasal 2 yang termasuk objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri adalah meliputi seluruh pembangkit tenaga listrik.

2.3.2 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Tidak termasuk objek pajak berdasarkan PERDA No.15 Tahun 2010 Pasal 2 adalah :

1. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota.

2.3.5 Tarif Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Palembang maka :

1. Untuk kepentingan layanan :
 - a. Golongan sosial murni sebesar 5 % (lima persen)
 - b. Golongan sosial komersil sebesar 7 % (tujuh persen)
2. Untuk keperluan pelayanan rumah tangga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rumah tangga 1 :
 1. Rumah tangga 1A (450VA dan 900VA) sebesar 5 % (lima persen)
 2. Rumah tangga 1B (1300VA) sebesar 6% (enam persen)
 - b. Rumah tangga 2 : (2200VA dan 6600VA) sebesar 8% (delapan persen)
 - c. Rumah tangga 3 : (> 6600VA) sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Untuk keperluan bisnis sebesar 10% (sepuluh persen)

4. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
5. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

2.3.7 Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut kamus Bahasa Indonesia (2008:1207) potensi adalah daya kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan adalah segala kemampuan yang dimiliki Pajak Penerangan Jalan untuk menjadi sumber penerimaan untuk suatu daerah. Potensi Pajak Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak, Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak yang diperoleh dari penjumlahan perhitungan biaya tarif beban yang diakumulasikan dengan biaya pemakaian listrik (KWh) selama 1 periode. Akumulasi biaya tarif beban didasarkan kepada persentase Pajak Penerangan Jalan yang dikalikan dengan tarif dasar listrik dari masing – masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan biaya pemakaian listrik (KWh) adalah hasil antara penjumlahan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan, jumlah pemakaian listrik dan rata – rata tarif dasar listrik masing – masing pelanggan PLN.

2.3.8 Listrik Prabayar

Semenjak awal berdirinya PLN sebagai pemasok energi listrik nasional, pelanggan telah diberikan kemudahan terutama terkait proses pembayaran untuk setiap penggunaan energi listrik yang dipergunakan sehari – hari. Pelanggan telah dibiasakan dengan penggunaan listrik pascabayar, dimana pelanggan dapat menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan dapat membayar belakangan pada bulan berikutnya. Listrik pascabayar mengharuskan sekali dalam sebulan pihak PLN terutama petugas pencatat meteran listrik harus melakukan pencatatan terhadap meteran pelanggan atas penggunaan tenaga listrik, lalu pihak PLN harus menghitung dan menerbitkan rekening yang berisikan nominal yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Lambat laun

penerapan listrik pascabayar dianggap tidak efisien bagi penerimaan PLN karena sedikit pelanggan yang terlambat bahkan sampai ada yang tidak membayarkan kewajibannya atas penggunaan energi listrik yang sudah digunakan. Sehingga PLN harus melakukan tindakan pemutusan aliran listrik setelah waktu yang telah ditentukan.

Pada penerapan sistem Prabayar mekanisme seperti listrik pascabayar sudah tidak dipergunakan lagi. Sebelum pelanggan menggunakan energi listrik, pelanggan diwajibkan membayar dahulu untuk energi listrik yang akan dipergunakan sesuai kebutuhan. Nantinya besar energi yang sudah dibeli oleh pelanggan, akan secara otomatis masuk kedalam Meter Prabayar dengan memasukan angka yang sudah diberikan oleh penjual pulsa listrik.

Selain itu penggunaan listrik Prabayar diharapkan dapat meningkatkan *cash flow* yang menggambarkan kesehatan keuangan PLN dari tahun ke tahun dan penggunaan Prabayar memudahkan pihak PLN dalam mengatur arus distribusi listrik ke pelanggan sesuai dengan hak yang mereka bayarkan.

Meteran Prabayar yang diterima oleh pelanggan, tentu akan menyediakan informasi berapa jumlah energi listrik (KWh) yang masih dapat dipergunakan. Energi listrik yang tertera akan berkurang/bertambah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam penggunaannya, manfaat lainnya pelanggan tidak akan mengeluarkan uang tambahan untuk biaya bulanan seperti yang ada didalam listrik pascabayar. Dengan demikian tentu pelanggan lebih dapat mengoptimalkan dan mengawasi penggunaan energi listrik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

2.3.9 Perkembangan Listrik Prabayar

Dalam rangka mempermudah kegiatan keseharian dimasyarakat, manusia tentulah sangat bergantung kepada berbagai macam sumber daya energi, salah satu sumber daya yang telah banyak diketahui adalah energi listrik karena sifat dasar listrik yang terbatas namun mampu diperbaharui maka dalam proses pembentukan energi listrik baik alami maupun buatan haruslah dikelola dan dikerjakan semaksimal mungkin oleh manusia.

Keberadaan listrik ditengah – tengah masyarakat sudah sewajarnya diberlakukan pengelolaan dan pengawasan oleh Pemerintah, agar dalam membantu menggerakkan roda perekonomian, pemerintah dapat mewujudkan kemajuan suatu daerah. Kemajuan dalam suatu daerah tentu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang berakibat kepada peningkatan permintaan sumber daya energi listrik. Listrik adalah kebutuhan primer manusia yang merupakan energi terpenting bagi kehidupan kita. Mengingat dalam suatu daerah tentu ada berbagai macam bentuk aktivitas keseharian yang dilakukan baik dari masyarakat, swasta maupun pemerintah tetapi dilain sisi jumlah ketersediaan tenaga listrik yang justru terbatas.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu diiringi pula dengan tuntutan ketersediaan tenaga listrik yang selalu siap satu hari penuh, karena listrik sudah sangat melekat di kehidupan masyarakat dan mampu menunjang kehidupan masyarakat perkotaan maupun diperdesaan. Tuntutan dalam ketersediaan energi listrik yang adil, handal, aman, ramah lingkungan, efisien, terbarukan dan mampu menjangkau ke seluruh pelosok daerah merupakan tuntutan bagi Pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku perusahaan BUMN yang diberikan hak monopoli untuk mengatur jalur distribusi maupun administrasi pelayanan publik terutama dalam memberikan layanan penyediaan tenaga listrik secara nasional untuk mengoptimalkan pengelolaan energi listrik guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di masyarakat.

Bagi PLN penerapan listrik pascabayar sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan Negara karena pembayaran listrik pascabayar menghadapi banyak kelemahan diantaranya pemakaian yang tidak teratur, pembayaran yang tertunda oleh pengguna hingga pengendalian kesalahan dalam pencatatan meteran rawan *human error* yang menyebabkan kelalaian kesalahan perhitungan meteran dan menyebabkan lonjakan pembayaran pelanggan. Menyikapi hal tersebut dan kekurangan dari penerapan listrik pascabayar serta seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang cepat, PLN telah mengembangkan sejumlah

program guna memenuhi efisiensi dan efektivitas standar kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Salah satu program terobosan *Development Product* yang akan diperkenalkan guna upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas baik mutu pelayanan, kehandalan, penyediaan tenaga listrik, pengelolaan yang semakin baik yaitu program listrik Prabayar (LPB).

Penerapan listrik Prabayar atau listrik pintar merupakan konsep yang diusung sosialisasinya sejak bulan maret 2010, kebijakan listrik Prabayar pada awalnya diperkenalkan semasa kepemimpinan Direktur Utama Edi Widiono yang diedarkan melalui surat edaran direksi PT. PLN (Persero) No. 035.E/012/DIR/2001 pada tanggal 31 Desember 2002 mengenai petunjuk pelaksanaan Tarif Multiguna Prabayar. Kebijakan ini tentulah perlu banyak yang harus dikaji agar sesuai dengan apa yang diharapkan didalam masyarakat dan yang diharapkan oleh PLN. Hingga pada tahun 2008 produk ini baru mulai diperkenalkan ke umum, tapi belum seluas saat ini dan produk yang ditawarkan oleh PLN ini akhirnya diresmikan pada tahun 2009 sesuai dengan surat direksi PT. PLN (Persero) No.01809/532/DITJB/2009, tanggal 13 Febuari 2009 mengenai Implementasi Penerapan Listrik Prabayar dan terkait pengelolaan keuangannya maka dikeluarkannya keputusan direksi PT. PLN (Persero) No.300.K/DIR/2009, pada tanggal 23 Desember 2009 yang mengatur ketentuan Akuntansi Listrik Prabayar dan terakhir surat direksi PT. PLN (Persero) No.01178/532/DITBMR/2010, tanggal 17 Febuari 2010 mengenai Implementasi Penerapan Listrik Prabayar, dan merupakan implikasi atas tanggung jawab pihak PLN selaku *regulator* dalam penyediaan energi listrik kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai macam keluhan masyarakat dan kebijakan bagi PLN untuk mewujudkan praktik transaksi yang bersih dan transparan yang umum terjadi antara konsumen dan oknum petugas, hal inilah yang menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan listrik Prabayar.

Untuk penggunaan listrik Prabayar, meteran listrik telah mengusung KWh digital yang memudahkan bagi pelanggan untuk memantau pemakaian listrik sehari – hari,

begitu pula pembayaran atas penggunaan listrik yang dipermudah dengan hanya melakukan pengisian voucher / *token* yang bisa anda peroleh dari jaringan yang direkomendasikan oleh PLN ataupun melalui lebih dari 30.000 ATM aktif diseluruh Indonesia. Setelah mendapatkan 20 digit yang dipergunakan untuk mengisi ulang saldo rekening listrik besar energi listrik yang telah dibeli oleh nantinya akan diakumulasikan kedalam meteran Prabayar.

Listrik Prabayar merupakan program unggulan yang ditawarkan oleh PLN kepada pelanggan dimana pelanggan yang menjadi target program listrik tersebut adalah pelanggan dari yang berkapasitas 450 watt hingga 5500 watt. Pada penggolongan praktek Prabayar, kelompok pelanggan yang ingin menggunakan listrik Prabayar dikategorikan menjadi 2 yaitu pelanggan lama yang migrasi ke Prabayar dan pelanggan baru. Pelanggan lama yang migrasi adalah pelanggan yang sebelumnya menggunakan listrik pascabayar atas keinginan pelanggan tersebut melakukan perpindahan ke listrik Prabayar dan pelanggan baru adalah pelanggan yang ingin naik daya maupun instalasi baru masuk ke kategori listrik Prabayar. Sistem Prabayar terdiri dari 2 komponen biaya yaitu biaya pemakaian listrik dan biaya Pajak Penerangan Jalan Umum.

2.3.10 Manfaat Pelanggan Pengguna Sistem Prabayar

Sistem Prabayar ini memberikan manfaat kepada pelanggan, manfaat yang diperoleh pelanggan pengguna sistem Prabayar adalah :

1. Pelanggan secara mandiri lebih mudah mengendalikan pemakaian listriknya,
2. Pelanggan dapat mengatur pemakaian sesuai dengan anggaran yang dimiliki,
3. Pelanggan terhindar dari kesalahan pencatatan kedudukan angka meter,
4. Pelanggan dapat melakukan pembelian stroom isi ulang dapat dilakukan kapan saja,
5. Calon pelanggan baru tidak perlu menyediakan uang jaminan langganan (ULJ) atau Uang Muka Tagihan Listrik (UMTL),

6. Privasi pelanggan terjaga, tidak terganggu.

2.3.11 Manfaat yang diperoleh PT. PLN (Persero)

1. Mempercepat penerimaan arus kas,
2. Mengurangi keluhan khususnya yang terkait dengan kesalahan pencatatan meter,
3. Siklus tagihan yang lebih sederhana dan murah,
4. Mengurangi kecurangan atau kesalahan baca meter,
5. Meniadakan tunggakan.

2.3.12 Efektivitas Listrik Prabayar

Secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu telah ditentukan, suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dibandingkan dengan semakin besar persentase target yang telah dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009 : 17) efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Dari kesimpulan diatas kita bisa menarik kesimpulan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur rasio keberhasilan dalam pemungutan pajak. Semakin besar rasio maka semakin efektif pemungutan pajak tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas sebagai berikut :

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif;
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 90% sampai dengan 100% berarti efektif;
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 80% sampai 90% berarti cukup efektif;
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian diatas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif;

5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif.

2.3.13 Kontribusi Listrik Prabayar

Peran PLN sebagai perusahaan perseroan terbatas yang menguasai pengelolaan energi listrik secara nasional membuat PLN tidak bisa langsung meningkatkan profitabilitas perusahaannya. Dilain sisi PLN juga dituntut agar pencapaian kinerja selalu baik dan mencapai kondisi yang lebih baik dari pencapaian sebelumnya.

Sebagai bentuk upaya pencapaian target kinerja yang lebih baik maka perusahaan perlu memandang bagaimana menciptakan strategi yang dapat meningkatkan baik secara profitabilitas perusahaan dan peningkatkan pelayanan kepada masyarakat. LPB (Listrik Prabayar) yang pada mulanya sebagai *Development Product* dianggap mampu sebagai alternatif atas tuntutan selama ini yang dialami oleh perusahaan. Penerapan produk ini diharapkan mampu membangun karakteristik budaya masyarakat yang disiplin dalam membayar kewajiban terhutangnya atas penggunaan tenaga listrik dan diharapkan mampu memperkecil resiko tunggakan yang dilakukan oleh pelanggan. Memang pada prakteknya perbandingan antara pelanggan yang menggunakan listrik prabayar jauh lebih besar dibandingkan pengguna listrik prabayar. Meskipun begitu setidaknya melihat sejauh mana kontribusinya yang diberikan Produk Listrik Prabayar terhadap penjualan tenaga listrik, tunggakan pelanggan PLN dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

3. Metodologi Penelitian

3.1 Operasional Variabel

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Listrik Prabayar, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data diperoleh secara langsung dari sumbernya dan sebagian

data diperoleh melalui penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber instansi terkait yaitu :

1. Data beban dan biaya pemakaian tahun 2014 - 2015
2. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2014 – 2015

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahun 2014 :

Tabel 4.1 Basis Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Basis Pajak Penerangan Jalan				
Keterangan	Biaya Beban+ Biaya Pemakaian	Tarif	Potensi	
Basis PPJ	Rp	8%	Rp	
Pascabayar+	936.771.4		74.941.712.	
Prabayar	02.453		196	

Sumber: PT PLN (Persero) Area Palembang, data diolah

Dari tabel 4.1 yang merupakan perhitungan Potensi/ target Pajak Penerangan Jalan tahun 2014 melalui listrik prabayar dan pascabayar sebesar Rp 74.941.712.196.

2. Tahun 2015 :

Tabel 4.2 Basis

Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Basis Pajak Penerangan Jalan				
Keterangan	Biaya Beban+ Biaya Pemakaian	Tarif	Potensi	
Basis PPJ	Rp	8%	Rp	
Pascabayar+	973.788.625		77.903.	
Prabayar	.627		090.05 0	

Sumber: PT PLN (Persero) Area Palembang, data diolah

Total potensi / target pajak penerangan jalan tahun 2014 sebesar Rp 74.941.712.196 dan tahun 2015 sebesar Rp 77.903.090.050. Jika seluruh pelanggan PLN menggunakan Listrik Prabayar dapat dipastikan potensi Pajak Penerangan Jalan dan realisasi Pajak Penerangan Jalan akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

4.2.3 Analisis Efektivitas Penerimaan PPJ Melalui Listrik Prabayar Dan Pascabayar

Rumus yang dipergunakan untuk mengukur Efektivitas penerapan listrik prabayar dan listrik pascabayar terhadap target penerimaan pajak penerangan jalan menurut Serdana, I ketut Ari.dkk (2013) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Penerimaan LPB} = \frac{\text{Penerimaan LPB}}{\text{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas bisa dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif

80%-90%	Cukup Efektif
60%-90%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327

Rumus diatas besarnya efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan melalui listrik Prabayar pada tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan rincian perhitungan :

1. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas Penerimaan LPB} = \frac{\text{Rp. 122.554.324.628}}{\text{Rp. 74.941.712.196}} \times 100\% = 163,5\%$$

2. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas Penerimaan LPB} = \frac{\text{Rp. 129.407.942.720}}{\text{Rp. 77.903.090.050}} \times 100\% = 166,1\%$$

Tabel 4.4

Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Melalui Listrik Prabayar 2014 Dan 2015

Tahun	Persentase	Kriteria
2014	163,5%	Sangat Efektif
2015	166,1%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah

Tingkat pencapaian penerimaan Pajak Penerangan Jalan melalui Listrik Prabayar di

Kota Palembang pada tahun 2014 sebesar 163,5% dan pada tahun 2015 sebesar 166,1% maka dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melalui listrik Prabayar adalah sangat efektif.

Tabel 4.5

Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Melalui Listrik Pascabayar 2014 Dan 2015

Tahun	Persentase	Kriteria
2014	21,35%	Tidak Efektif
2015	29,1%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah

Rumus yang dipergunakan untuk mengukur Efektivitas listrik pascabayar terhadap target penerimaan pajak penerangan jalan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Penerimaan PB} = \frac{\text{Penerimaan PB}}{\text{Target Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

Selanjutnya rincian perhitungan efektivitas listrik pascabayar terhadap target penerimaan pajak penerangan jalan sebagai berikut :

1. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas Penerimaan PB} = \frac{16.000.251.535}{74.941.712.196} \times 100\% = 21,35\%$$

2. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas Penerimaan LPB} = \frac{\text{Rp. 22.604.337.225}}{\text{Rp. 77.903.090.050}} \times 100\%$$

= 29,1%

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa efektivitas pajak penerangan jalan melalui listrik pascabayar pada tahun 2014 tidak efektif sebesar 21,35% dan pada tahun 2015 tidak efektif sebesar 29,1%. Dilihat dari efektivitas melalui listrik prabayar tahun 2014 dan 2015 menunjukkan kriteria sangat efektif sedangkan untuk listrik pascabayar pada tahun 2014 dan 2015 dengan kriteria tidak efektif. Terjadinya hal tersebut disebabkan listrik pascabayar selalu terjadi tunggakan dari pelanggan dan hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan kota Palembang.

4.2.4 Kontribusi Listrik Prabayar Dan Listrik Pascabayar Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang

Perhitungan kontribusi listrik prabayar dan listrik pascabayar terhadap penerimaan pajak penerangan jalan kota Palembang dilakukan dengan menggunakan data realisasi penerimaan melalui listrik prabayar dan pascabayar dan penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2014 dan 2015. Berikut adalah hasil penelitian kontribusi listrik prabayar dan listrik pascabayar terhadap penerimaan pajak penerangan jalan kota Palembang dari tahun 2014 dan 2015.

Rumus Perhitungan kontribusi listrik prabayar dan listrik pascabayar terhadap penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Listrik Prabayar+Pascabayar}}{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat kriteria

kontribusi bisa dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10%- 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327

Rincian perhitungan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan melalui listrik prabayar dan pascabayar tahun 2014 dan 2015 :

1. Tahun 2014

Rp 122.554.324.628 + Rp 16.000.251.535

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp 122.554.324.628 + Rp 16.000.251.535}}{\text{Rp 138.554.576.163}} \times 100\% = 100\%$$

Rp 138.554.576.163

2. Tahun 2015

Rp 129.407.942.730 + Rp 22.604.337.225

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp 129.407.942.730 + Rp 22.604.337.225}}{\text{Rp 152.012.229.955}} \times 100\%$$

Rp 152.012.229.955

= 100%

Tabel 4.7

Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Melalui Listrik Prabayar Dan Pascabayar 2014 Dan 2015

Tahun	Persentase	Kriteria
2014	100%	Sangat Baik
2015	100%	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi listrik Prabayar dan pascabayar terhadap penerimaan pajak penerangan jalan kota Palembang pada tahun 2014 sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 100%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan listrik Prabayar dan pascabayar ini sangat baik untuk kontribusi setiap tahunnya.

kontribusi listrik Prabayar juga meliputi dengan penurunan tunggakan yang disebabkan oleh pelanggan listrik pascabayar. Tentu jika pelanggan pascabayar seluruhnya beralih ke Prabayar maka tidak akan terjadi tunggakan seperti yang menjadi kendala PLN selama ini. Menurunnya jumlah tunggakan akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan terutama melalui pelanggan Listrik Prabayar.

4.2.5 Analisis Listrik Prabayar Dan Listrik Pascabayar

Selama ini pelanggan PLN mendapatkan layanan listrik pascabayar yaitu pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan pada bulan berikutnya. Setiap bulan petugas PLN harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar pelanggan, melakukan penagihan kepada pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutuskan aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu. Mekanisme tersebut tidak dilaksanakan pada sistem Prabayar, pada sistem Prabayar, pelanggan harus mengeluarkan uang atau membayar dulu

energi listrik yang akan dikonsumsinya. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam meter Prabayar (MPB) yang terpasang di lokasi pelanggan melalui sistem token atau stroom. MPB menyediakan informasi jumlah energi listrik (KWH) yang masih bisa dikonsumsi persediaan kwh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan demikian pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik. Dengan sistem Prabayar, pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya dilakukan setiap bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.

Tabel 4.8

Perbandingan Listrik Prabayar Dan Listrik Pascabayar

No	Listrik Prabayar	Listrik Pascabayar
1.	Menerima uang sebelum energi listrik dikonsumsi pelanggan	Menerima uang setelah energi listrik dikonsumsi pelanggan
2.	Tidak ada pencatatan meter sehingga sumber susut dan keluhan dapat diminimalisasi atau dihilangkan	Memerlukan pencatatan meter yang memerlukan biaya, pencatatan meter yang tidak akurat dapat menjadi sumber susut atau keluhan pelanggan

3. Tidak ada Pelanggan yang pemutusan aliran listrik karena tidak ada pembayaran rekening bulanan setelah waktu tertentu, rekening bulanan pemutusan penyambungan
4. Tidak dikenakan denda keterlambatan, jarena pembayaran dilakukan sebelum energi listrik dikonsumsi Pelanggan yang terlambat membayar rekening bulanan dikenakan denda keterlambatan
5. Pelanggan tidak dikenakan uang jaminan pelanggan (UJL) pada saat melakukan penyambungan baru Pelanggan membayar uang jaminan pelanggan (UJL) pada saat melakukan penyambungan baru
6. Dalam menghitung energi listrik yang dikonsumsi tidak memperhitungkan biaya beban Rekening bulanan memperhitungkan biaya beban
7. Mengendalikan sendiri pemakaian, sesuai dengan stroom yang Pelanggan kurang dapat mengendalikan pemakaian tenaga listrik

tersedia karena tidak terkait dengan jumlah stroom yang tersedia

Sumber : PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang

4.2.6 Pelaporan Atas Penjualan Listrik Prabayar Dan Listrik Pascabayar

1. Penerimaan listrik prabayar dan listrik pascabayar dalam laporan pendapatan penjualan tenaga listrik, dan dibukukan secara acrual basis sebagai pendapatan. Unsur materai, PPN, PPJ dll dibukukan sesuai ketentuan.
2. Pada laporan TUL III-09 ditambah baris listrik prabayar dan listrik pascabayar, untuk menampung total penjualan kwh, rupiah dan jumlah pelanggan listrik prabayar maupun listrik pascabayar.
3. Pada proses migrasi dari pascabayar menjadi prabayar misal bulan N maka jumlah pembelian kwh akan langsung masuk pada pendapatan bulan N mengacu kepada KepDir 300.K/DIR/2009 tanggal 23 Desember 2009.
4. Rincian per tarif penjualan listrik prabayar dan listrik pascabayar tetap dibuat dengan format seperti III-09 dan harus dicetak sebagai lampiran laporan TUL III-09.

4.2.7 Tarif Biaya Keterlambatan Rekening Listrik Pascabayar

Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh perusahaan perseroan PT PLN

Tabel 4.9 Tarif Biaya Keterlambatan Rekening Listrik Pascabayar

No	Batas Daya	Biaya Keterlambatan (Rp/Bulan)
----	------------	--------------------------------

1	450 VA	3000
2	900 VA	3000
3	1.300 VA	5000
4	2.200 VA	10.000
5	3.500 VA s.d 5.500 VA	50.000
6	6.600 VA s.d 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (min Rp 75.000)
7	Diatas 14.000 VA	3% dari tagihan rekening listrik (min Rp 75.000)

4.3 Pembahasan Dan Analisis

4.3.1 Analisis Penerapan Listrik Prabayar Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusinya dari listrik prabayar di Kota Palembang dengan menggunakan metode efektivitas dan kontribusinya sangat efektif variabel penerimaan pajak listrik prabayar berpengaruh bisa meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan. Dari hasil tabel 4.4 diketahui bahwa variabel penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2014 sebesar 163,5% dan tahun 2015 sebesar 166,1%. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *With Holding System* dengan PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya karena tagihan atas pembebanan rekening listrik didalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Upaya yang dilakukan PLN untuk memperbanyak jumlah pelanggan listrik dengan cara memasarkan dan mendistribusikan listrik ke daerah – daerah

yang belum terjangkau listrik atau daerah – daerah dalam tahap pembangunan misalnya perumahan baru, rumah toko, perkantoran dan lain sebagainya agar daerah tersebut menggunakan listrik untuk penerangan yang secara tidak langsung dengan menggunakan listrik juga telah membayar pajak penerangan jalan, yaitu membeli token (pulsa listrik) untuk pelanggan yang menggunakan listrik prabayar dan membayar rekening listrik yang menggunakan listrik pascabayar. PLN tidak hanya memasarkan pemasangan listrik tapii juga mempromosikan untuk penambahan daya masyarakat, sehingga dengan penambahan daya secara langsung pajak penerangan jalan juga bertambah. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian menurut penelitian Indra riady (2010) yang menyimpulkan bahwa melihat potensi penerimaan dan efektivitas pajak, khususnya pajak penerangan jalan Kabupaten Garut, tentu kabupaten tersebut mempunyai peluang keberhasilan yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik dan efektivitasnya mendekati nilai efektif.

Jika dilihat dari tahun 2014 sebesar 163,5% dan tahun 2015 sebesar 166,1% tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan melalui listrik prabayar Kota Palembang adalah sangat efektif, jika dibandingkan dengan penerimaan melalui listrik pascabayar tahun 2014 sebesar 21,35% dan tahun 2015 sebesar 29,1% tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kota Palembang adalah tidak efektif dikarenakan selalu terjadi tunggakan dari pelanggan setiap tahunnya tentu jika pelanggan di Kota Palembang seluruhnya beralih ke listrik prabayar atau menggunakan listrik prabayar maka akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Palembang.

Kriteria Kontribusi Listrik Prabayar dan Listrik Pascabayar terhadap penerimaan pajak penerangan jalan kota palembang tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sangat baik. Listrik prabayar dan listrik pascabayar memiliki kontribusi terhadap penerimaan

pajak penerangan jalan adalah sebesar 100%. Untuk itu penerapan listrik Prabayar dan pascabayar yang diterapkan oleh PLN untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan sudah sangat optimal atau keriterianya sangat baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT PLN (Persero) Area Palembang mengenai Analisis penerimaan Listrik Prabayar Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pascabayar Kota Palembang, maka penulis menarik kesimpulan yang akan diberikan berdasarkan data yang ada serta didukung oleh hasil analisa sebagai berikut :

1. Efektivitas pencapaian penerimaan pajak penerangan jalan untuk listrik prabayar tahun 2014 sebesar 163,5% dan tahun 2015 sebesar 166,1% berarti kriteria pada tahun 2014 dan tahun 2015 tersebut adalah sangat efektif.
2. Efektivitas pencapaian terhadap penerimaan pajak penerangan jalan untuk listrik pascabayar tahun 2014 sebesar 21,35% dengan kriteria tidak efektif dan tahun 2015 sebesar 29,1% dengan kriteria tidak efektif.
3. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan melalui listrik prabayar dan listrik pascabayar tahun 2014 dan 2015 terhadap penerimaannya sebesar 100% pada kedua tahun tersebut dengan keriterianya adalah sangat baik.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran yang dapat digunakan atau sebagai bahan masukan untuk PT PLN (Persero) Area Palembang. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Palembang maka ada beberapa masukan berupa saran dari penulis yang ingin disampaikan, antara lain :

1. Kepada PT PLN (Persero) Area Palembang agar tetap mempertahankan kinerja para petugas penerimaan PLN dalam hal Pajak

Penerangan Jalan baik listrik prabayar maupun listrik pascabayar dalam hal efektivitas dan kontribusinya.

2. Bagi pihak PLN maupun Dinas Pendapatan Daerah agar cepat melaksanakan kebijakan – kebijakan yang dianggap menambah pemasukan untuk pajak penerangan jalan, salah satunya dengan kebijakan pelanggan listrik pascabayar yang dituntut untuk berubah ke layanan listrik prabayar jika ingin menambah daya terpasang dirumah pelanggan, secara tidak langsung dengan kebijakan tersebut akan memperkecil terjadinya tunggakan.
3. Bagi mahasiswa lain yang akan menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan supaya dapat memperluas data penerimaan listrik prabayar di Kota Palembang, agar dapat dilihat perkembangan tahun ke tahun layanan listrik prabayar di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2011, *Teori Perpajakan dan Kasus*, Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Pajak Penerangan Jalan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 690.900.327, Tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan, Jakarta, 1996
- Sudarsono, Bambang. 2013. “Analisis Pemakaian Energi Listrik Prabayar dan Pascabayar pada Pelanggan Daya Non Subsidi”. *Jurnal*, Vol 9 No.1. pp 28 – 33.
- Riady, Indra, 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.

Skripsi Universitas Diponegoro,
Semarang.

Siti Resmi. 2013, *Teori Perpajakan dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta
Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2007, Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2013, *Perpajakan Indonesia*.
Salemba Empat, Jakarta

www.PLN.co.id (Diakses 28 november 2016)

ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE SEBAGAI PERWUJUDAN GREEN ACCOUNTING

Sari Purnama¹, Henni Indryani², Septiani Fransisca²
Dosen Universitas Bina Darma², Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Palembang
Email : saripurnama059@gmail.com¹, henniinayah@gmail.com²,
septiani.fransisca@binadarma.ac.id²

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Corporates Social Responsibility Disclosure* sebagai perwujudan *Green Accounting* dalam laporan tahunan Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi laporan keuangan dan laporan keberlanjutan yang dikeluarkan perusahaan dalam Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan *Indonesian Sustainability Reporting Award* tahun 2015 kategori *Minning&Methal, Energy, oil&gas, dan Manufacture*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporates Social Responsibility Disclosure* dalam perusahaan yang mendapatkan penghargaan ISRA belum mencerminkan *green accounting*, jika biaya aktifitas lingkungan yang ada belum diklasifikasikan sesuai konsep dasar *green accounting*.

Kata Kunci : *CSR, CSR-Disclosure, Green Accounting*

Abstract : *The study aims to determine Corporate Sosial Responsibility Disclosure as an embodiment off gree accounting in the annual report of Indonesia Stock Exchange and the website of each company. The data used inthis research is secondary data using qualititative descriptive analysis. Data collection methods used in this study documentation of financial reports and sustainability reports issued by the company in the annual report of Indonesia Stock Exchange and the website of each company.the research sampel consistec of companies that have been honoured Indonesia Sustainability Reporting Award 2015 category minning&methal, energy, oil&gas, and manufacture. The result showed that the corporate social responsibility disclosure in the company that was awarded ISRA has not reflected green accounting, if the cost environtmental activities that there have not been classified according to the basic concepts of green accounting.*

Keyword : *CSR, CSR-Disclosure, Green Accounting*

PENDAHULUAN

Kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang kini telah menjadi trend secara global untuk lebih peduli terhadap tanggung jawab pada lingkungan sosial masyarakat sekitarnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* penting dilaksanakan untuk keberlangsungan hidup baik bagi perusahaan itu sendiri maupun lingkungan

sekitar. *Corporate Social Responsibility (CSR)* diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain meningkatkan kesadaran sosial kemanusiaan dan lingkungan, *Corporate Social Responsibility (CSR)* pun bergerak ke arah *green company*.

Green company pun berperan dalam upaya untuk melestarikan lingkungan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau

environmental costs. Sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai *green accounting* atau *environmental accounting* (Aniela, 2012). Secara internal, peran dari *green accounting* dapat memberikan sebuah motivasi bagi manajer untuk mengurangi biaya lingkungan yang ditimbulkan, yang akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan menjadi dasar eksistensi perusahaan di masa mendatang. *Green Accounting* bukan hanya memberikan motivasi bagi manajer untuk mengurangi biaya lingkungan yang ditimbulkan, melainkan memberikan kesadaran masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah atas dampak lingkungan yang terjadi. Kesadaran masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah ini diungkapkan dengan memberikan tekanan terhadap perusahaan, sehingga perusahaan bukan hanya memiliki kegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan demi masyarakat dan perusahaan tersebut.

Untuk menerapkan pengelolaan lingkungan hidup, perusahaan-perusahaan biasanya akan mengeluarkan biaya-biaya lingkungan perusahaan yang telah dilaporkan dalam laporan *Corporate Sosial Responsibility* yang diungkap secara detail dalam laporan *Sustainability reporting*

dengan sifat sukarela (*voluntary*). Sifat *voluntary* perusahaan terhadap laporan *Sustainability reporting* membuat Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen bekerjasama dengan *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) menganugerahkan penghargaan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) bagi perusahaan-perusahaan yang melaporkan dengan baik kinerja keberlanjutan mereka dibidang sosial, lingkungan, dan ekonomi sebagai motivasi perusahaan-perusahaan dalam melaporkan *Sustainability reporting*. Penghargaan pelaporan tersebut sering disebut dengan *Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA)*. Meskipun Perusahaan yang mendapat penghargaan *Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA)* telah mengeluarkan biaya untuk aktivitas lingkungan dalam laporan *Corporate Sosial Responsibility Disclosure*, tentu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut belum bisa dipastikan mewujudkan *green accounting* sesungguhnya. Mengingat bahwa *Green accounting* memiliki biaya untuk aktivitas lingkungan yang mencerminkan *Green accounting* itu sendiri. Hal inilah yang membuat pentingnya *Corporate sosial Responsibility (CSR) disclosure* untuk mengungkapkan apakah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan *Indonesian Sustainability*

Reporting Awards (ISRA) tersebut telah atau belum menerapkan biaya atas aktivitas lingkungan yang mewujudkan *green accounting* pada perusahaan tersebut atau bahkan sebaliknya. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai perwujudan *Green Accounting* atas biaya aktifitas lingkungan yang telah dilaporkan.

LANDASAN TEORI

1) *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Menurut Rudito dan Famiola (2013:1), tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Menurut *World Business Council For Sustainability Development* (WBSD) dalam Rudito dan Famiola (2013:13), CSR adalah komitmen bisnis untuk berperilaku etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya. Menurut Bowen dalam Mardikanto (2014:86), CSR adalah kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan

yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

2) *Konsep Pelaporan CSR-Disclosure Berdasarkan Global Reporting Initiative*

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi nonprofit yang memajukan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan sosial. GRI menyajikan semua perusahaan dan organisasi dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif dan banyak digunakan di seluruh dunia. Laporan keberlanjutan adalah praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (Pedoman Laporan Keberlanjutan, versi 3.0: 3). Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi baik kontribusi positif maupun negatif. Pada umumnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (*Global Reporting initiative*) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR.

3) *Green Accounting*

a. *Pengertian Green Accounting*

Menurut *Environmental*

Accounting Guidelines yang dikeluarkan oleh menteri lingkungan Jepang dalam Meilanawati (2011:4) dinyatakan bahwa akuntansi lingkungan mencakup tentang pengidentifikasian biaya dan manfaat dari aktivitas konservasi lingkungan, penyediaan sarana atau cara terbaik melalui pengukuran kuantitatif, serta untuk mendukung proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, memelihara hubungan yang menguntungkan dengan komunitas dan meraih efektivitas dan efisiensi dari aktivitas konservasi lingkungan.

Menurut Schaltegger *et al* dalam Lako (2011:120), *green accounting* atau *environmental accounting* adalah suatu sub area dalam akuntansi yang berhubungan dengan aktivitas, metoda dan system pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi lingkungan terkait dengan dampak-dampak financial dan ekologis dari suatu system ekonomi korporat.

b. Sejarah dan Perkembangan *Green Accounting*

Di Eropa konsep *green accounting* ini sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an, dimulai dari Norwegia yang terpengaruh dengan publikasi *Limits to Growth* (Meadows et al . 1972) dan gerakan lingkungan yang berkembang. Kemudian kementerian lingkungan hidup Norwegia

mengembangkan statistik untuk pengukuran sumber daya alam sebagai alat bantu yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alamnya. Dimana ada ketakutan bahwa sumber daya alam mereka akan habis dikarenakan eksploitasi yang berlebihan. Lalu isu lingkungan ini juga mendapat perhatian pemerintah Denmark sebagai akibat adanya krisis minyak tahun 1973 yang mulai membuat perhitungan cadangan energi dan penghematannya. Pada 1980-an, Prancis mengembangkan sistem akuntansi untuk menilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif keadaan dan perubahan atas sumber daya alamnya. Dari Belanda Roefie Hueting, yang mengembangkan dan berusaha untuk menerapkan ukuran pendapatan nasional berkelanjutan yang memperhitungkan perubahan dan penurunan aset lingkungan yang disebabkan kegiatan ekonomi. Pada era tahun 1990-an *International Accounting Standards Committee* (IASC) mengembangkan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional yang meliputi pengembangan akuntansi lingkungan. Dan seiring meningkatnya standar industri yang diikuti berkembangnya auditor profesional seperti *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan. PBB lewat *Coalition for Environmental Economies* (CERES) dan

UNEP pada tahun 1997, mengeluarkan *Global Reporting Initiative* (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian pada tahun 2000 Kementerian lingkungan hidup Jepang mengeluarkan *environmental accounting guidelines* yang kemudian disempurnakan pada tahun 2002 dan 2005, dimana semua perusahaan di Jepang diwajibkan menggunakan akuntansi lingkungan yang sering disebut dengan *green accounting* atau *environmental accounting*.

c. Penerapan *Green Accounting* di Indonesia

Dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-undang lingkungan hidup pada tahun 1982. Dalam bidang Akuntansi pada tahun 1994, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) lalu menyusun suatu standar pengungkapan akuntansi lingkungan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 tentang akuntansi kehutanan dan PSAK No. 33 tentang akuntansi pertambangan umum, dalam perkembangannya kedua PSAK tersebut sudah ditarik, dan akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan dapat dilihat pada PSAK No.1 dan PSAK No.57.

d. Peraturan yang terkait dengan :

Green Accounting

Ikatan Akuntansi Indonesia belum mengatur PSAK untuk *green accounting*. Namun meski belum di atur dalam PSAK, perusahaan-perusahaan tetap memiliki peraturan yang menjadi landasan untuk *green accounting*.

Peraturan yang terkait dengan *green accounting* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Penyajian dampak lingkungan pada
6. Pada PSAK No.57 revisi 2009

e. Fungsi *Green Accounting*

Menurut *Environmental Accounting Guidelines Japan* dalam Astuti (2012:73), fungsi akuntansi lingkungan (*green accounting*) dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Fungsi internal
Akuntansi lingkungan bermanfaat bagi internal perusahaan untuk memberikan laporan mengenai pengelolaan internal, berupa keputusan manajemen mengenai pemberian harga, pengendalian biaya overhead dan penganggaran modal (*capital budgeting*)

b. Fungsi eksternal
Penerapan akuntansi lingkungan untuk eksternal lebih ditujukan untuk mematuhi peraturan pemerintah atau persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pasar modal. Jadi akuntansi lingkungan untuk eksternal adalah bagaimana merumuskan akuntansi keuangan untuk pelaporan keuangan dikombinasikan dengan kebijakan lingkungan.

f. Tujuan *Green Accounting*

Menurut Susilo dan Neni (2014:26), Tujuan diperlukannya *green accounting* adalah sebagai berikut :

1. merupakan konsep rerangka yang sangat berguna dalam pengembangan sebagai suatu proses pengelolaan portofolio asset.
2. suatu alat dalam mengukur sustainability.
3. suatu usaha untuk mengintegrasikan lingkungan dan sumber daya alam dalam perencanaan keuangan dan ekonomi.

4. untuk meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan lingkungan.

g. Klasifikasi Biaya Lingkungan *Green Accounting*

Biaya lingkungan dalam tulisan *An Introduction to Environmental Accounting As A Business Management Tool (1995)* yang disusun oleh *United States Environmental Protection Agency (US EPA)* dalam Meilanawati (2011:5) menyebutkan jika biaya-biaya yang terjadi di perusahaan dapat terbagi menjadi beberapa kelompok:

1. *Conventional Costs*,
2. *Potentially Hidden Costs*,
3. *Contingent Costs*
4. *Image and Relationship Costs*,

Menurut Hansen dan Mowen, klasifikasi biaya lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya Pencegahan Lingkungan (*Environmental Prevention Cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- b. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di

perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak.

- c. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
- d. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu :
 1. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realized external failure cost*)
 2. Biaya kegagalan yang tidak dapat direalisasikan (*unrealized external failure cost*)

h. Elemen/konsep dasar *Green Accounting*

Konsep dasar atau elemen yang menjadi dasar *green accounting* dalam *environmental accounting guideline 2002* adalah sebagai berikut:

1. Biaya konservasi lingkungan adalah investasi dan biaya-biaya berhubungan dengan pencegahan, pengurangan dan/atau penghindaran dampak

lingkungan, bergerak dari kenyataan, melakukan perbaikan yang terjadi setelah bencana dan kegiatan lainnya. Ada beberapa kategori yang berhubungan dengan konservasi lingkungan yaitu

a. bisnis adalah biaya

Dalam bisnis adalah biaya konservasi lingkungan merupakan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi bisnis dengan area bisnis. biaya upstream/downstream

Biaya upstream adalah suatu biaya yang berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan yang diciptakan sebelumnya terhadap masukan dari barang-barang dan jasa dalam area bisnis, sebaik biaya yang berhubungan terhadap usaha-usaha. Biaya downstream adalah biaya untuk usaha-usaha mengurangi dampak lingkungan yang diciptakan setelah barang-barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari area bisnis, sebaik biaya yang berhubungan dengan usaha-usaha.

b. biaya administrasi

Biaya administrasi meliputi pembendungan biaya konservasi lingkungan dari kegiatan administrasi.

- c. Biaya penelitian dan pengembangan meliputi pembendungan biaya

konservasi lingkungan dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Biaya pembelanjaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dialokasikan untuk konservasi lingkungan.

- d. Biaya kegiatan sosial meliputi pembendungan biaya konservasi lingkungan dari kegiatan social. Biaya kegiatan social adalah jenis biaya yang berhubungan dengan konservasi lingkungan yang dihasilkan untuk kebaikan masyarakat luas.
 - e. Biaya penyelamatan lingkungan
Biaya pemeliharaan lingkungan merupakan alokasi untuk perbaikan dan degradasi lingkungan atas kegiatan-kegiatan bisnis.
2. Keuntungan konservasi lingkungan yaitu keuntungan diperoleh dari pencegahan, pengurangan, dan/atau penghindaran dari dampak lingkungan, bergerak dari kenyataan, melakukan perbaikan yang terjadi setelah bencana kegiatan lainnya.
 3. Keuntungan ekonomi dari kegiatan konservasi lingkungan menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh atas laba perusahaan sebagai suatu hasil dari kemajuan.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan *Indonesian Sustainability Reporting Awards* (ISRA) tahun 2015 kategori *minning & metal*, kategori *energy, oil & gas*, serta kategori *manufacture* yang mempublikasikan laporan *annual report* di Bursa Efek Indonesia dan *sustainability report* website masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengklasifikasi biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan yang ada pada perusahaan yang termasuk dalam konsep dasar/elemen *green accounting*.
2. Membuat persentase dan grafik atas data yang telah dianalisis dan diklasifikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

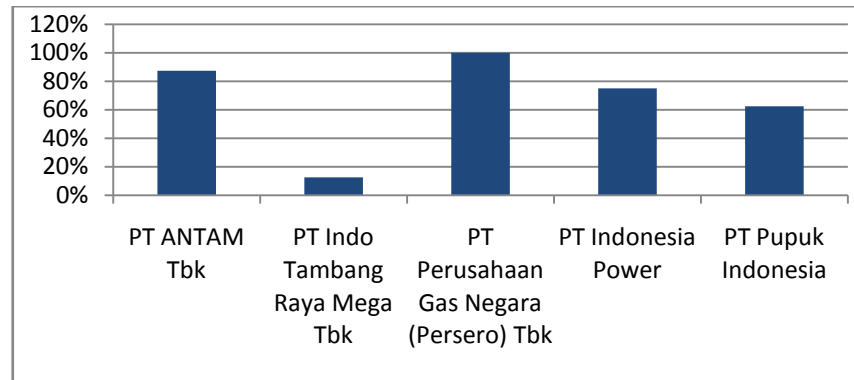
Berdasarkan data yang telah dianalisis, penulis kemudian menyajikan kembali dalam tabel secara lengkap atas konsep dasar *green accounting* dan presentase biaya konservasi lingkungan atas biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan sebagai berikut:

	Presentase konsep green accounting				
	PT ANTAM Tbk	PT Indo Tambang Raya Tbk	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	PT Indonesia Power	PT Pupuk Indonesia
Biaya area bisnis	✓	X	✓	✓	✓
Biaya up/downstream	✓	X	✓	✓	✓
Biaya adm.	✓	X	✓	✓	✓
Biaya R&D	✓	X	✓	X	✓
Biaya Kegiatan sosial	✓	X	✓	✓	X
Biaya penyelamatan lingkungan	✓	X	✓	✓	X
Keuntungan konservasi lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓
Keuntungan ekonomi dari konservasi lingkungan	X	X	✓	X	X

Rasio presentase konsep dasar green accounting	87,5 %	12,5 %	100 %	75 %	62,5 %
Total biaya konservasi lingkungan	71.328.099.076	1.199.553.000	8.865.636.800	6.279.745.998	20.877.354.650
Biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan	214.000.000.000	24.468.206.093	300.978.210.116	18.349.789.135	145.081.539.000
Rasio Persentase CSR atas biaya konservasi lingkungan	33,3%	4,9%	2,9%	34,2%	14,4%

Dari hasil presentase yang telah dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan penghargaan ISRA, selanjutnya akan disajikan berupa grafik. Grafik perusahaan yang mencerminkan *green accounting* sesuai data yang telah diolah adalah sebagai berikut :

Grafik Perusahaan Green Accounting



Sumber diolah : Peneliti, 2017

Dari hasil grafik diatas dapat dilihat bahwa aktifitas lingkungan perusahaan-perusahaan diatas mencerminkan *green accounting* , kecuali PT indo Tambang Raya Megah Tbk, hal ini terlihat dari grafik PT indo Tambang Raya Megah Tbk yang tidak mencapai 50% karena PT indo Tambang Raya Megah Tbk tidak melaporkan biaya dari aktifitas lingkungan dalam *annual report* dan *sustainability report*.

Grafik yang telah disajikan diatas memperlihatkan bahwa aktivitas lingkungan PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk lebih unggul dalam mencerminkan *green accounting*, bahkan PT ANTAM Tbk yang menjadi juara umum dalam penghargaan ISRA pun dikalahkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (persero). Hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (persero) mencerminkan *green accounting* dengan persentase 100% dibanding PT ANTAM Tbk yang hanya mencapai

87,5%, in membuktikan bahwa penghargaan yang diterima tidak menjamin aktifitas lingkungan perusahaan tersebut telah mencerminkan *green accounting*.

Meskipun biaya aktifitas PT PGN Tbk mencapai 100% mencerminkan konsep dasar *green accounting*, tetapi untuk persentase biaya CSR atas biaya lingkungan PT PGN Tbk sangat rendah dengan persentase 2,9 % dibawah perusahaan-perusahaan lain yang mendapat penghargaan ISRA. Hal ini membuat perusahaan PT PGN Tbk belum sepenuhnya memprioritaskan lingkungan, jika dibanding dengan perusahaan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa bahwa :

1. Aktifitas lingkungan yang ada dalam laporan CSR dalam *annual report* dapat

- dikatakan belum mencerminkan *green accounting* jika biaya aktifitas lingkungan belum dipublikasikan secara detail. Hal ini karena belum adanya standar pelaporan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga biaya aktifitas yang telah dilaporkan masih bersifat mandatory (sukarela).
2. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan ISRA tidak menjamin bahwa perusahaan yang menang dikatakan mencerminkan *green accounting*. Hal ini karena perusahaan tersebut masih melaporkan aktifitas lingkungannya dengan kebijakan masing-masing perusahaan.
 3. Biaya aktifitas PT PGN Tbk mencapai 100% mencerminkan *green accounting* disbanding perusahaan lain tidak menjamin bahwa PT PGN Tbk memprioritaskan lingkungan. Hal ini terlihat dari persentase biaya CSR atas biaya lingkungan PT PGN Tbk sangat rendah dengan persentase 2,9 % diatas perusahaan-perusahaan lain yang mendapat penghargaan ISRA.

b. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan-perusahaan terutama perusahaan pertambangan, energy, dan manufaktur melaporkan biaya aktifitas lingkungan yang ada, agar pemakai laporan dapat mengetahui dengan jelas kepedulian perusahaan terhadap lingkungan secara transparan.
2. Untuk Ikatan Akuntan Indonesia sebaiknya segera menetapkan standar *green accounting* dalam laporan, agar tidak ada lagi yang melaporkan aktifitas lingkungan secara sukarela.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya fokus pada satu perusahaan saja agar dapat mendapatkan informasi secara detail terhadap obyek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Kusumaningtias, Rochmawati, (2013), "*Green Accounting, Mengapa Dan Bagaimana*". Jurnal Dosen Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Sosial Responsibility (Tanggung Jawab Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Meilanawati, Refi. 2011. "Analisis Pengungkapan Biaya lingkungan (Environmental costs) pada PT. Semen Indonesia Persero, Tbk". Jurnal mahasiswa Negeri Surabaya.
- Puspita, Dyah Aruning dan Triana Murtiningtyas. 2011. "Analisis Corporate Social Responsibility Disclosure sebagai perwujudan Green Accounting (Studi Pada Perusahaan Dengan Peringkat Emas, Hijau dan Biru Berdasarkan Data PROPER)". Jurnal mahasiswa Stie Malangkecewara
- Rudito, Bambang dan Famiola Melia. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Susilo, Joko dan Neni Astuti. 2014. "Penyusunan Model Green Accounting untuk perusahaan melalui perhatian, keterlibatan, pelaporan akuntansi lingkungan dan auditnya". *Jurnal Dosen Akuntansi niversitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Dosen Manajemen Universitas Panca Sakti, Tegal*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

www.antam.com. sustainability report tahun 2014

www.bei.co.id. Annual Report tahun 2014

www.env.go.jp. Konsep dasar environmental accounting

www.indonesiapower.co.id. sustainability report tahun 2014

www.itmg.co.id. sustainability report tahun 2014

www.pgn.co.id. sustainability report tahun 2014

www.pupuk-indonesia.com. sustainability report tahun 2014

PENGARUH NILAI PERSEDIAAN DAN PROFIT MARGIN TERHADAP MARKET VALUE PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2014-2015

Serly Pertiwi¹, Poppy Indriani², M.Titan Terzaghi²

Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹

Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang

Pos-el: serlypertiwi4@gmail.com, poppy.indriani@binadarma.ac.id, mtitant4@gmail.com

ABSTRACT: *Impact of Stock Value and Margin Profit toward manufacturer company which listed on Indonesian Stock Exchange (IDX). This research studies all variables which impacted the value of market in Indonesian Stock Exchange (IDX). The variables that are going to be analyzed are the value of stock and margin profit. Population of this research is the manufacturer companies which listed on Indonesia Stock Exchange on the period of 2014-2015. Samples are consist of 33 samples chosen by using certain criterias. The result of the hipotesis testing shows that the variable of stock value and margin profit does not have any significant impact toward market value. The score of adjusted R2 is only 17%, meaning there is still 83% factors which is consist of other variabel which explains market value.*

Keyword : Stock Value, margin profit and market va

ABSTRAK: Penelitian ini membahas variabel-variabel yang mempengaruhi Market Value di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel-variabel yang akan dianalisis adalah Nilai Persediaan dan Profit Margin. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2015. Sampel yang digunakan sebanyak 33 dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Nilai Persediaan dan Profit Margin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Market Value. Nilai Uadjusted R2 hanya sebesar 17% yang berarti ada 83% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya yang menjelaskan Market Value.

Kata Kunci : Nilai Persediaan, Profit Margin dan Market Value

1. Pendahuluan

Pasar modal pada dasarnya menjembatani hubungan antara pemilik dana (investor) dengan pengguna dana (emiten). Para investor menggunakan pasar modal untuk keperluan investasi portofolionnya dengan tujuan untuk mengumpulkan penghasilan. Perkembangan pasar modal menunjukkan ada keterbukaan dikalangan pemilik perusahaan dalam hal kepemilikan dan kesadaran untuk melakukan ekspansi

demikian perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan terdiri dari berbagai macam bidang, mulai dari yang bergerak di bidang usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan dan usaha-usaha lainnya. Masing-masing bidang usaha tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dan khas. Sehingga dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut tidaklah gampang, sering terjadi hambatan dalam pelaksanaannya sehingga sebuah

perusahaan harus lebih cermat dalam menjalankan usahanya termasuk dalam hal persediaan.

Persediaan seharusnya dalam kondisi berputar, perputaran persediaan harus stabil, persediaan tidak boleh terlalu banyak atau sedikit, karena jika persediaan terlalu banyak maka akan menambah biaya untuk mempertahankan persediaan tersebut. Sedangkan jika terlalu sedikit, saat ada penambahan pesanan tidak terduga perusahaan tidak dapat mengatasinya. Besarnya investasi persediaan pada persediaan harus dikelola dengan tepat.

Profit margin yang tinggi sangat diinginkan, karena mengindikasikan pendapatan yang dihasilkan melebihi harga pokok penjualan. Informasi laba juga bermanfaat dalam menetapkan harga suatu perusahaan (Smith dan Skousen, 1999:115). Pada umumnya tujuan utama setiap perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya, memaksimalkan kemakmuran pemilik saham dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta untuk megembangkan usahanya.

Market Value menurut Jogiyanto (2000:89) adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham

bersangkutan di pasar bursa. Harga pasar merupakan harga jual saham sebagai konsekuensi dari posisi tawar antara penjual dan pembeli saham sehingga nilai pasar menunjukkan fluktuasi dari harga saham. Sehingga *market value* adalah nilai yang mencerminkan kondisi perusahaan dilihat dari kondisi ekuitas perusahaan di pasar yang tercermin dalam harga saham biasa dan jumlah lembar saham yang dikeluarkan perusahaan.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul : **“Pengaruh Nilai Persediaan dan *Profit Margin* Terhadap *Market Value* Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2015”**

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pengaruh nilai persediaan dan profit margin terhadap market value perusahaan?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan nilai persediaan terhadap *market value* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan *profit margin* terhadap *market value* pada perusahaan

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015.

2. Landasan Teori

Nilai Persediaan

Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. PSAK 14 (revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai aset yang; (i) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (ii) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Profit Margin

Profit Margin on sales merupakan rasio yang mengukur laba bersih per dolar penjualan; dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan. (Brigham, Houston, 2010, h.146). Dengan demikian *profit margin* yang tinggi sangat diinginkan karena mengindikasikan laba yang dihasilkan melebihi harga pokok penjualan (Darmadji dan Fakhrudin, 2006, h.85). Jika perusahaan dengan margin laba yang rendah kemungkinan akan mendapatkan tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham yang tinggi karena adanya penggunaan *leverage* keuangan.

Market Value

Market value adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa dan ditentukan oleh pelaku pasar pada saat tertentu. Harga pasar merupakan harga jual saham sebagai konekuensi dari posisi tawar antara penjual dan pembeli saham sehingga nilai pasar menunjukkan fluktuasi dari harga saham. Harga saham selalu mengalami perubahan oleh sebab itu pelaku pasar harus mampu memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi harga saham, harga suatu saham dapat ditentukan menurut hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang membeli suatu saham maka harga saham cenderung akan bergerak naik begitu juga sebaliknya, semakin banyak orang yang menjual saham suatu perusahaan, maka harga saham tersebut cenderung akan bergerak turun.

3. Metode Penelitian

3.1 Pengumpulan Data

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2015, data di ambil dari www.idx.co.id

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiono (2016:80), ialah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiono (2016:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur periode 2014-2015 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Didalam penelitian ini sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiono, 2016), teknik *purposive sampling* yaitu metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Penelitian ini menggunakan sampel tidak acak dengan *purposive sampling*. Dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu.

Adapun kriteria-kriteria perusahaan yang harus di miliki sebagai berikut :

1. Perusahaan sampel mengeluarkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) untuk tahun 2014-2015
2. Perusahaan sampel memperoleh laba berturut-turut selama tahun 2014-2015

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Akasha Wira International Tbk	18	Martina Berto Tbk
2	Indo Kordsa Tbk	19	Pashida Aneka Niaga Tbk
3	Berlina Tbk	20	Semen Baturaja Persero Tbk
4	Barito Pasific Tbk	21	Taisho Pharmaceutical Tbk
5	Chitose Internasional Tbk	22	Indo Acitama Tbk
6	Lotte Chemical Titan Tbk	23	SLJ Global Tbk
7	Gudang Garam Tbk	24	Tifico Fiber Indonesia Tbk
8	Gajah Tunggal Tbk	25	Tirta Mahakam Resources Tbk
9	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	26	Surya Toto Indonesia Tbk
10	Indofood Sukses Makmur Tbk	27	Chandra Asri Petrochemical Tbk
11	Indal Aluminium Industry Tbk	28	Trisula International Tbk
12	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	29	Tempo Scan Pasific Tbk
13	Kabelindo Murni Tbk	30	Ultrajaya Milk Industry Tbk
14	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	31	Nusantara Inti Corpora Tbk
15	Langgeng Makmur Industry Tbk	32	Unilever Indonesia Tbk
16	Multi Prima Sejahtera Tbk	33	Wismillak Inti Makmur Tbk
17	Malindo Feedmill Tbk		

4. Analisis dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder

berupa *annual report* dan laporan kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tanggal 31 Desember 2015.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Deskriptif Statistics

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviatio n
Nilai Persediaan	66	58263	762247944	135931621,09	197196763,282
Profit Margin	66	,00	304,44	12,8470	54,63343
Market Value	66	1132358	907385960	151116508,33	210792738,57
Valid N (listwise)	66				

Sumber : Data diolah, 2016

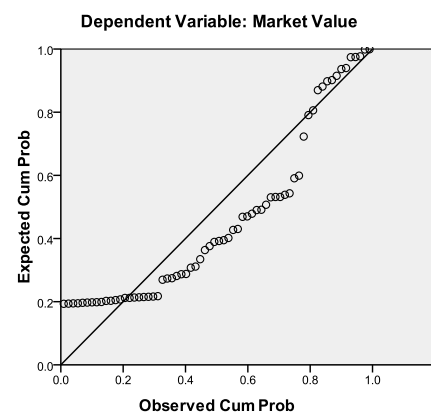
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian, NP (X1) yaitu Nilai Persediaan mempunyai nilai minimum sebesar 58263, nilai maximum sebesar 762247944, nilai rata-rata (mean) sebesar 135931621,09 dan nilai standar deviasi sebesar

197196763,282. PM (X2) yaitu *Profit Margin* mempunyai nilai rata-rata minimum sebesar ,00, nilai maximum sebesar 304.44, nilai rata-rata (mean) sebesar 12,8470 dan nilai standar deviasi sebesar 54,63343. MV (Y) yaitu *Market Value* memiliki nilai minimum sebesar 1132358, nilai maximum sebesar 907385960, nilai rata-rata (mean) sebesar 151116508,33, dan standar deviasi sebesar 210792738,57

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan syarat yang penting pada pengujian kebermaknaan koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih diragukan, karena statistik uji t dalam analisis regresi diturunkan dari distribusi normal

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan normal *probability* plot tersebut diketahui bahwa data menyebar disekitar atau mendekati garis normal, maka diasumsikan bahwa data menyebar disekitar atau mendekati garis normal, maka diasumsikan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Autokolerasi

Menguji Autokolerasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui adanya kolerasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokolerasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika:

1. Angka D-W terletak antara du dan 4-dU berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W terletak antar dan dU dan 4-dU berarti tidak ada autokolerasi.
3. Angka D-W terletak antar dan dU 4-dU bearti ada autokolerasi negatif.

Tabel 4.8

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Squared	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.218 ^a	.048	.017	2.089E8	2.124

1	.218 ^a	.048	.017	2.089E8	2.124
---	-------------------	------	------	---------	-------

a. Predictors: (Constant), *Profit Margin*, Nilai Persediaan

b. Dependent Variable: *Market Value*

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat nilai DW sebesar 2,124 kemudian berdasarkan table DW diketahui nilai dU berdasarkan tabel DW sebesar 1,6640. berdasarkan data tersebut diketahui nilai DW terletak antara dU dan $4 - dU$ yaitu $1,6640 < 2,124 < 2,3360$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gangguan autokorelasi.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kolerasi antar variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIP). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen dijelaskan variabel independen lainnya. Suatu model regresi dikatakan adanya multikolinieritas adalah apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan $VIF > 10$.

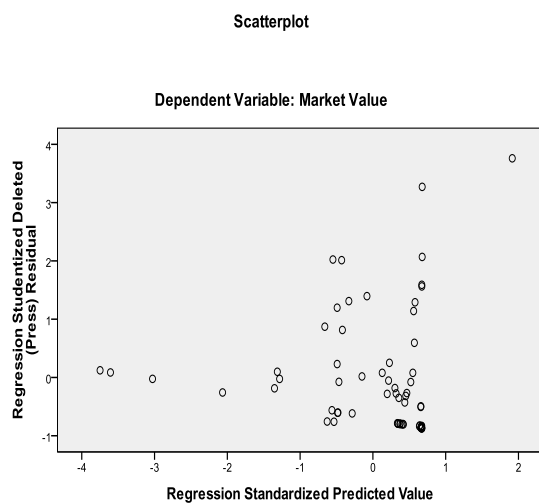
Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.7 terterlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan hasil

perhitungan *variance inflation factor* (VIP) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi yang diajukan bebas multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan hasil uji Gletjser di atas, dapat dilihat bahwa pada tabel Coefficient nilai signifikan.



Berdasarkan gambar 4.2 grafik *Scatterplot* Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara lain prediksi variable terikat (ZPREID) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Model yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$MP = X + B1NP + B2PM + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 1.820E8 dengan masing – masing variabel sebagai berikut :

1. Variabel NP (X1) yaitu nilai persediaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -275. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp. 1 nilai persediaan akan menyebabkan kenaikan *market value* (Y) sebesar -275 dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan.
2. Variabel PM (X2) yaitu profit margin memiliki nilai koefisien regresi sebesar 507281.194. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp. 1 *profit margin* akan

menyebabkan kenaikan market value (Y) sebesar 507281.194 dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen).

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.13, dilihat dari variabel NP (X1) yaitu nilai persediaan memiliki nilai t hitung sebesar $-1.775 < 1998$. (t tabel $\alpha = 0,05$, $df = (66-4) = 62$), sedangkan nilai signifikan ($market\ value = 0,369 > \alpha = 0,05$). Ini menyatkan bahwa H1 tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti nilai persediaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *market value* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2015. Variabel PM (X2) yaitu *profit margin* memiliki nilai t hitung sebesar $906 < 1998$. (t tabel $\alpha = 0,05$, $df = (66-4) = 62$), sedangkan nilai signifikan ($market\ value = 0,369 > \alpha = 0,05$). Ini menyatakan bahwa H2 tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti *profit margin* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

market value pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2015.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau hipotesis secara simultan digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas (independen) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (independen)

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F dari hasil tabel bahwa nilai persediaan dan *profit margin* terhadap *market value* tidak berpengaruh dengan nilai F hitung $< F$ tabel ($0,1576 < 3,14$) dengan nilai signifikan ($0,215 > 0,05$) jadi dapat disimpulkan bahwa nilai persediaan dan *profit margin* tidak berpengaruh secara bersama terhadap *market value*

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar R^2 maka semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin kecil nilai R^2 maka kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel independen amat terbatas.

Adjusted R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.218 ^a	.048	.017	2.089E8

a. Predictors: (Constant), *Profit*

Margin, Nilai Persediaan

b. Dependent Variable: *Market Value*

Sumber : Data diolah, 2016

Pada tampilan tabel 4.11 model summary besarnya koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai adjuster R2 yaitu 0,048, hal ini berarti 0,48% variabel *market value* yang diprosikan *price book value* dapat dijelaskan oleh kebijakan nilai persediaan dan *profit margin* sedangkan sisanya 52% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh nilai persediaan dan *profit margin* terhadap *market value* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang penulis sajikan dalam Bab IV, maka penulis

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel nilai persediaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *market value*. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai persediaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *market value* dengan nilai signifikan 0,482 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 ($\alpha = 5\%$ dan 10%).
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel *profitmargin* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *market value*. *Profit margin* tidak berpengaruh signifikan terhadap *market value* disebabkan karena *profit margin* tidak mempertimbangkan resiko dan jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Sejauh *profit margin* hanya berfokus pada tingkat pengembalian, peningkatan *profit margin* mungkin tidak konsisten dengan peningkatan kekayaan pemegang saham sehingga

hal ini akan sangat mempengaruhi investor mengenai *market value*..

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Rahmadanti, 2003-2006 Analisis Pengaruh Penerapan Metode Arus Biaya Persediaan, Nilai Persediaan, Perputaran Persediaan dan Gross Profit Margin Terhadap Market Value Perusahaan Manufaktur. Universitas Trisakti, Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Volume 4, Nomor 1.
- Anni. 2012. Analisis pengaruh penerapan Metode Arus Biaya Persediaan, Nilai Persediaan, Nilai Buku, Laba Akuntansi, dan Total Arus Kas Terhadap Market Value: Studi Empiris Relevansi Nilai Akuntansi. Skripsi Akuntansi. Universitas Esa Unggul.
- Bursa Efek Indonesia, 2015. Laporan Keuangan, Laba Berturut-Turut 2014-2015. <http://www.idx.co.id>. Diakses terakhir 15 November 2016 pukul 22.00 WIB
- Martani, Wardani, Farahmita, Tanujaya. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat
- Priyatno. 2013 Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS Gava Media:Jogjakart
- Prihadi, Toto. 2013. Analisis Laporan Keuangan Lanjutan. Jakarta: PPM.
- Santoso. 2010 Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting. Repika: Aditama
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat
- Sari, Ika Ratna. 2007. Analisis Pengaruh Profit Margin dan Penerapan Metode Arus Biaya Persediaan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Situmorang, Artha. 2011. Analisis Pengaruh Penerapan Metode Arus Biaya Persediaan, Nilai Persediaan, dan Profit Margin Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food dan Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Alfabeta:Bandung.
- Sumiyati.2008-2011. Pengaruh Penerapan Metode Arus Biaya Persediaan, Nilai Persediaan, dan Profit Margin Terhadap Market Value Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau
- Situmorang, Artha. 2011. Analisis Pengaruh Penerapan Metode Arus Biaya Persediaan, Nilai Persediaan, dan Profit Margin Terhadap Nilai

Seminar Hasil Penelitian FEB, 17 Maret 2017

*Perusahaan Pada Perusahaan
Food dan Beverages yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Skripsi
Fakultas Ekonomi.*

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, EARNINGS MANAGEMENT, TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Setri Ayu Lastari¹, Verawaty², Citra Indah Merina³
Dosen Universitas Bina Darma^{1,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma³
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang

Pos-el : verawaty_mahyudin@yahoo.com¹, citra_ims@yahoo.com², setriayulastari@gmail.com³

Abstract: The purpose of this research is to know the influence of Intellectual Capital, Earnings Management, and Tax Avoidance of companies with Good Corporate Governance as the variable moderating in the banking company listed on the Indonesia stock exchange in 2015. The approach used in this study was the quantitative approach that is analyzing the data in the form of numbers and perform data analysis using statistical procedures. The data used in this study are obtained from the annual report of the banking company. After going through the stage of purposive sampling, then a decent sample used as many as 38 companies. Technique of data analysis in this study uses the classic assumption test and multiple linear analysis using SPSS 22. The results of this study indicate that Intellectual Capital, Earnings Management and Tax Avoidance does not affect the value of the company. While the Intellectual Capital that is moderated by Good Corporate Governance to corporate values and Earnings Management that moderated by Good Corporate Governance not influence the value of the company.

Keywords: Good Corporate Governance, The Company's Value.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, dan *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel Pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu menganalisa data dalam bentuk angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan. Setelah melewati tahap *purposive sampling*, maka sampel yang layak digunakan sebanyak 38 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis linier berganda menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital*, *Earnings Management* dan *Tax Avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan *Intellectual Capital* yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan *Earnings Management* yang dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh nilai perusahaan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Nilai Perusahaan.

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba sehingga dapat memakmurkan pemegang saham. Memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan bisa dicapai melalui bermacam-macam cara, di antaranya melalui efisiensi di semua bidang, baik produksi, sumber daya manusia, maupun keuangan. Memaksimalkan

laba dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham apabila harga saham mengalami kenaikan. Pemegang saham akan memberikan tugas kepada pihak manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu prinsip mengendalikan

perusahaan untuk mencapai keseimbangan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antar pemegang saham, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit demi tercapainya tujuan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada penelitian ini diantaranya *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, dan *Tax Avoidance* serta *Good Corporate Governance* (GCG). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan tersebut, merupakan keputusan keuangan yang dilakukan pihak manajemen keuangan di suatu perusahaan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam memaksimalkan nilai perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ponga dan Amanah (2015) yang menggunakan dua variabel, yaitu CSR dan *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi. Sejauh ini penelitian banyak menggunakan satu atau dua variabel sehingga peneliti menambahkan variabel menjadi tiga, yaitu *Intellectual Capital* (Ponga dan Amanah, 2015), *Earnings Management* (AT dan Puspitosarie, 2013), dan *Tax Avoidance* (Herdiyanto, 2015). Peneliti menambahkan variabel pemoderasi terhadap nilai perusahaan yaitu *Good Corporate Governance*. Pemilihan objek penelitian yaitu

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pemilihan objek ini, karena saat ini perusahaan perbankan dianggap memberikan kontribusi tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dengan menggerakkan sektor rill. Dengan demikian perlu dikaji melalui penelitian faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu permasalahan tentang sejauh mana pengaruh *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, dan *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan. Konflik antara manajemen dan pemegang saham yang dapat menurunkan nilai perusahaan, sehingga diterapkan *Good Corporate Governance* secara efisien untuk memperkuat perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metodologi Penelitian

Desain penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Sanusi (2011), desain atau rancangan penelitian merupakan cetak biru bagi peneliti. Oleh karena itu, desain ini perlu disusun terlebih dahulu sebelum peneliti melaksanakan penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada metode hipotesis-deduktif. Menurut Sekaran (2011), Penelitian menggunakan metode ini melibatkan tujuh tahap, yaitu:

1. Pengamatan

Tahap ini mengamati dengan melihat apakah memang benar terdapat fenomena tertentu (dalam hal ini apakah *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, dan *Tax Avoidance* mempunyai hubungan positif dengan nilai perusahaan dan *Good Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap hubungan tersebut).

2. Pengumpulan informasi awal

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan informasi mengenai pengaruh terhadap nilai perusahaan yakni pengamatan pada perusahaan perbankan konvensional yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia.

3. Perumusan teori

Pada tahap ini peneliti berupaya untuk menggabungkan dan mengintegrasikan seluruh informasi yang diperoleh sehingga menjadi suatu kesatuan yang memiliki arti yang logis sehingga permasalahan yang diangkat (dalam hal ini nilai perusahaan mempunyai hubungan positif dengan *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, dan *Tax Avoidance* serta *Good Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi).

4. Penyusunan hipotesis

Gabungan antara teori-teori di antara variabel yang mendasari serta berbagai informasi terkait seperti penelitian-penelitian empiris terdahulu, akan membantu peneliti

dalam merumuskan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan pada penelitian pengembangan nilai perusahaan, maka peneliti mengasumsikan bahwa terdapat hubungan positif dengan acuan sampel yakni perusahaan perbankan konvensional di Bursa Efek Indonesia.

5. Pengumpulan data ilmiah lebih lanjut

Karena hipotesis yang dirumuskan akan diuji, maka tahap berikutnya adalah pengumpulan data ilmiah lebih lanjut terhadap variabel-variabel yang akan diukur, yang nantinya akan menjadi basis bagi analisis berikutnya.

6. Analisis data

Dalam tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara statistik untuk melihat apakah hipotesis terbukti.

7. Deduksi

Merupakan proses dimana peneliti sampai pada kesimpulan, yaitu dengan menginterpretasikan arti dari hasil analisis data yang diperoleh. Berdasarkan deduksi tersebut, maka peneliti dapat merekomendasikan apakah permasalahan yang diangkat telah terjawab sesuai dengan hipotesis atau tidak.

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

- *Intellectual capital*

Intellectual Capital (IC) adalah materi

intelektual yang telah diformalisasi, ditangkap, dan dimanfaatkan untuk memproduksi aset yang nilainya lebih tinggi. IC diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan. IC diukur berdasarkan *value added* yang diciptakan dari *Value Added Human Capital* (VAHC), *Value Added Capital Employed* (VACE), dan *Structural Capital Value Added* (SCVA).

- $VAHC = VA/HC$
- $VACE = VA/CE$
- $SCVA = SC/VA$

Rasio-rasio tersebut merupakan kalkulasi kemampuan intelektual sebuah perusahaan. Hasilnya sebuah indikator baru VAICTM, yaitu sebagai berikut:

$$VAICTM = VAHC + VACE + SCVA$$

Business Performance Indicator (BPI) yang membagi modal intelektual perusahaan kedalam empat kategori yaitu:

1. *Top performers* – skor VAICTM diatas 3
2. *Good performers*- skor VAICTM antara 2.0 sampai 2,99
3. *Common performers*- skor VAICTM antara 1,5 sampai 1,99
4. *Bad performers*- skor VAICTM dibawah 1,5

- **Earnings Management**

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki pihak tertentu, atau terutama manajemen perusahaan. Manajemen melakukan tindakan manajemen laba dengan cara memanfaatkan pos-pos akrual didalam laporan keuangan. Total akrual dibedakan

menjadi dua bagian yaitu (1) *normal accrual* atau *non discretionary accrual*, dan (2) *abnormal accrual* atau *discretionary accrual*. Manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*, yang pada penelitian ini dihitung dengan:

- $ACCR = EARN - CFO$ (1)

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai *non discretionary*

Accrual (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

- $NDA = \beta_0 + \beta_1[\Delta REV - \Delta REC] + \beta_2 PPE + \beta_3 \Delta CFO$ (2)

Selanjutnya *Discretionary Accruals* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

- $DA = ACCR - NDA$ (3)

Dimana:

ACCR = Total Akrual

EARN = Laba Bersih

CFO = Arus kas dari kegiatan operasi

ΔCFO = Perubahan arus kas operasi

ΔREV = Perubahan pendapatan

ΔREC = Perubahan nilai piutang

PPE = Nilai kotor aktiva tetap

NDA = *Non-Discretionary Accruals*

DA = *Discretionary Accruals*

- **Tax Avoidance**

penghindaran pajak merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar perundang-undang yang berlaku disuatu negara dengan kata lain merupakan suatu ktifitas yang legal dan aman bagi wajib pajak karena aktifitas ini dilakukan dengan caramemanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang sert aperaturan pajak.

$$\text{CASH ETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

- **Nilai perusahaan**

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh investor karena kemakmuran pemegang saham akan tercermin dalam nilai perusahaan atau melalui nilai perusahaan kinerja manajer keuangan dapat diketahui. Nilai perusahaan dalam penelitian ini di proksikan dengan *price book value* (PBV). PBV mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh.

$$\text{PBV} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku}}$$

- **Good Corporate Governance**

Komite Nasional kebijakan *Governance* menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Seluruh anggota komisaris}}$$

2.3 Teknik Analisis

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\text{NP} = \alpha + \beta_1 \text{IC} + \beta_2 \text{EM} + \beta_3 \text{TA} + \beta_4(\text{GCG} * \text{IC}) + \beta_5(\text{GCG} * \text{EM}) + e$$

Keterangan:

NP = Nilai Perusahaan

IC = *Intellectual Capital*

EM = *Earnings Management*

TA = *Tax Avoidance*

GCG = *Good Corporate Governance*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Tingkat Kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Semua Variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig.(2-tailed) dengan seluruh variabel diatas $\alpha = 0,05$ yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10 % dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai *absolute* residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

3.2 Uji Hipotesis

- **Koefisien Determinasi (R²)**

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,386 ^a	,149	,016	,67905

a. Predictors: (Constant), IC, EM, TA, GCGIC, GCGEM
b. Dependent Variable: NP

koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai adjusted R² yaitu 0,016, hal ini berarti 1,6% variabel nilai perusahaan yang diprosikan *price book value* dapat dijelaskan oleh variabel *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, *Tax Avoidance*, dan variabel pemoderasi, sedangkan sisanya 99,84 % merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

- **Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,583	5	,517	1,120	,370 ^b
	Residual	14,756	32	,461		
	Total	17,338	37			

a. Dependent Variable: NP
b. Predictors: (Constant), IC, EM, TA, GCGIC, GCGEM

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F sebesar 1,120 dengan tingkat probabilitas 0,370 (tidak signifikan). hasil uji F (regresi simultan) juga menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,1 jadi dapat disimpulkan bahwa *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, *Tax Avoidance*, GCG memoderasi *Intellectual Capital*, dan GCG memoderasi *Earnings*

Management tidak berpengaruh secara bersama- sama terhadap nilai perusahaan.

- **Uji Signifikansi Parsial (Uji T)**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,200	,463		6,911	,000
	IC	-,420	,230	-,724	-1,829	,077
	EM	-,016	,467	-,007	-,035	,972
	TA	-,840	1,465	-,097	-,573	,571
	GCGIC	,812	,374	,857	2,171	,037
	GCGEM	,003	,042	,016	,082	,935

a. Dependent Variable: NP

Berdasarkan hasil uji statistik t terlihat bahwa variabel *Intellectual Capital* (IC), *Earnings Management* (EM), *Tax Avoidance* (TA), dan GCG memoderasi *Earnings Management* (GCGEM) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan (NP) dengan tingkat signifikansi 10%. Adapun GCG memoderasi variabel *Intellectual Capital* (GCGIC) menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan (NP) dengan tingkat kurang dari signifikansi 10 %.

3.3 Pembahasan

- ***Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan**

Hasil hipotesis pertama (H₁) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi untuk variabel *Intellectual Capital* sebesar 0,077 lebih kecil dari 0,1 (α=10%) dan nilai koefisien regresi sebesar -1,829. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Randa dan Solon (2012) dan Handayani (2015) yang menyatakan bahwa

Intellectual Capital memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, hasil analisis ini mendukung hasil penelitian Faktur dan putri (2015) dan Ponga dan Amanah (2015) yang menyatakan *Intellectual Capital* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan yang mengelola sumber daya *Intellectual Capital* secara maksimal akan mampu menciptakan *value added* yang lebih besar dan keunggulan kompetitif, yang akan bermuara terhadap peningkatan nilai perusahaan (Randa dan Solon, 2012). Dari beberapa hasil penelitian tentang nilai perusahaan menyatakan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Alasan *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena *Intellectual Capital* pada perusahaan perbankan pada tahun 2015 kurang mampu menciptakan *value added* yang unggul dikarenakan perusahaan perbankan masih memiliki *Intellectual Capital* yang *bad performers* yang skor VAICTM dibawah 1,5. Perusahaan perbankan kurang memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki karyawan, penggunaan modal fisik tidak secara efisien, dan kinerja yang kurang baik untuk perusahaan sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak terwujud.

Dari beberapa hasil penelitian tentang nilai perusahaan menyatakan bahwa berpengaruh negatif terhadap *Intellectual Capital*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang berpengaruh negatif. Jadi semakin tinggi

Intellectual Capital maka nilai perusahaan akan menurun. Dengan demikian hipotesis *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak.

- ***Earnings Management* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan**

Hasil hipotesis kedua (H_2) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi untuk variabel *Earnings Management* sebesar 0,972 diatas dari 0,1 ($\alpha=1\%$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Earnings Management* tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Ridwan dan Gunardi (2013), AT dan Puspitosarie (2013), dan Pamungkas (2012) yang menyatakan *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, hasil analisis ini mendukung hasil penelitian Lestari dan Pamudji (2013) dan Hapsari (2014) yang menyatakan bahwa *Earnings Management* tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Earnings Management merupakan suatu tindakan mengatur laba sesuai yang dikehendaki pihak tertentu terutama oleh manajemen. Pengaturan laba ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada pemegang saham bahwa kinerja perusahaan yang terus membaik, yang nantinya akan berpengaruh kepada harga saham, dan nilai perusahaan itu sendiri (Hapsari, 2014). Dari beberapa hasil penelitian tentang nilai perusahaan menyatakan bahwa *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hasil penelitian ini

menunjukkan hal yang tidak sama dengan penelitian.

Alasan *Earnings Management* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan pada tahun 2015 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Inonesia (BEI) mengalami ketidakpastian tentang waktu kenaikan suku bunga AS sehingga manajemen tidak memiliki untuk mengatur *Earning Management* pada tahun 2015. Tidak stabilnya laba perusahaan sehingga sulit bagi pihak *Earnings Management* untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Dari beberapa hasil penelitian tentang nilai perusahaan menyatakan bahwa berpengaruh negative terhadap *Earnings Management*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang berpengaruh negatif. Jadi semakin tinggi *Earnings Management* maka nilai perusahaan akan menurun. Dengan demikian hipotesis *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak.

- ***Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan**

Hasil hipotesis ketiga (H_3) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi untuk variabel *Tax Avoidance* sebesar 0,571 lebih besar dari 0,1 ($\alpha=10\%$). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Herdiyanto (2015) dan Karimah dan Taufiq (2016) yang menyatakan *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, hasil analisis ini

mendukung hasil penelitian Ilmiah dan Sutrisno (2014) yang menyatakan bahwa *Tax Avoidance* tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Tax Avoidance merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang yang berlaku disuatu negara dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat di peraturan pajak untuk memperkecil jumlah pajak perusahaan dan menaikkan laba perusahaan sehingga berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat (Karimah dan Taufiq, 2016). Dari beberapa hasil penelitian tentang nilai perusahaan menyatakan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan hal sama dengan penelitian.

Alasan *Tax Avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada tahun 2015 penurunan kinerja IHSG maka saham menurun sehingga penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan perbankan pada tahun 2015 ini tidak bisa meningkatkan nilai perusahaan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi membuat penghindaran pajak juga tidak dilakukan pihak manajemen perusahaan.

Dari beberapa hasil penelitian tentang nilai perusahaan menyatakan bahwa berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang berpengaruh negatif. Jadi semakin tinggi *Tax Avoidance* maka nilai perusahaan akan menurun. Dengan demikian hipotesis *Tax Avoidance*

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak.

- **GCG berpengaruh positif terhadap hubungan *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan**

Hasil hipotesis keempat (H_4) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi untuk variabel GCGIC sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,1 ($\alpha=10\%$). Jadi GCG berpengaruh positif terhadap hubungan *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan GCG mampu memoderasi hubungan antara *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Octaviany (2015), yang menyatakan GCG tidak mampu memoderasi hubungan antara *Intellectual Capital* dengan nilai perusahaan. Akan tetapi, hasil analisis ini mendukung hasil penelitian Ponga dan Amanah (2015), yang menyatakan bahwa GCG mampu memoderasi hubungan antara *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan.

GCG mampu memoderasi *Intellectual Capital* untuk menciptakan suatu nilai tambah bagi *stakeholders* dengan meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara mengungkapkan sukarela suatu perusahaan yaitu pengungkapan *Intellectual Capital* sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Ponga dan Amanah, 2015). Dengan demikian pernyataan ini tidak menunjukkan hasil penelitian.

Alasan GCG mampu memoderasi *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan karena GCG yang diproksi komisaris independen dapat menciptakan *Intellectual*

Capital yang tinggi pada perusahaan dimana pada tahun 2015 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami Tekanan ekonomi global pada tahun 2015 membuat investor asing banyak mengalihkan dananya lebih awal untuk mengatur dan membuat strategi dalam menghadapi kesulitan pada tahun 2015 yang dicampur tanganin oleh komisaris independen terhadap pihak *Intellectual Capital* perusahaan sehingga terkontrol yang diinginkan perusahaan.

Dari beberapa hasil penelitian tentang GCG memoderasi *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan menyatakan bahwa berpengaruh positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang positif. Jadi semakin tinggi GCG memoderasi *Intellectual Capital* maka nilai perusahaan akan meningkat. Dengan demikian hipotesis GCG memoderasi *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima.

- **GCG berpengaruh positif terhadap hubungan *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan**

Hasil hipotesis kelima (H_5) diperoleh hasil nilai tingkat signifikansi untuk variabel GCGEM sebesar 0,935 lebih besar dari 0,1 ($\alpha=10\%$). Jadi GCG tidak berpengaruh positif terhadap hubungan *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan GCG mampu memoderasi hubungan antara *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Lestari dan Pamudji (2013), yang

menyatakan GCG mampu memoderasi hubungan antara *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, hasil analisis ini mendukung hasil penelitian Hapsari (2014), Pamungkas (2012), dan Ridwan dan Gunaidi (2013), yang menyatakan bahwa GCG tidak mampu memoderasi hubungan antara *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan.

GCG merupakan suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris independen dapat mempengaruhi pihak manajemen dapat menyusun laporan keuangan sehingga dapat memperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Hapsari, 2014). Dengan demikian pernyataan ini tidak menunjukkan hasil penelitian.

Alasan GCG tidak mampu memoderasi *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan karena GCG tidak bisa mencegah apa yang terjadi pada tahun 2015 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek tidak stabil dalam pergerakan harga saham walaupun GCG berusaha dapat mempengaruhi *Earnings Management* tetapi sulit untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan harga saham yang tidak stabil.

Dari beberapa hasil penelitian tentang GCG memoderasi *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan menyatakan bahwa berpengaruh negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang negatif. Jadi semakin tinggi GCG memoderasi *Earnings Management* maka nilai perusahaan akan menurun. Dengan

demikian hipotesis GCG memoderasi *Earnings Management* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh *Intellectual Capital*, *Earnings Management*, *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Intellectual Capital* tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti perusahaan kurang memaksimalkan *Intellectual Capital* yang dimiliki perusahaan dikarenakan masih adanya perusahaan perbankan pada tahun 2015 yang memiliki *Intellectual Capital* yang *Bad Performers* sehingga tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi *Intellectual Capital*, maka tidak berpengaruh terhadap tingginya nilai perusahaan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Earnings Management* tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi manajemen laba perusahaan tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan turun kinerja IHSG pada tahun 2015 maka manajemen laba tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Tax Avoidance* tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan *Tax Avoidance* semakin kecil pembayaran pajak perusahaan tetapi *Tax Avoidance* tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan pada tahun 2015 karena kondisi perekonomian yang lambat dan memperoleh laba yang tidak stabil. Semakin tinggi laba perusahaan tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa secara parsial variabel GCG berpengaruh positif terhadap hubungan *Intellectual Capital* terhadap nilai perusahaan. GCG mampu memoderasi disebabkan adanya ikut campur komisaris independen terhadap *Intellectual Capital* perusahaan karena bisa diwujudkan dengan lebih diperhatikan *Intellectual Capital*. Sehingga semakin tinggi GCG memoderasi *Intellectual Capital* semakin meningkat untuk meningkatkan nilai perusahaan.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa secara parsial variabel GCG tidak berpengaruh positif terhadap hubungan *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin peran GCG dalam membantu *Earnings Management* untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga investor dapat tertarik menanamkan modal kepada perusahaan tidak terwujud dikarenakan tidak stabil perekonomian dan membuat investor tidak menanamkan modalnya pada

perusahaan perbankan pada tahun 2015. Sehingga semakin efisien GCG dalam memoderasi *Earnings Management* tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agnes. 2013. Pengaruh Kepemilikan, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Hal. 2. Universitas Negeri Padang.
- AT, Marjani. dan Puspitosarie, Endah. 2013. *Earning Management* terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai *Moderating* variabel dan *Firm Size* sebagai variabel kontrol. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2. No.3.Hal. 42-43.
- Bontis, Nick. Keow, Chong, Chua, William. dan Richardson Stanley. *Intellectual Capital and business performance in malaysia industries*. *Journal of Intellectual Capital* 1 (1), 85- 100.
- Brigham, F, Eugene. dan Houston, F. Joel. 2001. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Buku II. Erlangga. Jakarta.
- Chayati, Nur. dan Kurniasih, Lulus. 2014. Pengaruh Inkremenral Informasi Akuntansi dan *Intellectual Capital* terhadap Nilai Perusahaan. Hal.18. Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
- Fathur, Syamsi. dan Putri, Maghfiroh. 2015. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja

- Keuangan Perusahaan sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Hal.14. Puwokerto.
- Hamdani. 2016. *Good Corporate Governance*. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Handayani, Indrie. 2015. Pengaruh Modal Intelektual terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. E-jurnal Katalogis. Vol.3. No.9. Hal. 28. Universitas Tadulako
- Hapsari, Wahyu, Dini. 2014. Pengaruh manajemen Laba terhadap nilai perusahaan dengan Mekanisme *Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi. Hal 21-22
- Herdianto, Ghozim, Dedy. 2015. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal.6.
- Ilmiah, Amalia. dan Sutrisno, Ragil, Catur. 2014. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan Transparansi perusahaan sebagai Variabel *Moderating*. Hal 8-9. Universitas Pekalongan.
- Karimah, Nadia, Hana. dan Taufiq, Eindye. 2016. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan. Ekombis Review. Hal. 8-9 niversitas UPN Veteran Jakarta.
- Lestari, Sri, Lulus. dan Pamudji, Sugeng. 2013. Pengaruh *Earning Management* terhadap Nilai Perusahaan di moderasi dengan praktek *corporate governance*. *Journal of Accounting*. Vol. 2. No. 3. Hal 8-9. Universitas Diponegoro.
- Octaviany, Issabella. 2015. Pengaruh *Intellectual Capital Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel Pemoderasi. Hal.108. Universitas Medan Area.
- Pamungkas, Tri, Dyas. 2012. Pengaruh *Earnings Management* terhadap nilai perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. Hal. 28. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ponga, Tempar, Bogam dan Amanah, Lailatur. 2015. Pengaruh CSR dan Modal Intelektual terhadap nilai perusahaan dengan GCG sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol.4. No.6. Hal 13 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Priyatno, Duwi. 2013. Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS. Gaya Media. Yogyakarta.
- Randa, Fransiskus. dan Solo, Ariyanto, S. 2012. Pengaruh Modal Intelektual terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi*. Vol.10.No.1.Hal. 43-44. Fakultas Ekonomi UAJ Makassar.

Ridwan, Mochammad. dan Gunardi, Ardi. 2013. Peran Mekanisme *Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi *Praktik Earning Management* terhadap nilai perusahaan. *Trikonomika*. Vol.12. No.1.Hal. 58-59.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1 Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Alfabeta. Bandung.

Verawaty. Merina, Indah, Citra. dan Kurniawati, Irra. 2016. Analisis pengembangan *Corporate Value* berdasarkan Keputusan Investasi dan Pendanaan, Struktur Kepemilikan serta Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. No. 1. Universitas Bina Darma. Hal. 25.

www.idx.co.id (Diakses pada tanggal 4 November 2016 Pukul 19.15)

TIMELINESS PELAPORAN KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA: STUDI KOMPARASI DENGAN PELAPORAN KEUANGAN DI SINGAPORE STOCK EXCHANGE

Silvia Triyanti¹, Poppy Indriani², Septiani Fransisca²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
**Pos-el: triyanti.silvia@yahoo.com, poppy.indriani@binadarma.ac.id,
Septiani.fransisca@binadarma.ac.id**

ABSTRACK: *This research aims to compare the degree of timeliness between Indonesia and Singapore. Using LQ 45 and STI 30 as samples, this research tries to represent the whole market in both countries. Consider the total capitalization that both index represented, this is quite justified. With Kolmogorov Smirnov Z, this research shows that the degree of timeliness between Indonesia and Singapore is different. Singapore is earlier in reporting its financial reportings than Indonesia, as 65% of the companies listed in Singapore did the reportings in less than 90 days after the end of financial year, which is different from Indonesia that 70% of companies listed in Indonesia reported in more than 90 days after the end of financial year. Not only that, 6 of 6 industries in Singapore which is comparable between both countries reported its financial reporting earlier. It's quite logical consider the role of Singapore as the 4th biggest financial market in the world that it takes more effort in ensuring its credibility. Beside, the amount of penalty given for the late companies is quite significant when compared to those in Indonesia.*

Keywords: *timeliness, international timeliness comparison, timeliness in Indonesia, timeliness in Singapore.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketepatanwaktuan antara Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan LQ 45 dan STI 30 sebagai sampel penelitian untuk merepresentasi kedua negara. Mengingat kapitalisasi pasar keduanya, hal ini merupakan langkah yang tepat. Uji z kolmogorov smirnov yang dilakukan menunjukkan bahwa ketepatanwaktuan di Indonesia berbeda dengan Singapura. Singapura lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan dibandingkan Indonesia. Hal ini karena 65% perusahaan di Singapura melakukan pelaporan keuangan dalam rentang waktu kurang dari 90 hari, sedangkan 70% perusahaan di Indonesia melakukan pelaporan keuangan di rentang waktu lebih dari 90 hari. Selain itu, 6 dari 6 industri yang dapat dibandingkan antara Indonesia dan Singapura melakukan pelaporan yang lebih awal dibandingkan Indonesia. Hal ini wajar mengingat peran Singapura sebagai pasar finansial terbesar ke empat di dunia. Tentunya Singapura akan lebih ketat dalam mengatur regulasi demi menjaga kredibilitasnya. Selain itu, denda yang dikenakan bagi perusahaan yang telat jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan Indonesia.

Kata kunci: *timeliness, international timeliness, timeliness Indonesia, timeliness Singapura.*

I. PENDAHULUAN

Timeliness merupakan ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek suatu negara. Ketepatanwaktuan ini merepresentasi seberapa baru informasi ini bagi para pemangku kepentingan sebagai

dasar pengambilan keputusan. Kenley & Staubus dalam Mc Gee (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang selaras antara kualitas pelaporan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh Atiase, Bamber, Tse, Hendriksen, Breeda, serta

Lawrence dan Glover dalam Mc Gee (2007), bahwasanya informasi keuangan akan tidak begitu relevan seiring berjalannya waktu.

Keane, dalam Leventis dan Weetman (2004) menyatakan bahwa tingkat perlindungan terhadap investor pada negara-negara berkembang masih rendah. Oleh karena itu, informasi yang tepat waktu menjadi salah satu tuntutan untuk mengurangi kecenderungan *insider trading*, kebocoran informasi, dan rumor pada pasar modal di negara-negara berkembang (Owusu-Ansah, 2000). Namun fakta yang ada, perusahaan-perusahaan di negara berkembang cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih lama dari perusahaan-perusahaan di negara maju. Hal ini terbukti oleh penelitian yang dilakukan Errunza dan Losq dalam Leventis dan Weetman (2004).

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sangatlah penting. Hal ini dikarenakan tingkat relevansi informasi yang menurun seiring dengan berjalannya waktu. Relevansi informasi memiliki dampak yang signifikan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Akan tidak relevan apabila pemangku kepentingan mendasarkan keputusan di tahun 2016 atas pelaporan keuangan yang diterbitkan di tahun 2011, dan juga sebaliknya.

Tanpa adanya pelaporan keuangan yang tepat waktu, kemungkinan besar terjadi isu di bursa efek suatu negara. Hal

ini tentunya akan menimbulkan biaya yang besar bagi negara tersebut, karena isu suatu bursa akan menimbulkan kondisi panik di pasar dan pada akhirnya akan membuat kredibilitas bursa tersebut menurun di mata publik dan pada akhirnya bursa efek akan dicap sebagai sarana investasi yang tidak layak.

Singapura sebagai salah satu pusat finansial dunia logisnya mempunyai peraturan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari *investing grade* yang jauh lebih besar daripada di Indonesia. Peraturan yang lebih ketat ini juga tentunya akan mendorong perusahaan-perusahaan di Singapura lebih tepat waktu apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di sisi lain, hubungan ekonomi yang cukup baik antara Indonesia dan Singapura memungkinkan adanya keterkaitan yang cukup erat antara pasar modal di kedua negara. Maka dari itu, akan menjadi logis apabila Singapura dipilih sebagai pasar modal yang digunakan sebagai dasar perbandingan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di dalam penelitian ini.

Apabila mendasarkan pada penelitian yang dilakukan Errunza dan Losq dalam Leventis dan Weetman (2004), maka Indonesia sebagai salah satu *emerging market* dapat digeneralisasi kurang tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Namun demikian, generalisasi yang ada belumlah cukup untuk memberikan dasar yang kuat

untuk mengidentifikasi *timeliness* pelaporan keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji komparasi antara *timeliness* pelaporan keuangan di *Singapore Stock Exchange* dan di Bursa Efek Indonesia untuk membuktikan generalisasi yang ada. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, Maka dari itu, rumusan masalah yang diambil adalah ,” Bagaimana *timeliness* pelaporan keuangan di Bursa Efek Indonesia apabila dibandingkan dengan pelaporan keuangan di *Singapore Stock Exchange*? “.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Signaling

Wolk, et al. (2001) teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan.

Menurut Jama'an (2008) Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan

tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Teori signal juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan (Jama'an, 2008).

2.2. *Timeliness* Laporan Keuangan

Secara konseptual, *timeliness* menunjukkan kualitas dalam : (i) 'tersedia pada waktu yang tepat' atau (ii) 'tepat waktu' (Gregory & Van Horn dalam Owusu-Ansah, 2000). Adapun, kunci utama untuk mengukur *timeliness* pelaporan keuangan adalah rentang waktu antara titik pisah batas (waktu di mana transaksi tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan pada periode tertentu) dan distribusi laporan keuangan kepada pengguna. Adapun, rentang waktu dalam konteks ini didefinisikan sebagai *reporting lead time*, yaitu rentang waktu perusahaan antara tanggal tutup buku dan tanggal diterbitkannya laporan keuangan untuk publik.

Lestari (2010) menemukan bahwa Lestari.Indra dan Arisudhana (2010)

menemukan bahwa bagi perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia, ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Abukosim et.al. (2013) menemukan bahwa *audit delay* di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah anggota komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen.

2.3. Regulasi *Timeliness* Pelaporan Keuangan di Indonesia

Untuk pelaporan keuangan di Indonesia, badan regulator terkait adalah Bapepam-LK. Bapepam-LK mengatur pelaporan keuangan bagi perusahaan publik melalui Peraturan No X.K.6 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Adapun, setiap emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

2.4. Regulasi *Timeliness* Pelaporan Keuangan di Singapura

Sesuai dengan *companies act section* no 107 yang diterbitkan oleh *Singapore Stock Exchange (SGX)*, *annual reports* perusahaan yang terdaftar dalam SGX harus paling lambat disampaikan 30 hari setelah *Annual General Meeting*, yang memiliki jeda maksimal 15 bulan dari *Annual General Meeting* di bulan sebelumnya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan berfungsi sebagai acuan dan pendukung untuk melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan pendukung adalah penelitian dengan salah satu atau lebih variabel yang sama dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

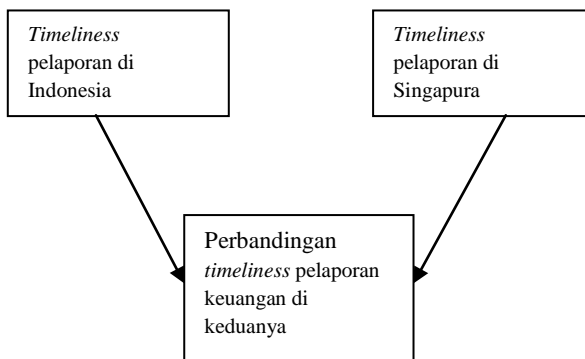
Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
S . Leventis dan P . Weetman	<i>Timeliness of financial reporting: applicability of disclosure theories in an emerging capital market.</i>	perusahaan-perusahaan di negara berkembang kurang tepat waktu ketika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di negara maju
Mc Gee	Corporate Governance and Timeliness of Financial Reporting: A Case Study Of The Russian Energy Sector	Perusahaan sektor energi di Rusia secara signifikan lebih lama melakukan pelaporan keuangan jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang bergerak pada sektor yang sama.
Mc Gee, R. W., & Yuan, X.	Corporate Governance and The Timeliness of Financial Reporting: An Empirical Study of The People Republic of China	Perusahaan Cina melakukan pelaporan keuangan lebih lama dibandingkan perusahaan non Cina.
Ansah, S. O.	<i>Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence From The Zimbabwe Stock Exchange</i>	informasi yang tepat waktu menjadi salah satu tuntutan untuk mengurangi kecenderungan <i>insider trading</i> , kebocoran informasi, dan rumor pada pasar modal di negara-negara berkembang.
Vichitsarawo	The Impact of	Pada saat krisis finansial

ng, T., Eng, L. L., & Meek, G. K. rawong, Eng, dan Meek	the Asian Financial Crisis on Conservatism and Timeliness of Earnings: Evidence from Hong Kong, Malaysia, Singapore, and Thailand	Asia di tahun 1997, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Thailand kurang tepat waktu dalam pelaporan keuangan.
Lestari, D.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi i <i>Audit Delay</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Bagi perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> di Indonesia, ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .
Indra, N. S., & Arisudhana, D.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi i <i>Audit Delay</i> Pada Perusahaan-Perusahaan yang <i>Go Public</i> di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> di Bursa Efek Indonesia (Periode 2007-2010)	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> di Indonesia, ukuran kantor akuntan publik (KAP) dan umur perusahaan berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .

Sumber : penulis (Data Diolah)

2.6. Paradigma Penelitian



Gambar 1 Paradigma Penelitian

Sumber : penulis

2.7. Hipotesis

H0: *Timeliness* pelaporan keuangan di Indonesia berbeda dengan *timeliness* pelaporan keuangan di Singapura.

H1: *Timeliness* pelaporan keuangan di Indonesia sama dengan *timeliness* pelaporan keuangan di Singapura.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif dan membandingkan antara *timeliness* pelaporan keuangan di Indonesia dan di Singapura.

3.2. Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua kelompok populasi. Kelompok populasi pertama adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 532 perusahaan. Kelompok populasi kedua adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura yang berjumlah 640 perusahaan.

3.3. Sampel Penelitian

Untuk kelompok populasi pertama, sampel yang ada dipilah dengan menggunakan kriteria, yaitu: perusahaan harus masuk dalam daftar LQ 45 selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2014-2015 dan menerbitkan laporan keuangan pada jangka waktu terkait. Untuk kelompok populasi kedua, perusahaan yang ada dipilah dengan menggunakan kriteria, yaitu:

STI (*Straits Times Index*) selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2014-2015 dan menerbitkan laporan keuangan pada jangka waktu terkait.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

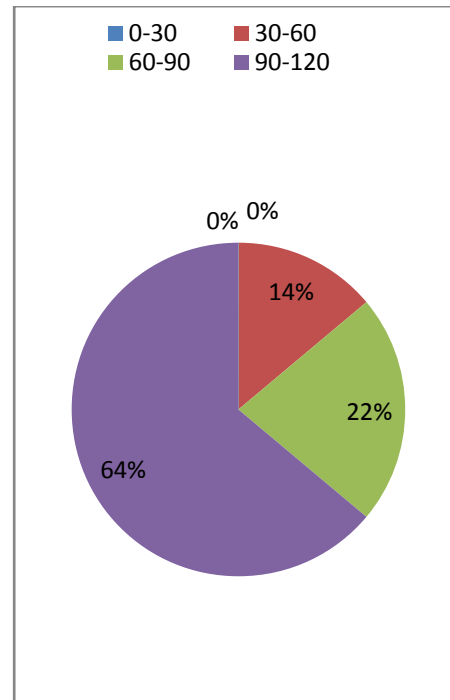
Sampel dikumpulkan dengan metode *purposive sampling*. Kelompok populasi perusahaan yang terdaftar di Indonesia akan dipilah dengan kriteria terdapatnya perusahaan tersebut di dalam LQ 45 selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2014-2015 berjumlah 36 perusahaan. Sedangkan, kelompok populasi perusahaan yang terdaftar di Singapura dipilah atas dasar terdapatnya perusahaan tersebut dalam STI (*Straits Times Index*) selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2014-2015 yang berjumlah 30 perusahaan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode statistik parametrik. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Uji hipotesis akan digunakan menggunakan Welch Test. Apabila nantinya didapati distribusi data tidak normal, metode statistik non parametrik akan digunakan dengan uji z kolmogorov smirnov.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

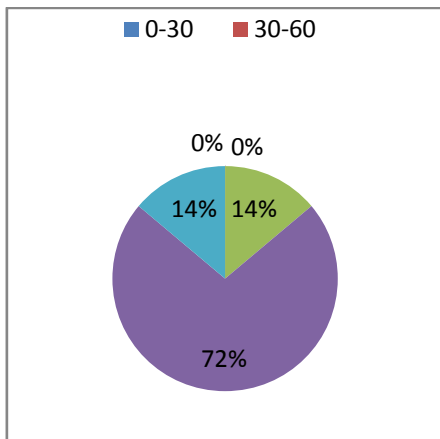
4.1. Statistik Deskriptif



Gambar 1 *Timeliness* di Indonesia Tahun 2014

Sumber : penulis (Data Diolah)

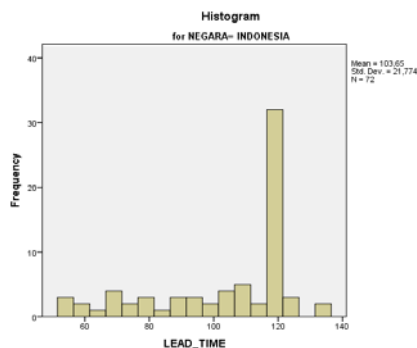
Seperti dilihat di gambar 1, di tahun 2014 tidak ada perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya secara terlambat. 64% dari sampel di tahun 2014 melaporkan laporan keuangannya di rentang waktu 90-120 hari dari tanggal tutup buku, selain itu 22% melaporkan di rentang waktu 60-90 hari dan 14% perusahaan melaporkan di rentang waktu 30-60 hari.



Gambar 2 *Timeliness* di Indonesia Tahun 2015

Sumber : penulis (Data Diolah)

Keadaan ini berbanding terbalik dengan tahun 2015. Berdasarkan gambar 2, di tahun ini tidak ada perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya di waktu 30-60 hari setelah tanggal tutup buku. Mayoritas perusahaan yang terdaftar (72%) melakukan pelaporan keuangannya di rentang 90-120 hari setelah tanggal tutup buku. Bahkan, terdapat 5 perusahaan, 14% dari sampel yang melaporkan pelaporan keuangannya lebih dari tenggat waktu yang ditetapkan sehingga harus membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan oleh OJK.



Gambar 3 Histogram *Timeliness* Pelaporan Keuangan di Indonesia

Sumber : penulis (Data Diolah)

Apabila di rata-rata selama dua tahun, terlihat bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia melakukan pelaporan keuangan 103,65 hari setelah tanggal tutup buku. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu meskipun terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pelaporan keuangan secara terlambat.

Tabel 1

Lead Time di Indonesia berdasarkan jenis industri

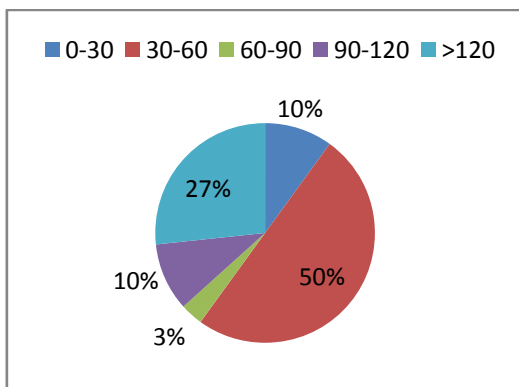
Jenis Industri	<i>Lead Time</i>	Jumlah perusahaan	Bobot dalam LQ 45 %
Perbankan	84	4	11,11
Jasa Konstruksi	93,17	6	16,67
Pertambangan	98,5	5	13,89
Perkebunan	105	2	5,56
Telekomunikasi	105,6	5	13,89
Property	114,5	5	13,89
Manufaktur	114,83	9	25

Sumber : penulis (Data Diolah)

Apabila dipecah ke dalam jenis industri, terdapat 5 jenis industri yang mendominasi LQ 45 secara dua tahun berturut-turut dalam LQ 45.

Dilihat dari *lead time* yang dibutuhkan dalam menyampaikan pelaporan keuangan, selama 2 tahun berturut-turut, perusahaan perbankan adalah sektor industri yang

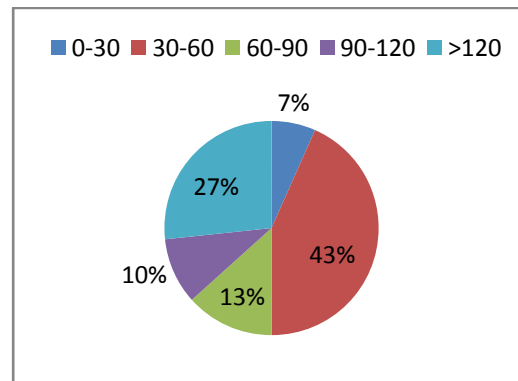
paling tepat waktu dengan *lead time* 84 hari setelah tanggal tutup buku dilanjutkan dengan jasa konstruksi sebanyak 93 hari, pertambangan 98,5 hari, perkebunan 105 hari, telekomunikasi 105,6 hari, property 114,5 hari dan manufaktur 114,83 hari. Hal ini jelas membuktikan bahwa ketika dilihat dari jenis industrinya, perusahaan perbankan adalah perusahaan yang paling tepat waktu dan perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang paling kurang tepat waktu dalam masalah pelaporan keuangannya.



Gambar 4 *Timeliness* di Singapura Tahun 2014

Sumber : penulis (Data Diolah)

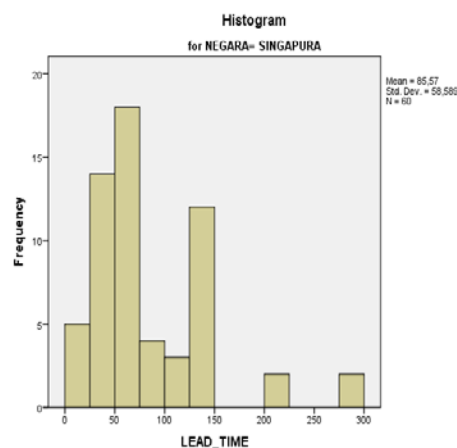
Berdasarkan gambar 4, di tahun 2014, 60% perusahaan di Singapura melakukan pelaporan keuangannya di rentang waktu kurang dari 60 hari setelah tanggal tutup buku, masing-masing 3% dalam rentang waktu 60-90 hari, 10% di 90-120 hari, serta 27% perusahaan yang melakukannya di rentang waktu >120 hari.



Gambar 5 *Timeliness* di Singapura Tahun 2015

Sumber : penulis (Data Diolah)

Berdasarkan gambar 5, di tahun 2015, terdapat 63% perusahaan yang melaporkan di rentang kurang dari 90 hari, 13% di rentang 60-90 hari dan 27% di rentang waktu lebih dari 120 hari.



Gambar 6 Histogram *Timeliness* Pelaporan Keuangan di Singapura

Sumber : penulis (Data Diolah)

Apabila di rata-rata selama 2 tahun, rata-rata perusahaan di Singapura melakukan pelaporan keuangan dalam rentang waktu 85,57 hari setelah tanggal tutup buku. Dari data yang didapatkan, apabila dibandingkan antara Indonesia dengan Singapura, maka didapati bahwa secara sekilas perusahaan-perusahaan di

Singapura lebih tepat waktu dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Tabel 2
Lead Time di Singapura berdasarkan jenis industri

Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	% Bobot STI	Lead Time
Konglomerasi	2	6,67	39,25
Jasa utilitas	1	3,33	48
Entertainment	1	3,33	52
Perkebunan	2	6,67	52,75
Perbankan	3	10	52,83
Konstruksi	1	3,33	57,5
Jasa keuangan	4	13,33	92,5
Telekomunikasi	2	6,67	94,25
Manufaktur	3	10	94,67
Jasa transportasi	4	13,33	112,88
Property	7	23,33	114,21

Sumber : penulis (Data Diolah)

Apabila dipecah ke dalam jenis industri, terdapat 11 jenis industri yang mendominasi indeks STI selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan properti mendominasi dengan bobot 23,33%.

Perusahaan konglomerasi adakah industri yang melakukan pelaporan keuangan paling tepat waktu dengan *lead time* 39,25 hari dari tanggal tutup buku.

Tabel 3
Perbandingan Lead Time di Indonesia dan Singapura

Jenis Industri	Lead Time Indonesia	Lead Time Singapura
Perbankan	84	52,83
Jasa Konstruksi	93,17	57,5

Perkebunan	105	52,75
Telekomunikasi	105,6	94,25
Property	114,5	114,21
Manufaktur	114,83	94,67

Sumber : penulis (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 3, apabila dibandingkan antar industri, di tahun 2014-2015, industri perbankan, jasa konstruksi, perkebunan, telekomunikasi, properti dan manufaktur di Singapura lebih tepat waktu dibandingkan dengan di Indonesia. Hal ini jelas memberikan bobot positif bagi Singapura.

Apabila ditelaah secara lebih terperinci, keadaan ini tidak lain disebabkan karena selama 2 tahun berturut-turut, 65% perusahaan di Singapura melakukan pelaporan keuangan di rentang waktu kurang dari 90 hari, sedangkan di Indonesia lebih dari 70% perusahaan terdaftar melakukan pelaporan keuangan di rentang waktu lebih dari 90 hari. Singapura sebagai salah satu pusat finansial dunia jelas harus menjunjung tinggi keterbaruan informasi demi menjaga kredibilitasnya sebagai salah satu pusat finansial di Asia, berbeda dengan Indonesia yang masih dalam tahap berkembang menjadi pasar modal yang *advanced*.

Selain itu, di sisi pemenuhan regulasi, perusahaan di Indonesia lebih tepat waktu dibandingkan dengan Singapura. Hal ini terlihat dari terdapatnya 27% perusahaan di Singapura yang melakukan pelaporan

keuangan di rentang >120, sedangkan di Indonesia hanya 7%. Hal ini kemungkinan karena adanya regulasi di Singapura yang mewajibkan pelaporan keuangan setelah rapat tahunan, bukannya setelah tanggal tutup buku. Hal ini memungkinkan adanya berbagai macam revisi yang krusial dari pihak direksi sebelum kemudian laporan keuangan dirilis ke publik.

4.2. Uji Normalitas

Tabel 4

Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality

	NE GA RA	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
LEAD_T IME	Indo nesia	,245	72	,000	,831	72	,000
	Sing apor e	,260	60	,000	,816	60	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : penulis (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4 nilai signifikansi kedua kelompok sampel <0,05, maka dari itu didapati bahwa distribusi kedua kelompok data tidaklah normal.

Maka dari itu, statistik non parametrik digunakan peneliti sebagai langkah akhir untuk menyelamatkan data penelitian.

Tabel 5

Uji Hipotesis dengan Uji Z Kolmogorov Smirnov

Test Statistics^a

			LEAD_T IME
Most	Extreme	Absolute	,547
Differences		Positive	,239
		Negative	-,547
Kolmogorov-Smirnov Z			3,131
Asymp. Sig. (2-tailed)			,000

a. Grouping Variable: NEGARA

Sumber : penulis (Data Diolah)

Peneliti menggunakan uji hipotesis dengan uji z Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari uji Kolmogorov Smirnov Z menunjukkan angka 0,000. Hal ini berarti bahwa hipotesis 0 diterima. *Timeliness* di Indonesia berbeda dengan *timeliness* di Singapura. Uji statistik ini sejalan dengan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan 65% perusahaan yang melaporkan laporan keuangan kurang dari 90 hari jelas di Singapura lebih tepat waktu apabila dibandingkan dengan Indonesia. Singapura perlu menetapkan regulasi yang ketat demi menjaga kredibilitasnya, salah satunya melalui *timeliness* laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan pasar modal di Indonesia sebagai *emerging market* yang masih berada pada tahap perkembangan menjadi *advanced market*.

Selain itu denda yang dikenakan jauh lebih besar di Singapura apabila dibandingkan dengan di Indonesia. Pihak OJK selaku regulator pasar modal, berdasarkan peraturan no X.K.6 hanya mengenakan denda maksimal Rp 150.000.000,00 kepada perusahaan yang terlambat, sedangkan pihak regulator Singapura, berdasarkan FRA 1993 mengenakan maksimal \$ 100.000, atau setara dengan Rp 930.000.000,00.

V. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *timeliness* di Indonesia berbeda dengan *timeliness* di Singapura. Perusahaan Singapura lebih tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan: 65% dari perusahaan yang ada melaporkan laporan keuangan di rentang waktu <90 hari dari tanggal tutup buku, hal ini berbeda dengan Indonesia yang lebih dari 70% perusahaannya melaporkan laporan keuangan di rentang waktu >90 hari setelah tanggal tutup buku; dari 6 industri yang diperbandingkan, Singapura lebih awal dalam menyampaikan pelaporan keuangan dibandingkan Indonesia. Denda di Singapura yang lebih besar apabila melaporkan secara telat, yaitu Rp 930.000.000,00 sedangkan di Indonesia hanya Rp 150.000.000,00; Posisi Singapura sebagai pasar finansial nomor 4 terbesar di dunia yang memungkinkan regulasi yang lebih ketat. Di sisi pemenuhan regulasi, perusahaan di Indonesia lebih tepat waktu

dibandingkan dengan Singapura. Hal ini terlihat dari terdapatnya 27% perusahaan di Singapura yang melakukan pelaporan keuangan di rentang >120, sedangkan di Indonesia hanya 7%. Hal ini kemungkinan karena adanya regulasi di Singapura yang mewajibkan pelaporan keuangan setelah rapat tahunan, bukannya setelah tanggal tutup buku. Hal ini memungkinkan adanya berbagai macam revisi yang krusial dari pihak direksi sebelum kemudian laporan keuangan dirilis ke publik.

DAFTAR REFERENSI

- Ansah, S. O. (2000). *Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence From The Zimbabwe Stock Exchange. Accounting and Business Research, Vol. 30* .
- Author. Bursa Efek Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia. 29 Januari 2017.
- Author. Singapura. <https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura>. 28 Januari 2017.
- Author. How to Guides Chapters. <https://www.acra.gov.sg/components/wireframes/howToGuidesChapters.aspx?pageid=1226#1229> . 29 Januari 2017.
- Badertcher, B. A., & Burks, J. J. (2011). Accounting Restatements and the Timeliness of Disclosures. *Accounting Horizon Vol. 25 No. 4* , 609-629.

- Bapepam-LK. *Peraturan Nomor X.K.6 : Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik.*
- Dewi, I Gusti Ayu Ratih Permata dan Wirakusuma, Made. (2014). Fenomena Ketepatan Waktu Informasi Keuangan dan Faktor yang Mempengaruhi di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.1. Universitas Udayana. Bali.
- Indra, N. S., & Arisudhana, D. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan-Perusahaan yang *Go Public* di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia (Periode 2007-2010).
- Lestari, D. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*: Studi Empiris Pada Perusahaan *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Leventis, S., & Weetman, P. (2004). Timeliness of financial reporting: applicability of disclosure theories in an emerging capital market. *Accounting and Business Research, Vol. 34* , 43-56.
- McGee, R. W. (2007, April). Corporate Governance and Timeliness of Financial Reporting: A Case Study Of The Russian Energy Sector . *Andreas School of Business Working Paper* . Barry University.
- McGee, R. W., & Yuan, X. (2008, Mei). Corporate Governance and The Timeliness of Financial Reporting: An Empirical Study of The People Republic of China. *Working Paper* . Florida International University Chapman Graduate School of Business.
- S, B. B., Abukosim, Mukhtaruddin, & Mursidi, I. (2013). The Effect of Good Corporate Governance Mechanism to Audit Delay at Company Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2009-2011. *3rd Global Accounting, Finance and Economics Conference*. Melbourne.
- Muslim Kabo. (21 November 2016). *Teori Sinyal*. Retrieved November 21, 2016, diakses dari <http://ekonomi.kabo.biz/2011/07/teori-sinyal.html>
- Vichitsarawong, T., Eng, L. L., & Meek, G. K. (2010). The Impact of the Asian Financial Crisis on Conservatism and Timeliness of Earnings: Evidence from Hong Kong, Malaysia, Singapore, and Thailand. *Journal of International Financial Management and Accounting* 21:1 , 32-61.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Alfabeta:Bandung.
- Terry, Lewis. 2007. *Practical Financial Management for NGOs:A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance*, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA YANG MELAKUKAN IPO TAHUN 2014-2015

Suhendar¹, Henny Indriyani², Citra Indah Merina³
Hendarmiekkel@gmail.com¹, henniinayah@gmail.com², citra_ims@yahoo.com³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma

Abstract : *This research aims to analyze the factors that influence the level of underpricing on the initial public offering of stock. The variables used in this study is the Debt to Equity Ratio, Return On assets, Earning Per Share, The research was carried out using multiple linear regression analysis. Data collecting tool used is a study of observation and study of purposive sampling method with the library. Sample as many as 23 companies from a population of 39 companies. The results of this research show that: there is no significant influence of the Debt to Equity Ratio against Underpricing, there is no significant influence on the Return On Assets against Underpricing, there are significant effects Earning Per Share against Underpricing,*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing pada penawaran umum saham perdana. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Earning Per Share Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi observasi dan studi pustaka dengan metode purposive sampling. Sampel sebanyak 23 perusahaan dari populasi sebanyak 39 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tidak ada pengaruh yang signifikan Debt to Equity Ratio terhadap Underpricing, Tidak ada pengaruh yang signifikan Return On Asset terhadap Underpricing, Terdapat pengaruh yang signifikan Earning Per Share terhadap Underpricing,

Keyword : *Debt to Equity Ratio, Return On assets, Earning Per Share, Underpricing.*

1. PENDAHULUAN

Proses go public, perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Salah satu alternatif pendanaan dari dalam umumnya dapat diperoleh dengan menggunakan laba ditahan dan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, menjual perusahaan kepada pihak lain, melakukan penggabungan usaha dengan mencari partner kerja (merger), dan dari pasar saham dengan mekanisme penyertaan.

Mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan

kepada publik atau sering dikenal dengan go public. Sebelum saham dijual atau diperdagangkan di pasar sekunder, saham terlebih dahulu dijual di pasar primer atau sering disebut pasar perdana. Penawaran saham secara perdana ke publik melalui pasar perdana ini dikenal dengan istilah initial public offering yang bisa diartikan sebagai harga saham yang akan dijual perusahaan pada pasar perdana yang ditentukan oleh kesepakatan antara emiten (perusahaan penerbit) dengan underwriter (penjamin emisi), sedangkan harga saham yang dijual pada pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran.

Informasi mengenai perusahaan yang akan melakukan IPO sangat penting dimiliki oleh para pihak yang akan menentukan harga saham pada saat IPO yaitu pihak emiten dan pihak underwriter. Ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh para pihak inilah yang dapat mengakibatkan perbedaan harga sehingga memungkinkan terjadinya underpricing. Baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder, asimetri informasi ini selalu terjadi (Puspita 2012).

Berbagai penelitian tentang underpricing sudah banyak dilakukan baik di dalam maupun diluar negeri. Namun penelitian dibidang ini dianggap masih sangat menarik untuk diteliti karena adanya inkonsistensi dari hasil penelitian. Hal inilah yang membuat peneliti termotivasi meneliti kembali untuk memperoleh bukti empiris yang dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan menemukan beberapa faktor yang berpengaruh pada underpricing. Seperti yang dikemukakan Lestari (2014) menguji hubungan antara initial return dengan reputasi auditor, reputasi underwriter, umur perusahaan, persentase saham yang ditawarkan kepada profitabilitas, perusahaan publik, financial leverage, rasio solvabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan pemerintah. Penelitian dilakukan pada 300 perusahaan yang melakukan IPO di BEI. Berdasarkan analisis, initial return dipengaruhi secara signifikan oleh reputasi underwriter dengan bersifat positif dan profitabilitas perusahaan dengan sifat negatif. Reputasi auditor, umur perusahaan, persentase kepemilikan saham

yang ditawarkan ke publik, financial leverage, solvability ratio, dan kepemilikan pemerintah gagal menunjukkan pengaruh signifikan terhadap initial return.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Asimetri Informasi.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

2.2 Teori Signaling

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

2.3 Pasar Modal

Di Indonesia istilah pasar modal sudah sejak lama telah dikenal oleh masyarakat baik pada masa penjajahan Belanda maupun pada zaman sesudah kemerdekaan meskipun sempat mengalami kelesuan beberapa waktu lalu. Saat ini hampir semua orang, terutama yang berdiam di kota-kota besar saat ini mengenal tempat dilakukannya kegiatan pasar modal itu. Namun demikian apa dan bagaimana jalannya kegiatan yang dilakukan di dalam tempat tersebut, mungkin masih belum dikenal orang.

2.4 Saham

Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa (common stock) merupakan salah satu jenis efek yang paling banyak diperdagangkan di pasar modal. Bahkan saat ini dengan semakin banyaknya emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa efek, perdagangan saham semakin marak dan menarik para investor untuk terjun dalam jual beli saham. Saham biasa adalah jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut hanya mengeluarkan satu macam saham (Jogiyanto, 2012). Diantara emiten (perusahaan yang menerbitkan surat berharga), saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Secara sederhana, saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

2.5. Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan yang membutuhkan dana atau emiten dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan kemudian dijual di pasar perdana (primary market). Pasar perdana sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalannya. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan. Pasar perdana merupakan pasar pertama kali satu perusahaan atau calon emiten melakukan penjualan sahamnya kepada masyarakat (public).

2.6 Penelitian Terdahulu

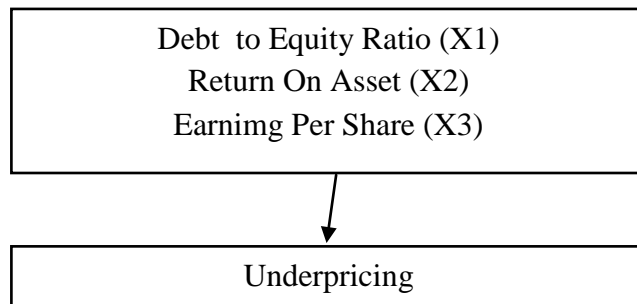
Penelitian	Variabel dependen	Variabel Independen	Teknik Analisis	Hasil
Sri Trisnaningsih (2010)	<i>Underpricing</i>	Reputasi underwriter, ROA, <i>financial leverage</i>	regresi linear berganda	hanya variabel ROA yang tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>underpricing</i>
Ardiyansyah (2009)	Initial Return dan <i>return</i> 15 hari setelah IPO	ROA, DER, EPS, Proceeds, pertumbuhan laba, CR, besaran perusahaan, reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, umur perusahaan jenis industri dan kondisi perekonomian	regresi linear berganda	EPS dan kondisi perekonomian berpengaruh signifikan terhadap <i>initial return</i> dan <i>return</i> 15 hari setelah IPO; <i>financial leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>return</i> 15 hari setelah IPO; besaran perusahaan tidak berhasil ditunjukkan sebagai variabel moderat terhadap hubungan antar variabel keuangan dgn <i>initial return</i> dan <i>return</i> 15 hari setelah IPO

2.7 Kerangka Pemikiran

Informasi keuangan yang terkandung dalam prospektus merupakan ketentuan yang harus dimiliki perusahaan go public. Dengan adanya informasi dalam prospektus tersebut diharapkan akan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan

modalnya pada perusahaan yang akan go public, sehingga perusahaan sebagai emiten di bursa akan mendapatkan return yang maksimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Debt To Equity Ratio, Return On Assets, Earnig Per

Share.berdasarkan hal tersebut ditentukan kerangka penelitian sebagai berikut.Tabel Kerangka Berfikir



3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan emiten yang melakukan IPO periode 2014-2015 yang ada di Bursa efek indonesia, Waktu penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis mulai dari bulan november 2016 sampai selesai.

3.2 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Agar penelitian lebih jelas, maka perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut:

3.3 Populasi Dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO di BEI dari tahun 2014-2015. Selama tahun 2014-2015 terdapat 39 perusahaan yang melakukan IPO di BEI Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling.

3.4 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara

mempelajari catatan – catatan atau dokumen – dokumen perusahaan sesuai dengan data – data yang diperlukan. Data tersebut diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dapat juga diperoleh melalui situs www.idx.co.id atau www.e-bursa.com. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO, harga saham perdana dan harga saham pada hari pertama perusahaan yang melakukan IPO di pasar sekunder, laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2014, dan 2015.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh DER Terhadap Besarnya Tingkat Underpricing Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO

Hasil pengujian parameter pengaruh logaritma natural DER diperoleh nilai t sebesar 0,129. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan debt to equity ratio maka tingkat underpricing akan menurun sebesar 0,129 satuan. Adapun nilai t yang diperoleh adalah sebesar -0,750 dengan signifikansi sebesar 0,228 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti menerima H_0 dan dapat disimpulkan bahwa logaritma natural DER tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat underpricing.

Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Daljono (2000) dalam Handayani (2008), yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara DER dengan underpricing. Namun temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Durukan (2002) dalam Handayani (2008)

yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap underpricing. Interpretasi dari variabel ini adalah setiap kenaikan satu satuan variabel DER akan menaikkan underpricing sebesar 0,005 satuan, dengan demikian H1 yang diajukan penelitian ini dimana DER berpengaruh terhadap besarnya tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan initial public Prosentaseing, tidak dapat diterima.

Variabel DER menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Alasan mengapa DER tidak berpengaruh terhadap underpricing adalah karena sampel dalam penelitian ini terdiri dari berbagai jenis industri, termasuk industri perbankan yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam laporan keuangannya sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31: Akuntansi Perbankan (Revisi 2000) bahwa akuntansi dan laporan keuangan bank berbeda dengan jenis usaha lainnya. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut merupakan kewajiban bagi bank dan dicatat sebagai utang. Oleh karena saldo utang yang besar pada neraca bank maka financial leverage yang terdapat pada industri perbankan berbeda secara signifikan dengan industri lainnya

4.2 Pengaruh ROA Terhadap Besarnya Tingkat Underpricing Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO

Pada tabel hasil uji t di atas yang dilakukan dengan pengujian satu arah, diketahui bahwa ROA memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,200. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan return on asset maka tingkat underpricing akan menurun sebesar 0,200 satuan. Adapun nilai t yang diperoleh adalah sebesar -0,740 dengan signifikansi sebesar 0,2305 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 Hal ini berarti menerima Ho dan dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2002) dalam Tifani (2011), yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara ROA dengan underpricing.

Variabel ROA menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Alasan mengapa ROA tidak berpengaruh karena investor telah menduga bahwa laporan keuangan perusahaan yang melakukan IPO telah di mark up untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian para investor tidak memperhatikan ROA yang disajikan dalam prospektus, tetapi cenderung merujuk pada ROA untuk beberapa tahun sebelum perusahaan go public.

Return on asset, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daljono dikutip dalam Yolana & Martina (2005) yang menemukan bahwa profitabilitas yang diwakilkan oleh return on asset tidak terbukti signifikan mempengaruhi tingkat underpricing yang diwakilkan oleh initial return dimana hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh peneliti yaitu return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Ghozali & Al Mansur dikutip dalam Yolana dan Martani (2005) menyatakan bahwa return on asset berpengaruh terhadap tingkat underpricing, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh peneliti. Penjelasan yang dapat diberikan sejalan dengan hasil dari tidak signifikannya ROA terhadap tingkat underpricing adalah investor mungkin telah menduga bahwa laporan keuangan perusahaan yang melakukan IPO telah di mark up untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian para investor tidak memperhatikan ROA yang disajikan dalam prospektus, tetapi cenderung merujuk pada ROA untuk beberapa tahun sebelum perusahaan go public, Daljono dalam Rachmawati (2007).

4.3 Pengaruh EPS Terhadap Besarnya Tingkat Underpricing Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO

Pada tabel hasil uji t di atas yang dilakukan dengan pengujian satu arah, diketahui bahwa EPS memiliki koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,305. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan earning per share maka tingkat underpricing akan menurun sebesar 0,305 satuan. Adapun nilai t yang diperoleh adalah sebesar -2,320 dengan signifikansi sebesar 0,0115 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa EPS berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing.

Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistio (2005) dalam Hapsari (2012) yang menyatakan bahwa EPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap underpricing. Namun temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2005), yang menyatakan adanya hubungan negatif dan signifikan antara EPS dengan underpricing. Interpretasi dari variabel ini adalah setiap kenaikan satu satuan variabel EPS akan menurunkan underpricing sebesar 0,001 satuan.

Untuk perbandingan sebelumnya pada pengujian earning per share dapat ditunjukkan dengan penelitian Misnen Ardiansyah dikutip dalam Yolana & Martani (2005), bahwa diperoleh hasil earning per share berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap underpricing yang diwakilkan dengan initial return sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian yang diperoleh peneliti yaitu earning per share berpengaruh signifikan ke arah negatif. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistio (2005) bahwa earning per share tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Menurut Yolana dan Martani (2005), EPS berpengaruh karena investor berekspektasi untuk memperoleh pengembalian terhadap investasi yang diberikannya. Apabila EPS semakin tinggi maka harapan untuk memperoleh keuntungan akan semakin besar, sehingga harga perdana yang diberlakukan oleh emiten akan mengalami peningkatan.

Untuk perbandingan sebelumnya pada pengujian earning per share dapat ditunjukkan dengan penelitian Misnen

Ardiansyah dikutip dalam Yolana & Martani (2005), bahwa diperoleh hasil *earning per share* berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap *underpricing* yang diwakilkan dengan *initial return* sebesar 5%. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian yang diperoleh peneliti yaitu *earning per share* berpengaruh signifikan ke arah negatif. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistio (2005) bahwa *earning per share* tidak berpengaruh terhadap tingkat *underpricing*. Menurut Yolana dan Martani (2005), EPS berpengaruh karena investor berekspektasi untuk memperoleh pengembalian terhadap investasi yang diberikannya. Apabila EPS semakin tinggi maka harapan untuk memperoleh keuntungan akan semakin besar, sehingga harga perdana yang diberlakukan oleh emiten akan mengalami peningkatan.

5. SIMPULAN

Tidak ada pengaruh yang signifikan Debt to Equity Ratio terhadap *Underpricing*, hal ini dibuktikan $\text{sig } t \ 0,228 > 0,05$, dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima. Alasan mengapa DER tidak berpengaruh terhadap *underpricing* adalah karena sampel dalam penelitian ini terdiri dari berbagai jenis industri, termasuk industri perbankan yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam laporan keuangannya

Tidak ada pengaruh yang signifikan Return On Asset terhadap *Underpricing*, hal ini dibuktikan $\text{sig } t \ 0,2305 > 0,05$, dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima. Alasan mengapa ROA tidak berpengaruh karena investor telah menduga bahwa laporan keuangan perusahaan yang melakukan IPO

telah di mark up untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dengan demikian para investor tidak memperhatikan ROA yang disajikan dalam prospektus, tetapi cenderung merujuk pada ROA untuk beberapa tahun sebelum perusahaan go public

Terdapat pengaruh yang signifikan Earning Per Share terhadap *Underpricing*, hal ini dibuktikan $\text{sig } t \ 0,0115 < 0,05$, dengan demikian H_o ditolak dan H_a diterima. Alasan mengapa EPS berpengaruh adalah karena rasio ini memberikan ekspektasi kepada investor untuk memperoleh pengembalian terhadap investasi yang diberikannya. Apabila EPS semakin tinggi maka harapan untuk memperoleh keuntungan akan semakin besar, sehingga harga perdana yang diberlakukan oleh emiten akan mengalami peningkatan.

REFERENSI

- Ardiansyah, 2009, Initial Return dan return 15 hari setelah IPO (Initial Public Offering)
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. "Accounting Theory". Salemba Empat. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2011. Analisis Data Penelitian Kuantitatif. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Fahmi 2015. Manajemen Investasi dan Portofolio. Salemba Empat. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat, Jakarta.

Kuncoro, 2011. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Ketiga. Bumi Aksara, Jakarta.

Lestari 2014. Teori Informasi non akuntansi dalam prospektus underwriter

Munandar. M. 2010. “Pokok-pokok Intermediete Accounting”. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Nurjanti T dan Kustini, 2007, Reputasi underwriter, Stock offering, stock retention, listing time

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 1 (FASB 1978, par 34)

Sri 2010. Reputasi underwriter, ROA, financial leverage terhadap tingkat underpricing

Sanusi, Anwar, 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta Selatan

Puspita 2012. Teori Akuntansi, Edisi Kedua. Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Simanjuntak dan Elvis, 2011. Metode Penelitian, Edisi Kedua. Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung

Wild John dan Subramanyam. 2010. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kesepuluh. Salemba Empat, Jakarta

Yolana dan Martani, 2010, Analisis independent kualitas underwriter, ukuran perusahaan, Rata-rata kurs, ROE dan jenis industri

Referensi Website

www.globalreporting.org

www.idx.co.id

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM DI KOTA PALEMBANG

Susy Siahaan¹, Henni Indriyani², Andrian Noviardy²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Pos-el: susy.siahaan91@gmail.com

ABSTRACT: *Inability to use accounting information is one of the main factors that cause problems and result of failure of small and medium micro enterprises in developing the business. This research analyzes some the factors that influence the use of accounting information on SMEs (Small Medium Enterprise). For the calculation of testing of the factors that influence the use of accounting information on SMEs (Small Medium Enterprise) by using multiple regression analysis. The population in this study is seeds' SMEs sungai selincah and kalidoni. The sampling technique is done by random sampling. To Collect data in this study is by using questionnaires (questionnaire) done by survey and conducted by directly visiting respondents. The data can be processed are 37 respondents. This result indicates that simultaneously (together) independent variables doesn't have positive and significant impact on the understanding of SMEs in the use of accounting information. While partially variable educational stage, business size, and business age doesn't have positive and significant for the use of accounting information on SMEs. Meanwhile for the educational background have positive and significant impact on the understanding of SMEs in the use of accounting information.*

Keywords: *small and medium enterprises (SMEs), the accounting information application, educational stage, business size, business age and educational background.*

Ketidakmampuan penggunaan informasi akuntansi merupakan salah satu faktor utama yang menimbulkan permasalahan dan mengakibatkan kegagalan perusahaan mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha. Penelitian ini melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di kota Palembang. Pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM di kota Palembang menggunakan analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kelurahan sungai selincah dan kalidoni. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *random sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan daftar pertanyaan kuesioner) dilakukan dengan survey langsung mendatangi responden. Data yang dapat diolah sebesar 37 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam penggunaan informasi akuntansi. Sedangkan secara parsial variabel jenjang pendidikan, ukuran usaha, dan lama usaha tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Sedangkan untuk variabel latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.

Kata kunci : Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penggunaan informasi akuntansi pada UMKM, jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Selama ini akuntansi dikenal sebagai suatu ilmu, sistem, dan seni pencatatan atas transaksi atau kegiatan yang bersifat keuangan. Dimana dalam pelaksanaannya akuntansi akan menghasilkan output yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk laporan yang berisi tentang informasi suatu entitas secara keseluruhan dan bersifat keuangan. Laporan keuangan pada umumnya dibagi menjadi 5 yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi secara keseluruhan, menunjukkan hasil pertanggungjawaban atas semua kegiatan atau aktivitas, serta penggunaan seluruh sumber daya entitas yang sudah dipercayakan kepada pihak yang diberi amanah untuk mengelolanya. Hal itulah yang pada akhirnya menyebabkan semua entitas harus mampu menyusun laporan keuangan dengan benar dan jelas sebagai bentuk suatu pertanggungjawaban dan pemberian informasi secara keseluruhan dan jelas kepada setiap pemakainya, sehingga suatu entitas dapat dilihat pencapaian kinerjanya melalui laporan keuangan tersebut. Salah satu fungsi akuntansi adalah mengkomunikasikan informasi ekonomi, yaitu realita ekonomi suatu organisasi. Komunikasi ini dapat berupa memberikan dan memperoleh informasi, memotivasi dan mempengaruhi si pemakai informasi akuntansi guna pembuatan

keputusan atau perjanjian kerja sama, termasuk untuk menetapkan harga. Tujuan pemakaian adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pada periode tertentu dan untuk memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan sehari-hari. Informasi akuntansi juga dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan sebuah kelompok mandiri. Adanya informasi akuntansi membantu dalam menyelenggarakan kegiatan usaha mandiri. Akuntansi memberikan informasi kepada organisasi mengenai cara pembukuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Informasi akuntansi juga membantu bagaimana memproses produksi yang sesuai dengan sistem biaya standar sehingga selisih biaya yang terjadi tidak merugikan organisasi tersebut. Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM di Kota Palembang”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.2 Penyaluran Kredit Perbankan Terhadap UMKM

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pasal 5 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan UMKM dalam memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, yang menjadi salah satu persyaratannya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang disediakan UMKM.

2.3 Informasi

Menurut McLeod dalam Yakub (2012:8) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Dalam bisnis, informasi itu mempunyai pengertian yang lebih penting yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi membantu usaha dalam memilih jalan keluar sekarang atau masa datang untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.4 Akuntansi

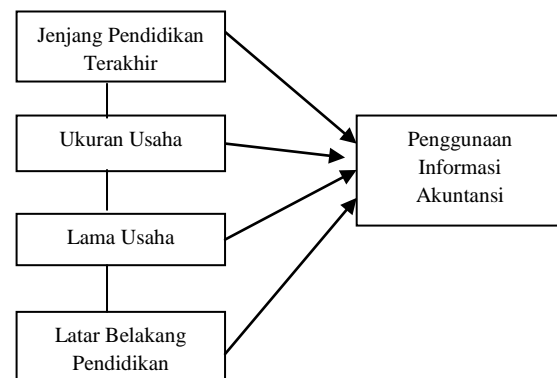
Menurut Komite Istilah *American Institute of Certified Public Accounting*

(AICPA) dalam buku Harahap (2012:5) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Perkembangan ekonomi baik secara nasional maupun regional tidak dapat terlepas dari peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di berbagai negara termasuk di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Hal ini karena kebanyakan para pengusaha kecil dan menengah berangkat dari industry keluarga/ rumahan.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



METODELOGI PENELITIAN

3.1 Operasional Variabel

Adapun Variabel independen dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, latar belakang pendidikan. Sedangkan yang menjadi variabel

dependen pada penelitian ini adalah penggunaan sistem informasi akuntansi.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di kelurahan sungai selincah dan kalidoni kota Palembang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah UMKM di kelurahan sungai selincah dan kalidoni kota Palembang yang berjumlah 37 UMKM.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini dapat dilakukan pengumpulan data-data yang memiliki hubungan dengan pokok masalah yang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik pengumpulan menggunakan :

- a. Observasi
- b. Kuesioner

3.4 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan survey. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis tanggapan responden yaitu dalam melakukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun analisis data yang dilakukan penulis meliputi analisis deskriptif dan analisis asosiatif. Analisis data deskriptif maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata mean dari masing-masing variabel sedangkan untuk analisis asosiatif menggunakan metode analisis regresi

berganda dengan dibantu software excel dan SPSS (Statistical product and service solution).

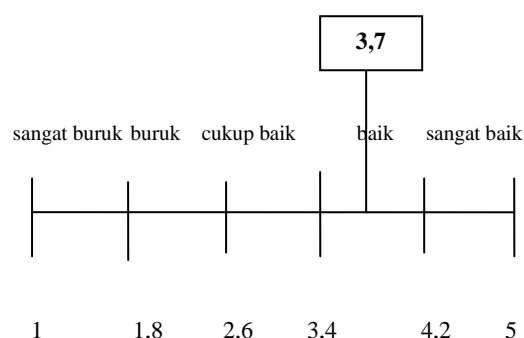
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Deskriptif

Tabel 1

Analisa Deskriptif Keseluruhan Variabel

Gambar 4.1
Garis Kontinum Kategorisasi Penilaian Variabel Penggunaan Informasi Akuntansi



Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk

dimensi persepsi penguasaha terkait pentingnya pelaporan keuangan adalah sebesar 54,3 % dengan mean skor 3,7 termasuk ke dalam kategori baik.

4.2 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2

Hasil Uji Hipotesis Berganda

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	281.309	4	70.327	1.196	.331 ^a

Residual	1881.501	32	58.797		
Total	2162.811	36			

a. Dependent Variable: Manajemen Keuangan(Y)
 b. Predictors: (Constant), Transparansi(X2), Akuntabilitas(X1)

Berdasarkan tabel ANOVA diatas, didapat bahwa F hitung sebesar 1,196 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,331 lebih besar dari standar nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti variabel jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha, dan latar belakang pendidikan secara bersama-sama tidak signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada umkm.

4.3 Uji Parsial (Uji T)

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	53.984	9.253			5.834	.000		
JenjangPendidikan	2.888	2.813	.198		1.037	.281	.838	1.193
UkuranUsaha	2.344	2.105	.196		1.114	.274	.880	1.137
LamaUsaha	.284	1.846	.029		.173	.864	.956	1.046
LatarBelakangPendidikan	-6.291	2.988	-.393		-2.106	.043	.781	1.280

a. Dependent Variable: variabely

Berdasarkan tabel 4.15 hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa T hitung sebesar 1,097 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,281 lebih besar dari level signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

hipotesis ditolak yang berarti variabel jenjang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada umkm.

2. Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa T hitung sebesar 1,114 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,274 lebih besar dari level signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti variabel ukuran usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada umkm.
3. Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa T hitung sebesar 0,173 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,864 lebih besar dari level signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak yang berarti variabel lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada umkm.
4. Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa T hitung sebesar 2,106 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari level signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yang berarti variabel latar belakang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada umkm.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai penggunaan informasi akuntansi pada UMKM, maka penulis melakukan analisis deskriptif. Dari total 14 butir pernyataan mengenai karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen adalah skor aktual 1.937 dan skor ideal sebesar 2.590 dengan nilai presentase yang diperoleh sebesar 54,3 % dengan mean 3,7. Dari skor tersebut menunjukkan bahwa penggunaan informasi akuntansi pada UMKM berada dalam kategori baik. Walaupun demikian masih terdapat kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam penggunaan informasi operasi (Pertanyaan 7-10) yaitu perusahaan UMKM masih banyak yang belum memiliki karyawan khusus untuk menjalankan proses akuntansi, sebagian besar UMKM hanya melakukan pencatatan akuntansi oleh bagian administrasi dan dampak dari masih banyaknya perusahaan UMKM yang belum memiliki karyawan khusus untuk menjalankan proses akuntansi adalah perusahaan tidak selalu secara rutin melakukan pencatatan akuntansi.
2. Kelemahan dalam penggunaan informasi akuntansi manajemen (Pertanyaan 9-12) yaitu perusahaan tidak selalu membuat informasi penilaian guna pengambilan keputusan bagi pemilik/manajer.
3. Kelemahan dalam penggunaan informasi akuntansi keuangan (Pertanyaan 13-20) yaitu masih belum menggunakan software akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan, sebagian UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun pembukuan itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak bank untuk pengajuan kredit.

4.3.2 Pembahasan Secara Simultan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji f) pada model regresi di atas, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,331, nilai ini lebih besar dari *significance level* 0,05 (5%), yaitu $0,331 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen yaitu variabel jenjang pendidikan, ukuran perusahaan, lama usaha, dan latar belakang pendidikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

yaitu variabel penggunaan informasi akuntansi.

4.3.3.1 Pengaruh Jenjang Pendidikan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak atau H_{a1} diterima, artinya secara parsial variabel jenjang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi. Karena pada kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah semakin tinggi jenjang pendidikan pemilik usaha di kelurahan sungai selincah dan kalidoni namun masih banyak yang belum memahami penggunaan informasi akuntansi, seperti penggunaan buku kas, mencatat persediaan, serta pencatatan pendapatan dan biaya.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mishbakhul Hadi (2016), yang menunjukkan hasil bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi.

4.3.3.2 Pengaruh Ukuran usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak atau H_{a2} diterima,

artinya secara parsial variabel ukuran usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi. Karena pada kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah semakin banyak karyawan yang dimiliki oleh UMKM di kelurahan sungai selincah dan kalidoni namun masih banyak yang belum memahami pentingnya penggunaan informasi akuntansi tersebut, salah satu contoh yang sering terjadi adalah tidak adanya karyawan khusus pada bagian akuntansi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mishbakhul Hadi (2016) yang menunjukkan hasil bahwa skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Namun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nita (2015) yang menunjukkan hasil bahwa skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.

4.3.3.3 Pengaruh Lama Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi disimpulkan bahwa H_{03} ditolak atau H_{a3} diterima, artinya secara parsial variabel lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi.

Karena pada kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah semakin lama usaha UMKM namun masih banyak yang belum memahami pentingnya penggunaan informasi akuntansi tersebut sehingga para pemilik UMKM dikelurahan sungai selincih dan kalidoni masih nyaman mengelola usahanya tanpa menggunakan informasi akuntansi.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh AUFAR (2013) yang menunjukkan hasil bahwa lama usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Namun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh WAHYUDI (2009) yang menunjukkan hasil bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.

4.3.3.4 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak atau H_{a4} diterima, artinya secara parsial variabel latar belakang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan logika teori pada pembahasan sebelumnya bahwa Menurut AUFAR (2013),

latar belakang pengusaha UMKM baik yang berasal dari bidang ekonomi maupun non ekonomi dapat mempengaruhi persepsinya terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha. Dengan adanya persepsi pentingnya akuntansi bagi UMKM diharapkan penggunaan informasi akuntansi di UMKM dapat menjadi suatu hal yang wajib mereka jalankan.

Dilihat dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan seseorang dapat membuat praktek penggunaan akuntansi menjadi lebih penting bagi perusahaan, karena mereka lebih dapat mengetahui ilmu dan kegunaan informasi akuntansi tersebut dari pada seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan non ekonomi.

5. SIMPULAN

1. Jenjang pendidikan pemilik UMKM di Kelurahan Sungai Selincih dan Kalidoni kota Palembang tidak berpengaruh terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi dengan nilai signifikan 0,281. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Jenjang pendidikan pemilik UMKM di Kelurahan Sungai Selincih Dan Kalidoni Kota Palembang tergolong rendah namun masih memiliki potensi untuk bersaing dengan UMKM yang ada di kota Palembang.

2. Ukuran usaha pada UMKM di Kelurahan Sungai Selincih dan Kalidoni kota Palembang tidak berpengaruh terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi dengan nilai signifikan 0,274. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran usaha pada UMKM di kelurahan sungai selincih dan kalidoni kota Palembang masih memiliki potensi untuk mampu mensejahterakan masyarakat secara luas.
3. Lama usaha pada UMKM di Kelurahan Sungai Selincih dan Kalidoni Kota Palembang tidak berpengaruh terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi dengan nilai signifikan 0,864. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Lama usaha pada UMKM di Kelurahan Sungai Selincih dan Kalidoni Kota Palembang masih memiliki potensi untuk menjadi UMKM yang mampu mensejahterakan masyarakat secara luas.
4. Latar belakang pendidikan pada UMKM di Kelurahan Sungai Selincih dan Kalidoni Kota Palembang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi dengan nilai signifikan 0,043.. Latar belakang pendidikan seseorang dapat membuat praktek penggunaan akuntansi menjadi lebih penting bagi perusahaan, karena mereka dapat lebih mengetahui ilmu dan kegunaan informasi akuntansi tersebut sehingga memiliki potensi untuk bersaing dengan UMKM yang ada di kota Palembang, dari pada seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan diluar akuntansi/ekonomi.
5. Penggunaan informasi akuntansi pada UMKM khususnya di Kelurahan Sungai Selincih dan Kalidoni Kota Palembang secara keseluruhan dapat dikategorikan cukup baik dengan nilai rata-rata jawaban dari 37 responden adalah sebesar 54,3 %. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Penggunaan informasi akuntansi pada UMKM khususnya di kelurahan sungai selincih dan kalidoni kota Palembang memiliki potensi untuk menjadi UMKM yang mandiri, dan mampu *survive* dalam persaingan bisnis serta mensejahterakan masyarakat secara luas.

DAFTAR REFERENSI

- Aufar, Arizali. 2013. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Umkm.*
- Bank Indonesia. 2012. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan UMKM.* Jakarta.
- Bank Mandiri. 2010. *Buku Panduan Kredit Usaha.* Jakarta.
- Darmansyah, Asep. 2012. *Akuntansi Agribisnis.* Alfabeta:Bandung.

- Depdiknas. 2003. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, Sofyan, syafri. 2012. *Teori Akuntansi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf 5. DSAK-IAI*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. 2008. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Jakarta.
- Lestanti, Dwi. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pengalaman Usaha, dan Motivasi Kerja Terhadap Persepsi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Pelaku Umkm di Boyolali*.
- Hadi, Misbakhul. 2016. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Umkm*.
- Purwanto, Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Gava Media: Yogyakarta.
- Rudiantoro, Rizky dan Sylvia Siregar, Veronica. 2012. *Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Simposium Nasional Akuntansi XIV, IAI.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

DETERMINAN AKSESIBILITAS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* MELALUI *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Dela Tri Aprianti¹, Verawaty², Rolia Wahasusmiah³
Dosen Universitas Bina Darma¹, Mahasiswa Universitas Bina Darma²
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang
Sur-el: delatriapriyanti@rocketmail.com¹, verawaty_mahyudin@yahoo.com²,
Rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id³

ABSTRACT: *Determinan aksesiability internent financial reporting thoug Through E-Government Provincial Government in Indonesia. This study aims to verify and analyze the effect Size, Income percapita, Debt Level, Audit Opinionthe accessibility of internet financial statements or IFR (Internet Financial Reporting) through e-government. This research was conducted 33 Provincial Government of 34 Provincial Government in Indonesia, selected through a purposive sampling techniques and analytical methods used in this research is multiple regression analasis. The results of this study prove that: size, percapita income, debt level, auditing opinion no positive effect on the accessibility of internet financial statements or IFR (Internet Financial Reporting) through e-government.*

Keywords: *size, income percapita, debt level, auditing opinion*

ABSTRAK: *Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh Size, Income PerCapita, Debt Level, Opini Audit terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet atau IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government. Penelitian ini dilakukan 33 Pemerintah Provinsi dari 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia, yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: size, income percapita, debt level, opini audit tidakberpengaruh positif terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet atau IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government.*

Kata kunci: *size, income percapita, debt level, opini audit*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa paradigma baru dalam tatanan seluruh aktivitas kehidupan. Salah satu keunggulan daya saing perusahaan menggunakan kriteria ekonomi dengan ukuran efektivitas, efisiensi dan produktivitas yang telah ada laporan keuangan yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan website belum menampilkan laporan keuangan secara keseluruhan. Selama ini untuk Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dibuat Ditjen Keuangan masih memiliki kelemahan. Seiring perkembangan teknologi informasi tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik, efisiensi

dan meningkatkan transparansi laporan keuangan maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan.

Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 menyatakan pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* mulai ditinggalkan. Salah satu upaya pemerintah dalam hal tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi yaitu dengan menerapkan sistem *electronic government* (*e-government*) atau pemerintahan berbasis elektronik. Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good government*).

SIKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah yang dipergunakan alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang diatur PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65/2010 tentang Perubahan Atas PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah menetapkan bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah, dalam hal ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Seiring dengan perkembangan teknologi di pemerintahan maka pemerintah membuat rancangan aplikasi berbasis internet. Salah satu aplikasi internet pada sektor pemerintah adalah *e-government*. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sudah menjadi bagian yang sangat penting bagi semua sektor. Sektor pemerintahan merupakan salah satu yang turut menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Karena dengan adanya teknologi informasi dapat membantu berbagai proses aktivitas yang dilaksanakan setiap harinya dan penambah nilai potensi yang ada. Di hampir semua sektor pemerintahan sudah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Ketua Harian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Nomor 08/KEP/M/KOMINFO/02/2007 tentang Pembentukan Tata Pamong Teknologi Informasi dan Komunikasi (*IT Governance*). Dinas

Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Indonesia merupakan salah satu sektor pemerintah yang telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam menerapkan pemanfaatan teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Indonesia menyadari perlunya sebuah prosedur pengamanan sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah aset yang sangat penting bagi organisasi untuk dilindungi terhadap ancaman-ancaman keamanan yang sekarang ini menjadi lebih luas dan rumit sehingga nantinya dapat merugikan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Indonesia.

E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. *e-government* juga dapat diartikan sebagai cara bagi pemerintahan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses bagi pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi serta menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses institusi demokrasi.

Dengan perkembangan yang pesat pada *e-government* di pemerintah, beberapa tahun belakangan ini IFR (*Internet Financial Reporting*) muncul dan berkembang sebagai media yang tepat untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan pemerintah provinsi. Berbagai keunggulannya menjadi motif perusahaan untuk menerapkan praktik IFR (*Internet Financial Reporting*).

IFR (*Internet Financial Reporting*) juga merupakan respon dari perusahaan untuk menjaga loyalitas, menjalin komunikasi dengan *stakeholder* dengan lebih baik dan lebih cepat. IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua *stakeholder* publik antara lain pemerintahan pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analisis ekonomi, investor, kreditor, donatur, dan rakyat.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan atau IFR kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah yaitu salah satunya hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Adapun faktor-faktor penentu (determinan) yang diasumsikan berpengaruh terhadap aksesibilitas *internet financial reporting* melalui *e-government* yaitu, ukuran (*size*), pendapatan per-kapita (*income per capita*), *debt level* dan opini audit. Dalam era pertumbuhan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah menghadapi kenaikan permintaan atau tuntutan

terhadap pengawasan informasi dan dorongan yang lebih besar terhadap kinerja.

Anggaran teknologi informasi yang lebih besar akan lebih membiayai daerah dengan suatu fungsi teknologi informasi yang mampu mendesain dan mempertahankan *website* yang lebih canggih dengan aksesibilitas yang paling mudah. Hal ini jelas berhubungan dengan *size* dengan proksi populasi penduduk, semakin besar kota, semakin besar jumlah penduduk dan semakin besar pula anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangannya atau IFR.

Permintaan yang meningkat untuk laporan keuangan akan memerlukan efisiensi biaya untuk penyediaan data laporan keuangan di *website* pemerintah tersebut. Efisiensi biaya ini akan lebih besar untuk provinsi-provinsi dengan *income per capita* yang lebih tinggi yang secara umum memiliki proporsi yang lebih tinggi atas penduduk yang berhubungan dengan internet, termasuk aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangannya. Akan tetapi pada pemerintah provinsi untuk akses melalui internet sekarang ini anggaran yang dibutuhkan belum terpenuhi karna sementara laporan keuangan di pemerintah provinsi masih menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Debt level merupakan dorongan yang diberikan oleh pemilik hutang (pemerintah daerah) untuk mempublikasikan laporan keuangan lebih dominan daripada biaya-biaya atau tekanan-tekanan regulasi dan politis. Hal ini disebabkan oleh pemberi hutang (debitur) akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan

cara yang paling aplikatif termasuk aksesibilitasnya.

Opini audit sebagai faktor yang mempengaruhi adanya IFR (*Internet Financial Reporting*) pada situs pemerintah. Hasil opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari laporan keuangan yang disetorkan oleh seluruh pemerintah provinsi menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah. Dengan anggapan bahwa jika pemerintah provinsi tersebut mendapatkan opini WTP maka akan semakin tinggi indikasinya dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan berbasis IFR (*Internet Financial Reporting*) termasuk aksesibilitasnya melalui *e-government*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, Apakah *size* berpengaruh terhadap aksesibilitas IFR (*internet financial reporting*) melalui *e-governmnet*, Apakah *income per-capita* berpengaruh terhadap aksesibilitas IFR (*internet financial reporting*) melalui *e-governmet*, Apakah *debt level* berpengaruh terhadap aksesibilitas IFR (*internet financial reporting*) melalui *e-government*, Apakah opini audit berpengaruh terhadap aksesibilitas IFR (*internet financial reporting*) melalui *e-governmen*.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah *size*, *income percapita*, *debt level*, dan opini audit berpengaruh terhadap aksesibilitas IFR (*internet financial reporting*) melalui *e-governmnet*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 *E-Government*

Menurut Indrajit (2012), *e-government* merupakan sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor, sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara.

Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank): *e-government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business Enterprises*), dan G2G (*Inter-Agency Relationship*).

2.1.1 Cara Implementasi E-Government

Menurut Rahardjo (2001), pada tataran implementasi, terdapat tiga tingkatan *e-government* yang dicerminkan oleh tampilan situs (*website*) pemerintah, yakni sebagai berikut:

1. *Booklet (to publish)*: Jenis implementasi termudah ini biasanya berskala kecil dan kebanyakan aplikasinya tidak memerlukan sumber daya yang terlalu besar dan beragam. Komunikasi yang muncul dalam tingkatan ini hanyalah

satu arah, pemerintah hanya mempublikasikan data dan informasi agar dapat diakses langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pada saat ini, *e - government* di Indonesia masih berada pada tingkatan ini.

2. *Interact*: Pada jenis ini muncul komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah yang berkepentingan. Terdapat dua jenis aplikasi yang dapat dipergunakan untuk komunikasi dua arah ini. Pertama, bentuk portal, yaitu situs memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari informasi secara spesifik. Kedua, pemerintah memberikan kanal, yaitu masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (*chatting, teleconference, web-tv, dan sebagainya*) maupun tidak langsung (*e-mail, frequent askquestions, newsletter, mailing list, dan sebagainya*).
3. *Transact*: Pada jenis ini sudah terjadi transfer uang dari satu pihak ke pihak lain sebagai konsekuensi dari diberikannya layanan jasa oleh pemerintah. Aplikasi ini lebih rumit karena mengharuskan adanya sistem keamanan dan perlindungan privasi pihak-pihak yang bertransaksi.

2.1.2 Manfaat *E - Government*

Menurut Rahardjo (2001), *e-government* ini membawabanyak manfaat, antara lain:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
3. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang sesuai untuk anaknya.
5. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus

terbang ke Jakarta untuk pertemuan yanghanyaberlangsung satu atau dua jam, misalnya.

2.2 Internet Financial Reporting (IFR)

Pengungkapan atau pelaporan akuntansi sektor publik dengan menggunakan media *website* pemerintah (*e-government*) merupakan konten yang biasa disebut IFR (*Internet Financial Reporting*). Menurut Oyelere, dkk (2003), IFR merupakan kombinasi kapasitas dan kapabilitas multimedia internet untuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan. Laporan keuangan yang biasanya dicetak, melalui internet pengguna laporan keuangan dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan mampu mengeksplorasi kegunaan teknologi ini untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*).

Menurut Lai, dkk (2009) *Internet Financial Reporting* adalah pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui internet atau website.

2.3 Aksesibilitas

Pengertian aksesibilitas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Sanjaya dkk (2014) mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Adapun menurut Styles dan Tennyson (2007), aksesibilitas laporan keuangan terkait dengan kemudahan penggunaan untuk dapat menemukan dan

melihat data laporan keuangan yang disediakan di internet.

Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantung kepada akses publik laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah yaitu salah satunya hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Ariefia Nosihana dan Rizal Yaya (2016)	<i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia	<i>Internet Financial Reporting, Local Government, Political Competition, Asset Size</i>	Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang seberapa besar faktor – faktor seperti kompetisi politik, ukuran Pemda, leverage, kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit dapat memengaruhi internet financial reporting pada website tiap Pemda di Indonesia sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ
Agus Tubels Nainggolan dan Dyah Purwanti (2016)	Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website	Pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah, belanja daerah, rasio pembiayaan hutang, tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan dalam website
Verawaty. (2015)	Determinan Aksesibilitas Informasi Keuangan Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia	<i>Internet financial reporting, accessibility index value, income per capita, debt level</i>	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara <i>size, income per capita, dan debt level</i> dengan aksesibilitas laporan keuangan.

2.5 Operasional Variabel

Adapun Variabel independen dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pengaruh IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* pemerintah provinsi di Indonesia. Sedangkan yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah ukuran (size) pemerintah provinsi, *income per capita* pemerintah provinsi, debt level pemerintah provinsi, opini audit pemerintah provinsi.

2.6 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia.

2.7 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012). Selain itu, data juga dikumpulkan melalui laporan-laporan yang dipublikasikan oleh pemerintah provinsi melalui *website* Badan Pusat Statistik (BPS) (<http://bps.go.id>) dan *website* Departemen Keuangan (<http://djpk.depkeu.go.id>). Selain itu, tentunya data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang menjadi tinjauan pustaka dalam membangun hipotesis dan sekaligus mengujinya, antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah ataupun populer, koran, serta internet.

2.8 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pemilihan teknik analisis kuantitatif adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini. Teknik analisis kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dengan menggabungkan hubungan antar variabel yang terlibat didalamnya, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perkembangan IFR (*Internet Financial Reporting*).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Data

Berdasarkan tabel statistik deskriptif variabel penelitian, terlihat bahwa dari 33 provinsi yang menjadi sampel penelitian, variabel *SIZE* mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 6,7641 dengan standar deviasi sebesar 0,63561 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata *SIZE*. Demikian pula nilai minimum sebesar 5,94 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 8,68 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

INCOME mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7,5952 dengan standar deviasi sebesar 0,23978 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata *INCOME*. Demikian pula nilai minimum sebesar 7,17 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum

sebesar 8,29 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE_pemda	33	5,94	8,68	6,7641	,63561
INCOME_pemda	33	7,17	8,29	7,5952	,23978
DEBT_pemda	33	1,79	3,89	3,0578	,36293
opiniaudit_BPK	33	,00	1,00	,8485	,36411
Calculation of Accessibility Index Value	33	7,00	9,00	7,4242	,66287
Valid N (listwise)	33				

DEBT mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,0578 dengan standar deviasi sebesar 0,36293 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata DEBT. Demikian pula nilai minimum sebesar 1,79 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 3,89 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

OPINI AUDIT mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8485 dengan standar deviasi sebesar 0,36411 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil daripada nilai rata-rata OPINI AUDIT. Demikian pula nilai minimum sebesar 0 yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 1,00 yang lebih besar daripada nilai rata-ratanya.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3.2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,165 ^a	,027	-,112	,69893

a. Predictors: (Constant), opiniaudit_BPK, SIZE_pemda, INCOME_pemda, DEBT_pemda

b. Dependent Variable: Calculation of Accessibility Index Value

Tabel menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,27 yang memiliki arti bahwa hanya 27% aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) dijelaskan oleh variabel *SIZE*-, *INCOME*-, *DEBT*-, dan *OPINI AUDIT*. Sedangkan sisanya 73% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

3.2.2 Uji Statistik F

Tabel 3.3

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,383	4	,096	,196	,938 ^b
Residual	13,678	28	,488		
Total	14,061	32			

a. Dependent Variable: Calculation of Accessibility Index Value

b. Predictors: (Constant), opiniaudit_BPK, SIZE_pemda, INCOME_pemda, DEBT_pemda

Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai *F* hitung sebesar 0,196 dengan probabilitas sebesar 0,938 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) atau dapat dikatakan variabel *SIZE*-, *INCOME*-, *DEBT* dan *OPINI AUDIT* berpengaruh terhadap

variabel dependennya yaitu *internet financial reporting* (IFR).

3.3 Analisis Regresi

Tabel 3.4
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,361	4,403		1,899	,068
SIZE_pemda	-,182	,217	-,175	-,839	,409
INCOME_pemda	,060	,596	,022	,101	,921
DEBT_pemda	-,061	,425	-,034	-,144	,886
opiniaudit_BP K	,031	,349	,017	,089	,930

a. Dependent Variable: Calculation of Accessibility Index Value

$$\text{IFRACCESS} = 8,361 + 0,182 \text{ SIZE} + 0,060 \text{ INCOME} + 0,061 \text{ DEBT} + 0,031 \text{ OPINI} + e$$

Persamaan tersebut dapat menunjukkan jika seluruh variabel bebas (*independent*) yaitu SIZE, INCOME, DEBT, OPINI bernilai 0, maka aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) positif yaitu 8,361

Variabel SIZE memiliki koefisien yang negatif yaitu -0,182 Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan SIZE sebesar 1, maka aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) akan menurun sebesar -0,182 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

Variabel INCOME memiliki koefisien yang positif yaitu 0,060. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan INCOME sebesar 1, maka aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) akan meningkat sebesar 0,060 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

Variabel DEBT memiliki koefisien yang negatif yaitu -0,061. Hal ini menunjukkan bahwa

setiap peningkatan DEBT sebesar 1, maka aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) akan menurun sebesar -0,061 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

Variabel OPINI memiliki koefisien yang positif yaitu 0,031. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan OPINI sebesar 1, maka aksesibilitas *internet financial reporting* (IFR) akan meningkat sebesar 0,031 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

4. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan atau faktor penentu aksesibilitas *internet financial reporting* melalui *e-government* sebagai variabel dalam laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5. Berdasarkan hasil uji hipotesis *size* pemerintahan provinsi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*, semakin besar jumlah penduduk ternyata tidak mempengaruhi tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangan atau IFR ditolak.
6. Berdasarkan hasil uji hipotesis *income percapita* pemerintahan provinsi tidak berpengaruh positif terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*, semakin pendapatan perkapita yang lebih besar pun ternyata tidak

- mempengaruhi tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangan atau IFR ditolak.
7. Berdasarkan hasil uji hipotesis *debt level* pemerintahan provinsi tidak berpengaruh positif terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*, tingkat hutang yang lebih tinggi dari jumlah penduduk ternyata tidak mempengaruhi tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangan atau IFR ditolak.
 8. Berdasarkan hasil uji hipotesis opini audit pemerintahan provinsi tidak berpengaruh positif terhadap aksesibilitas laporan keuangan internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan lagi-lagi tidak mempengaruhi tuntutan akan fungsi akuntansi serta aksesibilitas terhadap informasi laporan keuangan atau IFR ditolak.
 9. Tekanan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ dan keinginan untuk memenangkan PEGI (Pemeringkatan *E-Government* Indonesia) menjadi alasan kenapa semua hipotesis gagal diterima.

DAFTAR RUJUKAN

Agus TN dan Dyah P (2016). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi

transparansi informasi keuangan daerah via website

Giroux, G. and McLelland, A.J., 2003. *Governance Structure and Accounting at Large Municipalities. Journal of Accounting and Public Policy.*

GASB (*Governmental Accounting Standards Boards*), 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting. Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government.* Norwalk.

Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)*

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. *Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika).*

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.*

Laswad, Fawzi, Fisher, Richard and Oyelere, Peter, 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy.*

Oyelere, P, Laswad, F & Fisher, R. (2003). *Determinant of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies. Journal of International Financial Management and Accounting*, 14: 1-39.

- Rora (2010). Analisis tingkat pengungkapan sukarela pada situs resmi pemerintah daerah.
- Styles, AK & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 19: 56-92.
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Trisnawati, M.D., & Achmad, K., 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Pemerintah Menerbitkan PP No.61/2010.
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Verawaty (2012). The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E- Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia. *Proceedings of The 13th Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MICEMA)*, Palembang, Indonesia, pp. 562-579.
- Zimmerman, J., 1977. *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research*, 15: 107-144.

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS DAN CAPITAL*) PADA BANK BUMN DAN SWASTA YANG TERDAFTAR DI BEI

Santoso¹, Siti Nurhayati Nafsiah², Citra Indah Merina²
Dosen Universitas Bina Darma^{2,2}, Mahasiswa Universitas Bina Darma¹
Jalan Jendral Ahmad Yani No.3 Palembang

Pos-el : santosobram@gmail.com¹, citra_ims@yahoo.com², siti_nurhayati@binadarma.sc.id²

ABSTRACT : This study aims to determine the health of banks among state-owned banks and private banks being reviewed by the method RGEC period of 2015. This study was conducted at four state-owned banks and 22 private banks from 43 Banks listed in the Indonesia Stock Exchange in 2015, which were selected through purposive sampling and analysis techniques used in this study is a comparative analysis. The results of this study prove that the total ratio of Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Return on Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), and the Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2015 to the state-owned bank is higher than the total ratio in private banks. These conditions indicate the overall performance of state-owned bank is better than private banks.

Keywords: *The Healthy Level of Bank, RGEC Method*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank antara Bank BUMN dan Bank Swasta yang ditinjau dengan Metode RGEC periode 2015. Penelitian ini dilakukan pada 4 Bank BUMN dan 22 Bank Swasta dari 43 Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa total keseluruhan rasio *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return On Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2015 terhadap Bank BUMN lebih tinggi dibandingkan total keseluruhan rasio pada Bank Swasta. Kondisi ini menunjukkan secara keseluruhan kinerja Bank BUMN lebih baik dibandingkan Bank Swasta.

Kata kunci: *Tingkat Kesehatan Bank, Metode RGEC.*

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting perannya dalam kegiatan ekonomi, karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank maka dapat melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan. Semakin majunya globalisasi, dunia perbankan sangat berperan aktif bahkan dalam kemajuan perekonomian. Hal ini dikarenakan bahwa bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara unit perekonomian yang mengalami *surplus* (kelebihan dana) kepada unit perekonomian yang mengalami *defisit* (kekurangan dana), sehingga dapat dikatakan

bahwa bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.

Menurut Kasmir (2010), Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerakkan dana yang berasal dari masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya. Komunikasi yang kurang serta aneka ragam pengalaman berkenaan dengan likuiditas, risiko, waktu dan sebagainya, telah membuat hubungan

langsung antara penabung dengan investor tidak efisien dan terbatas ruang lingkupnya.

Menurut Kasmir (2010), Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank yaitu, melemahnya nilai tukar rupiah, lemahnya kondisi internal bank seperti kinerja manajemen yang kurang memadai dan pemberian kredit kepada kelompok atau group usaha sendiri yang dapat mengakibatkan kredit macet, selain itu tingkat kompleksitas usaha yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh pihak perbankan dan modal yang tidak dapat menutupi risiko – risiko yang dihadapi oleh perbankan dapat menyebabkan kinerja bank menurun. Lemahnya kondisi intern seperti ini dalam perbankan akan menurunkan manajemen kinerja yang nantinya akan menyebabkan buruknya aktivitas perbankan, maka peran pemerintah sangat berpengaruh sebagai langkah untuk menyetatkan industri perbankan.

Berdasarkan kelemahan kondisi intern bank di atas dan untuk mengetahui munculnya krisis keuangan pada perbankan yang akan mengancam aktivitas bisnis yang dilakukannya maka perlu dibuat suatu sistem peringatan dini dan penanganan yang lebih intens, mengingat bank merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat, selain itu, agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter, maka lembaga keuangan dalam menjalankan aktifitasnya harus senantiasa menjaga tingkat kesehatan bank.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi – fungsinya dengan baik, dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya terutama kebijakan moneter. Krisis moneter yang terus menerus mengakibatkan krisis kepercayaan, akibatnya banyak bank yang dilanda penyakit yang sama dan menyebabkan

banyak bank yang lumpuh karena dihantam kredit macet.

Tingkat kesehatan suatu perbankan dapat dinilai dari beberapa indikator salah satunya yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan. Laporan keuangan akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan pada saat itu atau dalam periode tertentu. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dari laporan tersebut dapat diketahui kondisi kesehatan bank, dan penilaian kesehatan perbankan dilakukan setiap periode.

Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank, bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya, bagi bank yang menurut penilaian sehat tidak jadi masalah tapi apabila terjadi penurunan dan terus menurun tidak sehat, maka harus mendapatkan pengarahannya atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dapat berjalan dengan lancar jika kondisi bank berada dalam kategori sehat. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menilai kesehatan bank dan salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Bank Indonesia sebelumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 dengan faktor-faktor penilaiannya digolongkan dalam 6 faktor yang disebut CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*). Tujuan penggantian Peraturan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan atas kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan Pengawasan secara konsolidasi yang diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko.

Dalam kamus perbankan metode *RGEC* adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan bank. Rasio *RGEC* adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Salah satu cara pasar dalam memahami sinyal yang dikeluarkan oleh perbankan adalah dengan menggunakan komponen *RGEC* untuk menilai kinerja perbankan selama satu periode sehingga dapat dikategorikan sehat atau tidak, berdasarkan nilai yang diperoleh dari rating tersebut. Kemudian dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi risiko dan menghindari gagalnya bank tersebut bahkan lebih jauh dapat mencegah terjadinya krisis keuangan dalam sistem perekonomian Indonesia.

Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di pihak lain, Bank Indonesia mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP).

Secara empiris tingkat kegagalan bisnis dan kebangkrutan bank dengan menggunakan rasio-rasio keuangan model *RGEC* dapat diuji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu: Trisnawati dan Puspita (2014), yang meneliti tingkat kesehatan Bank BUMN dengan Metode *RGEC* hasil penelitian menunjukkan Bank dalam kategori sangat sehat. Minarrohmah dkk (2014), yang meneliti tingkat

kesehatan Bank BCA dengan menggunakan Metode *RGEC* hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BCA memiliki kategori bank yang sangat sehat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ulya (2014), yang meneliti variabel profil risiko, rentabilitas, dan permodalan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara bank konvensional dan syariah. Sedangkan untuk variabel *GCG* menunjukkan adanya perbedaan antara bank konvensional dan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari penelitian terdahulu, penulis menarik kesimpulan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode *RGEC* setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh perbankan, regulator maupun stakeholder secara keseluruhan termasuk masyarakat untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Beberapa penelitian menggunakan objek dan hasil yang berbeda. Sehingga dari hal tersebut, penulis melakukan studi untuk menganalisis perbedaan tingkat kesehatan antara Bank BUMN dan Swasta dengan menggunakan metode *RGEC*.

Penelitian ini menggunakan pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan tingkat kesehatan bank berdasarkan *RGEC* (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) dan Uji *Mann-Whitney* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan respon dari 2 populasi data yang saling independen. Tes ini termasuk dalam uji nonparametrik. Tes ini merupakan tes paling kuat diantara tes-tes nonparametrik.

Peneliti tertarik memilih objek penelitian pada Bank BUMN dan Bank Swasta dengan membandingkan tingkat kesehatan bank karena Bank BUMN dan Bank Swasta bersaing untuk menjadi pilihan masyarakat. Bank BUMN sudah lebih dahulu beroperasi di Indonesia dan ini menjadi salah satu tantangan bagi Bank Swasta untuk lebih memperluas jaringan sehingga masyarakat bisa lebih mengenal dan tertarik

menjadi nasabah Bank Swasta, oleh karena itu Bank Swasta berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target tersebut. Bank BUMN dan Bank Swasta memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian di Indonesia, diharapkan perusahaan BUMN tersebut mampu mempertahankan kinerjanya secara maksimal sehingga akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Nasional secara keseluruhan begitu juga sebaliknya Bank Swasta dapat meningkatkan kinerjanya secara maksimal. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kesiapan Bank BUMN dan Bank Swasta untuk menghadapi risiko-risiko yang akan dihadapi kedepannya dan juga mengetahui bagaimana kinerja dari bank tersebut. Perbandingan tingkat kesehatan menggunakan Profil risiko dengan rasio *NPL* dan *LDR*, kemudian *GCG* (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas dengan *ROA* dan *NIM* dan permodalan dengan *CAR*. Kinerja bank umum milik pemerintah selalu menjadi sorotan bagi para pengambil keputusan investasi juga bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di bank.

Selain itu alasan lain penulis memilih Bank BUMN dan Bank Swasta sebagai objek penelitian karena penelitian-penelitian yang sudah ada lebih banyak menggunakan salah satu bank tertentu sebagai objek penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK BERDASARKAN METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS DAN CAPITAL*) PADA BANK BUMN DAN SWASTA TERDAFTAR DI BEI”**.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEC antara Bank BUMN dan Swasta.

C. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan khususnya mengenai analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang tingkat kesehatan serta perbedaan antara Bank BUMN dan Swasta dinilai dengan metode RGEC. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat mengembangkan penelitian sebelumnya yang masih terdapat perbedaan hasil dan objek penelitian, sehingga nantinya akan bermanfaat dan menjadi sumber informasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis yaitu bagi Bank BUMN dan Swasta dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak manajemen bank dan investor dalam menilai tingkat kesehatan bank. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keadaan suatu bank sehingga dapat memilih bank yang dapat dipercaya untuk mengelola dana masyarakat ataupun dalam proses penyediaan layanan jasa perbankan yang lain.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikan data – data laporan keuangan untuk menentukan kategori kesehatan bank.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah – masalah berupa fakta – fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro, 2011). Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji atau

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Mudrajad, 2009).

Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC yang meliputi penilaian terhadap faktor profil risiko (*Risiko profil*), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), *Capital* (Permodalan) selama periode 2015.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank BUMN dan Swasta yang terdaftar di BEI tahun 2015.

Berdasarkan *Indonesia Stock Exchange* (IDX) Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015. yaitu sebanyak 43 perusahaan perbankan. Perbankan dipilih karena termasuk industri yang selalu berisiko (Kruk, 2009). Aktivitas yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan bervariasi, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat (PBI Nomor : 11/25/PBI/2009).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis komparatif. Menurut Nazir (2005), penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor – faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

F. Hasil Penelitian

1. Perhitungan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Untuk Bank BUMN

a. Analisis Faktor Profil Risiko (*Risk Profile*)

1) *Non Performing Loan* (NPL)

Tabel 1

Hasil Penilaian Komposit Predikat NPL (*Non Performing Loan*) Bank BUMN

NO	NAMA BANK	NPL (%)
		2015
1	Bank Mandiri Tbk	2,29
2	Bank Negara Indonesia Tbk	2,70
3	Bank Rakyat Indonesia Tbk	2,02
4	Bank Tabungan Negara Tbk	3,42
Jumlah		10,43
Rata – rata		2,60

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan data hasil perhitungan NPL (*Non Performing Loan*) Bank BUMN dilihat dari jumlah NPL pada tahun 2015, nilai rata-rata NPL Bank BUMN dan diukur menggunakan nilai komposit NPL yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum Bank BUMN dapat dikatakan memperoleh predikat “Baik” pada tahun 2015 karena nilai rata-rata NPL bank BUMN >2%.

2) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Tabel 2

NO	NAMA BANK	LDR (%)
		2015
1	Bank Mandiri Tbk	87,05
2	Bank Negara Indonesia Tbk	87,80
3	Bank Rakyat Indonesia Tbk	86,88
4	Bank Tabungan Negara Tbk	108,78
Jumlah		370,51
Rata – rata		92,63

Hasil Penilaian Komposit Predikat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank BUMN

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan data hasil perhitungan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank BUMN dilihat dari jumlah LDR pada tahun 2015, nilai rata-rata

LDR Bank BUMN dan diukur menggunakan nilai komposit LDR yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum Bank BUMN dapat dikatakan memperoleh predikat “Cukup Baik” karena nilai rata-rata LDR Bank BUMN >85%.

b. Analisis Faktor Good Corporate Governance (GCG)

Tabel 3
Hasil Penilaian Komposit Predikat Good Corporate Governance (GCG) Bank BUMN

NO	NAMA BANK	GCG (%) 2015
1	Bank Mandiri Tbk	92,88
2	Bank Negara Indonesia Tbk	87,46
3	Bank Rakyat Indonesia Tbk	82,47
4	Bank Tabungan Negara Tbk	92,27
Jumlah		355,08
Rata – rata		88,77

Sumber : Data diolah 2016

Berdasarkan data hasil perhitungan GCG (*Good Corporate Governance*) Bank BUMN dilihat dari jumlah GCG pada tahun 2015, nilai rata-rata GCG Bank BUMN dan diukur menggunakan nilai komposit GCG yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum Bank BUMN dapat dikatakan memperoleh predikat “Sangat Baik” karena nilai rata-rata GCG Bank BUMN >80%.

c. Analisis Faktor Rentabilitas (Earnings)

3) Return On Asset (ROA)

Tabel 4
Hasil Penilaian Komposit Predikat Return On Asset (ROA) Bank BUMN

NO	NAMA BANK	ROA (%) 2015
1	Bank Mandiri Tbk	3,15
2	Bank Negara Indonesia Tbk	2,60
3	Bank Rakyat	4,19

Indonesia Tbk		
	Bank	Tabungan
4	Negara Tbk	1,61
Jumlah		11,55
Rata – rata		2,89

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan data hasil perhitungan ROA (*Retrun On Asset*) Bank BUMN dilihat dari jumlah ROA pada tahun 2015, nilai rata-rata ROA Bank BUMN dan diukur menggunakan nilai komposit ROA yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum Bank BUMN dapat dikatakan memperoleh predikat “Sangat Baik” karena nilai rata-rata ROA Bank BUMN >1,5%.

4) Net Interest Margin (NIM)

Tabel 5
Hasil penilaian Komposit Predikat Net Interest Margin (NIM) Bank BUMN

NO	NAMA BANK	NIM (%) 2015
1	Bank Mandiri Tbk	5,90
2	Bank Negara Indonesia Tbk	6,40
3	Bank Rakyat Indonesia Tbk	8,13
4	Bank Tabungan Negara Tbk	4,87
Jumlah		25,30
Rata – rata		6,33

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan data hasil perhitungan NIM (*Net Interest Margin*) Bank BUMN dilihat dari jumlah NIM, nilai rata-rata NIM Bank BUMN dan diukur menggunakan nilai komposit NIM yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan penilaian predikat komposit Bank BUMN berdasarkan rasio NIM memperoleh predikat “Sangat Baik”.

d. Analisis Faktor Permodalan (Capital)

5) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Tabel 6
Hasil Penilaian Komposit Predikat Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank BUMN

NO	NAMA BANK	CAR (%)
		2015
1	Bank Mandiri Tbk	18,60
2	Bank Negara Indonesia Tbk	19,50
	Bank Rakyat Indonesia Tbk	
3	Bank Tabungan Negara Tbk	20,59
	Bank Rakyat Indonesia Tbk	
4	Bank Tabungan Negara Tbk	16,97
	Bank Tabungan Negara Tbk	
Jumlah		75,66
Rata – rata		18,92

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan hasil perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada tabel diatas menunjukkan bahwa keempat Bank BUMN memiliki nilai CAR diatas 12%. Penilaian predikat komposit Bank BUMN berdasarkan rasio CAR memperoleh predikat komposit “Sangat Baik”.

2. Perhitungan RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Untuk Bank Swasta

e. Analisis Faktor Profil Risiko (*Risk Profile*)

6) *Non Performing Loan* (NPL)

Tabel 7

Hasil Penilaian Komposit Predikat NPL (*Non Performing Loan*) Bank Swasta

NO	NAMA BANK	NPL (%)
		2015
1	Bank Agris Tbk	1,75
	Bank Artha Graha	
2	Internasional Tbk	2,33
3	Bank Bukopin Tbk	2,38
4	Bank Bumi Arta Tbk	0,78
5	Bank Central Asia Tbk	0,70
6	Bank CIMB Niaga Tbk	3,74
	Bank Danamon Indonesia	
7	Tbk	3,00
8	Bank Maspion Tbk	0,51
	Bank Mayapada	
9	Internasional Tbk	2,52
10	Bank Maybank Indonesia	3,67

		Tbk
11	Bank Mega Tbk	2,81
12	Bank Mestika Dharma Tbk	1,36
13	Bank Mitraniaga Tbk	0,34
14	Bank Nationalnobu Tbk	1,14
	Bank Nusantara	
15	Parahyangan Tbk	3,98
16	Bank OCBC NISP Tbk	2,50
	Bank Of India Indonesia	
17	Tbk	0,79
18	Bank Pan Indonesia Tbk	2,44
19	Bank QNB Indonesia Tbk	2,59
20	Bank Sinar Mas Tbk	3,95
	Bank Tabungan Pensiunan	
21	Nasional Tbk	0,70
22	Bank Yudha Bhakti Tbk	1,85
Jumlah		45,83
Rata – rata		2,08

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dilihat dari nilai rata-rata NPL (*Non Performing Loan*) Bank Swasta dan diukur menggunakan nilai komposit, maka dapat dikatakan penilaian predikat komposit Bank Swasta berdasarkan rasio NPL memperoleh predikat “Baik” karena nilai rata-rata NPL berada diatas 2%.

7) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Tabel 8

Hasil Penilaian Komposit Predikat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Swasta

		LDR (%)
NO	NAMA BANK	2015
		1
2	Bank Artha Graha	80,75
	Internasional Tbk	
3	Bank Bukopin Tbk	86,34
4	Bank Bumi Arta Tbk	82,78
5	Bank Central Asia Tbk	81,10
	Bank CIMB Niaga	
6	Tbk	97,98

7	Bank Danamon Indonesia Tbk	87,50
8	Bank Maspion Tbk	92,96
9	Bank Mayapada Internasional Tbk	82,99
10	Bank Maybank Indonesia Tbk	86,14
11	Bank Mega Tbk	65,05
12	Bank Mestika Dharma Tbk	101,61
13	Bank Mitraniaga Tbk	59,34
14	Bank Nationalnobu Tbk	72,53
15	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	90,17
16	Bank OCBC NISP Tbk	92,10
17	Bank Of India Indonesia Tbk	82,06
18	Bank Pan Indonesia Tbk	98,83
19	Bank QNB Indonesia Tbk	112,54
20	Bank Sinar Mas Tbk	78,04
21	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	97,00
22	Bank Yudha Bhakti Tbk	88,95
Jumlah		1862,43
Rata – rata		84,66

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dilihat dari nilai rata-rata LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Swasta dan diukur menggunakan nilai komposit, maka dapat dikatakan penilaian predikat komposit Bank Swasta berdasarkan rasio LDR memperoleh predikat “Baik” karena nilai rata-rata NPL kurang dari 85%.

e. Analisis Faktor Good Corporate Governance (GCG)

Tabel 9
Hasil Penilaian Komposit Predikat Good Corporate Governance (GCG) Bank Swasta

		GCG (%)
NO	NAMA BANK	2015
1	Bank AGRIS Tbk	78,00
2	Bank Artha Graha Internasional Tbk	70,00
3	Bank Bukopin Tbk	75,00
4	Bank Bumi Arta Tbk	78,00
5	Bank Central Asia Tbk	96,00
6	Bank CIMB Niaga Tbk	74,00
7	Bank Danamon Indonesia Tbk	92,50
8	Bank Maspion Tbk	74,00
9	Bank Mayapada Tbk	77,50
10	Bank Maybank Indonesia Tbk	91,00
11	Bank Mega Tbk	79,00
12	Bank Mestika Dharma Tbk	79,00
13	Bank Mitraniaga Tbk	76,00
14	Bank Nationalnobu Tbk	77,00
15	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	78,00
16	Bank OCBC NISP Tbk	89,42
17	Bank Of India Indonesia Tbk	67,00
18	Bank Pan Indonesia Tbk	74,00
19	Bank QNB Indonesia Tbk	94,00
20	Bank Sinar Mas Tbk	73,00

	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	
21		77,00
22	Bank Yudha Bhakti Tbk	73,00
Jumlah		1742
Rata – rata		79,20

Sumber : Laporan keuangan 2015

Berdasarkan data hasil perhitungan GCG (*Good Corporate Governance*) Bank Swasta dilihat dari jumlah GCG, nilai rata-rata GCG Bank Swasta dan diukur menggunakan nilai komposit GCG yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum Bank Swasta dapat dikatakan memperoleh predikat “Baik” karena nilai rata-rata GCG Bank Swasta kurang dari 80%.

f. Analisis Faktor Rentabilitas (*Earnings*)
8) Return On Asset (ROA)

Tabel 10
Hasil Penilaian Komposit Predikat Return On Asset (ROA) Bank Swasta

NO	NAMA BANK	ROA (%) 2015
1	Bank AGRIS Tbk	0,17
2	Bank Artha Graha Internasional Tbk	0,33
3	Bank Bukopin Tbk	1,39
4	Bank Bumi Arta Tbk	1,33
5	Bank Central Asia Tbk	3,80
6	Bank CIMB Niaga Tbk	0,24
7	Bank Danamon Indonesia Tbk	1,20
8	Bank Maspion Tbk	1,10
9	Bank Mayapada Tbk	2,10
10	Bank Maybank Indonesia Tbk	1,01

11	Bank Mega Tbk	1,97
12	Bank Mestika Dharma Tbk	3,53
13	Bank Mitraniaga Tbk	0,71
14	Bank Nationalnobi Tbk	0,38
15	Bank Parahyangan Tbk	0,99
16	Bank OCBC NISP Tbk	2,30
17	Bank Of India Indonesia Tbk	-0,77
18	Bank Pan Indonesia Tbk	1,31
19	Bank QNB Indonesia Tbk	0,87
20	Bank Sinar Mas Tbk	0,95
21	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	3,10
22	Bank Yudha Bhakti Tbk	1,16
Jumlah		29,11
Rata – rata		1,32

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan data hasil perhitungan ROA (*Retrun On Asset*) Bank Swasta dilihat dari jumlah ROA, nilai rata-rata ROA Bank Swasta dan diukur menggunakan nilai komposit ROA yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum Bank Swasta dapat dikatakan memperoleh predikat “Baik” karena nilai rata-rata ROA Bank Swasta kurang dari 1,5%.

9) Net Interest Margin (NIM)

Tabel 11
Hasil penilaian Komposit Predikat Net Interest Margin (NIM) Bank Swasta

NO	NAMA BANK	NIM (%) 2015
1	Bank AGRIS Tbk	3,24
2	Bank Artha Graha Internasional Tbk	4,56

3	Bank Bukopin Tbk	3,58
4	Bank Bumi Arta Tbk	5,49
5	Bank Central Asia Tbk	6,70
6	Bank CIMB Niaga Tbk	5,21
7	Bank Danamon Indonesia Tbk	4,50
8	Bank Maspion Tbk	4,42
9	Bank Mayapada Tbk	4,78
10	Bank Maybank Indonesia Tbk	4,84
11	Bank Mega Tbk	6,04
12	Bank Mestika Dharma Tbk	8,13
13	Bank Mitraniaga Tbk	2,53
14	Bank Nationalnobi Tbk	3,89
15	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	5,18
16	Bank OCBC NISP Tbk	5,40
17	Bank Of India Indonesia Tbk	3,70
18	Bank Pan Indonesia Tbk	4,61
19	Bank QNB Indonesia Tbk	3,08
20	Bank Sinar Mas Tbk	5,77
21	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	11,30
22	Bank Yudha Bhakti Tbk	6,12
Jumlah		111,68
Rata – rata		5,08

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan data hasil perhitungan NIM (*Net Interest Margin*) Bank Swasta dilihat dari jumlah NIM, nilai rata-rata NIM Bank Swasta dan diukur menggunakan nilai komposit NIM yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan penilaian predikat komposit Bank Swasta berdasarkan rasio NIM memperoleh predikat “Sangat Baik” karena nilai rata – rata NIM lebih dari 3%.

g. Analisis Faktor Permodalan (*Capital*)
10) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Tabel 11

Hasil Penilaian Komposit Predikat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Swasta

NO	NAMA BANK	CAR (%) 2015
----	-----------	-----------------

1	Bank AGRIS Tbk	8,12
2	Bank Artha Graha Internasional Tbk	15,20
3	Bank Bukopin Tbk	13,56
4	Bank Bumi Arta Tbk	25,57
5	Bank Central Asia Tbk	17,80
6	Bank CIMB Niaga Tbk	14,20
7	Bank Danamon Indonesia Tbk	18,80
8	Bank Maspion Tbk	19,33
9	Bank Mayapada Tbk	12,97
10	Bank Maybank Indonesia Tbk	15,17
11	Bank Mega Tbk	22,85
12	Bank Mestika Dharma Tbk	28,26
13	Bank Mitraniaga Tbk	15,49
14	Bank Nationalnobi Tbk	27,48
15	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	18,07
16	Bank OCBC NISP Tbk	21,40
17	Bank Of India Indonesia Tbk	23,85
18	Bank Pan Indonesia Tbk	20,13
19	Bank QNB Indonesia Tbk	16,18
20	Bank Sinar Mas Tbk	14,37
21	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	23,80
22	Bank Yudha Bhakti Tbk	15,70
Jumlah		410,30
Rata – rata		18,65

Sumber : Laporan Keuangan 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa penilaian predikat komposit Bank Swasta berdasarkan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah “Sangat Baik” hal tersebut dikarenakan, baik perolehan nilai CAR per individu bank maupun nilai rata-rata CAR Bank Swasta berada diatas 12%.

Tabel 13
Hasil uji *Mann-Whitney Test* untuk semua faktor RGEK

Ranks

	NAMAB ANK	N	Mean Rank	Sum of Ranks
NPL	BUMN	4	16,00	64,00
	SWAST A	22	13,05	287,00
	Total	26		

LD R	BUMN	4	17,00	68,00
	SWASTA	22	12,86	283,00
	Total	26		
GC G	BUMN	4	22,25	89,00
	SWASTA	22	11,91	262,00
	Total	26		
RO A	BUMN	4	21,75	87,00
	SWASTA	22	12,00	264,00
	Total	26		
NIM	BUMN	4	19,63	78,50
	SWASTA	22	12,39	272,50
	Total	26		
CA R	BUMN	4	15,25	61,00
	SWASTA	22	13,18	290,00
	Total	26		

Test Statistics^a

	NP L	LD R	GC G	RO A	NI M	CA R
Mann-Whitney U	34,00	30,00	9,00	11,00	19,50	37,00
Wilcoxon W	287,00	283,00	262,00	264,00	270,00	290,00
Z	-,71	-,99	2,50	2,34	1,74	-,49
Asymp. Sig. (2-tailed)	,477	,320	,012	,019	,082	,619
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,515 ^b	,352 ^b	,009 ^b	,016 ^b	,081 ^b	,656 ^b

a. Grouping Variable: NAMABANK

b. Not corrected for ties.

Sumber : Data diolah SPSS 22

Tabel 14
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
BUMN dan Bank Swasta tahun 2015

Me tod e	Ra sio	Bank		Kesimpul an		
		BUMN	Bank Swasta			
R	L	Nil ai (%)	Pre dika t	Nilai Predi kat	Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Swasta pada faktor Risk Profile Bank BUMN lebih baik dibandingkan Bank Swasta Bank BUMN lebih baik dibandingkan Bank Swasta Bank BUMN dan Swasta Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Swasta Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN	
		1.	NP	2,6		Baik
2.	LD R	92,63	Cuk up Baik	84,66	Baik	Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Swasta
1.	RO	2,8	San gat Baik	1,32	Baik	Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Swasta
2.	NI M	6,33	San gat Baik	5,08	Sanga t Baik	Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Swasta
1.	CA R	18,92	San gat Baik	18,65	Sanga t Baik	Tidak ada perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Swasta

Sumber : data diolah 2016

F. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

1. Tahun 2015 untuk faktor *risk profile* (profil risiko) dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) terhadap Bank BUMN dan Bank Swasta berada pada Peringkat Komposit 2 (PK2) dengan predikat “Baik”. Hasil ini juga didukung oleh pengujian *Mann-Whitney Test* yang menunjukkan nilai *sig.2-tailed* sebesar $0,477 > 0,05$, yang berarti tidak ada perbedaan antara Bank BUMN dan Bank Swasta untuk *Non Performing Loan* (NPL).
2. Faktor *risk profile* yang menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), hasil penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio LDR pada tahun 2015 terhadap Bank BUMN memperoleh predikat “Cukup Baik” sehingga kondisi bank berada pada Peringkat Komposit 3 (PK3) yaitu “Cukup Sehat” dan Bank Swasta memperoleh predikat “Baik” sehingga kondisi bank berada pada Peringkat Komposit 2 (PK2) yaitu “Sehat”. Dan dari hasil uji *Mann – Whitney Test* dapat diketahui bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) antara Bank BUMN dan Swasta menghasilkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar $0,320 > 0,05$. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Bank Swasta pada faktor LDR tahun 2015.
3. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada tahun 2015 untuk faktor *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Bank BUMN memperoleh predikat “Sangat Baik” sehingga kondisi bank berada pada Peringkat Komposit 1 (PK1) yaitu “Sangat Sehat” dan Bank Swasta memperoleh predikat “Baik” sehingga kondisi bank berada pada Peringkat Komposit 2 (PK2) yaitu “Sehat”. Dan dari hasil uji *Mann – Whitney Test* dapat diketahui bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) antara Bank BUMN dan Bank Swasta menghasilkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar $0,012$. Hal ini berarti terdapat perbedaan antara Bank BUMN dan Bank Swasta pada faktor GCG tahun 2015.
4. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada tahun 2015 untuk faktor *earnings* (rentabilitas) dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) terhadap Bank BUMN memperoleh predikat “Sangat Baik” sehingga kondisi bank berada pada Peringkat Komposit (PK1) “Sangat Sehat” dan Bank Swasta memperoleh predikat “Baik” sehingga kondisi bank berada Peringkat Komposit (PK2) yaitu “Sehat”. Hasil uji *Mann – Whitney Test* dapat diketahui bahwa *Return On Asset* (ROA) antara Bank BUMN dan Bank Swasta menghasilkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar $0,016$. Hal ini berarti terdapat perbedaan antara Bank BUMN dan Bank Swasta pada faktor ROA tahun 2015.
5. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada tahun 2015 untuk faktor *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Bank BUMN dan Bank Swasta memperoleh predikat “Sangat Baik sehingga kondisi bank berada pada Peringkat Komposit (PK1) yaitu “Sangat Sehat”. Hasil uji *Mann – Whitney Test* dapat diketahui bahwa *Net Interest Margin* (NIM) antara Bank BUMN dan Bank Swasta menghasilkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar $0,081$. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan antara Bank BUMN dan Bank Swasta pada faktor NIM tahun 2015.

6. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada tahun 2015 untuk faktor permodalan (*Capital*) dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Bank BUMN dan Bank Swasta berada pada Peringkat Komposit (PK1) “Sangat Sehat”. Hasil uji *Mann – Whitney Test* dapat diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) antara Bank BUMN dan Bank Swasta menghasilkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,656. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan antara Bank BUMN dan Bank Swasta pada faktor CAR tahun 2015.
7. Total keseluruhan rasio *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return On Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2015 terhadap Bank BUMN lebih tinggi dibandingkan total keseluruhan rasio pada Bank Swasta. Kondisi ini menunjukkan secara keseluruhan kinerja Bank BUMN lebih baik dibandingkan Bank Swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.
- Bestari, Adhitya R. dan Rohman, Abdul. 2013. *Pengaruh Rasio CAMEL dan Ukuran Bank Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Sektor Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011)*. Diponegoro *Journal of Accounting*.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI).2016.*Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*.Edisi Pertama, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Cetakan ke-14. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir.2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Oktafrida Angraeni. 2011. *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2006 – 2009*. Skripsi. FE UNDIP, Semarang.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. 2011. “Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum” diakses pada tanggal 15 September 2014 dari <http://ojk.go.id/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-1-pbi-2011>
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1. 2009. “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 revisi 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan” diakses pada tanggal 18 September 2014 dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-1.pdf>
- Purnamasari, I. dan Mimba, S.H. (2014). Penilaian Tingkat Kesehatan PT. BPD Bali Berdasarkan *Risk Profile, GCG, Earning, Capital*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Hlm. 716-732.
- Refmasari, Veranda Aga dan Setiawan, Ngadirin. (2014). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Menggunakan Metode RGEC Dengan Cakupan Risk Profile, Earnings, dan Capital Pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012. *Jurnal Profita* 2014

- Universitas Negeri
Yogyakarta.
- Surat Edaran No.13/24/DPNP. 2011.
“Surat Edaran No.13/24/DPNP
Tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Bank Umum”
diakses pada tanggal 16
September 2014 dari
[http://ojk.go.id/surat-edaran-
bank-indonesia-nomor-13-24-
dpnp](http://ojk.go.id/surat-edaran-bank-indonesia-nomor-13-24-dpnp)
- Ulya, Nadia Iffatul. 2014. “Analisis
Perbandingan Tingkat kesehatan
Bank Syariah dan Konvensional
Berdasarkan Risk Profile, Good
Corporate Governance,
Earnings, dan Capital”. Skripsi.
Yogyakarta : Universitas Islam
negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
- Yessi, N.P., Rahayu, S.M., dan Endang,
M.G. (2015). Analisis Tingkat
KesehatanBank dengan
Menggunakan Pendekatan
RGEC (*Risk Profile, Good
Corporate Governance,
Earning, Capital*) Studi pada PT
Bank SinarHarapan Bali Periode
2010-2012. *Jurnal Administrasi
Bisnis (JAB)* Vol.1No. 1 Januari
2015.
- [http://www.idx.co.id/idid/beranda/peru
sahaantercatat/laporankeunga
ndantahunan.aspx](http://www.idx.co.id/idid/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangan_dantahunan.aspx) diakses
tanggal 4 November 2016 .
- [http://www.sahamok.com/emiten/sekt
or-keuangan/sub-sektor-
bank/diaksestanggal](http://www.sahamok.com/emiten/sector-keuangan/sub-sektor-bank/diaksestanggal) 4
November 2016.